Seri Bunga Rampai 12

PENDIDIKAN ISLAM:
ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Aan Hasanah | Agus Salim Mansyur | Ara Hidayat
Asti Meiza | Cik Hasan Bisri | Dede Suhendar
Dewi Sadiah | Lilis Sulastri | Muhammad Taufik Rahman
Shalahudin Kafrawi

Penyunting:
Ara Hidayat dan Cik Hasan Bisri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Seri Bunga Rampai 12

PENDIDIKAN ISLAM:
ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Aan Hasanah | Agus Salim Mansyur | Ara Hidayat
Asti Meiza | Cik Hasan Bisri | Dede Suhendar
Dewi Sadiah | Lilis Sulastri | Muhammad Taufik Rahman
Shalahudin Kafrawi

Penyunting:
Ara Hidayat dan Cik Hasan Bisri

Pendidikan Islam: Antara Harapan dan Kenyataan
Penulis: Aan Hasanah, dkk.
Penyunting: Ara Hidayat dan Cik Hasan Bisri
Desain Cover: Mang Ozie

Penerbit:
Madrasah Malem Reboan (MMR) & Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ISBN: 978-602-51281-9-6

Hak Cipta: pada Penulis
Cetakan Pertama: Mei 2018

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau keseluruhan isi buku ini tanpa izin dari Penerbit, kecuali kutipan kecil dengan menyebutkan sumbernya yang layak

DAFTAR SINGKATAN

Balitbang	Badan Penelitian dan Pengembangan
CRS	*Corporate Social Responsibility*
Dikdasmen	Pendidikan Dasar dan Menengah
Ditjen Dikti	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Ditjenpendis	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
DPR-RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
FST	Fakultas Sains dn Teknologi
GBHN	Garis-garis Besar Haluan Negara
H.R.	Hadis Riwayat
IAIN	Institut Agama Islam Negeri
IPA	Ilmu Pengetahuan Alam
IPM	Ikatan Pelajar Muhammadiyah
IPS	Ilmu Pengatahuan Sosial
KBM	Kegiatan Belajar Mengajar
KBI	Kurikulum Berbasis Ilmu
KBK	Kurikulum Berbasis Kompetensi
Kemenag	Kementerian Agama
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KKNI	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
KSA	Kurikulum Subyek Akademis
KTSP	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Lemlit	Lembaga Penelitian
LP2M	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
MA	Madrasah Aliah
MAK	Madrasah Aliah Kejuruan
MD	Madrasah Diniyah
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MPR-RI	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
MTs	Madrasah Tsanawiyah
PAK	Pendidikan Agama dan Keagamaan
PAR	*Participation Action Research*

Persis	Persatuan Islam
PKP	Pondok Karya Pembangunan
PP	Peraturan Pemerintah
PRA	*Participatory Research Approach*
Prodi	Program Studi
PTAS	Perguruan Tinggi Amerika Serikat
PTKI	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
PTS	Perguruan Tinggi Swasta
Pusdiklat	Pusat Pendidikan dan Latihan
Puslitbang	Pusat Penelitian dan Pengembangan
RA	Raudhatul Athfal
SAC	*Standards and Criteria*
SAP	Satuan Acara Perkuliahan
SBP	Sekolah Berbasis Pesantren
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
sks	satuan kredit semester
SLTP	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMU	Sekolah Menengah Umum
SNP	Standar Nasional Pendidikan
STAIN	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
TK	Taman Kanak-kanak
TQM	*Total Quality Management*
TRI	Teori Respons Item
TTK	Teori Tes Klasik
UIN	Universitas Islam Negeri
UN	Ujian Nasional
UUSPN	Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional
Wajar Dikdas	Wajib Belajar Pendidikan Dasar
WMI	Wahyu Memandu Ilmu

PENGANTAR PENYUNTING

Apabila masalah dijadikan sasaran penelitian (pengkajian), maka kehidupan manusia pada dasarnya dapat dipandang sebagai rentetan masalah yang berkesinambungan sehingga dapat diteliti sepanjang masa. Hasil penelitian itu, secara praktis, diarahkan untuk memecahkan masalah tersebut. Upaya untuk memecahkan, atau, menyelesaikan masalah menjadi ciri abadi yang melekat dalam kehidupan umat manusia. Hal itu terjadi karena suatu masalah kehidupan berhubungan dengan berbagai masalah lain, sehingga penyelesaian suatu masalah berakibat pada kemunculan masalah baru. Dengan demikian, terjadi serangkaian masalah yang selalu tidak terselesaikan. Semakin rumit kehidupan manusia, maka masalah pun semakin menumpuk dan menggurita.

Ketika masalah itu dihubungkan dengan sasaran penelitian secara umum, maka dapat dikelompokkan menjadi tiga gugus masalah, yakni masalah alamiah, masalah sosial, dan masalah budaya. Pada masing-masing gugus masalah itu terdiri atas berbagai masalah, di antaranya masalah pendidikan. Secara sosiologis, masalah itu muncul karena terjadi perbedaan antara apa yang "semestinya" diraih menurut ukuran ideal dengan apa yang "senyatanya" dapat diraih. Upaya mengatasi berbagai masalah pada dasarnya untuk menutup, atau memperpendek kesenjangan antara yang diyakini dapat dicapai dengan cara untuk mewujudkannya. Dengan kata lain, solusi merupakan upaya memangkas kesenjangan antara yang semestnya, atau yang diharapkan, dengan yang senyatanya.

Dewasa ini masalah-masalah sosial itu mencakup masalah keluarga, masalah pendidikan, masalah kemiskinan, masalah minoritas, masalah etnik, masalah pemerintahan, masalah kesehatan, ma-

salah seks, masalah penggunaan obat terlarang, masalah kriminalitas, masalah kekerasan, masalah konflik internasional, masalah urbanisasi, masalah kependudukan, dan masalah lingkungan hidup. Dewasa ini muncul masalah baru yang telah menjadi keprihatinan masyarakat dunia ialah masalah hak asasi manusia, masalah penyalahgunaan obat terlarang, masalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), dan masalah terorisme internasional. Bahkan masalah terakhir telah menimpa beberapa negara Eropa (Perancis dan Belgia) dan Amerika Serikat.

Tulisan yang disajikan dalam buku ini membahas berbagai hal tentang masalah pendidikan Islam, khususnya di Indonesia. Ia mencerminkan tentang "apa yang semestinya diraih menurut ukuran ideal dengan apa yang senyatanya dapat diraih". Intinya, tentang harapan dan kenyataan pendidikan Islam di Indonesia. Hampir seluruh tulisan tersebut pernah dipresentasikan dalam diskusi Madrasah Malem Reboan (MMR). Ada yang berupa makalah yang sengaja disiapkan untuk diskusi. Ada pula yang berasal dari hasil penelitian di antaranya ditulis dalam disertasi. Pemaparanya dalam buku ini dimulai tentang pendidikan menengah dan diakhiri seputar pendidikan tinggi.

Tulisan Prof. Dr. Aan Hasanah tentang "Arah Pendidikan Islam Menuju Peradaban Modern: Upaya Penguatan Sistem Pendidikan Islam", berasal dari makalah yang disajikan dalam diskusi MMR tanggal 21 Oktober 2014. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kehendak penulisnya untuk memperolah jawaban atas pertanyaan tentang apa arah yang dituju oleh program doktor di bidang Pendidikan Islam? Rupanya jawaban atas pertanyaan itu tidak memuaskan. Tidak ditemukan jawaban konseptual dan programatis yang dapat dijadikan rujukan untuk menuju ke arah pencapaian keahlian yang akan diraih oleh lulusan program tersebut. Dari mana titik tolak dan ke mana arah yang hendak dituju?

Dari situ Prof. Aan Hasanah menerawang ke kawasan yang lebih luas, yakni posisi pendidikan Islam dalam membangun peradaban Islam; dan arah pendidikan Islam secara menyeluruh mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Atas perihal yang sama, tidak dapat dihindarkan untuk menyoroti satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan Islam yang sarat dengan berbagai masalah yang amat rumit. Kerumitan berbagai masalah itu membuat Dr. Aan Hasanah merasa gelisah dengan sistem pendidikan Islam yang sedang berkembang dewasa ini. Apalagi menghadapi masa depan, dihadapkan kepada tantangan dalam peradaban modern yang sarat dengan persaingan antar bangsa.

Masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan Islam tidak terbatas pada aspek teknis pengelolaan satuan pendidikan, namun berpangkal pada keputusan politik tentang otonomi daerah. Di satu pihak bidang pendidikan diotonomikan dengan menggunakan asas disentralisasi; di pihak lain bidang agama, yang menjadi "payung" pendidikan Islam, tidak diotonomikan dengan menggunakan asas dekonsentrasi. Keputusan ini berbasis "ideologis", bahkan "teologis". Hubungan antara agama dengan negara masih belum sepenuhnya final.

Tulisan Cik Hasan Bisri mengenai "Seputar Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan", berasal dari makalah yang disampaikan dalam acara workshop yang diselenggarakan oleh Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan, Kementerian Agama, tanggal 3 Juli 2003 di Jakarta. Meskipun tulisan ini pernah dipresentasikan hampir limabelas tahun yang lalu, tampaknya masih dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan tentang penelitian dan pengembangan (kebijakan) pendidikan agama dan keagamaan (PAK) saat ini. Apa yang disampaikan oleh Dr. Acep Arifuddin, dalam diskusi MMR tanggal 23 Januari 2018, menunjukkan bahwa tradisi penelitian di Balitbang itu masih belum mengalami perubahan yang menonjol. Selain itu, dalam konteks penulisan buku ini, tu-

lisan Cik Hasan Bisri dihubungkan dengan tulisan Aan Hasanah sebagaimana dikemukakan di atas.

Menurut Cik Hasan Bisri, PAK dapat diidentifikasi menjadi beberapa pilahan. Pertama, PAK diidentifikasi sebagai dua sisi dari satu mata uang, yakni pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Kedua, PAK diidentifikasi sebagai salah satu ranah kebijakan publik. Ketiga, PAK diidentifikasi sebagai sasaran penelitian dan pengembangan. Keempat, berdasarkan butir ketiga dapat dirumuskan tentang manajemen penelitian dan pengembangan PAK. Kelima, berdasarkan butir keempat dikemukakan tentang kemungkinan adanya jaringan penelitian PAK. Selanjutnya, berdasarkan butir ketiga, Cik Hasan Bisri memilah empat macam penelitian kebijakan PAK. Pertama, penelitian bahan kebijakan. Kedua, penelitian koherensi kebijakan (analisis kebijakan). Ketiga, penelitian pelaksanaan kebijakan (evaluasi formatif). Keempat, penelitian pencapaian hasil kebijakan (evaluasi sumatif).

Pada bagian akhir, Cik Hasan menyatakan bahwa masalah penelitian di bidang PAK merupakan bagian dari masalah PAK. Sedangkan masalah PAK merupakan bagian dari masalah sosial. Sementara itu, masalah sosial merupakan matarantai masalah yang mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat bangsa yang sedang mengalami perubahan. Oleh karena itu, masalah penelitian PAK juga berhubungan dengan unsur-unsur di luar dirinya, baik yang dipandang sebagai penyebab maupun yang dipandang sebagai akibat. Atas perihal yang sama, dapat disusun topik-topik penelitian yang kemudian dapat dirumuskan menjadi masalah penelitian kebijakan di bidang PAK.

Tulisan Dr. Dewi Sadiah tentang "Pengembangan Model Pendidikan Nilai-nilai Keberagamaan: Studi di Madrasah Aliyah Darul Arqam Garut", berasal dari disertasi yang dipromosikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian disajikan dalam diskusi MMR tanggal 1 November 2016. Kajiannya difokuskan pada empat hal.

Pertama, berkenaan dengan pencapaian tujuan pendidikan yang hendak diupayakan oleh guru agama dalam membina kepribadian sehat para siswa di sekolah. Kedua, metode yang digunakan oleh para guru agama dalam membina kepribadian sehat di kalangan para siswa. Ketiga, kurikulum yang digunakan oleh para guru agama dalam membina kepribadian sehat di kalangan para siswa. Keempat, pengembangan model pendidikan nilai-nilai keberagamaan dalam membina kepribadian sehat terhadap perubahan perilaku siswa di sekolah.

Hasil penelitian Dewi menunjukkan bahwa pencapaian tujuan yang hendak dicapai oleh guru agama di MA Darul Arqam adalah mewujudkan manusia yang memiliki kepribadian utuh atau insan yang sehat, berakhlak terpuji, beriman dan bertakwa kepada Allah dalam arti selamat di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru agama melakukan pembinaan dalam melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah yang hukumnya wajib maupun ibadah yang hukumnya sunat. Sedangkan metode yang digunakan oleh guru agama dalam membina kepribadian sehat yaitu: metode keteladanan untuk mempengaruhi siswa dengan penampilan guru agama dan guru umum sebagai sosok yang patut diteladani. Mereka secara tidak langsung telah membimbing siswa dalam mengaplikasikan pendidikan nilai keberagamaan dalam membina kepribadian sehat dengan baik.

Adapun kurikulum yang digunakan guru agama dalam membina kepribadian sehat yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Ma'had Madrasah Aliyah Darul Arqam Garut yang memiliki kurikulum khusus pesantren. Kurikulum tersebut dilihat dari substansinya lebih berupaya dalam pembinaan akhlak yang mulia dan kepribadian sehat serta kesetiakawanan sosial siswa melalui penyeimbangan antara pelajaran-pelajaran agama dan pelajaran lainnya. Hasilnya, pengembangan model pendidikan nilai-nilai keberagamaan dalam membina kepribadian sehat terhadap perubahan perilaku

siswa yang ditampilkan oleh guru agama dalam wujud ucapan, pikiran, dan tindakan telah membawa hasil yang tampak dalam perilaku keseharian siswa di lingkungan sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sosok guru agama telah berhasil dalam membangun iklim yang kondusif bagi siswa dalam mengembangkan dirinya dan memupuk semangat beragama.

Tulisan Dr. Ara Hidayat tentang "Pemasaran Jasa Pendidikan Madrasah", memfokuskan pada pentingnya mengembangkan strategi pemasaran jasa pendidikan madrasah. Terdapat beberapa konsep inti pemasaran, yakni kebutuhan, keinginan, permintaan, produk, nilai pelanggan, kepuasan pelanggan, pertukaran, transaksi, hubungan, jaringan, pasar, dan calon pembeli. Pemasaran dalam konteks jasa pendidikan adalah sebuah proses sosial dan manajerial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan (*creation*) penawaran, pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain dalam bidang pendidikan.

Dalam konteks bauran pemasaran (*marketing mix*) jasa pendidikan madrasah yang mencakup produk, harga, lokasi, promosi, sumberdaya manusia, bukti fisik, dan proses, madrasah memiliki peluang besar dalam memadukan unsur-unsur tersebut sehingga dapat menghasilkan strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk memenangkan persaingan. Selain itu, Dr. Ara Hidayat menjelaskan langkah strategis yang dapat ditempuh dalam pemasaran jasa pendidikan madrasah, yaitu identifikasi pasar, segmentasi pasar dan positioning, diferensiasi produk, komunikasi pemasaran, pelayanan pembelajaran dan membuat citra baik terhadap madrasah.

Tulisan M. Taufik Rahman, Ph.D. tentang "Pendidikan Karakter Islam Modern di Sekolah Berbasis Pesantren", berasal dari hasil penelitian di pesantren. Taufik menjelaskan tentang pesantren sebagai agen pembangunan sumberdaya manusia modern. Melalui analisis atas kandungan doktrin dalam kurikulum pesantren dan kehidupan praktis sehari-hari di pesantren, M. Taufik Rahman menyimpulkan

bahwa pesantren merupakan jenis satuan pendidikan yang memiliki keunggulan ketimbang satuan pendidikan lainnya. Taufik, secara spesifik mengungkap keunggulan-keunggulan sekolah berbasis pesantren dalam mencetak karakter muslim yang modern, seperti kerja keras dan berjiwa wirausaha.

Di pesantren-pesantren modern, kokurikulum yang digunakan dapat memberi semangat kepada para santrinya untuk memiliki karakter tidak pantang menyerah, optimis, dan bekerja keras. Tidak heran jika pesantren tidak hanya mampu melahirkan ulama saja, malah dapat pula memunculkan orang yang mampu menjadi pekerja dalam berbagai bidang.

Tulisan Shalahuddin Kafrawi, Ph.D., tentang ”Tradisi Akademik di Perguruan Tinggi Amerika: Sebuah Refleksi Secara Umum”, dipresentasikan dalam diskusi MMR tanggal 29 Oktober 2013. Makalah yang disajikan Shalahudin disusun atas permintaan pengelola MMR, yang memiliki misi mengembangkan budaya akademik. Mengapa pendidikan tinggi Amerika? Karena pendidikan tinggi di Indonesia, dan di beberapa negara lainnya, mengadopsi sistem pendidikan tinggi Amerika Serikat, sebagaimana tampak dalam penyelenggaraan administrasi yang kita kenal dengan Sistem Kredit Semester (SKS) sejak pertengahan tahun 1970-an. Sistem itu tak hanya tampak dalam pengelolaan administrasi pendidikan, tetapi berbasis pada beberapa prinsip yang dianut dalam sistem itu.

Penyajian makalah ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, Shalahuddin Kafrawi telah cukup lama menjadi tenaga pengajar di perguruan tinggi Amerika Serikat. Pengetahuan dan pengalamannya di sana, dapat dijadikan bahan perbandingan. Kedua, penyelenggaraan pendidikan tinggi mengadopsi dari pendidikan tinggi Amerika Serikat sebagaimana dikemukakan di atas. Secara struktural memiliki kemiripan. Sedangkan secara kultural, khususnya budaya akademik, memiliki nuansa. Pengalaman Shalahuddin Kafrawi dapat dijadikan bahan untuk mengaca diri bagi pengembangan budaya a-

kademik dalam lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam, antara lain UIN dan perguruan tinggi lainnya.

Apa yang disampaikan oleh Shalahudin, didasarkan pada hasil observasi selama mengenyam pendidikan dan mengajar di beberapa perguruan tinggi: State University of New York at Binghamton, Hobart and William Smith Colleges, Hamilton College, dan Moravian College. Sedangkan tradisi akademik itu meliputi: tri dharma perguruan tinggi, *faculty governance*, otoritas akademik dosen dan jurusan, kejujuran akademik, program disipliner dan interdisipliner, dan support untuk mahasiswa.

Tulisan Dr. Lilis Sulastri tentang "Manajemen Perguruan Tinggi Berbasis Nilai: Studi di Binus University Jakarta", berasal dari disertasi yang dipromosikan di Universitas Pasundan, Bandung. Kemudian disajikan dalam diskusi MMR tanggal 12 Agustus 2014. Fokus kajiannya tentang manajemen berbasis nilai yang diterapkan dalam lingkungan Binus University, yang mencakup praktik penciptaan nilai (*value creation*) dan pengelolaan nilai (*value management*). Binus University mencantumkan empat nilai utama sebagai landasan dan pedoman kerja seluruh elemen yang terdapat di dalamnya, yaitu: (1) *tenacious focus* (focus pencapaian)*;* (2) *freedom to innovate* (bebas berinovasi); (3) *farsighted* (berpandangan jauh)*;* dan (4) *embrace diversity* (merangkul perbedaan).

Menurut Dr. Lilis Sulastri, praktik penciptaan nilai di Binus University merupakan praktik awal dalam kerangka penerapan manajemen berbasis nilai pada sebuah perguruan tinggi. Dalam konteks Binus University, praktik ini diawali dengan perumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan perumusan nilai-nilai filosofis kelembagaan yang akan menjadi pedoman dan tuntunan bagi setiap unsur manajemen dan lembaga secara umum dalam menjalankan setiap bentuk upaya mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan praktik pengelolaan nilai di Binus University terkandung dari mulai perumusan kebijakan, penetapan prosedur dan aturan, penetapan kurikulum

dan hal-hal yang berkaitan dengan aspek akademik, praktik kepemimpinan, hingga penataan elemen manajemen baik secara fungsional maupun struktural.

Adanya basis nilai dalam praktik manajemen yang dijalankan oleh Binus University sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang dituntut untuk terus bersaing dengan mengutamakan peningkatan kualitas. Binus University mampu meraih prestasi baik dalam standar manajemen (ISO 9001:2008). Juga prestasi yang berkaitan dengan kualitas akademik (termasuk dalam perguruan tinggi unggulan berdasarkan pemeringkatan perguruan tinggi 0leh Webometrics, 4iCU, dan TeSCA).

Tulisan Dr. Asti Meiza tentang "Evaluasi Materi Ujian Tulis Seleksi Penerimaan Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung TA 2012/2013", berasal dari hasil penelitian tahun 2014 dan disajikan dalam diskusi MMR tanggal 8 Juli 2014. Penelitian dimaksudkan untuk memperoleh materi tes masuk UIN yang reliabel, valid, dan memiliki item-item yang layak secara psikometrik; Merevisi silabus pengajaran mata kuliah Psikometri yang selama ini menggunakan TTK dengan TRI; dan Mensosialisasikan penggunaan TRI untuk berbagai pembuatan alat ukur psikologi.

Seleksi penerimaan mahasiswa melalui jalur ujian tulis meliputi ujian tertulis untuk pengetahuan bahasa, pengetahuan umum, dan pengetahuan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi ujian tulis masuk UIN khususnya bagian pengetahuan agama, perlu dievaluasi dan ditulis ulang. Hal ini dapat dilihat dari hampir semua item baik ditinjau dari tingkat kesulitan maupun daya pembeda item. Evaluasi dan penulisan ulang materi ujian tulis perlu ditindaklanjuti dengan serangkaian ujicoba sehingga memperoleh item-item yang layak untuk menjadi instrumen seleksi calon mahasiswa.

Tulisan Prof. Dr. Agus Salim Mansyur tentang "Tantangan Masa Depan dan Pengembangan Kurikulum Program Studi di Lingkungan PTKI", dipresentasikan dalam diskusi MMR tanggal 2 Desember

2014. Menurut Prof. Agus Salim, di tengah perkembangan arus informasi yang begitu cepat, UIN/IAIN/STAIN sebagai satuan pendidikan tinggi dalam lingkungan Kementerian Agama mempunyai kewajiban untuk merespons dan menyesuaikan kurikulumnya sesuai dengan berbagai perubahan dan tuntutan kebutuhan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Terdapat beberapa kelemahan kurikulum program studi di lingkungan PTKI. Pertama, sejak tahun 2004, rata-rata desain kurikulum prodi didasarkan kepada model kurikulum teknologis atau dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Isi kurikulum tidak dirancang secara baik, yang akan menyebabkan sasaran pembelajaran menjadi tidak tentu arahnya. Kedua, kurikulum tidak diimplementasikan sesuai dengan kebijakan yang diharapkan dalam Keputusan Menteri Agama dan Keputusan Direktur Jnderal Pendidikan Islam, yakni menggunakan KBK, tapi kenyataannya menggunakan model konsep kurikulum berbasis ilmu (KBI) atau kurikulum subyek akademik (KSA). Ketiga, dilihat dari keseluruhan kegiatan evaluasi kurikulum yang seharusnya dilakukan oleh tim pengembang kurikulum, ternyata hanya melakukan evaluasi hasil belajar yang diselenggarakan oleh para dosen yang hanya berbentuk UTS dan UAS saja. Keempat, sarana dan prasarana pendukung pembelajaran pada prodi sangat tidak memadai. Kelima, alumni prodi di lingkungan PTKI sudah banyak tersebar, dan sebagian besar dari mereka bekerja sebagai pengajar dan hanya sedikit yang mengambil profesi di luar dunia pendidikan.

Untuk meminimalisasi sejumlah kelemahan di atas diperlukan revitalisasi pengembangan kurikulum program studi, khususnya pada domain kurikulum inti prodi yang mengarah kepada kompetensi utama. Kurikulum setiap prodi harus dinamis sebagai upaya merespons perubahan dan tuntutan keilmuan, profesionalisme, dan pasar (*stakeholders*). Sifat dinamis merupakan salah satu nilai intrinsik dari kurikulum selain beroreintasi ke masa depan, efisien, efektif, *integ-*

rated, dan komprehensif. *Output* dari implementasi kurikulum pada akhirnya terukur dari alumni prodi tersebut, dan sangat terukur oleh kuantitas lulusan yang berprofesi (bekerja), baik di sektor formal maupun nonformal, sesuai dengan kompetensi (utama, pendukung, dan lainnya) sebagaimana dirumuskan oleh kurikulum program studi tersebut.

Tulisan terakhir, dari Dr. Dede Suhendar berjudul "Strategi Penerapan Spirit Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu dalam Ilmu Kimia", disajikan dalam diskusi MMR tanggal 6 Desember 2016. Menurut Dr. Dede, kajian ilmu kimia berbasis WMI memiliki potensi untuk dikembangkan. Bahkan dapat menginisiasi untuk keilmuan lainnya di Fakultas Sains dan Teknologi dan memotivasi memunculkan gagasan riset yang paling mungkin dikerjakan. Di antaranya, dalam masalah pangan halal, *thaharah* dan obat-obatan. Dalam masalah *thaharah* misalnya, dapat memfokuskan pada kriteria nilai ambang batas polutan bagi lingkungan, khususnya tanah dan air. Najis dalam ilmu fikih memiliki makna riil dalam ilmu lingkungan sebagai polutan, demikian juga syarat air dan tanah untuk thaharah memiliki makna yang sangat dekat dengan kriteria terjadinya pencemaran dalam ilmu lingkungan. Dr. Dede menegaskan perlunya strategi yang diterapkan melalui pewacanaan sains, kemudian memikirkan hal yang dapat diteliti dari ajaran Islam dengan yang memiliki kaitan paling dekat dengan konsentrasi bidang ilmunya, sehingga kajian sains berbasis WMI bisa berjalan.

Akhirnya, semua tulisan yang disajikan dalam buku ini diharapkan menjadi wacana yang terus dikembangan dalam kajian dan penelitian lebih lanjut sehingga memiliki kegunaan bagi pengembangan khazanah ilmiah sesuai dengan disiplin ilmu dan bidang kajian masing-masing. Aspek lain dari hasil kajian ini dapat ditularkan kepada generasi muda, dalam hal ini mahasiswa, untuk merintis dan mendalami bidang keahlian mereka. Atas perihal yang sama, apa yang dapat kita baca dapat menjadi bagian untuk meningkatkan

budaya akademik di kalangan para pencinta ilmu, khususnya dalam lingkungan kampus. Semoga semua hasil kajian tersebut dapat dijadikan salah satu bahan untuk untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama dalam lingkungan perguruan tinggi. Dengan kata lain, salah satu menfaat hasil kajian dan penelitian dapat meningkatkan kualitas hidup dan peradaban umat manusia. *Wa 'l-Lāh A'lam*.

Bandung, 18 Maret 2018
Cik Hasan Bisri dan Ara Hidayat

DAFTAR ISI

Daftar Singkatan — i
Pengantar Penyunting — iii
Daftar Isi — xv
Daftar Tabel — xix
Daftar Gambar — xxi

Aan Hasanah

Arah Pendidikan Islam menuju Peradaban Modern:
Upaya Penguatan Sistem Pendidikan Islam
A. Pendahuluan — 1
B. Tantangan dalam Membangun Peradaban Modern — 5
C. Problem Pendidikan Islam — 8
D. Arah Pendidikan Islam — 13
E. Penutup — 17
Daftar Pustaka — 18

Cik Hasan Bisri

Seputar Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan Agama dan Keagamaan
A. Pendahuluan — 21
B. Substansi dan Institusi PAK — 24
C. PAK sebagai Ranah Kebijakan — 28
D. PAK sebagai Sasaran Penelitian — 32
E. Satuan dan Manajemen Penelitian PAK — 37
F. F. Penutup — 42
Daftar Pustaka — 44

Dewi Sadiah

Pengembangan Model Pendidikan
Nilai-nilai Keberagamaan
A. Pendahuluan — 47
B. Metode Penelitian — 52
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan — 54
D. Penutup — 65
Daftar Pustaka — 66

Ara Hidayat

Pemasaran Jasa Pendidikan Madrasah
A. Pendahuluan — 69
B. Pengertian Pemasaran — 70
C. Konsep Inti Pemasaran — 72
D. Pemasaran Jasa Pendidikan — 76
E. Kepuasan Pelanggan Pendidikan — 78
F. Loyalitas Pelanggan Pendidikan — 82
G. Bauran Pemasaran Jasa Pendidikan Madrasah — 87
H. Langkah Strategis Pemasaran Madrasah — 95
I. Membuat Citra Baik terhadap Madrasah — 103
Daftar Pustaka — 104

M. Taufiq Rahman

Pendidikan Karakter Islam Modern
di Sekolah Berbasis Pesantren
A. Pendahuluan — 109
B. Pendidikan Kemodernan — 113
C. Karakter Kemodernan Islam — 122
D. Praktik Pendidikan Karakter — 129
E. Penutup — 138
Daftar Pustaka — 139

Shalahudin Kafrawi

Tradisi Akademik di Perguruan Tinggi Amerika Serikat:
Sebuah Refleksi dalam Garis Besar
A. Pendahuluan — 145
B. Tridharma Perguruan Tinggi — 146
C. Pengajaran — 147
D. Keilmuan — 148
E. Pengabdian — 150
F. Dukungan PTAS — 154
G. Faculty Governance — 156
H. Diciplinary dan Interdiciplanary Programs — 158
I. Otoritas Akademik Dosen dan Jurusan — 159
J. Academic Honesty dan Committee on Standard — 160
K. Support untuk Mahasiswa — 162

Lilis Sulastri

Manajemen Perguruan Tinggi Berbasis Nilai
Studi di Binus University, Jakarta
A. Pendahuluan — 165
B. Manajemen Berbasis Nilai — 170
C. Profil Binus University — 180
D. Manajemen Berbasis Nilai di Binus University — 184
E. Penutup — 203
Daftar Pustaka — 204

Asti Meiza

Evaluasi Materi Ujian Tulis Masuk UIN Bandung
A. Pendahuluan — 207
B. Kajian Teori — 209
C. Metodologi Penelitian — 213
D. Pengolahan dan Anasis Data — 215

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan — 216
F Kesimpulan dan Saran — 222
Daftar Pustaka — 224
Lampiran — 225

Agus Salim Mansyur

Tantangan Masa Depan dan Pengembangan Kurikulum
Program Studi di Lingkungan PTKI
A. Pendahuluan — 257
B. Kondisi Objektif Kurikulum Program Studi — 262
C. Pengembangan Kurikulum Program Studi — 273
D. Nilai-nilai Religius dalam Kurikulum Program Studi — 288
E. KKNI sebagai Upaya Penegasan KBK — 292
F Penutup — 298
Daftar Pustaka — 299

Dede Suhendar

Strategi Penerapan Spirit Keilmuan
Wahyu Memandu Ilmu dalam Ilmu Kimia
A. Pendahuluan — 301
B. Pembahasan — 304
C. Penutup — 312
Daftar Pustaka — 313

Glosarium — 315

Indeks — 327

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Unsur Penyelenggaraan Penelitian — 35
Tabel 2 Indikator Kepuasan Pelanggan Pendidikan — 82
Tabel 3 Loyalitas Pelanggan Pendidikan — 86
Tabel 4 Perguruan Tinggi Unggulan di Indonesia — 166
Tabel 5 Indeks Tingkat Kesulitan dan Distribusi Item — 216
Tabel 6 Indeks Daya Pembeda dan Distribusi Item — 218
Tabel 7 Perbandingan antara Kurikulum Prodi yang Berlaku dengan Kurikulum yang Dikembangkan — 279
Tabel 8 Contoh Ragam dan Klasifikasi Riset Berbasis Wahyu Memandu Ilmu di Prodi Kimia — 310

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Keberlanjutan Pilahan PAK dalam Satuan Pendidikan — 27
Gambar 2 Relasi antara Penelitian PAK dengan Pengembangan PAK — 38
Gambar 3 Pilar Penelitian dalam Penelitian Kebijakan PAK — 39
Gambar 4 Konsep Inti Pemasaran Jasa Pendidikan — 76
Gambar 5 Model Mempengaruhi Calon Pemakai Jasa Pendidikan — 95
Gambar 6 Landasan Teori Penelitian — 177
Gambar 7 Struktur Organisasi Binus University — 182
Gambar 8 Ringkasan Proposisi Satu — 186
Gambar 9 Praktik Penciptaan Nilai di Binus University — 191
Gambar 10 Praktik Pengelolaan Nilai di Binus University — 198
Gambar 11 Dampak Manajemen Berbasis Nilai pada Keunggulan Bersaing Binus University — 202
Gambar 12 Kurva Karakteristik Item — 211
Gambar 13 Persentase Tingkat Kesulitan Item — 216
Gambar 14 Persentase Daya Pembeda Item — 219
Gambar 15 Kurva Karakteristik Item *p* vs *D* — 220
Gambar 16 Langkah-langkah Pengembangan Kurikulum — 275
Gambar 17 Proses Pendidikan dan Komponen Pendukungnya — 276
Gambar 18 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia — 294
Gambar 19 Empat Unsur Deskripsi KKNI — 296
Gambar 20 Ruang Lingkup Riset Kimia Berbasis Wahyu Memandu Ilmu Dikaitkan dengan Status Hukum

Benda menurut Ilmu Fikih — 306
Gambar 21 Empat Jenis Benda atau Fenomenanya dari Keterangan al-Qur'an dan Hadits Sahih — 307

ARAH PENDIDIKAN ISLAM MENUJU PERADABAN MODERN:
Upaya Penguatan Sistem Pendidikan Islam

Prof. Dr. Aan Hasanah

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world".
Nelson Mandela

A. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan negara. Menurut undang-undang tersebut pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Sementara itu dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan pendidikan "Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab".

Posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional merupakan subsistem dari sitem pendidikan nasional. Semestinya pendidikan Islam mendapatkan perlakuan yang sama dalam memilki akses dan kontrol terhadap sumber-sumber untuk pengembangan dan perbaikan praksis pendidikan Islam.

Ketika berbicara tentang pendidikan Islam maka dapat merujuk kepada praksis pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Islam yakni, pendidikan pondok pesantren dan pendidikan lembaga pendidikan Islam. Dapat merujuk kepada kurikulum pendidikan agama Islam yakni pelajaran agama Islam yang diselenggarkan oleh lembaga-lembaga pendidikan umum. Serta dapat merujuk kepada pendidikan Islam nonformal yakni pendidikan Islam dalam keluarga atau di tempat-tempat ibadah, dan/atau di forum-forum kajian keislaman, majelis ta'lim dan institusi-institusi lainnya yang sekarang sedang digalakkan oleh masyarakat. Dalam kajian ini penulis memfokuskan pada praksis pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam yakni pesantren dan lembaga pendidikan Islam.

Pada sisi lain pendidikan telah nyata berkontribusi dalam menentukan model peradaban manusia. Peradaban Islam pernah mengalami perkembangan yang pesat pada Abad Pertengahan. Karakteristik peradaban yang dikembangkan pada saat itu berlandaskan pada dua hal. Pertama, berkembangnya nilai-nilai masyarakat yang terbuka (*open society*) yang menghasilkan kontak dengan kebudayaan-kebudayaan lain, kontak kebudayaan ini melahirkan nilai-nilai baru yang modern dan egaliter. Kedua, perkembangan humanisme yang melahirkan perhatian terhadap masalah hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Humanisme yang dikembangkan memandang manusia sebagai eksistensi yang positif dan menentukan. Manusia adalah makhluk yang unik, memiliki cinta, kreativitas, nilai dan makna serta pertumbuhan pribadi. Oleh karena itu dalam perspektif ini manusia memiliki otoritas yang lebih luas dalam me-

nentukan makna kehidupan dan peradabannya. Kedua nilai ini menjadi spirit dalam membangun peradaban yang modern.

Namun pada perkembangan berikutnya akar peradaban modern yang berbasis pada *open society* dan humanisme ini tidak berkembang baik di negara-negara Islam. Justru spirit ini telah diambil alih oleh negara Barat, sehingga sekarang mereka memimpin peradaban dunia. Dan sekarang spirit yang sama dikembangkan oleh negara-negara ***non-Barat yang non-Islam***, sebut saja India, Cina, Jepang, Korea. Mereka adalah negara modern baru yang mengembangkan peradaban Timur dengan memasukan elemen-elemen tradisi Timur dengan elemen modernitas Barat menjadi peradaban moderen baru yang berbasis pada induk budaya agama.

Pada Kasus India misalnya, India dikelompokkan menjadi negara non-Barat yang modern. India mengadopsi sistem pendidikan modern Barat yang liberal dan diterapkan secara masif di kelas-kelas sekolah di india, maka tidak heran India mengalami perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologinya. India juga mengadopsi sistem politik yang demokratis seperti Barat. Tetapi mengadopsi sistem moderen Barat bukan sebagai tujuan akhir tetapi sebagai jalan yang efisien untuk mencapai tujuan hidup orang India yakni sampai pada "pencerahan jiwa" "perbaikan", peningkatan keuntungan" dan "kebahagiaan hidup" yang berlandaskan pada nilai-nilai agama Hindu (Ramohun Roy, dalam Steven Hay, 1985).

Contoh yang lainnya, Jepang. Kemajuan Jepang karena mereka mampu menemukan esensi, makna dan spirit kultur mereka sebagai elemen penting dalam membangun peradaban modern. Modernisasi yang datang dari nilai-nilai eksternal tidak akan memuaskan orang Jepang. Karena mereka sudah memiliki sejarah dan kultur timur yang cukup tua di mana makna dan spirit ***Bushido*** menjadi cahaya dan aliran darah yang melekat kuat dalam diri orang Jepang. Terjadinya kontak kebudayaan dengan moderinasai Barat menjadi pemicu terjadinya pertemuan nilai (*melting values*) yang mengun-

tungkan. Pertemuan nilai tidak dikonfrontasi berhadap-hadapan *(vis a vis*) tetapi diadaptasi dengan baik dengan memasukan elemen kultur lokal dalam elemen modern Barat menjadi kekuatan pendorong untuk membangun peradaban modern yang non Barat (John Whitney Hall., 1985).

Dawam Raharjo (2005) menyebut fenomena ini sebagai lahirnya negara-negara non-Barat yang mengembangkan peradaban baru yang berbasis pada empat aspek, yakni: Adanya kebudayaan Induk (*mother culture*) yang berbasis pada agama; berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kebudayaan tekno ekonomi; majunya sistem dan lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi; berkembangnya sistem politik dan kenegaraan yang berakar pada trilogi liberalisme, pluralisme, dan sekularisme.

Tumbuh dan berkembangnya negara modern baru *non-Barat* yang *non-Islam* ini melahirkan pertanyaan epistemologis. Mengapa negara-negara Islam yang memiliki kebudayaan induk yang sangat kohesif justru tertinggal dari negara-negara lainnya? Padahal modal sosial yang dimiliki lebih dari cukup untuk membangun sebuah peradaban Islam yang modern.

Ketika kini spirit keterbukaan dan humanisme ditinggalkan oleh dunia Islam, maka sekarang ini dunia Islam termasuk Indonesia masih bergelut dengan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan masih sibuk menolak liberalisme, pluralisme, sekularisme, dan lain-lain yang sebenarnya sudah merupakan keniscayaan dunia modern saat ini. Bahkan, akhir-akhir ini, dunia Islam terjebak ke dalam fundamentalisme dan radikalisme yang menengok kebelakang.

B. Tantangan dalam Membangun Peradaban Modern

Umat Islam tidak bisa lagi *setback* ke belakang, pilihannya menjadi *trend setter* atau menjadi *folllower* peradaban yang diciptakan

oleh orang lain. Kita memiliki modal sosial yang cukup untuk membangun peradaban Islam yang modern dan maju mewarnai peradaban lain. Ada beberapa tantangan ke depan yang harus dihadapi oleh umat Islam di Indonesia, di antaranya sebagaimana berikut ini.

1. Paradigma Islam Inklusif

Umat Islam sudah memiliki induk kebudayaan yang amat kohesif. Islam menjadi sumber nilai dan tempat bermuaranya peradaban. Pada perjalanan sejarahnya Islam bukan hanya bersifat adaptif tetapi juga mewarnai nilai-nilai eksternal yang datang, dan nilai-nilai lokal yang ketempatan. Di mana pun Islam berkembang mampu menjadi *melting values* untuk membangun peradaban baru yang lebih maju.

Namun sekarang ini tantangan yang paling besar adalah mengubah paradigma Islam eksklusif menjadi paradigma Islam inklusif. Ketika kita menempatkan Islam *vis a vis* dengan peradaban modern dan menjadi sangat eksklusif, maka sekohesif apa pun induk kebudayaan ini tidak akan mampu membangun peradaban.

2. Kemajemukan

Indonesia adalah negara yang memiliki kemajemukan yang rumit, menjadi modern adalah memaknai kemajemukan secara positif. Kita tidak pernah punya masalah dengan kemajemukan, bahkan menjadi ciri unik kultural dari masyarakat Indonesia. Bahkan orang-orang Eropa yang homogen, belajar dari kita yang heterogen dalam memahami realitas kemajemukan.

Kemajemukan ini harus menjadi modal sosial yang besar bagi terbangunnya peradaban baru. Selama ini kemajemukan justru menjadi wacana yang tidak pernah selesai. Ia sering dimaknai hanya untuk kepentingan-kepentingan praktis pragmatis ketimbang kepentingan lebih besar sebagai penopang peradaban baru.

Di negara-negara di dunia, tantangan kemajemukan itu sejak dulu sudah ada. Dalam peradaban Islam telah diajarkan untuk memahami kemajemukan ini dengan ajaran toleransi, tetapi pada tataran implementasi belum semua orang Muslim memiliki toleransi.

3. Pendidikan yang Modern

Peradaban modern dibangun dengan kekuatan *human capital* yang tangguh. Daya saing suatu bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat modal manusia yang dapat dihasilkan oleh pendidikan. Pengabaian atas pendidikan akan menghasilkan kemunduran dan kegagalan suatu bangsa. Di sinilah letak peran strategis pendididikan yang tidak dapat digantikan oleh sektor apa pun.

Oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk melakukan reorientasi terhadap pendidikan yang dibutuhkan bangsa ini. Tanpa melakukan reorientasi, pendidikan Indonesia akan mengalami kemunduran, di tengah dunia yang semakin cepat bergerak. Lemahnya sumber daya manusia dan daya saing ekonomi, menurunkan minat investasi asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, keterpurukan ekonomi, krisis kepemimpinan, tingginya tingkat korupsi, rendahnya produktivitas, rendahnya kedisiplinan, rendahnya jiwa kewiraswastaan, merupakan fenomena nyata yang bermuara pada ketidakmampuan pendidikan dalam menentukan arah bangsa ke depan.

Maka tantangan yang paling besar bagi umat Islam di Indonesia adalah mengembangkan pendidikan yang bisa melahirkan sumber daya manusia dengan kualifikasi dan kompetensi global. Seperti yang dilakukan oleh India, Cina, Jepang, Korea, termasuk Malaysia.

4. Tumbuhnya Demokrasi

Sejak reformasi tahun 1998, kehidupan demokrasi di Indonesia menyeruak ke permukaan dan memasuki semua sektor kehidupan

masyarakatnya. Kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan mengeluarkan aspirasi adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Keberhasilan Indonesia dalam menerapkan sistem politik yang demokratis telah mengembangkan demokrasi dengan baik, bahkan sekarang ini Indonesia menjadi Negara Muslim terbesar di dunia yang demokratis, karena berhasil mengembangkan demokrasi tanpa berdarah-darah. Demokrasi di Indonesia telah tumbuh secara distingsi dan unik.

Tumbuhnya demokrasi dengan baik di Indonesia yang mayoritas Muslim, tidak terlepas dari peran umat Islam Indonesia yang telah mampu mengembangkan Islam di atas landasan kedamaian dan toleransi. Meskipun pengaruh-pengaruh radikal tetap ada namun pengaruhnya tidak terlalu besar. Islam yang berkembang di Indonesia adalah Islam yang damai. Islam yang tersenyum. Hal ini karena Islam beradaptasi dengan kultur Indonesia yang mengedepankan unsur-unsur *harmoni*. Karakter seperti ini menurut Clifford Geertz "… adalah sikap adaptif, menyerap, pragmatis, bertahap, agak kompromistis, setengah menyetujui, dan cenderung menghindar. Sehingga gerakan Islam lahir lebih sebagai upaya untuk membangun keutuhan. Dengan demikian perbedaan-perbedaan pemahaman bisa diminimalisir untuk membangun sikap yang moderat dan toleran.

C. Problem Pendidikan Islam

1. Dualisme Pengelolaan Pendidikan

Dilihat dari sistem pengelolaannya, sampai saat ini lembaga pendidikan Islam masih menganut sistem dualisme pendidikan – yang dalam pengembangannya cukup dilematis. Sistem ini menyelenggarakan dua model pendidikan yang dikelola di bawah naungan dua kementerian yang berbeda yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Kementerian Agama (Kemenag). Seko-

lah-sekolah (sekuler) umum mulai dari TK, SD, SLTP, SMU dan perguruan tinggi berada dalam pengelolaan Kemendikbud. Sementara itu, sekolah-sekolah agama muali dari Raudhatul Athfal (RA) yang setingkat TK, lembaga pendidikan Islam Ibtidaiyah (MI) dan lembaga pendidikan Islam diniyyah (MD) – keduanya setingkat SD, lembaga pendidikan Islam tsanawiyah (MTs) yang setingkat SLTP, lembaga pendidikan Islam aliyah (MA) yang setingkat SMU dan IAIN/STAIN di tingkat perguruan tinggi dikelola oleh Kemenag.

Dualisme tersebut berdampak pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang juga dualistis, baik yang menyangkut struktur kurikulum dan tenaga kependidikan maupun pembiayaannya. Sampai pada tahun 1970-an, struktur kurikulum lembaga pendidikan Islam 90% berunuansa Islam, sedangkan sekolah-sekolah umum mengembangkan kurikulum yang 100% bermuatan akademik umum sedangkan pelajaran keagamaan hanya menempati fungsi suplemen dan atau pilihan. Perbedaan struktur kurikulum telah berdampak pada strategi penyediaan guru di Kemenag. Tenaga guru – karena kurikulum sekolah-sekolah Kemenag lebih menitikberatkan pada pelajaran agama, disediakan dengan lebih banyak menekankan kualifikasi atau latar belakang pendidikan agama (PAI – Pendidikan Agama Islam). Untuk kebutuhan ini, Kemenag telah mendirikan Pendidikan Guru Agama (PGA) untuk kebutuhan guru di MI, MTs dan Fakultas Tarbiyah di IAIN-IAIN untuk kebutuhan guru di MTs dan MA. Bahkan alumni IAIN di luar Fakultas Tarbiyah pun banyak yang mengisi posisi guru di lembaga pendidikan Islam MTs dan MA.

Dampak lain dari dualisme tersebut adalah soal pendanaan pendidikan. Kebijakan pembiayaan pendidikan di lingkungan Kemendikbud dan Kemenag dipengaruhi oleh perkembangan politik nasional, bahkan sejak zaman kolonial. Pemerintah kolonial telah menganakemaskan pendidikan untuk keturunan bangsa Eropa, calon pegawai birokrasi kolonial dan kaum elite pribumi. Sedangkan pendidikan agama, seperti Islam, sama sekali tidak mendapat perha-

tian. Selain karena bangsa Eropa adalah sekuler, juga, agama pada zaman kolonial, telah menjadi inspirasi yang ampuh bagi gerakan-gerakan pemberontakan menghadapi penjajahan sendiri. Kondisi ini diteruskan oleh pemerintah Orde Lama dan Orde Baru yang tidak mengangkat atau menempatkan lembaga pendidikan agama sejajar dengan lembaga pendidikan umum. Kebijakan pemerintah tentang pembiayaan kedua pendidikan ini pun tidak diperlakukan secara adil dan wajar.

Upaya-upaya untuk memecahkan masalah ini pernah muncul. Misalnya dengan keluarnya Kepres Nomor 34/1972 yang kemudian diperkuat oleh Inpres Nomor 15/1974 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan yang mengindikasikan adanya upaya pemerintah untuk menjadikan pendidikan agama sebagai satu bagian penting di bawah tanggung jawab Kemendikbud te. Inti dari kebijakan itu adalah hanya Kemendikbud yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan, termasuk pendidikan agama. Ini berarti sekolah-sekolah yang berada dalam pengelolaan Kemenag harus diserahkan kepada Kemendikbud. Selain itu, pada tahun 1975, muncul juga gagasan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. SKB yang dikeluarkan tanggal 24 Maret 1975 bernomor 0371 U/1975, Nomor 6 Tahun 1975, dan Nomor 16 Tahun 1975 tersebut berusha menetapkan pengelolaan lembaga pendidikan Islam di bawah Kemenag dan perubahan-perubahan internal dalam kurikulum pendidikan lembaga pendidikan Islam dengan memasukkan pelajaran umum sebanyak 30%.

Dalam bentuk lain, upaya-upaya selanjutnya untuk mengintegrasikan sistem pendidikan lembaga pendidikan Islam ke dalam pendidikan nasional terus diusahakan melalui langkah-langkah seperti SKB 2 Menteri 1983; UUSPN 1989, perubahan dalam kurikulum nasional tahun 1994 sampai usha menggabungkan (*integrasi*) sistem

pendidikan yang dikenal dengan istilah Pendidikan Satu Atap. Tetapi upaya-upaya itu semua, sampai sekarang tidak pernah selesai dan terimplementasikan dengan baik. Dengan kata lain, lembaga pendidikan Islam belum mengalami transformasi posisi yang berarti yang diperlakukan secara sejajar oleh pemerintah dengan sekolah umum di bawah Kemendikbud. Dengan kata lain lagi, posisi lembaga pendidikan Islam selama ini masih dalam posisi marginal, di luar sistem pendidikan nasional dan masih dianggap sebagai sistem pendidikan kelas dua di Indonesia.

2. Rendahnya Sumber Daya Kependidikan

Upaya peningkatan kualitas pendidikan dalam berbagai aspeknya telah menjadi bahan perhatian dan pertimbangan Kemenag terutama dalam pemberdayaan lembaga pendidikan Islam yang jumlahnya memang melimpah. Upaya-upaya yang dimaksud antara lain mencakup peningkatan kualitas sarana fisik (*hardware*); pembangunan gedung baru, laboratorium dan perpustakaan, penyediaan alat dan bahan pembelajaran, sampai pada pembangunan kualitas sumber daya manusianya (*human resources*), seperti melakukan training-training untuk para guru bidang studi, para kepala lembaga pendidikan Islam; dan mengikutsertakan peran masyarakat dalam lembaga pendidikan Islam (BP3/MPM) serta upaya memperkuat kelembagaannya. Namun demikian, upaya pembangunan dan pemberdayaan lembaga pendidikan Islam, baik tingkat Tsanawiyah maupun Ibtidaiyah di lingkungan Kemenag jauh lebih berat bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum di lingkungan Kemendikbud.

Salah satu di antara yang sangat penting dan mendesak untuk ditingkatkan kualitasnya, dan diberdayakan kemampuannya adalah para tenaga guru atau pendidik. Para guru mesti dinaikkan citra dan pangkatnya pada level yang lebih tinggi. Walaupun memang, mesti diakui bahwa problem tenaga pendidik/guru di kita begitu banyak dan variatif. Problem-problem tersebut antara lain: rendahnya ke-

mampuan guru dalam disiplin ilmu yang digelutinya, ini menyangkut kemampuan substansi akademik dan latar belakang keilmuan yang dimiliki guru; rendahnya pembiayaan lembaga pendidikan Islam; rata-rata kebanyakan lembaga pendidikan Islam berstatus swasta; tingkat partisipasi masyarakat yang rendah; dan ditambah kebanyakan lembaga pendidikan Islam berada di perdesaan.

Secara umum, masalah pokok yang dihadapi lembaga pendidikan Islam hingga saat ini adalah rendahnya kualitas tenaga guru. Motivasi menjadi guru di kebanyakan lembaga pendidikan Islam selama ini lebih dikarenakan faktor pengabdian dan ketulusan, sedangkan dari sisi kemampuan dan kecakapan disiplin ilmu masih rendah. Hal ini telah menyebabkan rendahnya kualitas lembaga pendidikan Islam sehingga mengalami kesulitan untuk memiliki keunggulan kompetitif. Masalah pokok dalam lembaga pendidikan Islam pada dasarnya adalah masalah yang terkait pada faktor kualitas guru.

3. Rendahnya Pendanaan Pendidikan Lembaga Pendidikan Islam

Meskipun telah terjadi perubahan beberapa kebijakan pemerintah yang signifikan berkenaan dengan status lembaga pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, perbandingan anggaran antara dua model pendidikan secara nasional tetap tidak berubah. Hingga saat ini lembaga pendidikan Islam masih belum memperoleh hak anggaran secara wajar. Struktur anggaran pendidikan untuk lembaga pendidikan Islam sangat kecil dibandingkan sekolah umum. Kendati lembaga pendidikan Islam dianggap sama dan sejajar dengan sekolah umum, namun lembaga pendidikan Islam tidak memperoleh anggaran pembangunan pendidikan. Anggaran biaya pengembangan lembaga pendidikan Islam hanya diperoleh dari anggaran keagamaan. Oleh sebab itu, kemampuan Kemenag untuk membangun fasilitas gedung lembaga pendidikan Islam baru, penyediaan alat dan bahan pembelajaran, maupun peningkatan kualitas tenaga

kependidikannya, masih sangat terbatas. Lebih dari itu karena mayoritas lembaga pendidikan Islam berstatus swasta, dapat dipastikan bahwa sebagian besar pembiayaan berasal dari masyarakat.

4. Mayoritas Lembaga Pendidikan Islam Berstatus Swasta

Kebanyakan lembaga pendidikan Islam yang ada hingga saat ini berstatus swasta. Bahkan banyak lembaga pendidikan Islam yang saat ini berstatus negeri pada awalnya adalah lembaga pendidikan Islam swasta yang didirikan oleh masyarakat. Dengan kata lain, lembaga pendidikan Islam negeri adalah hasil alih status (konversi) dari lembaga pendidikan Islam swasta. Kecuali menyangkut kurikulum dan ujian nasional, lembaga pendidikan Islam swasta pada umumnya memiliki kebijakan sendiri yang otonom baik berkaitan dengan penyediaan tenaga guru dan kepala lembaga pendidikan Islamnya maupun dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikannya. Oleh karena itu, upaya standarisasi fasilitas serta alat dan bahan pembelajaran merupakan suatu hal yang sangat sulit.

Perbandingan lembaga pendidikan Islam negeri dan lembaga pendidikan Islam swasta yang ada di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut: MI Negeri berjumlah 1.454 buah sedang MI Swasta berjumlah 20.000 buah. MTs Negeri berjumlah 1.178 buah sementara MTs Swasta berjumlah 8.682 buah.

5. Mayoritas Lembaga pendidikan Islam di Perdesaan

Secara geografis, penyebaran lembaga pendidikan Islam lebih banyak di daerah perdesaan yang relatif miskin. Masyarakat yang memilih lembaga pendidikan Islam lebih didorong oleh motif praktis. Selain murah biayanya, lembaga pendidikan Islam juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pengetahuan dan keterampilan praktis keagamaan. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan Islam merupakan salah satu alternatif terbaik bagi kalangan Mus-

lim perdesaan untuk memperoleh pendidikan. Hal itu karena kenyataan bahwa di lembaga pendidikan Islam ilmu-ilmu pengetahuan dasar seperti baca-tulis dan berhitung –betapa pun rendahnya kualitas– bisa diperoleh murid. Sementara, pada saat yang sama, mereka memperoleh pengetahuan dasar keagamaan.

Beberapa masalah pokok yang dihadapi lembaga pendidikan Islam tersebut di atas merupakan hambatan paling besar dalam upaya mencapai target peningkatan mutu dan perluasan akses mayarakat terhadap pendidikan, terutama pendidikan dasar menengah.

D. Arah Pendidikan Islam

Tugas besar ke depan ialah, bagaimana Umat Islam Indonesia mampu mengembangkan pendidikan yang modern untuk menjadi soko guru peradaban. Hal inilah yang sudah dilakukan oleh negara-negara non-Barat yang non-Islam dalam membangun peradaban modern mereka tanpa kehilangan akar budaya dan karakteristik kulturalnya. Dan mereka bangga dengan identitas kultural yang distingtif dalam modernisasi peradaban dunia. Ada dua hal yang menjadi fokus arah pengembangan ke depan. Pertama pada aspek kebijakan. Kedua pada aspek praksis pendidikan.

1. Aspek kebijakan

Kebijakan pemerintah mestinya secara maksimal memberikan perhatian penuh terhadap peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam. Tambahan lagi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menempatkan lembaga pendidikan Islam sejajar dengan sekolah umum perlu mendapat perhatian lebih besar guna peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam ke depan. Sistem manajemen dan kepemimpinan pendidikan lembaga pendidikan Islam telah memasuki era baru dengan demikian, pemberian kepercayaan secara penuh kepada kepala lembaga pendidikan Islam untuk mengelola lem-

baga pendidikan Islam termasuk di bidang keuangan menjadi *school learning*, sehingga menjadi lembaga pendidikan Islam yang mandiri.

2. Penerapan Model Pendidikan yang Tepat

a. Model Pendidikan Islam yang Moderat

Sistem pendidikan Islam yang dikembangkan secara konsepsional menanamkan pemahaman Islam yang moderat, sehingga anak didik memiliki pemahaman yang luas dan memiliki karakter yang kuat. Dengan memahami realitas masyarakat yang majemuk, maka konsepsi pendidikan yang dikembangkan pada lembaga pendidikan Islam ialah pemahaman, semangat dan cara pengelolaan yang mampu mengakomodasi perbedaan dan keragaman dengan tanpa mengorbankan keyakinan dalam keberagamaan masing-masing individu.

Lembaga pendidikan Islam harus mampu membawa siswanya kepada pemahaman keagamaan yang moderat dan ketengah (*center*). Selama pemahaman keagamaan berada pada ujung ekstrim, maka pendidikan Islam akan tetap menjadi feriferal dan marjinal. Tugas kita bersama untuk membawa pendidikan Islam ke tengah peradaban dunia bahkan mampu menjadi *trend setter* baru peradaban dengan modal sosial yang sangat kohesif yang sudah dimilki umat Islam, dengan menggeser paradigm yang moderat .

b. Model Pendidikan Plural dan Multikultural

Keragaman pemahaman dan penafsiran memunculkan pola-pola artikulasi keberagaman, menurut Azra (1999) dikelompokkan ke dalam 3 tipologi, yaitu: (1) *Substansialisme* yang lebih mementingkan substansi/isi daripada label atau simbol-simbol eksplisit; (2) *Formalisme/Legalisme* yang cenderung sangat literal, dan/ketaatan formal dan hukum agama diekspresikan dalam bentuk sangat lahiriah semacam simbol/label keagamaan; dan (3) *Spiritualisme* yang lebih menekankan pada pengembangan sikap batiniah melalui

keikutsertaan dalam kelompok *spiritual-mistik,* tasawuf atau tarekat, bahkan kelompok kultus.

Untuk menumbuhkan dan membentuk sikap warga bangsa yang mampu menghargai perbedaan-perbedaan itu, maka diperlukan suatu konsep pendidikan agama yang berwawasan pluralisme dan multikultural. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, pemahaman tentang realitas pluralisme itu, tampaknya sudah merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa diabaikan lagi. Sebab penggunaan "paradigma tunggal" dalam memecahkan berbagai permasalahan sosial yang sering muncul beberapa tahun terakhir ini, sudah tidak efektif lagi.

Pendidikan Islam pluralis/multikultural adalah pendidikan yang di dalamnya memuat unsur-unsur sikap toleran dan demokratis serta fleksibel dengan bersumber pada nilai-nilai spiritual dan moral universal agama. Adapun sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam pendidikan agama pluralis ini adalah sikap yang mampu menghargai pendapat, pandangan, dan kebiasaan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri, serta anak bangsa yang memiliki keluwesan sikap, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Jika nilai-nilai toleransi tersebut di atas terpadu dalam pikiran, sikap dan prilaku sebagian besar masyarakat kita, dalam hal ini peserta didik, maka sangat mungkin mampu mengharmoniskan berbagai varian latar budaya, bahasa, agama yang merupakan realitas pluralisme bangsa Indonesia (Abdul Hasim, Media Indonesia, 2001).

c. Model Pendidikan Demokrasi

Pendidikan demokrasi perlu dikembangkan sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih demokratis, sebagaimana diungkapkan oleh Cohen (2002) dan Cristoper (1989) Pendidikan Demokrasi akan menghargai hak-hak individu, termasuk kebebasan berpikir, berserikat, berpendapat dan bebas dari ketakutan. Upaya

ini urgen untuk menciptakan kohesivitas nasional dan komitmen warganya dalam membangun warga negara kesatuan yang demokratis

Pendidikan demokrasi yang digagas pada lembaga pendidikan Islam dimaksudkan untuk lebih menekankan pada penanaman sikap demokratis, toleransi, terbuka, berlapang dada menerima perbedaan, dan bersedia mendengar dan bertukar pendapat secara elegan dan santun, cerdas dan dewasa. Hal ini sejalan dengan kondisi bangsa Indonesia yang sedang menghadapi krisis sosial yang cukup menghawatirkan sekarang ini.

d. Moderenisasi Sitem Pendidikan Islam

Ciri kehidupan modern adalah perubahan yang semakin cepat dan cenderung semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang mampu menumbuhkembangkan *kepekaan* terhadap perubahan tanpa kehilangan identitas, dan *kreativitas* serta *keprofesionalan* dalam merespons berbagai tantangan.

Lembaga pendidikan Islam dituntut untuk responsif terhadap modernisasi pembelajaran yang telah berjalan pada lembaga-lembaga pendidikan sekolah umum di bawah Kemendibud. Ada dua hal yang bisa dikembangkan. Pertama, mengembangkan strategi pembelajaran aktif dengan berpusat pada siswa. Mengembangkan "belajar bagaimana belajar" (*learn how to learn*), menumbuhkembangkan semangat belajar, tahu dan mampu cara-cara belajar yang produktif, dan mengembangkan kepercayaan dan optimisme serta mampu memecahkan masalah. Di samping mengembangkan sikap yang sensitif terhadap perubahan melalui berbagai strategi pembelajaran yang tepat dan mengembangkan sesuai dengan kondisi psiko-sosial anak. Yang tidak kalah penting adalah, kedua, memodernisasi fasilitas pembelajaran, lingkungan dan *supporting factor* lainnya, termasuk keterlibatan dari orang tua, pemerintah, masyarakat serta para stakeholder pendidikan lainnya.

E. Penutup

Pendidikan Islam memiliki peluang yang amat terbuka untuk tampil sebagai pilar peradaban baru yang modern dan kokoh berlandaskan pada nilai-nilai ke-Islaman. Pendidikan Islam telah memiliki induk budaya yang sangat kohesif serta sikap yang responsif terhadap perubahan.

Berbagai tantangan khas umat Islam di Indonesia membutuhkan sikap yang terbuka dari pemerintah dan lembaga pendidikan Islam itu sendiri untuk mengembangkan berbagai model pendidikan yang inklusif, terbuka, dialogis, serta bertumpu pada siswa. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan Islam mampu melahirkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkarakter kuat yang akan berkiprah mengisi dan menciptakan peradaban baru yang bertumpu pada nilai keagamaan, spiritualitas, dan humanism.

Yang lebih penting lagi adalah mengembangkan *networking* dan kerjasama nasional dan internasional untuk meluaskan akses informasi, pendanaan dan dukungan internasional lainnya. Sehingga pendidikan Islam tidak lagi "dicurigai"sebagai agen radikalisme dan fundamentalisme, tetapi bersama-sama bisa menciptakan kehidupan yang harmoni dan mampu menjadi solusi terhadap masalah-masalah kehidupan yang semakin rumit.

Wa 'lāh A'lam bi al-sawāb.

Daftar Pustaka

Anggani Sudono, M. A. 2001. *Mengembangkan Kesadaran Masyarakat: Berpartisipasi Meningkatkan Pendidikan Anak Bangsa, dalam Membangun Masyarakat Pendidikan,* Bahan Bacaan Inservice Training BP-3 MI & MTs, INSEP Bekerjasama dengan BEP Departemen Agama Jakarta.

Bloom, B. S. 1956. *Toxomony of Educational Objectives, the Classification of Educational Goals*, Hand Book I: Cognitive Domain. New York: Longmans, Green and Co.

Ba Yunus, Ilyas dan Farid Ahmad. 1988. *Sosiologi Islam dan Masyarakat Kontemporer,* Jakarta: Mizan.

Berger, Peter L. 1991. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*, Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

Darmuin. 1998. "Prospek Pendidikan Islam di Indonesia: Suatu Telaah terhadap Pesantren dan Lembaga pendidikan Islam, dalam Chabib Thoha dan Abdul Muth'i, *PBM-PAI di Sekolah: Eksistensi dan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan Fakultas Tarbiyah lAIN Walisongo Semarang.

Fadjar, M. A. 1998. *Lembaga Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan.

Fischer, Joseph. 1970. The *Social Sciences and the Compatrative Study of Educational Systems*. Berkeley: Int. Teksbook Company.

Indra Djati, Sidi. 2001. *Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Jakarta: Paramadina.

J. Drost, SJ. 2005*. Dari Kurikulum Berbasis Kompetensi sampai Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Jalaluddin dan Said, U. 1996. *Filsafat Pendidikan Islam: Konsep dan Perkembangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Maclaine and Selby Smith. 1971. *Fundamental Issues in Australian Education*. Sydney: Ian Novak Publishing.

Nashir, H. 1999. *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sarijo, M. 1980. *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*. Jakarta: Dharma Bakti.

Steenbrink. Karel A. 1986. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

*Undang-undang Sistem Pendidikan Nasinal (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989) dan Peraturan Pelaksa*naannya. 1994. Jakarta: Sinar Grafika.

Zamroni. 2000. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Penerbit Bigraff Publishing.

Zamakhsyari Dhofier. 1982. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

Zamakhsyari Dhofier. 1984. "K. H. Hasyim Asy'ari, Penggalang Islam Tradisional", dalam *Prisma*, Januari 1984.

SEPUTAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN

Cik Hasan Bisri

A. Pendahuluan

Pendidikan Islam, menurut Aan Hasanah, masih menghadapi berbagai masalah terutama menghadapi peradaban umat manusia di masa depan. Masalah tersebut dapat dimaknai sebagai "jarak" antara "yang seharusnya" atau "yang selayaknya" diraih dengan "yang senyatanya" dapat diraih. "Jarak" tersebut masih menganga, sehingga memerlukan solusi sistemis dengan mengerahkan berbagai sumber daya yang diperlukan. Apa yang "mesti" dilakukan ialah memperpendek "jarak" itu, atau bahkan "memotong jarak" itu, khususnya dalam sistem pendidikan nasional. Tampaknya masalah pendidikan Islam itu tidak hanya dialami dalam penyelenggaraannya; tetapi juga dialami dalam penelitian dan pengembangan untuk menunjang kebijakan di bidang pendidikan itu, yang dalam istilah lain disebut sebagai pendidikan agama dan keagamaan (Islam).

Apa yang dikemukakan di atas, telah menjadi fokus pembicaraan dalam "Workshop Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan" pada Badan Penelitian dan Pengembangan Agama dan Pendidikan dan Latihan Keagamaan, Kementerian Agama, pada tanggal 3 Juli 2003 di Jakarta. Dalam *workshop* tersebut saya diminta menyajikan makalah untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh penyelenggara penelitian kebijakan pada Pu-

sat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan (Puslitbang PAK), dengan isi makalah sebagaimana berikut ini.

Mungkin saya bukan orang yang tepat untuk membahas penelitian dan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan, karena saya tidak memiliki pengetahuan akademis mengenai subyek tersebut. Akan tetapi saya tertolong oleh pengalaman menjadi guru pendidikan agama pada Sekolah Menengah Pertama dan pernah menjadi ustadz pada Madrasah Tsanawiyah Persatuan Islam (Persis). Pengalaman mengajar pada dua satuan pendidikan itu, ditunjang oleh pengalaman sebagai praktisi pendidikan pada "satuan pendidikan keagamaan", yaitu di Fakultas Syariah IAIN (kini UIN) Sunan Gunung Djati Bandung sejak tahun 1978. Dengan bekal tersebut saya memberanikan diri untuk menyusun makalah tentang penelitian dan pengembangan **pendidikan agama dan keagamaan (PAK).**

Di samping itu, sebagaimana telah dirumuskan oleh penyelenggara *workshop*, pembahasan tentang topik ini merupakan suatu wujud keperihatinan terhadap pengalaman bahwa hasil penelitian belum dimanfaatkan oleh *user* (diduga) karena: (1) Penelitian yang dilakukan kurang relevan dengan kebutuhan pihak user; (2) Penelitian yang dilakukan kurang bermutu karena secara konseptual, teoritis, dan metodologis masih lemah; dan (3) Komunikasi yang kurang lancar dengan *user* berkenaan dengan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Keprihatinan itu memberi peluang untuk saling bertukar pengalaman.

Sementara itu, diagnosis dan terapi yang diharapkan muncul dari *workshop* ini adalah himpunan informasi dan pemikiran, sebagai bahan penyusunan program Puslitbang PAK sebagai "dapur pemikir", yang sesuai dengan kebutuhan unit-unit terkait dalam lingkungan Kementerian Agama. Atas perihal tersebut, tujuan khusus *workshop* ini untuk: (1) Mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan agama dan keagamaan; (2) Memetakan penelitian di bidang

pendidikan agama dan keagamaan yang telah dilakukan; (3) Meng-inventarisasi masalah-masalah yang perlu diteliti.

Meskipun hubungan antara "yang diduga mengandung masalah" dengan "terapi yang akan dirumuskan" kurang koheren, namun saya berkeinginan menyumbangkan pokok-pokok pikiran untuk memenuhi bagian dari harapan yang hendak dicapai dalam *worksop* ini. Atas perihal tersebut, ada beberapa hal yang akan diuraikan dalam tulisan ini, terutama berkenaan dengan butir (1) dan butir (3). Sedangkan butir (2) berada di luar jangkauan pengetahuan saya, karena informasi tentang butir itu sangat terbatas. Atas perihal yang sama, ilustrasi yang dipaparkan berkenaan dengan pendidikan agama dan keagamaan (Islam). Kedua butir tersebut disusun dalam konteks diagnosis terhadap masalah yang selama ini dihadapi.

Apabila dilakukan identifikasi, PAK yang dihubungkan dengan penelitian dan pengembangan, dapat dipilah berdasarkan beberapa identifikasi. Pertama, PAK diidentifikasi sebagai dua sisi dari satu mata uang, yakni pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Kedua, PAK diidentifikasi sebagai salah satu ranah kebijakan publik. Ketiga, PAK diidentifikasi sebagai sasaran penelitian dan pengembangan. Keempat, berdasarkan butir ketiga dapat dirumuskan tentang manajemen penelitian dan pengembangan PAK. Kelima, berdasarkan butir keempat dapat dikemukakan tentang kemungkinan adanya jaringan penelitian PAK.

Sementara itu, konsep kunci tentang penelitian dan pengembangan dapat didefinisikan sebagaimana berikut ini. Pertama, yang dimaksud dengan penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian kebijakan (*policy research*), yakni rangkaian kegiatan untuk menjelaskan, menilai, dan mengukur kebijakan di bidang PAK dengan menggunakan seperangkat prinsip dan prosedur kerja ilmiah. Kedua, yang dimaksud dengan pengembangan adalah pengembangan kebijakan, atau pengembangan PAK, yakni serangkaian kegiatan perubahan yang disengaja, direncanakan, dan berjangka, untuk mencapai tuju-

an tertentu (*Cf.* McIver and Page, 1957: 523). Ketiga, yang dimaksud dengan kebijakan adalah kehendak penyelenggara negara tentang arah pengembangan PAK dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang terdiri atas kebijakan nasional, kebijakan pembangunan, kebijakan sektoral, dan kebijakan teknis.

B. Substansi dan Institusi PAK

Terdapat berbagai sudut pandang yang dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan pendidikan. Menurut sudut pandang antropologis pendidikan dapat dimaknai sebagai sosialisasi norma-norma kehidupan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.[1] Dari pernyataan itu terdapat tiga unsur utama pendidikan, yakni norma-norma kehidupan, sosialisasi, dan antar generasi. Norma-norma kehidupan itu, berpangkal dari keyakinan, kamudian diturunkan menjadi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang sangat konkret dan praktis, seperti norma sopan santun dan hukum. Sebut saja besaran keyakinan, nilai, dan kaidah itu sebagai aspek normatif dalam kehidupan manusia, dalam hal ini masyarakat bangsa Indonesia atau masyarakat muslim Indonesia. Oleh karena itu, sosialisasi dilakukan sebagai suatu keharusan agar kepribadian, ucapan, sikap, dan perilaku generasi berikut berpatokan kepada aspek normatif yang dianut oleh generasi masa kini dan sebelumnya.

Sosialisasi bermakna suatu proses pemahaman, penghayatan, dan penerimaan terhadap norma kehidupan untuk dijadikan patokan perilaku dalam pergaulan hidup. Berdasarkan hal itu, sipenerima sosialisasi, dapat mengetahui dan menerima perilaku yang benar

[1] Menurut ketentuan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang harus dilakukan dan mesti ditinggalkan. Di samping itu, terdapat pilihan-pilihan yang terbaik bagi dirinya dan bagi masyarakatnya. Dengan demikian, secara preskriptif, penerimaan dan penggunaan norma-norma kehidupan itu dilakukan dengan sukarela dan kesadaran sendiri.

Sementara itu, antargenerasi memiliki beberapa makna. Ia bermakna antara orang tua dengan anak, yang berada dalam lingkungan keluarga. Ia juga bermakna antara guru dengan murid, yang berada dalam lingkungan sekolah dan satuan pendidikan sejenis. Ia juga bermakna antara generasi tua dengan generasi muda, yang berada dalam lingkungan masyarakat dalam arti yang luas. Berkenaan dengan hal itu, dikenal tiga lingkungan pendidikan: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena pendidikan dipandang sebagai sosialisasi aspek normatif dalam kehidupan, maka penyelenggaraan pendidikan dalam ketiga lingkungan itu pun bersifat normatif, dan keterlibatannya didasarkan atas tanggung jawab moral.

Dewasa ini, dalam kehidupan masyarakat bangsa, lingkungan pendidikan itu dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, yang disebut sebagai jalur pendidikan, yakni jalur keluarga, jalur sekolah, dan jalur masyarakat. Dari ketiga jalur tersebut, tampaknya, yang mampu memberi identitas dan status sosial, ialah jalur sekolah sebagaimana menjadi pusat perhatian Aan Hasanah. Pendidikan seringkali diidentikkan dengan sekolah, apabila dilakukan registrasi dan sensus untuk kepentingan demografis. Pendidikan jalur ini juga dijadikan "jalan pintas" dalam melakukan mobilitas vertikal, untuk meraih status dan okupasi dalam struktur sosial.

Dalam perjalanan lebih lanjut, sehubungan dengan pengorganisasiannya dalam wujud persekolahan, pendidikan dikelola secara profesional dan fungsinya berkembang. Ia diselenggarakan dalam konteks kehidupan nasional, bahkan internasional. Secara vertikal, ia, disusun menjadi beberapa jenjang, mulai pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi. Secara horizontal, ia dikembangkan dalam

berbagai bidang keahlian dan spesialisasi. Dalam jenis pendidikan tertentu, lebih diarahkan pada pengembangan keterampilan, baik manajerial maupun teknis. Dengan demikian, semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin beranekaragam bidang keahlian dan spesialisasi yang dikembangkan.

Atas perihal yang sama, PAK merupakan proses sosialisasi ajaran agama mencakup keyakinan, nilai, dan kaidah sosial. Ketika PAK itu menjadi bagian dari struktur dan kultur masyarakat bangsa dan diorganisasikan melalui berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, maka PAK menjadi gejala yang rumit dan pelik. Kerumitan itu terjadi karena PAK telah menjadi bagian urusan publik; terjadi adopsi dan adaptasi terhadap tradisi PAK dari lingkaran kebudayaan yang bersifat plural; dan negara diberi wewenang untuk menata sistem pendidikan nasional. Hal itu berakibat terjadinya pemilahan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang semula menjadi otoritas keluarga dan komunitas agama beralih menjadi wewenang pemerintahan negara. Berkenaan dengan hal itu, pendidikan agama merupakan substansi dalam proses sosialisasi ajaran agama. Sedangkan pendidikan keagamaan merupakan suatu institusi otonom, bagian dari institusi keagamaan dalam komunitas agama, yang kemudian menjadi identitas satuan pendidikan yang berciri agama (*Cf.* Coleman and Cressey, 1984: 97).

Atas perihal yang sama, terdapat perubahan yang sangat menonjol. Pertama, pemerintah dan parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/DPR-RI) memiliki wewenang untuk menata sistem pendidikan, sebagaimana tampak dalam perumusan dan penetapan undang-undang sistem pendidikan nasional. Kedua, pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan di bidang pendidikan. Ketiga, pemerintah bertindak sebagai penyelenggara dan pengelola pendidikan, terutama bagi satuan pendidikan (sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi) negeri sebagai konsekuensi pelayanan publik. Keempat, pemerintah berkedudukan sebagai

pembina dan pengawas terhadap seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. Kontroversi tentang pendidikan agama dalam lingkungan sekolah yang dikelola oleh komunitas agama, ketika dilakukan perubahan undang-undang sistem pendidikan nasional, dapat dipahami dalam konteks ini.[2]

Pemilahan pendidikan agama dan keagamaan sebagaimana dikemukakan di atas, tampaknya merupakan gejala yang sangat sederhana. Namun di balik itu, berpangkal dari paradigma tentang hubungan antara agama dengan negara (*al-dīn wa al-dawlah*) dalam masyarakat plural yang tidak pernah selesai. Di samping itu, pemilahan tersebut berpangkal dari tradisi pendidikan yang telah berkembang dalam rentang waktu yang sangat panjang. Dalam kehidupan komunitas Muslim (umat Islam) pilahan itu menunjukkan sebagai suatu gejala kontinum. Hal itu tampak dalam pergeseran ranah pendidikan agama dan keagamaan apabila dihubungkan dengan satuan pendidikan (pesantren hingga sekolah) dan penyelenggaranya, sebagaimana diperagakan dalam Gambar 1.

Gambar 1: Keberlanjutan Pilahan PAK dalam Satuan Pendidikan

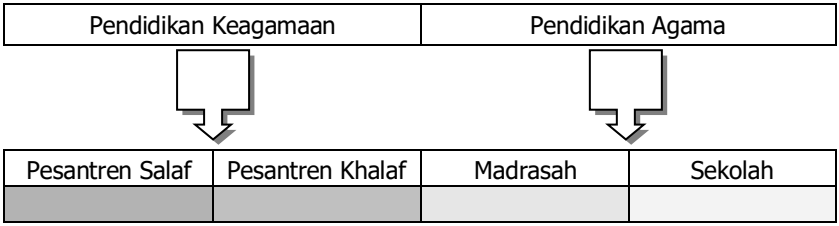

Uraian di atas menunjukkan bahwa PAK berpangkal dari dua institusi utama (*major institution*) dalam kehidupan masyarakat sederhana maupun masyarakat kompleks, yakni institusi keagamaan

[2] Konteks perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

dan institusi pendidikan. Dua institusi yang bersumber dari ajaran agama, sehingga ketika dilakukan modifikasi dan integrasi dalam suatu kesatuan sistem masyarakat bangsa mengandung masalah yang sangat peka dan sarat dengan kontroversi. Bahkan dapat menimbulkan pengerahan massa. Kedua institusi itu merupakan potensi kemunculan masalah-masalah sosial, karena masyarakat bangsa Indonesia merupakan masyarakat majemuk (vertikal dan horizontal) yang berada dalam posisi transisi dari masyarakat tradisional (agraris) menuju masyarakat modern (industri dan informasi) yang diikat dan digerakkan oleh organisasi raksasa, yakni negara. Selanjutnya, masalah sosial itu dapat dijadikan masalah penelitian, dalam hal ini masalah penelitian kebijakan bidang PAK.

C. PAK sebagai Ranah Kebijakan

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa penyelenggara negara memiliki wewenang untuk melakukan penataan terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat bangsa, termasuk bidang agama dan bidang pendidikan. Hal itu didasarkan kepada nilai dan hukum dasar (konstitusi) yang dijadikan rujukan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wewenang tersebut dinyatakan dan ditetapkan dalam berbagai kebijakan lembaga tinggi negara maupun produk pemerintahan daerah, sesuai dengan alokasi dan distribusi wewenang dalam hierarki pemerintahan dan tata usaha negara. Oleh karena itu, terdapat serangkaian kebijakan yang bersifat vertikal dan horizontal. Kebijakan vertikal tersusun mulai dari kebijakan nasional hingga kebijakan teknis. Sedangkan kebijakan horizontal berkenaan dengan seluruh bidang kehidupan masyarakat bangsa, yang dalam konteks tulisan dan *workshop* ini bidang agama dan bidang pendidikan. Seluruh kebijakan tersebut, secara konkret tersusun dalam bentuk keputusan atau ketetapan instansi yang di-

beri wewenang, yang pada umumnya dinyatakan dalam serangkaian ragam bahasa hukum (peraturan tertulis/*lex scripta*).

Dari rangkaian kebijakan di atas, terdapat beberapa ciri yang melekat, di antaranya:

1. Seluruh kebijakan merujuk kepada landasan ideal, yakni Pancasila; landasan struktural, yakni Undang-Undang Dasar 1945; serta landasan operasional, yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI).
2. Terdapat koherensi dan konsistensi antarkebijakan tersebut, yang tersusun secara hierarkis. Kebijakan yang lebih tinggi dijadikan rujukan dalam menentukan kebijakan yang lebih rendah.
3. Kebijakan itu disusun dengan mempertimbangkan potensi sumber daya yang tersedia dan masalah-masalah yang dihadapi, baik secara makro (integral-nasional) maupun secara mikro (sektoral-regional). Selain itu, disesuaikan dengan tahapan perkembangan masyarakat bangsa Indonesia yang senantiasa mengalami perubahan struktural maupun kultural.
4. Kebijakan itu bersifat strategis, dalam arti memiliki jangkauan ke depan, berjangka panjang, berhubungan dengan berbagai unsur yang sangat luas, dan dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
5. Untuk melaksanakan kebijakan itu ditentukan arah yang akan dituju, faktor-faktor kunci keberhasilan, dan langkah-langkah yang bersifat operasional. Selanjutnya disusun berbagai program operasional dalam bentuk proyek-proyek.

Kebijakan tertinggi yang mencakup seluruh bidang kehidupan dinyatakan dalam Ketetapan MPR-RI, khususnya mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurut GBHN 1999-2004, berbagai bidang kehidupan itu dirumuskan dalam kandungan Bab IV, tentang Arah Kebijakan, yang terdiri atas: (1) bidang hukum, (2) bidang ekonomi, (3) bidang politik, (4) bidang agama, (5) bidang pen-

didikan, (6) bidang sosial dan budaya, (7) bidang pembangunan daerah, (8) bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, kebijakan nasional di bidang PAK terdapat dalam dua bidang yang saling berhubungan, yakni bidang agama dan bidang pendidikan.

Kebijakan nasional di bidang PAK yang dirumuskan dalam bidang agama, terdiri atas dua butir, yakni: (2) Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai; (5) Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkukuh jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan dalam bidang pendidikan dapat ditelusuri dari seluruh butir, yang intinya ialah: (1) Mengupayakan perlusaan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga mampu berfungsi secara optimal; (3) Melakukan pembaruan sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keragaman peserta didik, kurikulum yang berlaku nasional dan lokal; (4) Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pemberdayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai; (5) Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen; (6) Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan il-

mu pengetahuan, teknologi, dan seni; (7) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbgai upaya proaktif dan kreatif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal.

Berdasarkan kebijakan nasional itu, ditetapkan berbagai kebijakan yang lebih rendah, yakni kebijakan pembangunan sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan; kebijakan sektoral sebagai rincian dari kedelapan bidang di atas; dan kebijakan teknis berkenaan dengan operasionalisasi seluruh kebijakan, baik sektoral dan lintas sektoral maupun regional. Atas perihal tersebut, akan ditemukan derajat koherensi antarlevel kebijakan berkenaan dengan proses pelaksanaan otonomi daerah. Di satu pihak bidang agama menjadi wewenang Pemerintah Pusat, namun khusus di bidang keagamaan, sebagian kegiatannya dapat ditugaskan kepada Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dengan menggunakan prinsip dekonsentrasi. Di pihak lain bidang pendidikan telah dilimpahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan menggunakan prinsip desentralisasi.[3]

Uraian di atas menunjukkan bahwa PAK berada dalam dua bidang kehidupan masyarakat bangsa, dan menjadi ranah kebijakan penyelenggara negara, baik pada tingkat pusat maupun tingkat dae-

[3] Berbagai masalah yang dikemukakan Aan Hasanah mengenai pendidikan Islam: dualisme pengelolaan pendidikan, sumber daya kependidikan yang rendah, pendanan pendidikan yang rendah, sebagian besar satuan pendidikan milik swasta, dan sebaran satuan pendidikan di perdesaan merupakan akibat dari kebijakan nasional berkenaan dengan otonomi daerah. Kebijakan tersebut tidak hanya berada dalam level politik, tetapi berada dalam level ideologis, bahkan teologis. Hal itu menunjukkan bahwa hubungan antara agama dengan negara, khususnya di bidang pendidikan belum selesai sepenuhnya. Kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini sangat terbuka ketika Kemendikbud dipecah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Saya menduga peluang ini tidak akan menjadi potensi soluatif ketika hubungan antara agama dengan negara tidak menjadi titik tolak untuk menyelesaikan berbagai bidang kehidupan yang berpangkal dari landasan teologis.

rah. Ketika kebijakan itu ditetapkan dengan mempertimbangkan kepentingan dan potensi sumber daya yang tersedia, akan terjadi variasi kebijakan, terutama pada level kebijakan teknis. Penyerahan wewenang dari Pusat ke Daerah yang baru dilakukan dalam kurun waktu yang relatif pendek, merupakan potensi kemunculan masalah kebijakan, yang dapat diidentifikasi sebagai bagian dari masalah-masalah sosial (*Cf.* Coleman and Cressey, 1984: 66-70). Selanjutnya, masalah sosial itu menjadi masalah penelitian, dalam hal ini masalah penelitian kebijakan di bidang PAK.

D. PAK sebagai Sasaran Penelitian

Apabila membicarakan penelitian, muncul pertanyaan mendasar yang memerlukan jawaban yang tepat dan akurat: **apa yang akan diteliti?** Pertanyaan itu mempersoalkan wilayah penelitian, yakni suatu kawasan yang menjadi sasaran penelitian, yang merujuk kepada salah satu atau beberapa disiplin ilmu; lintas disiplin ilmu; atau lintas rumpun ilmu. Atau bagian dari entitas kehidupan yang sederhana sampai yang rumit. Dalam ranah perencanaan penelitian, pertanyaan itu mempersoalkan masalah penelitian atau fokus penelitian, yang kemudian dirinci menjadi pertanyaan penelitian. Jawaban atas pertanyaan itu dapat disusun secara gradatif, namun pada dasarnya tetap satu: yang diteliti ialah **sesuatu yang ada**; bukan yang diada-adakan, atau mengada-ada.

Berkenaan dengan hal itu, muncul pertanyaan berikutnya: apa masalah penelitian itu? Jawaban atas pertanyaan tersebut sangat tergantung kepada tipe penelitian dan metodologi penelitian (paradigma penelitian) yang akan digunakan. Masalah penelitian dapat didefinisikan sebagai hubungan kausal antara variabel bebas dengan variabel terikat, apabila disusun dalam tipe penelitian akademis dengan menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Kemudian, masalah penelitian juga dapat didefinisikan sebagai pola hubungan

antarunsur yang tercakup dalam suatu kesatuan terintegrasi dari suatu subyek, apabila disusun dalam tipe penelitian akademis dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Di samping itu, masalah penelitian juga dapat didefinisikan sebagai jarak atau kesenjangan antara "yang seharusnya" (*das söllen*) dengan "yang senyatanya" (*das sein*), apabila disusun dalam tipe penelitian kebijakan dengan menggunakan metodologi penelitian kuantitatif atau kualitatif. Atau, bahkan dalam metodologi penelitian kritis. Boleh jadi kesenjangan itu terjadi dalam pemilahan PAK, atau dalam perumusan dan produk kebijakan PAK.

Sebelum terlanjur membicarakan masalah penelitian kebijakan, ada baiknya dikemukakan tentang tipe penelitian secara umum, untuk menyahuti keprihatinan penyelenggara *workshop* sebagaimana dirumuskan dalam butir: (1) Penelitian yang dilakukan kurang relevan dengan kebutuhan pihak *user*; (2) Penelitian yang dilakukan kurang bermutu karena secara konseptual, teoritis, dan metodologis masih lemah. Barangkali uraian tentang tipe penelitian merupakan salah satu obat penawar untuk menutupi kelemahan yang menjangkit. Di samping itu, ia, diharapkan akan memberi inspirasi kepada akademisi untuk memosisikan diri ketika dilibatkan dalam kegiatan penelitian kebijakan, sesuai dengan kebutuhan pihak pengguna.

Secara garis besar terdapat empat tipe penelitian yang paling dikenal. Pertama, penelitian akademis atau penelitian ilmiah, yang lazim dikembangkan oleh perguruan tinggi. Ia, antara lain, terlihat dalam produk penelitian pendidikan akademis, yakni: skripsi, tesis, dan disertasi. Kedua, penelitian pengembangan diselenggarakan berkenaan dengan aplikasi ilmu bagi perumusan model atau sistem yang berskala lokal, regional, dan nasional. Tipe penelitian ini dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi secara tunggal atau berupa kerja sama dengan penyelenggara penelitian lain, seperti Kemendikbud atau Kemenag. Ketiga, penelitian kebijakan, atau penelitian terapan berorientasi kebijakan, yang lazim dikembangkan oleh badan

penyelenggara penelitian pemerintah dan dunia bisnis, terutama badan penelitian dan pengembangan kementerian, seperti Puslitbang PAK. Keempat, penelitian aksi atau *participation action research* (PAR), atau dikenal juga sebagai *participatory research approach* (PRA), yang lazim dikembangkan oleh lembaga swadaya masyarakat. Namun demikian, perguruan tinggi berpeluang untuk mengembangkan keempat tipe penelitian tersebut, baik yang direncanakan sendiri maupun atas permintaan pengguna hasil penelitian (sponsor) melalui kerja sama penelitian.

Berkenaan dengan uraian di atas, unsur penelitian kebijakan sebagaimana terlihat dalam Tabel 1 (kolom 4), dapat digunakan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan penelitian kebijakan bidang PAK. Pertama, masalah penelitian merupakan bagian dari masalah sosial, dalam hal ini masalah PAK, masalah kebijakan PAK, dan masalah pelaksanaan kebijakan PAK. Kedua, sumber masalah penelitian berasal dari kebijakan PAK yang tersusun secara hierarkis. Ketiga, satuan penyelenggara penelitian ialah Puslitbang PAK bekerjasama dengan perguruan tinggi dan pengguna hasil penelitian (unit perumus kebijakan PAK). Keempat, pelaku penelitian dan yang terlibat dalam penelitian terdiri atas peneliti (Puslitbang PAK), akademisi (perguruan tinggi), dan birokrat (unit perumus kebijakan, sebagai sponsor). Kelima, pendekatan yang digunakan ialah interdisipliner atau transdisipliner dengan mengintegrasikan beberapa unsur disiplin ilmu (serumpun atau antarrumpun) dalam suatu kesatuan kegiatan penelitian; atau multidisipliner dengan mengintegrasikan suatu kesatuan program penelitian dengan menggunakan disiplin ilmu masing-masing. Keenam, metode penelitian yang digunakan adalah survai (*survey*) atau evaluasi bagi yang menggunakan paradigma penelitian kuantitatif; atau studi kasus atau hermeneutik terhadap beberapa satuan kebijakan yang tersebar bagi yang menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Ketujuh, penggunaan hasil penelitian sebagai salah satu bahan dalam proses perumusan dan pe-

ngembangan kebijakan. Kedelapan, pengguna hasil penelitian atau konsumen adalah unit perumus kebijakan, baik pada tingkat pusat maupun daerah.

Tabel 1: Unsur Penyelenggaraan Penelitian dalam Empat Tipe Penelitian

Unsur Penyelenggaraan Penelitian	Tipe Penelitian			
	Akademis	Pengembangan	Kebijakan	Aksi
1	2	3	4	5
Masalah	Akademis atau ilmiah	Ilmiah dan Sosial	Sosial atau bisnis	Kemasyarakatan (sosial)
Sumber	Disiplin ilmu	Disiplin ilmu dan sosial	Kebijakan publik atau bisnis	Interaksi sosial
Penyelenggara	Perguruan tinggi	Perguruan tinggi dan unit lain	Litbang kementerian/bisnis	Lembaga swadaya masyarakat
Pelaku	Peneliti	Peneliti dan fasilitator	Peneliti dan sponsor	Peneliti dan masyarakat
Pendekatan	Monodisipliner atau Interdisipliner	Monodisipliner atau Interdisipliner	Interdisipliner atau Multidisipliner	Interdisipliner
Metodologi	Metode ilmiah pada umumnya	Metode ilmiah pada umumnya	Survai atau Studi kasus	Partisipasi
Tujuan	Penemuan teori dan metodologi baru	Model aplikasi	Rekomendasi bagi kebijakan	Perubahan situasi
Pengguna	Masyarakat ilmiah	Masyarakat ilmiah/fasilitator	Pembuat kebijakan	Masyarakat lokal

Khusus tentang penelitian interdisipliner atau multidisipliner, selayaknya mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tersedia sejumlah tenaga peneliti yang memiliki keahlian beragam baik dalam lingkungan puslitbang dan perguruan tinggi atau antarperguruan tinggi. Kerja sama antarpeneliti menjadi ciri utama dalam penelitian interdisipliner atau multidisipliner. Berkenaan dengan penelitian kebijakan PAK dibutuhkan keahli-

an di bidang perencanaan pembangunan, bidang pendidikan, bidang kebijakan publik, dan bidang hukum tata usaha negara.

2. Didasarkan kepada program dan urutan prioritas yang ditetapkan sponsor atau oleh pengelola perguruan tinggi dan puslitbang yang menyelenggarakan penelitian. Oleh karena itu, Puslitbang PAK dan masing-masing perguruan tinggi (IAIN/UIN) memiliki perhatian dan prioritas penelitian bidang PAK.
3. Sumber yang tercakup di bidang PAK tersedia dan dapat diperoleh, baik dalam bentuk produk kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan. Berkenaan dengan hal itu, data dasar yang dibutuhkan dalam perumusan rencana penelitian disediakan oleh perumus dan pelaksana kebijakan.
4. Tersedia kemudahan yang dapat digunakan dalam penelitian itu, mencakup berbagai unsur manajemen penelitian, yang terdiri atas tenaga terampil yang dapat membantu peneliti, alokasi tugas di kalangan pelaksana penelitian, biaya yang dibutuhkan, dan sarana serta prasarana yang menunjang kelancaran penelitian.
5. Hasil penelitian memiliki signifikansi atau kegunaan, terutama sebagai bahan masukan dalam perumusan dan pengembangan kebijakan. Dewasa ini, produk penelitian merupakan salah satu bahan masukan dalam perumusan model pengembangan masyarakat, dalam hal ini, diharapkan, sebagai bahan penyusunan model PAK pada jenis dan jenjang pendidikan yang bervariasi.

Secara garis besar penelitian kebijakan PAK dapat disusun menjadi empat paket. Pertama, paket bahan kebijakan yang diarahkan untuk mengumpulkan informasi atau opini yang dapat dijadikan sumber dalam perumusan kebijakan. Kedua, paket analisis kebijakan yang diarahkan untuk menjelaskan dan menilai koherensi kebijakan, baik secara vertikal maupun horizontal. Ketiga, paket penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang diarahkan untuk menilai

unsur penunjang dan penghambat, internal maupun eksternal (evaluasi formatif). Keempat, paket penilaian terhadap produk kebijakan PAK yang diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang dioperasionalkan dalam bentuk program dan proyek (evaluasi sumatif). Dalam paket ini disusun kriteria, indikator, dan tolok ukur tententu.

E. Satuan dan Manajemen Penelitian PAK

Memang suatu ironi, apabila penelitian kebijakan kurang relevan dengan kebutuhan pengguna. Demikian pula apabila terjadi kesenjangan komunikasi antara peneliti dengan pengguna. Apabila kenyataan itu masih terus berlanjut, muncul pertanyaan yang sangat menyakitkan: untuk kebutuhan apa dan siapa penelitian itu dilakukan? Bila jawabannya bukan untuk siapa-siapa, dapat dikatakan bahwa penelitian itu merupakan pemborosan. Pemborosan waktu, pemborosan tenaga, dan pemborosan biaya. Bahkan pemborosan usia. Namun, peneliti tidak usah berkecil hati, karena penelitian akademis pun, dalam berbagai hal belum memiliki signifikansi bagi pengembangan unsur-unsur pengetahuan ilmiah karena dihadapkan kepada kendala yang sama: secara konseptual, teoritis, dan metodologis masih lemah. Di samping itu, boleh diuji di lapangan, masih dapat ditemukan kebijakan yang menceng sasaran, terutama kemencengan struktural (antara lain *bias urban*).

Untuk mencari solusi tentang kendala itu, ada baiknya dilakukan pemetaan tentang hubungan antara kebijakan dengan penelitian kebijakan, khususnya di bidang PAK, sebagaimana dapat diperagakan dalam Gambar 2. Atas perihal tersebut muncul pertanyaan: mana yang berada lebih duluan kebijakan PAK atau penelitian kebijakan PAK?

Apabila jawaban atas pertanyaan itu menggunakan cara kerja penelitian, maka jawabannya kebijakan PAK diasumsikan telah ada

dan telah dilaksanakan. Bukan sesuatu yang diada-adakan atau mengada-ada. Jawaban atas pertanyaan itu, pada dasarnya mempersoalkan hakikat keberadaan sesuatu yang kemudian diturunkan menjadi masalah penelitian. Adalah mustahil kegiatan penelitian dilaksanakan tanpa terlebih dulu dilakukan inventarisasi masalah sebagaimana diharapkan oleh penyelenggara *workshop*. Namun demikian dalam gambar tersebut penelitian kebijakan ditempatkan sebagai unsur masukan, karena subyek pembicaraan dalam forum ini ialah penelitian dan pengembangan PAK.

Gambar 2: Relasi antara Penelitian PAK dengan Pengembangan PAK

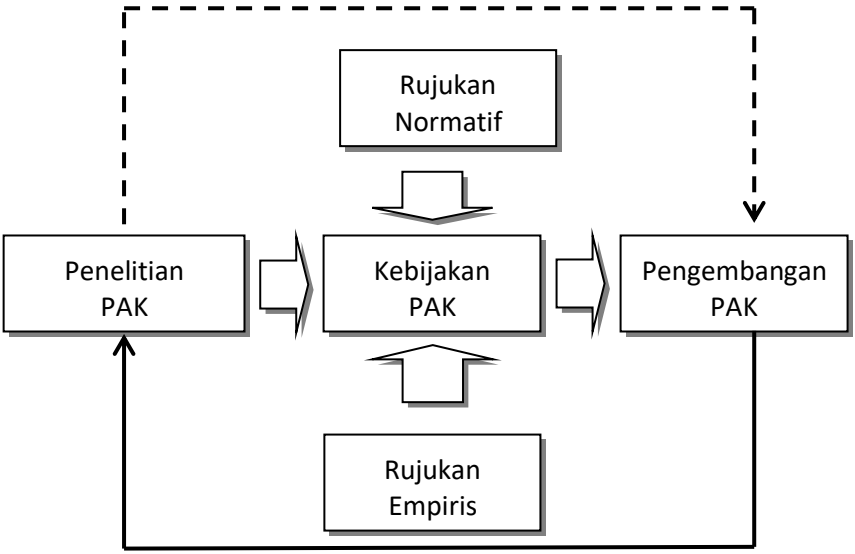

Adalah suatu keniscayaan, bahwa penelitian kebijakan PAK didasarkan pada kebijakan PAK yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, dalam hal ini kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjenpendis), atau unit lain yang berwewenang menetapkan kebijakan di bidang PAK. Berkenaan dengan

hal itu, penelitian ditujukan untuk menjelaskan, menilai, dan mengukur tingkat keberhasilan kebijakan tersebut, sebagaimana dikemukakan dalam paket penelitian di atas. Hasil penelitian yang didukung data empiris, dijadikan bahan masukan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan, kemudian dijadikan bahan masukan bagi pengembangan kebijakan berikutnya. Berdasarkan kebijakan itu, dilakukan pengembangan PAK sesuai dengan visi dan misi Kementerian Agama. Apabila hal itu dapat dilakukan, maka hasil penelitian akan memiliki kegunaan secara proporsional sehingga pemborosan dapat dihindarkan.

Gambar 3: Pilar Penelitian dalam Penelitian Kebijakan PAK

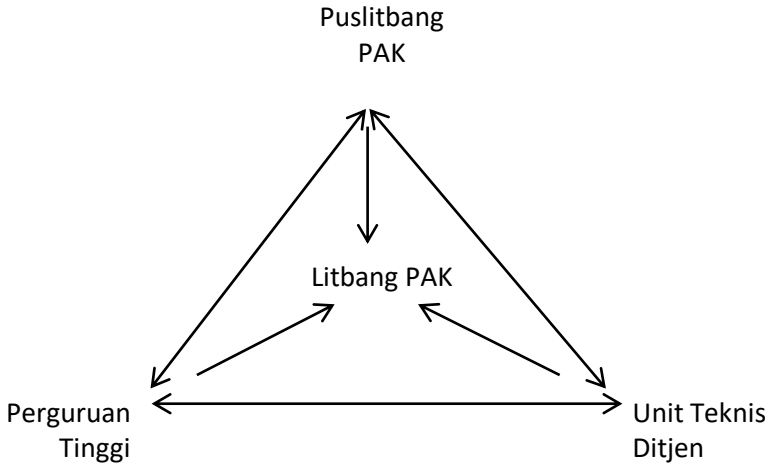

Untuk menuju ke arah itu, terlebih dulu dilakukan kerja sama dalam bentuk nota kespahaman (*memorandum of understanding*), atau koordinasi antara unit penelitian (Balitbang Agama dan Pusdiklat Keagamaan) dengan unit perumus kebijakan teknis di bidang PAK (Ditjendiktis), atau unit lain. Kerja sama (koordinasi) yang demikian akan mudah dilakukan, karena kedua unit tersebut berada

dalam satu atap, yaitu dalam lingkungan Kementerian Agama. Dalam kerja sama (koordinasi) itu, antara lain, dilakukan inventarisasi masalah, prioritas penelitian yang berjangka, unit yang akan dilibatkan, sumber dan satuan pembiayaan yang diperlukan, dan prosedur kerja yang akan ditempuh. Secara teknis pelaksanaan kerja sama (koordinasi) itu dituangkan dalam bentuk kontrak kerja yang dilaksanakan oleh satuan teknis (eselon II, direktorat dan seterusnya) pada kedua instansi tersebut, dengan melibatkan unsur perguruan tinggi (di antaranya UIN/IAIN). Dengan cara demikian, akan terbentuk tiga pilar penelitian PAK, sebagaimana dapat diperagakan dalam Gambar 3. Ketiga pilar tersebut ialah Puslitbang PAK, perguruan tinggi (IAIN/UIN), dan unit teknis dalam lingkungan Ditjenpendis atau unit lain.

Apabila kerjasama (koordinasi) itu telah ditentukan, maka setiap unit akan dapat menempatkan diri sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi permanen masing-masing; dan dapat melakukan peranan dalam kesatuan kerja penelitian. Berkenaan dengan hal itu, Puslitbang PAK dapat menjalankan fungsi: (a) perencanaan dan perumusan di bidang penelitian dan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan; (b) penyusunan program serta pelaksanaan penelitian di bidang penelitian dan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan; dan (c) penilaian, penelaahan, serta pelaporan hasil penelitian. Selanjutnya, unit teknis dalam lingkungan Ditjen dapat menempatkan diri sebagai penyedia data dasar (hasil laporan registrasi) dan penyandang dana. Sementara itu, perguruan tinggi menempatkan diri sebagai penyedia tenaga peneliti (ahli) sesuai dengan kebutuhan penelitian yang disepakati. Dengan cara demikian, semua pilar sejak dini dapat memahami anatomi dan dinamika kebijakan yang ditetapkan, sehingga masalah penelitian akan dapat dirumuskan secara tepat dan proporsional. Selain itu, kalangan akademisi dari perguruan tinggi akan memperoleh informasi sistematis yang digali dari entitas kehidupan sebagai "buku besar" bagi pe-

ngembangan pengetahuan ilmiah dalam lingkungan masyarakat kampus.

Pola kerja yang demikian dapat dikembangkan dalam ruang lingkup yang lebih luas, misalnya, melibatkan Pemerintah Daerah atau Kantor Wilayah Kementerian, sehingga akan terwujud apa yang kemudian dapat disebut sebagai jaringan penelitian PAK. Apabila hal itu dapat diwujudkan, maka dapat disinergikan dengan jaringan penelitian serupa yang telah tumbuh dan berkembang, baik antar perguruan tinggi maupun antar satuan penyelenggara penelitian lain. Di samping itu, akan dapat dirancang besaran kegiatan penelitian kebijakan yang mencakup, antara lain: (1) Pengembangan sumber daya peneliti melalui pelatihan penelitian kebijakan; (2) Perumusan strategi dan agenda penelitian berjangka panjang; (3) pembahasan hasil penelitian terpilih dalam forum ilmiah dengan melibatkan unsur yang lebih luas; (4) penyebaran informasi hasil penelitian secara berkala, baik melalui jurnal maupun *news-letter*; dan (5) memperluas jaringan kerja sama antar instansi dan antar perguruan tinggi, dalam dan luar negeri.

Tentu saja, apa yang dikemukakan di atas akan dihadapkan kepada berbagai kendala, baik struktural maupun kultural. Ia akan dihadapkan kepada ruang lingkup wewenang dalam kesatuan birokrasi pemerintahan. Ia juga akan dihadapkan kepada kemampuan memposisikan diri secara setara dalam kegiatan bersama yang terkait dengan kedudukan permanen dalam struktur birokrasi kementerian. Ia juga akan dihadapkan kepada tradisi dan budaya penelitian dalam lingkungan perguruan tinggi dan satuan penyelenggara penelitian lainnya. Bahkan, ia, akan dihadapkan kepada kepentingan peraihan finansial dan okupasi dalam lingkaran birokrasi pemerintahan. Manakala semua pihak memahami anatomi kendala dan bersedia secara kebersamaan untuk memecahkan kendala tersebut, maka semua kendala yang dihadapi, bahkan mungkin akan dihadapi, akan dapat diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.

F. Penutup

Secara ideal, perhelatan ilmiah semacam forum ini diupayakan sebagai wahana untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Namun seringkali yang ditemukan adalah masalah baru, yang menyita perhatian, pikiran, dan waktu. Namun sangat beruntung, perhelatan ini diarahkan untuk menampung masalah, yang kemudian akan dipilih dan dijadikan sasaran penelitian. Dengan merujuk kepada uraian di atas, dapat ditemukan besaran masalah yang mencakup masalah penelitian dan masalah manajemen penelitian.

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa masalah penelitian di bidang PAK merupakan bagian dari masalah PAK. Sedangkan masalah PAK merupakan bagian dari masalah sosial. Sementara itu, masalah sosial merupakan matarantai masalah yang mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat bangsa yang sedang mengalami perubahan. Oleh karena itu, masalah penelitian PAK juga berhubungan dengan unsur-unsur di luar dirinya, baik yang dipandang sebagai penyebab maupun yang dipandang sebagai akibat. Atas perihal yang sama, dapat disusun tema-tema penelitian yang kemudian dapat dirumuskan menjadi masalah penelitian kebijakan (bahan, koherensi, pelaksanaan, dan capaian) di bidang PAK. Adapun tema-tema tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pandangan dan sikap tokoh masyarakat (umat) tentang pemilahan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
2. Pertimbangan aspek sosial dan budaya dalam perumusan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan.
3. Penerapan prinsip desentralisasi dalam perumusan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan.
4. Koherensi kebijakan pendidikan agama dan keagamaan dalam kesatuan sistem pendidikan nasional.
5. Aplikasi tujuan pendidikan agama dan keagamaan dalam satuan pendidikan tertentu.

6. Tingkat pencapaian tujuan pendidikan agama, dengan menggunakan kriteria, indikator, dan tolok ukur tertentu.
7. Faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan.
8. Upaya terpadu dan integral dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan.
9. Hubungan antara perkembangan masyarakat dengan perubahan kurikulum pendidikan agama.
10. Alokasi substansi pendidikan agama untuk mencapai tujuan pendidikan.
11. Ekstensitas dan intensitas substansi pendidikan agama.
12. Relasi antara substansi pendidikan agama dengan entitas kehidupan masyarakat.
13. Kompetensi dan derajat profesionalisme guru agama.
14. Jaminan kesejahteraan di kalangan guru agama.
15. Tradisi belajar di kalangan siswa dan santri.
16. Harapan siswa terhadap penyelenggaraan pendidikan agama.
17. Daya dukung sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan.
18. Partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan.
19. Peranserta satuan pendidikan keagamaan dalam mengatasi dampak perubahan sosial.
20. Upaya meningkatkan kualitas satuan pendidikan keagamaan.
21. Perkembangan pendidikan keagamaan dalam lingkungan pesantren.
22. Perubahan pandangan orang tua terhadap penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah dan madrasah.

Rangkaian tema penelitian di atas, sebagian dirujuk dari kebijakan nasional di bidang PAK, tanpa dilengkapi oleh kebijakan yang lebih rendah. Demikian pula tema-tema tersebut belum dihubung-

kan dengan penelitian kebijakan yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, penajaman tema yang kemudian diformulasikan menjadi masalah penelitian masih memerlukan seleksi dan verifikasi.

Akhirnya, apa yang dikemukakan di atas mungkin merupakan gagasan yang laik untuk diaplikasikan. Atau, mungkin hanya sekedar mimpi seorang akademisi. Namun, mimpi itu pun masih mempunyai manfaat apabila kita pandai menakwilkannya. *Wa 'l-Lāh A'lam bi al-Shawāb.*

Daftar Pustaka

Anonimus. 1999. *Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1999-2004*. Jakarta: Tamita Utama.

Cik Hasan Bisri. 1997. "Analisis Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan". Makalah disampaikan dalam *Latihan Penelitian Jaringan Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bogor* tanggal 22 Agustus 1997 di Tugu, Bogor. Bandung: Jaringan Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat.

Coleman, William and Cressey, Donald R. 1984. *Social Problems*, Second Edition. New York: Harper & Row, Publisher.

Epton, S. R., Payne R. L., Pearson A. W. 1991. *Manajemen Riset Antardisiplin* (Diterjemahkan oleh Tjun Surjaman), Cetakan Pertama. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Husni Rahim. 2001. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama. Ciputat: Logos Wacana Ilmu.

Manfred Oepen. 1988. "Memecahkan Monopoli Pengetahuan: Ideologi dan Metodologi dari Riset Aksi Partisipatori", dalam Yusuf Kassam dan Kemal Mustafa (Penyunting), *Riset Partisipatori: Riset Alternatif* (Diterjemahkan oleh Umar Basalim dkk.), Ce-

takan Pertama, hlm. 112-127. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.

McIver, Robert M., and Page, Charles H. 1957. *Society: An Introductory Analysis*. New York: Rinehart and Company, Inc.

Neuman, W. Lawrence. 2000. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Fourth Edition. Boston: Allyn & Bacon.

Samodra Wibawa dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Cetakan Pertama. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soumelis, Constantin G. 1983. *Project Evaluation: Methodologies and Techniques,* Second Impression. Paris: UNESCO.

Steenbrink, Karel A. 1974. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, Cetakan Pertama. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1974. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Cetakan Pertama. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

Wilson, Bryan R. 1993. "Secularization", in Mircea Eliade (Editor-in-Chief), *The Encyclopedia of Religion*, Volume 13, Complete and Unabridged Edition, pp. 159-165. New York: MacMillan Publishing Company.

Yin, Robert K. 1987. *Case Study Research: Design and Methods*, Sixth Printing. Baverly Hills, London, New Delhi: Sage Publications.

PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN NILAI-NILAI KEBERAGAMAAN
Studi di Madrasah Aliyah Darul Arqam Garut

Dr. Dewi Sadiah

A. Pendahuluan

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan proses pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kepribadian sehat yang dimiliki manusia secara utuh dan menyeluruh. Orang-orang dengan kepribadian yang sehat dapat menyesuaikan dirinya dengan baik dan dapat mengaktualisasikan dirinya (*self actualizing*). Kondisi kepribadian sehat menurut Najati (2005: 379) kepribadian normal menurut Islam ialah kepribadian yang berimbang antara tubuh dan roh serta memuaskan kebutuhan-kebutuhan, baik untuk tubuh maupun roh. Kepribadian normal adalah memperhatikan tubuh, kesehatan tubuh, dan kekuatan tubuh serta memuaskan kebutuhannya dalam batas-batas yang telah digariskan syariat. Dalam waktu yang bersamaan juga berpegang teguh pada keimanan kepada Allah Swt., menunaikan peribadahan, menjalankan segala apa yang diridhai-Nya dan menghindari semua hal yang dapat me-

ngundang murka-Nya. Jadi, pribadi yang dikendalikan hawa nafsu dan syahwatnya adalah pribadi yang normal atau sehat.

Faktor utama dalam penilaian suatu kepribadian, dalam pandangan Al-Quran, adalah akidah dan ketakwaan, sesuai dengan firman Allah dalam Q. S. Al-Hujurat [49]: 13 yang artinya: "...Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Mahateliti." Sementara karakteristik kepribadian sehat (*healthy personality*) pandangan Hurlock (Yusuf & Nurihsan, 2007: 12) adalah ditandai dengan: 1. Mampu menilai diri secara realistik, 2. Menilai situasi secara realistik, 3. Menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, 4. Menerima tanggung jawab, 5. Kemandirian (*autonomy*), 6. Dapat mengontrol emosi, 7. Berorientasi tujuan, 8. Berorientasi keluar, 9. Penerimaan sosial, 10. Memiliki filsafat hidup, dan 11. Berbahagia.

Sementara itu, menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Rumusan tujuan pendidikan tersebut, yang dimaksud manusia seutuhnya yaitu manusia yang berakhlak mulia, berkepribadian sehat dapat diwujudkan apabila kepada yang bersangkutan atau peserta didik diberikan pendidikan agama yang merupakan bagian dari program pendidikan umum.

Sedangkan manusia yang utuh menurut Mujib (1999: 125), yaitu "Manusia utuh atau kepribadian yang utuh adalah gabungan antara dimensi-dimensi ragawi (biologis), kejiwaan (psikologis), lingkungan (sosiokultural), dan ruhani (spiritual) yang memandang manusia dalam kesatuan utuh. Pandangan Najati (2005: 426) terkait hal

tersebut khususnya adalah agama Islam, membantu kita memberikan bukti-bukti keberhasilan keimanan kepada Allah dalam menyembuhkan jiwa dari berbagai penyakit, mewujudkan perasaan aman dan tenteram, mencegah perasaan gelisah, serta berbagai penyakit kejiwaan yang adakalanya terjadi". Nilai keberagamaan terdiri dari dua kata yaitu kata nilai dan keberagamaan. Nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan (Departemen Pendidikan Nasional, 2001: 783). Sedangkan keberagamaan yaitu perihal beragama dalam beribadat. Keagamaan yaitu yang berhubungan dengan agama; agama ialah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan), peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa, tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya (Departemen Pendidikan Nasional, 2001: 12). Jadi nilai keberagamaan yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu kegiatan menanamkan nilai tauhid, iman, Islam, ihsan, takwa, ikhlas, tawakkal, syukur, dan sabar (Madjid, 2000: 98-100). Dilihat dari segi tujuan yang hendak dicapai pengembangan model pendidikan nilai-nilai keberagamaan dalam membina kepribadian sehat diarahkan untuk membina perilaku anak yang lebih baik, menarik, menyenangkan hati, shaleh, menurut tuntunan Islam, yang memancarkan iman dan takwa kepada Allah Swt.

Jika melihat sejarah pendidikan Islam yang paling awal, bahwa sistem pendidikan Rasulullah Saw. belum mengeluarkan pengakuan kelulusan melalui gelar atau ijazah. Nilai tertinggi murid-murid Rasulullah Saw., terletak pada tingkat ketakwaan. Ukuran takwa terletak pada akhlak dan amal shaleh yang dilakukan oleh masing-masing shahabat. Dengan demikian *output* sistem pendidikan Rasulullah Saw. adalah orang yang langsung beramal, berbuat dengan ilmu yang didapat karena Allah semata, kemudian dikembangkan oleh para shahabat, maka lahirlah generasi Islam terbaik (Antonio, 2007: 185). Di Dar al-Arqam, Rasulullah mengajar tentang wahyu yang diterimanya kepada kaum muslimin dengan cara menghafal, meng-

hayati, dan mengamalkan ayat-ayat suci yang diturunkan kepadanya (Munir, 1998: 198). Pandangan Antonio (2007: 187-193) bahwa tuntunan Muhammad Saw tentang sifat-sifat guru yang menjadi indikator kepribadian sehat yaitu: Ikhlas, jujur, adil, akhlak mulia, tawadhu, berani, jiwa humor yang sehat, sabar dan menahan amarah, menjaga lisan, sinergi dan musyawarah. Sedangkan ditelaah dari sudut kajian pendidikan umum, nilai-nilai perilaku keberagamaan dalam membina kepribadian sehat merupakan salah satu kajian yang esensial, karena lebih banyak mengarah kepada terciptanya pengembangan atau pembinaan kondisi kedewasaan dan kemandirian peserta didik, agar kehidupannya menjadi tenang, bahagia, harmonis, memiliki nilai-nilai yang prinsipil bagi kemanusiaan, dan kemanusiawian dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Kejadian yang sering muncul dalam tindakan siswa, yang bertolak belakang dengan nilai-nilai keberagamaan yang dididikkan, seperti timbulnya peralihan nilai bagi peserta didik menimbulkan persoalan tersendiri yang mengakibatkan munculnya gejala-gejala yang tidak diharapkan berupa merebaknya kemerosotan moral dewasa ini di kalangan remaja. Oleh karena itu, guna menghindari semakin rusaknya komitmen berkepribadian sehat, maka diperlukan pengembangan model pendidikan nilai-nilai keberagamaan dalam membina kepribadian sehat siswa yang bisa diimplementasikan di sekolah, masyarakat, dan keluarga berdasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:

1. Peranan guru agama terhadap pengembangan model pendidikan nilai-nilai keberagamaan dalam membina kepribadian sehat, sangat mengkristal karena menekankan kepada perwujudan sikap, perilaku dan pribadi yang sehat, akhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Allah Swt.
2. Orang tua siswa tidak ingin anaknya nakal, oleh karena itu anaknya dimasukan ke sekolah yang ada di lingkungan pesantren. Menurut Tafsir (2008: 10) orang tua tidak ingin anaknya

nakal sekurang-kurangnya ada empat alasan: a. Remaja nakal itu kesehatan fisiknya terancam; b. Remaja nakal itu prestasi akademiknya akan menurun; c. Remaja nakal itu mahal; d. Orang tuanya malu bila punya anak nakal. Ternyata tidak ada orang tua yang ingin punya anak nakal, karena malu, sekalipun orang tuanya nakal. Kenakalan anak remaja yang berbentuk tawuran menurut Hawari (1999: 77) bahwa tawuran, penyalahgunaan obat terlarang, dan tindakan kriminal di kalangan remaja, disebabkan tidak adanya komunikasi yang baik antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sehingga adanya nilai-nilai keberagamaan yang diajarkan di sekolah sebagai suatu konsep yang ideal, berhadapan dengan realita di masyarakat yang bertolak belakang dengan eksistensi pemahaman keberagamaan siswa di sekolah. Dalam keadaan demikian lahirlah sikap-sikap tertentu di kalangan siswa yang mencerminkan kegalauan nilai dan kebingungan arah, serta adanya kesenjangan antara pendidikan keagamaan yang diajarkan di sekolah dengan tingkat pemahaman nilai-nilai keberagamaan peserta didik.

3. Kepribadian sehat erat kaitannya dengan kepribadian utuh berarti kepribadian mantap dan matang (dewasa) yang merupakan salah satu tujuan dari pendidikan umum. Sedangkan tujuan dari pendidikan nilai untuk membantu peserta didik agar memahami, menyadari, dan mengalami nilai-nilai serta mampu menempatkannya secara integral dalam kehidupan (Mulyana, 2004: 119). Untuk sampai pada tujuan dimaksud, tindakan-tindakan pendidikan yang mengarah pada perilaku yang baik dan benar perlu diperkenalkan oleh para pendidik.
4. Ketertarikan adanya keberhasilan yang dilakukan oleh para pengelola Ma'had Darul Arqam Muhammadiyah Daerah Garut Jawa Barat, menunjukkan sekolah yang berbeda dengan sekolah umum yang ada di lingkungan pesantren lainnya. Kebijakan Ma'had Darul Arqam Garut, sebagaimana yang ada dalam atur-

an penyelenggaraan pendidikan, diarahkan untuk terciptanya (sukses belajar mengajar, sukses berprestasi, dan berprestise, sukses kaderisasi organisasi) kehidupan dan keadaan yang tertib, aman, nyaman, sejahtera, dan memberi arahan bagi terciptanya situasi tertentu terhadap lembaga pendidikan, (Ma'had Darul Arqam, 2008: 6). Penyediaan sarana pendidikan dan fasilitas sekolah ditata sejalan dengan visi dan misi yang diemban sekolah di antaranya menyelenggarakan dan mengembangkan model-model pembinaan dan pengkaderan serta kegiatan dakwah Islamiah, sehingga memberikan iklim tersendiri dalam seluruh konteks pendidikannya.

Berdasarkan uraian di atas, dalam tulisan ini difokuskan pada beberapa aspek di Madrasah Aliyah Darul Arqam Garut pada tahun ajaran 2009/2010. Pertama, berkenaan dengan pencapaian tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh guru agama dalam membina kepribadian sehat para siswa di sekolah. Kedua, metode yang digunakan oleh para guru agama dalam membina kepribadian sehat di kalangan para siswa. Ketiga, kurikulum yang digunakan oleh para guru agama dalam membina kepribadian sehat di kalangan para siswa. Keempat, pengembangan model pendidikan nilai-nilai keberagamaan dalam membina kepribadian sehat terhadap perubahan perilaku siswa di sekolah.

B. Metode Penelitian

Adapun subyek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi Madrasah Aliyah Darul Arqam Garut tahun pelajaran 2009/2010. Subyek yang ditentukan untuk memperoleh informasi melalui wawancara sebagai berikut:

1. Dua orang kepala sekolah, (ASk & Hk) yang secara struktur hierarkis sekolah menduduki pimpinan sekolah dengan tataran manajemen sekolah (*middle management*).

2. Satu orang wakil kepala sekolah, (ARwk) yang memegang bidang kepesantrenan dan kurikulum.
3. Tiga orang guru (ARg, NHg, dan Yg), sebagai pengajar guru agama dan satu di antara mereka (ARg) merangkap jabatan sebagai bidang kesiswaan.
4. Dua orang guru (DSg) dan DHg) sebagai guru BP.
5. Tiga orang guru (RDg), ESg), dan (NHg), sebagai guru pembina dan seorang di antara mereka (NHg) merangkap jabatan sebagai guru agama di Darul Arqam Garut.
6. Sembilan siswa masing-masing 3 orang (ESs), AIs), RFs) dari kelas X, 3 orang (AUs), (DMs), (FAs) kelas XI, dan tiga orang (BMs), (CEs), (VDs) kelas XII. Dari sembilan siswa yang dijadikan subyek penelitian, enam orang (AIs), RFs), (AUs), (DMs), (BMs), (CEs), yang aktif dalam mengikuti pelajaran agama dan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dan tiga orang (ESs), (FAs), (VDs), yang tidak aktif.

Penentuan jumlah tersebut didasarkan atas hasil observasi permulaan dan hasil wawancara silang dengan kepala sekolah. Cara demikian ditujukan agar data yang diperoleh lebih proporsional. Adapun keterangan siswa, selain memberikan masukan mengenai motivasi dalam perubahan perilaku, ketaatan dalam beribadah, keyakinan dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., juga telah memberikan kontribusi data yang cukup kepada peneliti, dalam mengecek kebenaran tentang pembinaan kepribadian sehat yang dilakukan oleh guru agama, kepala sekolah dan wakilnya, guru BP, dan pihak yang terkait baik secara kolektif maupun secara individual.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: pengamatan, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Sedangkan data dianalisis melalui: “a. reduksi data, b. display data, c. kesimpulan dan verifikasi” (Kahmad, 2000: 102-103).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tujuan pendidikan

Tujuan pendidikan dalam tulisan ini ialah yang diharapkan oleh guru agama membina kepribadian sehat siswa di sekolah dapat diinterpretasikan bahwa upaya guru agama telah diwarnai oleh faktor-faktor internal dan faktor eksternal. Segala upaya yang dilakukan oleh guru agama (ARg, ESg, dan NHg) dalam membina kepribadian sehat dan akhlak yang baik, sudah mengarah kepada pencapaian satu tujuan yaitu manusia memiliki kepribadian utuh atau insan yang sehat, dalam arti selamat di dunia dan di akhirat. Adapun upaya yang dilakukan oleh guru agama berupa pembinaan dalam melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah yang hukumnya wajib (shalat subuh, dzuhur, ashar, magrib, dan isya secara berjamaah), maupun ibadah yang hukumnya sunat (shalat tahajud, puasa hari Senin dan Kamis, mendengarkan adzan dengan khidmat, mengucapkan salam, berdoa, tadarus al-Quran, dan tahfizh ayat-ayat al-Quran). Dalam mencapai tujuan tersebut, mereka lakukan berulang-ulang dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen yang cukup kuat, walaupun dengan cara pendekatan yang berbeda dalam menampilkan perilakunya, akan tetapi tujuan tetap menjadi harapan bersama sebagai sesuatu yang ingin dicapai. Pembinaan keperibadian sehat terhadap siswa yang dilakukan oleh guru agama, merupakan alat untuk membantu mereka dalam melaksanakan tata cara hidup sehari-hari, yang mencakup *hablum minallah* dan *hablum minannas*, akhirnya tercipta kehidupan yang damai, selalu berusaha menempatkan diri dalam lingkungan baik di sekolah maupun masyarakat, sehingga disenangi dalam pergaulan sehari-hari.

Hasil wawancara dengan tiga orang guru agama (ARg, NHg, dan ESg) di Madrasah Aliyah Darul Arqam Garut menunjukkan bahwa pembinaan keperibadian sehat siswa di sekolah, agar semua siswa mempunyai tujuan hidup yang Islami sebagai pedoman hidup di dunia dan bekal hidup kelak di akhirat, berakhlak yang terpuji,

beriman dan bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, sopan dalam berbicara, santun dalam bertindak, menghargai teman sebaya dan sayang kepada yang lebih muda. Setiap perilaku santun yang dilakukan seseorang dicatat sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah (Sauri, 2006: 77). Kemudian kalau dikaitkan dengan pengembangan model pendidikan nilai-nilai keberagamaan dalam membina kepribadian sehat, tujuan pendidikan pada dasarnya ditentukan oleh pandangan hidup (*way of life*) orang yang mendesainnya, yaitu menjadi manusia terbaik menurut pandangan Allah (Tafsir, 2006: 75).

Adapun menurut ASk dan Hk bahwa tujuan pendidikan adalah dengan menyadari potensi yang dimiliki manusia Ma'had Darul Arqam Garut berusaha untuk memaksimalkan potensi siswa dan membimbingnya agar menjadi anak yang shaleh dan insan yang dicintai Allah Swt. Kemudian tentang ketaatan kepada Allah terungkap sebagai tujuan guru agama dalam membina kepribadian sehat atau akhlak siswa. Adapun pribadi sehat menurut Kusuma (2009) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, di mana kesehatan mencakup empat aspek, sebagai berikut: aspek fisik, aspek mental (jiwa), sosial, dan aspek ekonomi http://afand.abatasa.com/post/detail/2456/pengertian-sehat11Mei2009. Tujuan ini, salah satunya dapat direpleksikan dalam perilaku guru pembina ketika mengajak siswa untuk melaksanakan shalat berjamaah tepat waktu dan bimbingan baca tulis al-Quran lengkap dengan penafsirannya secara sungguh-sungguh. Makna yang terkandung dari kegiatan guru dan siswa tersebut adalah: Makna nilai ketaatan, nilai kesungguhan dan nilai kejujuran. Nilai kesungguhan dan nilai ketaatan terungkap pada saat mngucapkan dan melakukan bacaan yang sudah diatur dan dicontohkan dalam shalat. Untuk menyatakan kesungguhan dalam shalat perlu adanya pengucapan bacaan shalat yang benar, penghayatan, menghadirkan Allah dalam perasaan sedang shalat seolah-olah tampak berhadapan sedang

memperhatikan. Adapun nilai kejujuran terungkap dengan melakukan semua aturan dalam shalat tidak mengurangi dan tidak melewati petunjuk pelaksanaan shalat yang dimulai dari *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan salam. Selain nilai kejujuran guru agama juga berharap agar siswa dalam melakukan semua kegiatan di luar shalat pun akan bersikap jujur, berdisiplin dengan penuh keikhlasan.

2. Metode yang Digunakan

Meode yang digunakan oleh guru agama dalam membina kepribadian sehat yaitu: metode keteladanan untuk mempengaruhi siswa dengan penampilan guru agama dan guru umum sebagai sosok yang patut diteladani. Mereka secara tidak langsung telah membimbing siswa dalam mengaplikasikan pendidikan nilai keberagamaan dalam membina kepribadian sehat dengan baik melalui: Teladan Rasulullah Saw., disiplin waktu, ketaatan beribadah, kebersihan, keindahan penataan fisik sekolah, penampilan berpakaian, perhatian, nasihat yang baik, dan pembiasaan. Yang demikian itu, mereka lakukan agar bisa diteladani oleh siswa untuk melakukan hal yang baik. Sebagaimana Said (1995: 151) bahwa kecintaan yang tulus terhadap Rasulullah Saw. selaku guru dan pendidik dengan dilandasi oleh petunjuk Allah Swt., untuk mencintai dan mentaatinya, para sahabat menjadi orang-orang yang sangat berambisi untuk mengikuti jejak langkahnya sang panutan Rasulullah Saw.

Abu Bakar Ash-Shiddiq ra berkata: ”Aku tidak meninggalkan sesuatu pun. Semua yang dikerjakan Rasulullah Saw., aku mengerjakannya, aku takut akan terpeleset jika meninggalkan sesuatu dari yang pernah beliau perintahkan”. Pandangan Umar ketika menatap Hajar Aswad berkata: “Sebenarnya kamu hanyalah batu yang tidak mendatangkan mudharat dan tidak mendatangkan manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah Saw. menciummu, aku tidak akan menciummu”, kemudian ia menciumnya. Dan ketika ia berada di Dzul Hulaifah mengerjakan shalat dua rakaat lalu berkata: “Aku

mengerjakannya seperti aku lihat Rasulullah Saw. mengerjakannya".

Adapun metode keteladanan yang dilakukan guru selalu disesuaikan dengan konteksnya. Misalnya, sewaktu suara adzan berkumandang semua siswa mendengarkan dengan khidmat sampai selesai. Selanjutnya pada saat istirahat guru dan para siswa melaksanakan shalat berjamaah subuh, dzuhur, ashar, magrib, dan isya di masjid sambil mendengarkan ceramah yang dilaksanakan oleh para siswa secara bergiliran. Ketika siswa ada masalah maka segera diselesaikan sampai tuntas baik di sekolah, di asrama, maupun di masjid, dan lainnya. Dengan demikian siswa yang tidak melaksanakan shalat berjamaah diberi sanksi sebelumnya diberi peringatan dulu, akhirnya siswa yang belum melaksanakan shalat berjamaah merasa sadar dan terketuk hatinya untuk segera melaksanakan shalat berjamaah. Selain keteladanan seperti di atas, semua siswa di saat masuk dan keluar meninggalkan kelas selalu mengucapkan salam. Keteladanan lain terlihat dari perilaku guru agama yang selalu datang lebih awal atau tepat waktu, dengan pakaian dan penampilan rapi serta berlaku adil. Begitu juga peserta didik mencontoh apa yang dikerjakan guru dalam menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Upaya lain dalam menanamkan kedisiplinan diterapkan pada kegiatan keberagamaan terutama mengenai waktu, sering diungkapkan ARg yaitu pandai-pandailah menggunakan waktu.

Adapun peraturan tata tertib dalam menjaga kesopanan yang dibuat Madrasah Aliyah Darul Arqam Garut dilaksanakan dengan kerelaan hati yang ikhlas. Sementara metode guru agama melalui nasihat yang baik untuk mempengaruhi siswa menjadi manusia yang berkepribadian sehat, ternyata dilakukan tidak hanya terbatas dalam konteks rutinitas kegiatan yang sudah berlabelkan agama saja, akan tetapi dilakukan juga pada setiap kesempatan dalam segala bentuk kegiatan kehidupan baik dalam situasi formal di kelas, di masjid, di asrama, atau di luar kelas. Dengan cara dan situasi demikian guru mata pelajaran agama dan guru mata pelajaran lainnya

memberikan keteladanannya sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi pengembangan pribadi siswa yang berkepribadian sehat. Dalam mempertahankan nilai-nilai religius siswa di sekolah, melalui nasihat yang baik ternyata dilakukan secara menyeluruh di antaranya: mencakup seluruh kondisi kehidupan, aneka peristiwa alam semesta, dan fenomena kekuasaan-Nya serta karunia Allah Swt. Guru agama (ARg) terbiasa memberikan nasihat diselingi dengan humor dan tanya jawab, ketika melihat muridnya merasa jenuh dengan pelajaran yang banyak atau murid yang tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.

Dari pengamatan di lokasi penelitian, nilai dasar yang hendak dicapai adalah nilai ketuhanan, pemberian nasihat yang baik lebih dipahami sebagai ikhtiar untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan pribadi manusia yang berkepribadian sehat, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Cara pemberian nasihat yang baik dimaksudkan juga untuk mengingatkan kembali kepada para siswa tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai muslim sejati. Dengan cara tersebut guru agama bermaksud mengajak siswa agar melakukan apa yang dipesankannya. Bukan hanya sekedar membina akhlak dan perilaku siswa saja, melainkan juga untuk membina suasana nilai kebersamaan dalam kehidupan di sekolah, menampakkan kepedulian guru terhadap permasalahan yang dihadapi siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan disiplin dan bertanggung jawab sebagai perwujudan sosok manusia yang berkepribadian sehat yang insan kamil. Perhatian guru mata pelajaran agama dan guru mata pelajaran umum dengan cara melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa tidak hanya bermakna komunikasi lisan semata, tetapi mengandung makna yang lebih penting yaitu adanya perhatian dan kepedulian guru yang sangat mendasar dengan mengingatkan kembali kepada siswa akan tugas-tugas yang mereka emban sebagai hamba Allah yang selalu beribadah kepada-Nya. Dengan bertanya, guru agama kepada sis-

waya berarti telah mengingatkan siswa agar selalu ingat tugas dan kewajiban selaku siswa mengetahui apa yang menjadi permasalahan yang sedang dihadapi para peserta didiknya, sehingga dapat membantu dan mengatasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahannya. Atas dasar perhatian dan pemahaman terhadap keadaan dan latar belakang yang menjadi persoalan siswa tindakan guru akan lebih terarah dan tepat sasaran dalam memecahkan persoalan yang dimiliki siswa. Melalui perhatian, berarti para guru telah saling menasehati, mengingatkan, dan mentaati suatu kebenaran dan kesabaran yang merupakan wujud kepedulian sosok manusia yang berkepribadian sehat, Q.S. al-Ashr/103: 3.

Dengan berbagai kegiatan yang dilakukan guru agama baik dalam konteksnya yang berkenaan langsung dengan nilai-nilai akhlak atau kepribadian sehat siswa dan cara mengkaitkannya dengan nilai-nilai akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap manusia dan lingkungannya, jelas memperlihatkan bahwa pembiasaan yang dilakukan guru agama dan guru umum sangat mempengaruhi pertumbuhan perilaku siswa dari kurang baik menjadi baik, dan dari baik menjadi lebih baik. Keteguhan pribadi guru agama dan guru umum telah mendorong mereka untuk menciptakan pembiasaan dalam bentuk realisasi program kegiatan ekstrakurikuler keberagamaan yang ditindaklanjuti oleh para siswa. Dalam kegiatan tersebut guru agama tampak memasilitasi kesempatan siswa untuk berbuat sesuai dengan kapasitasnya, namun tetap dalam perhatian sebagaimana mestinya. Dalam situasi seperti tersebut di atas, pembiasaan yang dilakukan guru agama akan menjadi titik awal perbuatan siswa untuk lebih meningkatkan: Ketaatan terhadap Allah, penampilan berpakaian yang rapi dan bersih, kedewasaan, kemandirian, kekeluargaan yang harmonis, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, tatakrama dan kesopanan. Perubahan tersebut terlihat pada siswa kelas XI dan kelas XII, sedangkan pada kelas X masih kurang per-

ubahannya yang pada akhirnya akan menjadi kebiasaan dalam perilaku siswa yang kepribadian sehat dan berakhlak mulia.

3. Kurikulum yang Digunakan

Kurikulum yang digunakan guru agama dalam membina kepribadian sehat yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Ma'had Madrasah Aliyah Darul Arqam Garut yang memiliki kurikulum khusus pesantren. Kurikulum yang digunakan oleh guru agama dilihat dari substansinya lebih berupaya dalam pembinaan akhlak yang mulia dan kepribadian sehat serta kesetiakawanan sosial siswa. Seperti yang disampaikan oleh ARg salah satu upaya sekolah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, akhlak siswa yang baik, yang memiliki kepribadian sehat agar lebih mampu dan teraplikasi dalam kehidupan nyata adalah melalui bimbingan agama di pesantren, sekolah, keluarga, masyarakat, dan mengembangkan spiritualitas melalui doa serta amalan-amalan nyata dalam bentuk aksi sosial.

Dalam mencapai keseimbangan antara pelajaran-pelajaran agama dan pelajaran-pelajaran umum keduanya sama-sama dibelajarkan untuk mengembangkan pendidikan dan pengajaran secara komprehensif yang mengintegrasikan sains religious (*al-'ulum al-naqliyah*) dan sains rasional (*al-'ulum al-aqliyah*). Menyelenggarakan pendidikan khusus kepesantrenan dalam penguasaan *al-'ulum al-naqliyah* melalui pendidikan bahasa Arab, bahtsul kutub, dan kemuhammadiyahan. Menurut ARwk, dalam melaksanaan kurikulum yang banyak, tentu memerlukan pengaturan waktu belajar yang efektif dan efesien, dengan ketentuan murid atau santri belajar setiap hari dimulai pada pukul 05.00 pagi sampai dengan pukul 09.00 malam, istirahat (untuk makan siang yang telah tersedia di sekolah, shalat berjamaah pada waktu shubuh, dhuhur, ashar, maghrib, dan isya, ditambah shalat tahajjud dan sunah lainnya, serta kegiatan lain yang langsung dibimbing oleh guru pembina. Setiap hari sebelum shalat berjamaah para santri selalu bertadarus al-Quran. Pada jam

pertama sekolah dimulai biasanya diawali dengan pembacaan ayat suci al-Quran secara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang siswa dan lamanya berdoa antara 5 s.d 10 menit. Sedangkan dalam penyempurnan tata tertib sekolah dengan menambahkan beberapa point yang bernilai Islami, seperti membiasakan berpakaian sopan dan menutup aurat khususnya bagi santri perempuan dan diusahakan siswa datang ke ruangan kelas tepat waktu. Bagi siswa yang berprestasi diberikan *reward* berupa beasiswa dan hadiah-hadiah lainnya dan bagi siswa yang melanggar aturan ma'had diberikan hukuman (*punishment*). Para siswa dibiasakan untuk memberikan sedekah semampunya kepada orang yang tidak mampu. Hal tersebut karena adanya itikad baik dari para pelaku pendidikan. Secara formal menurut ARg, pelaksanaan kurikulum yang dijadikan acuan kebijakan oleh guru agama yaitu: KTSP Ma'had Madrasah Aliyah Darul Arqam Garut. Pelaksanaannya, dengan maksud untuk mewujudkan manusia yang berkepribadian sehat, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., sebagaimana yang tertera dalam tujuan Pendidikan Nasional. Kemudian ARg, menyatakan pula tindakannya didorong oleh rasa tanggung jawab dan perintah agama.

Strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru agama bersama guru umum, pada kelas X dan XI yaitu agar bisa mengembangkan pengajaran sesuai dengan harapan dan arah tujuan sekolah namun pada siswa kelas XII guru agama secara optimal melakukan upaya pencapaian target kurikulum dengan jalan bimbingan belajar intensif mengikuti kegiatan bimbingan belajar (bimbel) dengan Primagama, Ganesa Operation, dan Nurul Falah adapun materinya yang di-UN-kan dengan maksud untuk mempersiapkan peserta didik ke jenjang Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, orientasi dari pelaksanaan kurikulum pesantren menurut ARwk, adalah untuk memodifikasi model pesantren sebagai suatu pendidikan yang memiliki arah agar manusia sebagai makhluk yang diberikan potensi akal, dapat mengembangkan akhlak yang mulia dan memiliki kepribadian sehat,

melalui pendidikan nilai-nilai keberagamaan secara formal dengan mempertimbangkan masalah situasi dan kondisi sosial masyarakat untuk mengoptimalkan mutu lulusan sebagai insan yang sehat, beriman dan bertakwa kepada Allah Swt.

Eksistensi guru agama dan guru Pembina dalam meningkatkan kualitas siswa melalui kebijakan kurikulum yang mengacu kepada tujuan Pendidikan Nasional. Secara operasional wawasan kurikulum tersebut dilaksanakan agar materi yang diajarkan di Madrasah Aliyah Darul Arqam Garut adalah untuk mencapai harapan prestasi akademis yang optimal. Namun menurut ASk, dalam pelaksanaannya kurikulum Madrasah Aliyah Darul Arqam Garut lebih ditekankan pada aplikasi nilai-nilai keberagamaan dalam kehidupan siswa sehari-hari, di samping menguasai sejumlah materi-materi yang ada pada kurikulum. Dalam membina dan memantau pelaksanaan program ekstrakurikuler yang dilakukan oleh guru pembina dengan tujuan agar siswa dalam kebebasan memilih kegiatan ekstrakurikuler tersebut tetap senantiasa terarah dan dalam bingkai akhlak mulia yang memiliki kepribadian sehat. Dilihat dari komposisi kecenderungan produk Madrasah Aliyah Darul Arqam Garut boleh dikatakan memiliki potensi yang mampu berkompetisi dengan lembaga pendidikan sederajat. Menurut ASk bahwa Madrasah Aliyah Ma'had Darul Arqam Garut telah memperoleh berbagai prestasi yang telah diraihnya baik dari cabang olah raga maupun prestasi akademik.

Adapun program ekstrakurikuler yang sangat mendukung terhadap kegiatan pendidikan nilai-nilai keberagamaan dalam membina kepribadian sehat ada tiga program kegiatan esktrakurikuler yaitu: a. IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) yang membawahi departemen Kajian dan Dakwah Islam, Kaderisasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia, Apresiasi seni budaya dan olahraga, dan lainnya; b. HW (*Huzbul Wathan)* atau pramuka, dan c.Tapak suci. Semua sivitas akademika menurut NHg perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak atau program yang satu dengan pogram lainnya, se-

hingga bisa saling melengkapi dalam berbagai hal. Sebagai muslim menurut NHg tindakan pembinaan kepribadian sehat atau akhlak terhadap siswa adalah manifestasi dari nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw. Dalam membina kepribadian sehat atau akhlak siswa di Madrasah Aliyah Darul Arqam Garut yang dilakukan oleh guru agama tidak lepas dari kurikulum Ma'had Darul Arqam yang bersifat "Berimbang" dan "Terpadu" (Ma'had Darul Arqam, 2008: 18). Kegiatan ekstrakurikuler berperan penting dalam mengembangkan potensi santri dalam hal kepemimpinan, kemandirian, kedewasaan, ketaatan, kekeluargaan, kerja sama, penampilan berpakaian yang rapi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan.

4. Pengembangan Model Pendidikan

Pengembangan model pendidikan nilai-nilai keberagamaan dalam membina kepribadian sehat terhadap perubahan perilaku siswa yang ditampilkan oleh guru agama dalam wujud ucapan, pikiran, dan tindakan telah membawa hasil yang tampak dalam perilaku keseharian siswa di lingkungan sekolah. Hal tersebut membuktikan bahwa sosok guru agama telah berhasil dalam membangun iklim yang kondusif bagi siswa dalam mengembangkan dirinya dan memupuk semangat beragama. Dari penampilan guru agama dan guru umum yang demikian adanya, maka lahir perilaku siswa yang menurut hasil pengamatan mereka selain melakukan ibadah-ibadah yang wajib (shalat berjamaah subuh, dzuhur, ashar, magrib, dan isya) juga ibadah sunat seperti shalat sunat rawatib, shalat tahajud, duha, puasa hari Senin dan Kamis, dan lainnya yang secara moralitas dapat dijadikan indikator penunjuk tingginya kesadaran beragama. Tetapi ada kekurangan hasil wawancara dengan guru pembina (AgP) tentang nilai-nilai yang ada dan terjadi di Madrasah Aliyah ternyata kaya akan nilai-nilai. Namun, nilai disiplin dan kesadaran dirasa masih kurang contoh kegiatan shalat berjamaah bagi santri putra belum seluruhnya melaksanakan tetapi kalau putri

hampir 95% berjamaah kecuali yang berhalangan, cara berpakaian seragam untuk santri putra masih belum rapi sedangkan putri kelihatannya kompak rapi, pemberian sanksi tidak begitu berat kalau yang tidak melakukan shalat berjamaah disanksi dengan tugas yaitu membaca dan menghafal al-Quran serta menulis ayat al-Quran dan lainnya. Jadi sanksi tidak membuat jera atau sadar pada sebagian siswa Madrasah Aliyah Darul Arqam.

Sementara contoh nilai kesadaran masih adanya santri yang suka menutupi kesalahan temannya, karena solidaritas nilai kebersamaannya sangat kuat. Ketika ada pemeriksaan tentang santri yang membawa hp (*handphone*), kalau ketahuan santri membawa hp oleh guru Pembina maka hpnya dikembalikan kepada orang tuanya selama satu tahun. Bahkan ada santri yang berbohong tidak bawa hp ternyata bawa. Seandainya nilai disiplin dan kesadaran dioptimalkan atau ditegakkan dengan tegas dalam sebuah pembinaan khususnya di Madrasah Aliyah Darul Arqam baik aturan maupun sanksi yang membuat jera atau sadar bagi santrinya, semua itu akan terpancar sifat *siddiq* dalam pribadi peserta didik dan menjadi keberhasilan yang luar biasa untuk masa depan siswa/santri sebagai kader ulama di masa yang akan datang. Mereka juga memiliki inisiatif untuk menggunakan peluang-peluang bagi semangat keislamannya dan terikat oleh tata tertib sekolah, seperti; berupaya dalam berpakaian yang menutupi aurat, mereka juga mengikuti kajian keislaman, dan organisasi kemuhammadiyahan. Kejadian tersebut dapat menunjukkan bahwa dalam diri siswa tumbuh ikatan beragama yang nilai perilakunya sesuai tatanan hukum wajib dalam pandangan Islam maupun wajib dalam pandangan budaya tata tertib sekolah. Berdasarkan wawancara dengan ASk dan Hk sebagai Kepala Madrasah Aliyah Darul Arqam Garut dengan banyak belajar menghasilkan pelbagai prestasi. Apalagi yang berprestasi di Darul Arqam Garut bisa mengikuti pertukaran siswa ke luar negeri (USA), beasis-

wa santri berprestasi dari Depag dan beasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri.

Adapun siswa MA Darul Arqam merasakan adanya sebuah perubahan dalam dirinya seperti, yang sebelumnya tidak biasa shalat Tahajjud jadi terbiasa shalat Tahajjud; apabila tidak shalat wajib merasa berdosa; dan siswa akhirnya bisa beradaptasi dengan baik sebagaimana tercantum dalam profil pendidikan nilai-nilai keberagamaan dalam membina kepribadian sehat.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa guru Madrasah Aliyah Darul Arqam berusaha memberikan yang terbaik kepada para siswa melalui; proses belajar mengajar yang menyenangkan dan berbagai kegiatan sekolah, agar para siswa menjadi pribadi yang *berakhlaq al-karimah,* dan mendapatkan ridha Allah semata. Akhirnya, siswa Madrasah Aliyah Darul Arqam dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah sehingga eksistensi siswa mengalami perubahan perilaku dengan baik. Maka perubahan perilaku siswa tersebut, dapat bercermin pada karakteristik Rasulullah Saw., yaitu: *siddiq*, *amanah, fatonah*, dan *tabligh* yang direalisasikan oleh para siswa rajin melaksanakan ibadah *mahdhah* maupun ibadah *ghair mahdhah*, sehingga melahirkan keshalehan sosial menuju insan yang sehat.

2. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah : a. Belum adanya pengembangan model pendidikan nilai keberagamaan dalam membina kepribadian sehat, maka penting untuk diterapkan di Madrasah Aliyah Darul Arqam Muhammadiyah Garut; b. Sistem pendidikan nilai keberagamaan dalam membina kepribadian sehat dapat dijadikan masukan bagi

SMA/SMK/MA dari aspek-aspek keunggulan yang terjadi di tempat penelitian. Semua pihak yang terkait di Madrasah Aliyah Darul Arqam Garut harus memiliki inisiatif dalam mencari alternatif kegiatan-kegiatan yang dapat dibakukan di sekolah, pengelolaan masjid dan kegiatan keagamaan lebih banyak dipercayakan kepada para siswa, serta sanksi atau *punishment* harus ditegakkan dengan tegas terutama nilai disiplin dan nilai kesadaran sehingga siswa sadar dan menyadari dengan benar akan kesalahannya.

Keberagamaan dalam membina kepribadian sehat ini, masih merupakan model yang belum diujicobakan di Madrasah Aliyah atau SLTA lainnya, tetapi dalam pelaksanaannya telah berhasil mewujudkan perubahan perilaku keberagamaan siswa di Madrasah Aliyah Darul Arqam Garut. Bagi peneliti lain, hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengembangan model pendidikan nilai-nilai keberagamaan dalam membina kepribadian sehat di sekolah dengan melibatkan beberapa sekolah dan hasilnya diujicobakan, sehingga adanya model terbaru yang bisa diterapkan di berbagai sekolah.

Daftar Pustaka

Al-Quran Terjemah Indonesia. 1999. Jakarta: Depag RI.

Antonio, M.S. 2009. *The Super Leader Super Manager*. Jakarta: Tazkia Publishing & Pro-LM Centre.

Departemen Agama. 1999. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Sari Agung.

Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Hawari, D. 1999. "Konsep Penanganan Perilaku Menyimpang Remaja", dalam Syahrudin. *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba.* Jakarta: BP Dharma Bakti dan Yayasan Penerus Nilai-nilai Luhur Perjuangan 1945.

Kahmad, Dadang. 2000. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: Pustaka Setia.

Kusuma, A. 2009. *Pengertian Sehat*. dari http://afand.abatasa.com/post/detail/2456/pengertian-sehat11Mei2009diunduh 20 Desember 2010.

Ma'had Darul Arqam. 2008. *Profil Sekolah Kader Muhammadiyah.* Ma'had Darul Arqam Garut: Restu Budaya Parahyangan.

Madjid, N. 2000. *Masyarakat Religius Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan.* Jakarta: Paramadina.

Mujib, A. 1999. *Fitrah & Kepribadian Islam: Sebuah Pendekatan Psikologis*. Jakarta: Darul Falah.

Mulyana, R. 2004. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.

Munir, G. 1998. *Al-Tarbiyyah al-Qiyadiyyah.* Kairo: Dar al-Wafa.

Najati, M.U. 2005. *Psikologi dalam al-Quran Terapi Quran dalam Penyembuhan Gangguan Kejiwaan*. Bandung: Pustaka Setia.

Said, M.R. 1995. *Rasulullah Saw Profil Seorang Pendidik.* Jakarta: Firdaus.

Sauri, S. 2006. *Pendidikan Berbahasa Santun.* Bandung: Genesindo.

____ 2006. *Filsafat Pendidikan Islam.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003*. Sistem Pendidikan Nasional.* Bandung: Fokusmedia.

Yusuf, S & Nurihsan, J. 2007. *Teori Kepribadian.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

PEMASARAN JASA PENDIDIKAN MADRASAH

Dr. Ara Hidayat

A. Pendahuluan

Persaingan dalam dunia pendidikan menjadi tidak dapat terelakkan lagi, banyak lembaga pendidikan yang ditinggalkan oleh pelanggannya, sehingga *merger* (penggabungan) menjadi solusi dari keterpurukan beberapa lembaga pendidikan. Kemampuan administrator untuk memahami pemasaran pendidikan menjadi prasyarat dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan lembaganya.

Komponen kunci yang dapat dijadikan bahan analisis untuk memahami konsep pemasaran pendidikan adalah konsep pasar. Pasar merup akan tempat bertransaksi berbagai komoditas yang dihasilkan produsen dengan sesuatu yang dibutuhkan, diinginkan dan diharapkan konsumen. Pemasaran ialah proses transaksional untuk meningkatkan harapan, keinginan dan kebutuhan calon konsumen sehingga calon konsumen menjadi terangsang untuk memiliki produk yang ditawarkan dengan mengeluarkan imbalan sesuai yang disepakati.

Pendidikan merupakan produk jasa yang dihasikan dari lembaga pendidikan yang bersifat *non profit*, sehingga hasil dari proses pendidikan kasat mata. Dalam konteks madrasah, madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang produknya adalah jasa pendidikan Islam. Untuk mengenal lebih dalam tentang pemasaran pen-

didikan berikut ini akan diulas mengenai pengertian dan konsep inti dari pemasaran.

B. Pengertian Pemasaran

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang melibatkan kegiatan-kegiatan penting yang memungkinkan individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan melalui pertukaran dengan pihak lain dan untuk mengembangkan hubungan pertukaran. Proses pemasaran sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, dan manajerial. Akibat dari berbagai pengaruh tersebut masing-masing individu atau kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk yang memiliki nilai komoditas (*cimodity values*). Dengan demikian pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain.

"Sesuatu" dalam konteks pemasaran dapat berupa barang atau jasa yang dibutuhkan oleh orang yang tepat, pada tempat dan waktu serta harga yang tepat, dengan promosi dan komunikasi yang tepat. Pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran.

Pemasaran saat ini tidak hanya berfungsi menyampaikan produk atau jasa hingga sampai ke tangan konsumen, tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif serta mempertahankan pe-

langgan yang sudah ada dengan tetap memegang prisip kepuasan pelanggan.

Unsur utama dalam pemesaran dapat diklasifikasikan menjadi tiga unsur utama, yaitu:

1. Unsur strategi persaingan (*mind share strategy*) meliputi:
   a. *Segmentasi pasar* yaitu tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Masing-masing konsumen ini memiliki karakteristik, kebutuhan produk, dan bauran pemasaran tersendiri.
   b. *Targetting,* yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki.
   c. *Positioning,* yaitu penetapan posisi pasar. Tujuannya adalah untuk membangun dan mengomunikasikan keunggulan bersaing produk yang ada di pasar ke dalam benak konsumen.
2. Unsur taktik pemasaran (*market share tactic*) meliputi:
   a. *Selling*, yang terkait dengan penjualan.
   b. *Differensiasi,* yang terkait dengan cara membangun strategi pemasaran di berbagai aspek perusahaan. Kegiatan membangun strategi pemasaran ini yang membedakan differensiasi yang dilakukan suatu perusahaan dengan perusahaan lain.
   c. Bauran pemasaran (*marketing mix*)*,* terkait dengan kegiatan mengenai produk, harga, promosi, dan tempat, yang lebih dikenal dengan sebutan 4P, yaitu *product, price, promotion*, dan *place* untuk bauran pemasaran barang dan 7P, yaitu *product* (produk jasa), *price* (harga jasa)*, place* (lokasi jasa)*, promotion* (promosi jasa)*, person* (sumberdaya jasa)*, physical evidance* (bukti fisik atau sarana prasarana jasa)*,* dan *process* (manajemen layanan jasa) untuk pemasaran jasa.
3. Unsur nilai pemasaran (*heart share*) yang berkaitan dengan *brand, service* dan *process*. Dalam nilai pemasaran, merek (*brand*) mempunyai arti penting bagi konsumen, yaitu:

a. Sebagai identifikasi untuk membedakan antara satu produk dengan produk lain. Identifikasi ini diperlukan agar konsumen mempunyai kebebasan memilih produk dan merek mana yang memenuhi kebutuhannya.
b. Sebagai garansi atas kualitas dan kinerja dari produk yang akan dibeli. Merek akan memberikan rasa percaya diri kepada konsumen.
c. Merek memberi status dan image pada seseorang. Dengan membeli merek tertentu, sudah menunjukkan bagaimana status sosial seseorang.
d. Merek memberi arti emosional. Seorang fans sebuah klub sepakbola misalnya, akan rela membeli berbagai macam *merchandise* yang dijual dengan atribut klub tersebut.

C. Konsep Inti Pemasaran

1. Kebutuhan

Konsep dasar yang melandasi pemasaran adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah pernyataan dari rasa kahilangan, dan manusia mempunyai banyak kebutuhan yang kompleks. Kebutuhan manusia yang kompleks tersebut karena bukan hanya fisik (makanan, pakaian, perumahan, dan lain-lain), tetapi juga rasa aman, aktualisasi diri, sosialisasi, penghargaan, kepemilikan. Semua kebutuhan berasal dari masyarakat konsumen. Bila konsumen tidak puas maka konsumen akan mencari produk atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan mereka.

2. Keinginan

Bentuk kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh budaya dan kepribadian individual dinamakan keinginan. Keinginan digambarkan dalam bentuk obyek yang akan memuaskan kebutuhan mereka atau keinginan adalah hasrat akan penawar kebutuhan yang spe-

sifik. Masyarakat yang semakin berkembang, keinginannya juga semakin luas, tetapi ada keterbatasan dana, waktu, tenaga dan ruang, sehingga dibutuhkan organisasi, lembaga atau perusahaan yang bisa memuaskan keinginan sekaligus memenuhi kebutuhan manusia dengan menebus keterbatasan tersebut, paling tidak meminimalisasi keterbatasan sumber daya. Contohnya adalah: manusia butuh makan, akan tetapi keinginan untuk memuaskan lapar tersebut tergantung dari budaya dan lingkungan tumbuhnya. Orang Yogyakarta, misalnya, akan memenuhi kebutuhan makannya dengan gudeg; orang Jepang akan memuaskan keinginannya dengan makanan sukiyaki; begitu pula dengan orang Sunda di Jawa Barat; dan lainnya.

3. Permintaan

Dengan keinginan dan kebutuhan serta keterbatasan sumber daya tersebut, akhirnya manusia menciptakan permintaan akan produk atau jasa dengan manfaat yang paling memuaskan. Sehingga muncul istilah permintaan, yaitu keinginan menusia akan produk spesifik yang didukung oleh kemampuan dan ketersediaan dana untuk membelinya.

4. Produk (Organisasi, Jasa, Ide)

Sejalan dengan kebutuhan, keinginan dan permintaan: organisasi, lembaga, perusahaan berusaha keras untuk mempelajarinya. Mereka melakukan riset pemasaran, mengamati perilaku konsumen, menganalisis keluhan yang dialami konsumen, mencari jawaban produk atau jasa apa yang sedang disukai atau bahkan produk apa yang tidak disukai, dan lain-lain. Dengan kegiatan tersebut, akhirnya perusahaan dapat menawarkan segala sesuatu kepada pasar untuk diperhatikan, untuk dimiliki atau dikonsumsi sehingga konsumen dapat memuaskan kebutuhan sekaligus keinginannya, sesuatu itu disebut produk. Produk tidak hanya mencakup obyek fisik, tetapi juga jasa, orang, tempat, organisasi ataupun gagasan.

Contoh: perusahaan manufaktur menyediakan: barang (komputer, laptop, monitor, printer); jasa (pengiriman, pemasangan, pelatihan, perbaikan, dan pemeliharaan); ide/gagasan (kekuatan/keunggulan jenis komputer).

5. Nilai Pelanggan

Karena semua perusahaan berusaha menawarkan produk dan jasa yang superior, maka konsumen dihadapkan pada pilihan yang beranekaragam. Konsumen membuat pilihan pembeli berdasarkan pada persepsi mereka mengenai nilai yang melekat pada berbagai produk dan jasa. Nilai bagi pelanggan adalah selisih antara nilai total yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya total yang menyertai produk tersebut. Nilai total antara lain nilai dari produk, jasa, personil pemasar, biaya waktu, biaya energi yang dikeluarkan, biaya psikis. Setelah pemberian nilai, konsumen akan mengevaluasi dan hasil evaluasi ini akan mempengaruhi kepuasan dan peluang untuk membeli ulang produk itu.

6. Kepuasan Pelanggan

Kepuasan pelanggan tergantung pada anggapan kinerja produk dalam menyerahkan nilai relatif terhadap harapan pembeli. Bila kinerja atau prestasi sesuai atau bahkan melebihi harapan pembelinya, maka pembeli merasa puas. Perusahaan yang cerdik mempunyai tujuan membuat gembira pelanggan dengan hanya menjanjikan apa yang dapat mereka serahkan, kemudian menyerahkan lebih banyak dari yang mereka janjikan.

Kepuasan pelanggan berkaitan erat dengan mutu. *Total Quality Management* (TQM) adalah respons terhadap kepuasan pelanggan. TQM yaitu program yang dirancang untuk memperbaiki mutu produk, jasa dan proses pemasaran secara terus menerus. Komitmen TQM adalah fokus terhadap pelanggan, dan memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas.

7. Pertukaran

Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Ada lima kondisi yang harus dipenuhi agar pertukaran dapat terjadi: 1) terdapat sedikitnya dua pihak; 2) masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin berharga bagi pihak lain; 3) masing-masing pihak mampu berkomunitas dan melakukan penyerahan; 4) masing-masing pihak bebas menerima atau menolak tawaran pertukaran; 5) Masing-masing pihak yakin bahwa berunding dengan pihak lain adalah layak dan bermanfaat (*negosiasi*).

8. Transaksi

Transaksi adalah perdagangan antara dua pihak, yang paling sedikit melibatkan dua macam nilai, persetujuan mengenai kondisi, waktu dan tempat.

9. Hubungan

Hubungan adalah proses menciptakan, memelihara, dan meningkatkan hubungan erat yang semakin bernilai dengan pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan yang lain. Dengan kata lain, membangun hubungan jangka panjang yang memuaskan dengan pelanggan, pemasok (*supplier*), penyalur (*distributor*). Agar hubungan tercipta, maka hal-hal yang dapat dilakukan antara lain: 1) Saling mempercayai, saling menguntungkan; 2) menjanjikan dan memberikan kualitas yang tinggi, pelayanan yang baik, harga yang pantas antar pihak; 3) menghasilkan ikatan ekonomi, teknik dan sosial yang kuat antar pihak yang berkepentingan; 4) menekan biaya transaksi dan waktu pencarian pelanggan.

10. Jaringan

Jeringan terdiri atas perusahaan dan semua pihak pendukung; pelanggan, *supplier, distributor,* pengecer, agen iklan, ilmuwan dan

pihak lain yang bersama-sama dengan perusahaan telah membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan.

11. Pasar

Pasar terdiri atas semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu yang sama, yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan itu.

12. Pemasar dan Calon Pembeli

Seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli yang akan terlibat dalam pertukaran tersebut. Calon pembeli adalah seseorang yang diidentifikasikan oleh pemasar sebagai orang yang mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran tersebut.

Gambar: 1: Konsep Inti Pemasaran Jasa Pendidikan

D. Pemasaran Jasa Pendidikan

Kotler (2003: 428) mengartikan jasa sebagai "*a service is any act or performance that one party can offer to another that is essen-*

tially intangible and does not result in the ownership of anything. Its production may or may not be tied to a physical product". Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya, yang secara prisip tidak berwujud dan tidak menyebabkan kepindahan kepemilikan.

Dengan demikian karakteristik jasa dapat diidentifikaskan sebagai berikut:

1. Tidak berwujud (*intangible*)*,* sehingga konsumen tidak dapat melihat, mencium, meraba, mendengar dan merasakan hasilnya sebelum mereka membelinya. Untuk mengurangi ketidakpastian, maka konsumen mencari informasi tentang jasa tersebut.
2. Tidak terpisahkan (*inseparability*), di mana jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya yaitu perusahaan jasa.
3. Bervariasi (*variability*), di mana jasa sering kali berubah-ubah tergantung siapa, kapan dan di mana menyajikannya.
4. Mudah musnah (p*erishability*), jasa tidak dapat di jual pada masa yang akan datang.
5. Jasa tidak dapat disimpan dan dikonsumsi pada saat dihasilkan.
6. Konsumen adalah bagian integral dari proses produksi jasa.
7. Setiap orang atau apa pun yang berhubungan dengan konsumen mempunyai andil dalam memberikan peranan.
8. Karyawan penghubung merupakan bagian dari proses produksi jasa.
9. Kualitas jasa tidak dapat diperbaiki pada saat proses produksi karena produksi jasa terjadi secara *real time*.

Berdasarkan ciri dan karakteristik tersebut, maka jasa pendidikan mempunyai karakteristik sebagai berikut (Leonard L. Berry-Philip Kotler/Keith Cox, 1984: 302):

1. Lebih bersifat tidak berwujud dari pada berwujud (*more intangible than tangible);*

2. Produksi dan konsumsi bersamaan waktu (*simultananeous production and consumption*);
3. Kurang memiliki standar dan keseragaman (*less standardized and uniform*).

Pemasaran dalam konteks jasa pendidikan adalah sebuah proses sosial dan manajerial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan (*creation*) penawaran, pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain dalam bidang pendidikan. Etika pemasaran dalam dunia pendidikan adalah menawarkan mutu layanan intelektual dan pembentukan watak secara menyeluruh. Hal itu karena pendidikan bersifat lebih kompleks, yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, hasil pendidikannya mengacu jauh ke depan, membina kehidupan warga negara, generasi penerus ilmuwan di masa yang akan datang.

Secara teoritis, terdapat tiga komponen dasar dalam penerapan pemasaran pendidikan yaitu: (1) *integrated marketing,* (2) *create customer satisfaction,* dan (3) *a profit.* Di mana kita harus mengelola: (1) *customer-impinging resources,* (2) *policies*, (3) *activities,* dan *(4) market segmentation,* karena empat faktor tersebut akan memberikan referensi terhadap pilihan para pemakai jasa produk yang dihasilkan. Akan tetapi lebih spesifik lagi bahwa pemasaran memiliki empat aktivitas yaitu *analysis, organization, planning* dan *control.*

E. Kepuasan Pelanggan Pendidikan

Kepuasan atau *satisfaction* berasal dari bahasa Latin *"satis*" yang berarti cukup baik, memadai, dan *"facio"* yang berarti melakukan atau membuat. Sehingga kepuasan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai. Zeithaml, (2000: 75) menyatakan bahwa *"Satisfaction is the consumer's fulfillment response. It is a judgement that a product pleasurable level*

of consumption related fulfillment". Jadi dapat ditegaskan bahwa kepuasan merupakan respons konsumen yang sudah terpenuhi keinginannya mengenai penggunaan barang atau jasa yang mereka pakai.

Pembelian atau pemakaian ulang serta mengajak temannya untuk menggunakan produk dan jasa yang dihasilkan pendidikan terjadi karena *customer delivered value* (nilai yang diterima pelanggan). Secara matematis kepuasan adalah merupakan selisih antara *total customer value* dengan *total customer cost* "Kepuasan = Total Customer Value – Total Castumer Cost".

Total customer value berarti jumlah segala pengorbanan yang dikeluarkan seseorang untuk memperoleh barang dan jasa. Artinya adalah perbandingan antara pengorbanan waktu, tenaga, dan uang yang dikeluarkan dengan nilai manfaat hasil yang diterima.

Beberapa pendapat dan teori tentang kepuasan pelanggan dapat ditunjukkan sebagaimana berikut ini. Pertama, c*ontrast theory* yang berasumsi bahwa konsumen akan membandingkan kinerja produk aktual dengan ekspektasi para-pembelian, di mana apabila kinerja aktual lebih besar atau sama dengan ekspektasi, maka pelanggan akan puas, dan sebaliknya apabila kinerja aktual lebih rendah dari ekspektasi maka komsumen akan mengalami ketidakpuasan.

Kedua, *assimilation theory* menyatakan bahwa evaluasi purna beli merupakan fungsi positif dari ekspektasi konsumen para-pembelian, karena proses diskonfirmasi secara psikologis tidak enak dilakukan, konsumen cenderung secara perseptual mendistorsi perbedaan antara ekspektasi dan kinerjanya ke arah ekspektasi awal sehingga penyimpangan ekspektasinya cenderung akan diterima oleh konsumen yang bersangkutan.

Ketiga, *assimilation-contras theory* berpandangan bahwa terjadinya efek asimilasi (*assimilation effect*) atau efek kontras (*contrast effect*) merupakan fungsi dari tingkat kesenjangan antara kinerja

yang diharapkan dan kinerja aktual. Apabila kesenjangannya besar, konsumen akan memperbesar *gap* tersebut. Dengan kata lain, rentang waktu yang diterima (*acceptable deviations*) dilewati, maka kesenjangan antara ekspektasi dan kinerja akan menjadi signifikan sehingga di situ efek kontras berlaku.

Stauss & Neuhaus (1997) yang dikutip Fandhy & Gergorius (2005: 203) membedakan lima tipe kepuasan dan dua tipe ketidakpuasan berdasarkan kombinasi antara emosi spesifik terhadap penyedia jasa, ekspektasi menyangkut kapabilitas kinerja masa depan pemasok jasa, dan minat berperilaku untuk memilih lagi penyedia jasa bersangkutan. Tipe tersebut adalah:

1. *Demanding customer satisfaction*, merupakan tipe kepuasan yang aktif, relasi dengan penyedia jasa diwarnai emosi positif, terutama optimisme dan kepercayaan. Berdasarkan pengalaman positif dimasa lalu, pelanggan dengan tipe kepuasan ini berharap bahwa penyedia jasa bakal mampu memuaskan ekspektasi mereka yang semakin meningkat di masa depan. Selain itu mereka bersedia meneruskan relasi yang memuaskan dengan penyedia jasa sehingga loyalitas akan tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam meningkatkan kinerjanya seiring dengan tuntutan pelanggan.
2. *Stable customer satisfaction* yaitu pelanggan yang memiliki aspirasi pasif dan perilaku yang *demanding.* Emosi positifnya terhadap penyedia jasa bercirikan *steadiness* dan *trust* dalam relasi yang terbina saat ini, di mana mereka menginginkan segala sesuatunya tetap sama. Berdasarkan pengalaman positif yang telah terbentuk, mereka bersedia melanjutkan relasi dengan penyedia jasa
3. *Resigned customer satisfaction.* Pelanggan pada tipe ini merasa puas, namun bukan diakibatkan pemenuhan ekspektasinya, akan tetapi lebih didasarkan pada kesan tidak realistis. Perila-

kunya cenderung pasif, cenderung tidak bersedia melakukan berbagai upaya dalam menuntut perbaikan.

4. *Stable customer dissatisfaction.* Pelanggan tidak puas terhadap kinerja penyedia jasa namun cenderung tidak melakukan apa-apa. Relasi dengan penyedia jasa diwarnai emosi negatif dan asumsi ekspektasi mereka di masa datang tidak akan terpenuhi, dan tidak melihat adanya peluang untuk perubahan dan perbaikan.
5. *Demanding customer dissatisfaction* bercirikan tingkat aspirasi aktif dan perilaku *demanding,* pada tingkat emosi ketidakpuasan menimbulkan protes dan oposisi. Mereka aktif menuntut perbaikan.

Dalam melakukan pengukuran kepuasan pelanggan itu, Kotler (2000: 38) mengemukakan beberapa cara diantaranya adalah:

1. *Complaint and suggestion system* (sistem keluhan dan saran), informasi dari saran dan keluhan ini akan dijadikan data dalam melakukan antisipasi dan pengembangan perusahaan.
2. *Customer satisfaction surveys* (survey kepuasan pelanggan), tingkat keluhan konsumen dijadikan data dalam mengukur tentang kepuasan, hal itu bisa melalui survey, pos, telpon, atau angket.
3. *Ghost shopping* (pembeli bayangan), dengan mengirim orang untuk melakukan pembelian di perusahaan orang lain maupun diperusahaan sendiri untuk melihat secara jelas keunggulan dan kelemahan pelayanannya.
4. *Lost customer analysis* (analisis pelanggan yang beralih), yaitu kontak yang dilakukan kepada pelanggan yang telah beralih pada perusahaan lain untuk dijadikan perbaikan kinerja dalam meningkatkan kepuasan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa timbulnya ketidakpuasan dari konsumen dikarenakan oleh: (1) tidak sesuai harapan dengan

kenyataan yang dialaminya, (2) ketidakpuasan dalam pelayanan selama proses menikmati jasa, (3) perilaku personil kurang memuaskan, (4) suasana dan kondisi fisik lingkungan tidak menunjang, (5) ongkos terlalu tinggi, karena jarak, waktu dan harga terlalu tinggi, (6) promosi tidak sesuai dengan kenyataan.

Dalam konteks pendidikan, kepuasan pelanggan dapat dilihat dari beberapa komponen sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1: Indikator Kepuasan Pelanggan Pendidikan

No.	Komponen	Indikator
1	Karateristik Jasa	Nama madrasah yang dikenal, staf pengajar yang kompeten, dan hubungan dengan lembaga luar
2	Emosi Pelanggan	Motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar
3	Atribut Pendukung	Promosi di bidang jasa madrasah, lulusan yang dihasilkan, dan prestasi yang dicapai
4	Persepsi atas Pelayanan	Penerimaan pelayanan oleh siswa
5	Pelanggan Lainnya	Penyebarluasan informasi
6	Manfaat	Fungsional - Emosional
7	Biaya	Moneter, waktu, energy dan fisik

F. Loyalitas Pelanggan Pendidikan

Loyalitas pelanggan (*customer loyalty*) adalah *"frequency of use or the proportion of re-use of the service. Loyalty can also be observed when service customers or consumers recommend or even urge others to use the service"* (Stackpole, 2004: 1). Maksud dari pengertian ini adalah bahwa kesetiaan pelanggan diukur dengan

frekuensi penggunaan atau proporsi penggunaan kembali (*re-use*) suatu jasa. Kepuasan tersebut dapat juga diamati ketika pelanggan jasa menganjurkan atau bahkan mendesak orang lain untuk mengkonsumsi jasa tersebut. Jadi kesetiaan pelanggan dapat dilihat dari perilaku pelanggan.

Oliver (1997: 392) menyatakan *"customer loyalty is a deeply held commitment to rebuy or repatronize a preffered product or service consistently in the future, despite situational influence and marketing efforts having the potential to cause switching behavior".*

Pengertian Oliver tersebut menyiratkan bahwa pelanggan yang loyal merupakan konsumen yang memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk melakukan pembelian ulang atas suatu produk secara konsisten dalam jangka panjang, meskipun terdapat berbagai pengaruh atau tawaran lain dari produk pesaing. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelanggan yang loyal mempunyai "fanatisme permanen" terhadap sebuah produk/jasa atau suatu perusahaan yang telah menjadi pilihannya.

Griffin (2002: 4) mendefinisikan loyalitas sebagai *"Loyalty is defined as non random purchase expressed by some decision marking unit".* Berdasarkan definisi ini terlihat bahwa loyalitas lebih ditujukan kepada suatu perilaku, yang ditunjukkan dengan pembelian rutin. Didasarkan pada unit pengambilan keputusan.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, kepuasan pelanggan dalan konteks pendidikan dapat diamati pada perilaku siswa yang melakukan kegiatan rutin seperti masuk sekolah rutin, pembayaran SPP, dan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga setiap harinya. Loyalitas lebih mengacu kepada perilaku yang relatif stabil dalam jangka panjang dari unit-unit pengambil keputusan untuk melakukan kegiatan secara terus menerus terhadap program lembaga pendidikan (madrasah) yang dipilih.

Keuntungan-keuntungan yang diperoleh lembaga pendidikan jika memiliki siswa yang loyal adalah (Griffin, 2002: 13):

1. Mengurangi biaya pemasaran—sebab biaya untuk menarik konsumen baru lebih mahal mengurangi biaya transaksi biaya, transaksi kontrak, pemrosesan pemesanan, dan lain-lain.
2. Mengurangi biaya *tern over* konsumen—karena pergantian konsumen yang lebih sedikit.
3. Meningkatkan penjualan silang yang akan memperluas pangsa pasar lembaga *Word of Mouth* yang lebih positif dengan asumsi bahwa konsumen yang loyal, juga berarti yang merasa puas, dan mengurangi biaya kegagalan.

Siswa yang loyal merupakan asset yang tak ternilai bagi lembaga sekolah/madrasah, sebab karakteristik siswa yang loyal adalah (Griffin, 2002: 31):

1. Melakukan transaksi ulang secara teratur (*repeat purchase*).
2. Membeli di luar lini jasa (*purchase across product lines*).
3. Mengajak orang lain (*refer other*).
4. Menunjukkan kekebalan dari tarikan persaingan (tidak mudah terpengaruh oleh tarikan persaingan produk sejenis lainnya—*immunity*.

Konsumen yang loyal harus melalui berbagai tahapan, sebab membutuhkan proses yang lama. Dalam praktek pendidikan persekolahan, siswa (sebagai konsumen) yang loyal akan menunjukkan perilaku rajin dan tekun mengikuti program kegiatan KBM yang diselenggarakan oleh lembaga/sekolah/madrasah, sering memberi saran yang membangun, merekomendasikan sekolah tersebut kepada kerabat/orang lain, tidak pindah ke lembaga lain, dan kebal terhadap daya tarik sekolah lain. Untuk dapat menciptakan loyalitas para siswa, maka penyelenggara pendidikan madrasah harus dapat memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya.

Keuntungan memiliki sejumlah siswa yang loyal terhadap lembaga sekolah/madrasah adalah memberikan citra bahwa jasa pendidikan yang ditawarkan tersebut dapat diterima dan dikenal oleh

masyarakat luas, memiliki reputasi baik, dan sanggup untuk memberikan dukungan layanan dan peningkatan mutu pendidikan.

Ukuran variabel loyalitas siswa didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Griffin (2002: 4), Kotler dan Karen F. A Fox (1995: 38) yaitu:

1. Pembelian ulang dengan indikator-indikatornya: (a) frekuensi mengikuti KBM, (b) frekuensi mengerjakan tugas-tugas guru, (c) frekuensi untuk belajar mandiri dalam suatu mata pelajaran, dan (d) rekuensi memberikan saran yang membangun sekolah/madrasah.
2. Penciptaan prospek (*refers others*) dengan idikator-indikatornya: (a) frekuensi menyarankan suatu lembaga sekolah agar siswanya mau melanjutkan ke madrasah, (b) frekuensi menyarankan orang lain untuk sekolah di madrasah.
3. Kekebalan terhadap pesaing (*immunity*) dengan indikator: (a) tingkat kekuatan (daya ikat) dapat menikmati segala fasilitas yang disediakan madrasah tanpa harus pendah ke sekolah lain, (b) kepercayaan untuk tidak pindah ke madrasah lain, (c) kebanggaan kepada madrasah sendiri dibanding dengan sekolah lain, dan (d) konsistensi dalam membandingkan daya tarik madrasah lain.
4. Hubungan harmonis dengan indikator-indikatornya: (a) perhatian pimpinan atas keluhan-keluhan yang disampaikan siswa, (b) perhatian dosen pada siswa atas ide-ide (inovasi) yang disampaikan, dan (c) perhatian staf/pegawai pada siswa atas keluhan-keluhan layanan akademik yang disampaikan.
5. Pemyampaian positif dengan indikator-indikatornya: (a) frekuensi memberikan informasi tentang hal-hal positif program madrsah kepada teman, saudara/kerabat, (b) frekuensi memberikan informasi madrasah kepada lembaga madrasah di bawahnya, (c) frekuensi memberikan informasi program madrasah kepada lembaga lain yang membutuhkan.

Tabel 2: Loyalitas Pelanggan Pendidikan

No.	Komponen	Indikator
1	Pembelian ulang	Frekuensi mengikuti KBM rutin yang diselenggarakan Madrasah Frekuensi pemberian saran pada madrasah
2	Penciptaan Prospek	Frekuensi menyarankan ke orang lain untuk sekolah di madrasah
3	Kekebalan terhadap pesaing	Kekuatan/kepercayaan siswa untuk tidak pindah ke sekolah lain dengantingkat kebanggaan/ konsistensi siswa atas daya tarik sekolah lain
4	Hubungan Harmonis	Perhatian pimpinan dan guru terhadap keluhan dan harapan pegawai staf administrasi di madrasah
5	Penyampaian positif	Memberikan informasi tentang hal-hal positif mengenai madrasah ini kepada: teman saudara kerabat lembaga pendidikan dan perusahaan
6	Hambatan untuk berpindah	Keengganan untuk berpindah dari madrasah Ini: Pemeran pendidikan, lomba karya ilmiah, mengadakan kontak dengan lembaga lain, tetap bertahan di madrasah

6. Hambatan untuk berpindah dengan indikator-indikatornya: (a) frekuensi madrasah dalam mengadakan kegiatan bursa pendidikan, (b) frekuensi madrasah untuk meningkatkan daya saing dengan madrasah lain melalui lomba karya ilmiah, (c) frekuensi mengadakan kontak dengan lembaga pendidikan yang membutuhkan tenaga, (d) keinginan siswa untuk tetap bertahan di

madrasah tersebut meskipun ada godaan untuk pindah ke sekolah/madrasah lain.

G. Bauran Pemasaran Jasa Pendidikan Madrasah

Adanya fenomena kecenderungan masyarakat yang lebih banyak berorientasi pada lembaga sekolah, dan pandangan psimistis terhadap pendidikan madrasah berakibat kepada *image* bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan kelas dua. Dari *survey* sederhana yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat favoritas madrasah di bawah lembaga sekolah. Selain itu, ternyata anggota masyarakat yang belum mengenal madrasah masih banyak. Fenomena tersebut seharusnya mendorong madarasah untuk melakukan upaya-upaya sosialisasi dan berusaha terus untuk meningkatkan kualitasnya, sehingga mempunyai daya saing tinggi dan dipercaya oleh masyarakat.

Diketahui bahwa madrasah merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Menuurut ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa "Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan MadrasahTsanawiyah (MTS) atau bentuk lain sederajat". Selanjutnya pada bagian Kedua Pendidikan Menengah, pada Pasal 18 ayat (3), disebutkan, "pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat". Disahkan dan diundangkannya UU Nomor 2 Tahun 2003 sebagai pengganti UU Nomor 2 Tahun 1989, merupakan babak baru bagi pendidikan madrasah untuk bangkit, berbenah, meningkatkan mutu dan kualitasnya serta lebih mengenalkan dirinya di tengah-tengah masyarakat.

Peningkatan mutu, kualitas dan kinerja layanan pendidikan adalah tuntutan bagi madrasah. Dalam konteks Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu maka ditetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

SNP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai pengganti dari PP 19 Tahun 2005 mencakup delapan hal:

1. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
2. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
3. Standar Proses adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
5. Standar Sarana dan Prasarana adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasidan komunikasi.
6. Standar Pengelolaan adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

7. Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
8. Standar penilaian pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Kedelapan SNPendidikan tersebut merupakan kriteria minimal mutu pendidikan dalam sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu madrasah harus terus berusaha, meningkatkan dan memenuhi standar nasional tersebut. Dengan berorientasi pada mutu dan SNP tersebut maka *image* negatif madrasah sebagai lembaga kelas dua akan berubah menjadi positif bahkan justru akan membentuk *image* baru bagi madrasah sebagai pusat unggulan (*centre of excellence*).

Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan madrasah harus berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) yang dalam konteks pendidikan dasar menengah (Didasmen) siswa sebagai pihak pelanggan. Siswa merupakan pihak paling penting, tanpa siswa tidak aka ada permintaan dalam pendidikan. Siswa adalah konsumen pendidikan yang harus dilayani dengan baik. Melayani, mengarahkan, mendidikan siswa dengan baik bukanlah suatu gangguan bagi lembaga pendidikan, melainkan merupakan tujuan bagi lembaga pendidikan. Untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang prima dan memuaskan siswa maka diperlukan strategi-strategi pemasaran jasa madrmadrasah khususnya bauran pemasaran.

Bauran pemasaran (*marketing mix*) merupakan alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implemtasi strategi pemasaran dan *po-*

sitioning yang ditetapkan dapat berjalan sukses (Lupiyoadi & Hamdani, 2006: 70). Kotler *et al.* (2002: 9) mendefinisikan bauran pemasaran sebagai berikut "*marketing mix as a set of controllable, tactical marketing tools that the firm blends to produce the result it wants in the target market".* Maksudnya adalah bauran pemasaran merupakan serangkaian unsur-unsur pemasaran yang dapat dikendalikan oleh perusahaan dan dipadukan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuannya dalam pasar sasaran. Dalam konteks pendidikan, bauran pemasaran adalah unsur-unsur yang amat penting dan dapat dipadukan sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk memenangkan persaingan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam bauran pemasaran ada tujuh hal yang biasa disingkat dengan 7P yaitu terdiri dari 4P tradisional yang digunakan dalam pemasaran barang dan 3P sebagai perluasan bauran pemasaran (Zeithaml & Bitner, 2004: 23). Unsur 4P adalah *product* (produk); jasa seperti apa yang ditawarkan, *price* (harga); strategi penentuan harganya, *place* (lokasi/tempat); dimana tempat jasa diberikan, *promotion* (promosi); bagaimana promosi dilakukan. Sedangkan unsur 3P adalah *people* (sumberdaya manusia); kualitas, kualifikasi, dan kompetensi yang dimiliki oleh orang yang terlibat dalam pemberian jasa, *physical evidence* (bukti fisik); sarana prasarana seperti apa yang dimiliki, dan *process;* manajemen layanan pembelajaran yang diberikan. Ketujuh unsur bauran pemasaran tersebut dalam konteks pendidikan madrasah secara singkat dapat dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

1. Produk Jasa Pendidikan Madrasah

Kotler (2000: 448) mendefinisikan produk sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Dalam pengertian lain produk adalah keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai kepada kon-

sumen (Lupiyoadi & Hamdani, 2006: 70). Lebih spesifik dikemukakan oleh Keegan (1997: 73) bahwa produk adalah koleksi sifat-sifat fisik, jasa dan simbolik yang menghasilkan kepuasan, atau manfaat, bagi seorang pengguna atau pembeli.

Pengertian-pengertian tersebut menunjukkan bahwa produk adalah sesuatu yang dihasilkan dari sebuah proses yang dapat menghasilkan kepuasan atau manfaat bagi pengguna (*user*) yang dapat ditawarkan ke pasar dan akan mempengaruhi persepsi pelanggan dalam melakukan pembelian.

Produk dalam konteks jasa pendidikan madrasah adalah jasa yang ditawarkan kepada pelanggan berupa reputasi, prospek dan variasi pilihan. Lembaga pendidikan yang mampu bertahan dan mampu memenangkan persaingan jasa pendidikan adalah lembaga yang dapat menawarkan reputasi, prospek, mutu pendidikan yang baik, prospek dan peluang yang cerah bagi para siswa untuk menentukan pilihan-pilihan yang diinginkannya, seperti studi lanjut di perguruan tinggi favorit di dalam atau luar negeri, bekerja atau bermasyarakat dengan baik.

Reputasi dan prospek lembaga madrasah menjadi daya tarik dan minat siswa. Selama ini madrasah menawarkan produk sesuai dengan misinya yaitu sebagai proses *"Character Building",* yaitu siswa berakhlaq mulia, agamis, religius dan penuh nilai, termasuk di dalamnya adalah terpenuhinya Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Produk madrasah ini sesungguhnya dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para calon pelanggannya.

2. Harga Jasa Pendidikan Madrasah

Harga (*price*) dalam pemasaran adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk. Saladin-Oesman (2002: 95) mengartikan harga sebagai sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk atau jasa. Harga dalam

konteks jasa pendidikan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan jasa pendidikan yang ditawarkan. Elemen harga pendidikan dipertimbangkan mengenai penetapan harga seperti SPP, investasi bangunan, biaya labolatorium.

3. Lokasi Jasa Pendidikan Madrasah

Tempat (*place*) berarti berhubungan dengan di mana perusahaan jasa harus bermarkas dan melakukan aktivitas kegiatannya. Dalam konteks jasa pendidikan madrasah *place* adalam lokasi sekolah berada. Lokasi sekolah sedikit banyak menjadi preferensi calon pelanggan dalam menentukan pilihannya. Lokasi yang strategis, nyaman dan mudah dijangkau akan menjadi daya tarik tersendiri, dibanding dengan lokasi sekolah yang dekat pemakaman, dikenal angker, dekat pasar dan lain-lain.

4. Promosi Jasa Pendidikan Madrasah

Promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan penjualan produk di pasaran dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Promosi bertujuan untuk memberikan informasi dan meyakinkan konsumen akan manfaat produk yang dihasilkan. Kegiatan promosi yang dapat dilakukan adalah dengan cara*advertising* (iklan) melalui media TV, radio, surat kabar, bulletin, majalah, baliho, brosur dan lain-lain. Promosi penjualan seperti pameran pendidikan, bazar pendidikan, dan invitasi. Melakukan kontak langsung dengan calon siswa dan melakukan kegiatan hubungan dengan masyarakat.

5. Sumberdaya Manusia Jasa Pendidikan Madrasah

Sumberdaya manusia dalam konteks pendidikan adalah orang-orang yang terlibat dalam proses penyampaian jasa pendidikan seperti Tata Usaha (TU), kepala sekolah, guru, dan karyawan (pendidik dan tenaga kependidikan). Dalam PP 32 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa Standar Pendidik dan Tena-

ga Kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

Sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan ini sangat penting bahkan menjadi ujung tombak dalam proses pemberian layanan pendidikan kepada para siswa dalam lembaga madrasah. Misalnya teknik mengajar yang tidak hanya monoton, kemampuan penguasaan teknologi, metode pengajaran yang menyenangkan, kemampuan memberi motivasi.

6. Bukti Fisik Jasa Pendidikan Madrasah

Bukti fisik adalah lingkungan fisik tempat jasa diciptakan dan langsung berinteraksi dengan konsumennya. Zeithaml dan Bitzer (2004: 25) mendefinisikan *physical evidence* sebagai *the environment in which the service is delivered and where the firm and customer interact, and any tangible components thet facilitate performance or communication of the service.*

Terdapat dua macam bukti fisik. Pertama, bukti penting (*essential evidence*) merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemberi jasa mengenai desain dan tata letak (*layout*) dari gedung. Dalam konteks jasa pendidikan *essential evidence* dapat berupa desain ruang kelas, gedung sekolah, perpustakaan, lapangan olah raga dan lain-lain.

Kedua*,* bukti pendukung (*peripheral evidence*) merupakan nilai tambah yang bila berdiri sendiri tidak akan berarti apa-apa, jadi hanya berfungsi sebagai pelengkap saja, namun demikian mempunyai peran penting dalam proses produksi jasa. Dalam konteks lembaga pendidikan bukti pendukung dapat berupa raport persemester, catatan prestasi siswa dan lain-lain.

Physical evidence dalam kontek SNP adalah standar sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berek-

reasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

7. Proses Jasa Pendidikan Madrasah

Proses adalah prosedur atau mekanisme dalam rangkaian aktivitas untuk menyampaikan jasa dari produsen kepada konsumen. Zeithaml dan Bitzer (2004: 25) mengartikan proses sebagai *"the actual procedures, mechanisms, and flow of activities by which the service is delivered the service delivery and operating system".*

Dalam konteks jasa pendidikan proses pendidikan yang meliputi segala kegiatan yang medukung terselenggarannya proses kegiatan belajar-mengajar guna terbentuknya lulusan (*output*) yang diinginkan. Dalam SNP proses mencakup standar isi, standar proses, standar pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), dan standar penilaian pendidikan.

Melalui pengelolaan unsur-unsur bauran pemasaran tersebut diharapkan lembaga pendidikan madrasah dapat menyusun suatu strategi yang lebih baik dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan suatu kondisi di mana pelanggan merasa apa yang diterimanya sama atau melebihi harapannya, atau dalam pengertian lain kepuasan adalah *"satisfaction is fulfillment of need, or the degree to which an expectation is met"* (Stackpole, 2004: 2). Dengan tercapainya kepuasan pelanggan madrasah maka diharapkan loyalitasnya meningkat. Loyalitas atau kesetiaan dapat diukur dari frekuensi penggunaan atau promosi penggunaan kembali sebuah jasa. Kepuasan pelanggan juga dapat diamati ketika pelanggan jasa menganjurkan atau bahkan mendesak orang lain untuk mengkonsumsi jasa tersebut.

Dalam konteks upaya mempengaruhi calon pemakai produk pendidikan, maka keterkaitan ketujuh faktor tersebut diilustrasikan sebagaimana dapat diperagakan dalam Gambar 2.

Gambar 2. Model Mempengaruhi Calon Pemakai Jasa Pendidikan
(Diadopsi dari Winardi 1999)

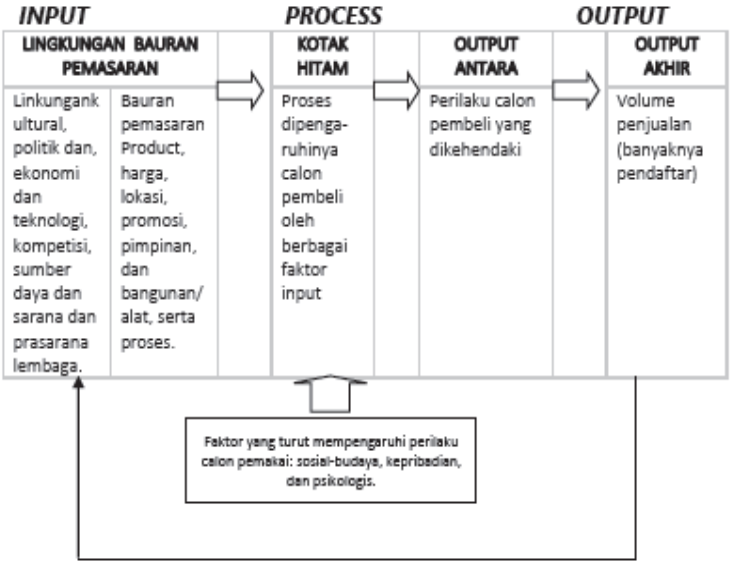

H. Langkah Strategis Pemasaran Madrasah

1. Identifikasi Pasar

Tahapan pertama dalam pemasaran madrasah adalah mengidentifikasi dan menganalisis pasar. Dalam tahapan ini perlu dilakukan suatu penelitian/riset pasar pendidikan untuk mengetahui kondisi dan ekspektasi pasar termasuk atribut-atribut pendidikan yang menjadi kepentingan konsumen pendidikan. Termasuk dalam tahapan ini adalah pemetan dari sekolah lain.

Dalam konteks pendidikan madrasah, identifikasi dapat dilakukan dengan melihat bahwa lembaga pendidikan madrasah sesungguhnya mempunyai kapasitas dan potensi besar dalam upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensukseskan program wajib

belajar nasional. Di samping itu, madrasah telah lama mengakar di masyarakat bawah. Dalam kaca mata *marketing,* madrasah termasuk dalam segmen pasar emosional. Diketahui bahwa pasar jasa pendidikan dari sudut pandang marketing secara sederhana dapat dikelompokkan ke dalam dua segmen pasar, yaitu segmen pasar emosional dan segmen pasar rasional.

Maksud segmen pasar emosional adalah kumpulan pelanggan atau "nasabah" yang datang mendaftar atau bergabung ke sebuah lembaga pendidikan (madrasah) karena pertimbangan religiousitas. Pasar ini kurang memperhatikan harga, kualitas, mutu dan ketersediaan jaringan (*networking*) yang memadai. Dengan kata lain pasar ini benar-benar emosional religious "asal banyak muatan pelajaran agamannya". Sedangkan segmen pasar rasional adalah pelanggan atau "nasabah" sekolah yang benar-benar sensitif terhadap perkembangan dan kualitas mutu pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dan bermutu baik adalah pendidikan yang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, muatan pelajaran yang bertaraf internasional, penggunaan bahasa-bahasa global (Inggris), dan didukung oleh fasilitas dan jaringan (*networking*) memadai. Dengan kata lain pasar ini berpendapat "lembaga pendidikan boleh berbentuk apa saja asal bermutu dan berkualitas bahkan bertaraf global".

Madrasah sebagaimana pembagian segmentasi pasar tersebut berada pada segmen pasar emosional. Pelanggan atau pendaftar ke pendidikan madrasah adalah mereka yang mempunyai keterkaitan religius, orang tua yang alumni madrasah, pernah menempuh pendidikan pesantren, jamaah pengajian atau majlis ta'lim, dan masyarakat umum yang sudah melakukan "pertobatan" yang menganggap penting penanaman akhlak, etika religious, dan dasar-dasar agama yang memadai. Mereka mendasarkan pertimbangan tidak semata-mata pada mutu dan kualitas lembaga pendidikan madrasah akan tetapi hal-hal yang bersifat emosional tersebut, sebab madrasah sampai saat ini menurut pandangan kebanyakan masyarakat masih

menjadi lembaga pendidikan kelas dua di bahwa lembaga-lembaga pendidikan sekolah. Pagsa pasar emosional pada madrasah juga dapat ditunjukkan bahwa meskipun terdapat *image* "negatif" peminat pendidikan madrasah tetap stabil atau bahkan naik.

2. Segmentasi Pasar dan Positioning

Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku, yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Sedangkan *positioning* (pemosisian) adalah karakteristik dan pembedaan (differensiasi) produk yang nyata yang memudahkan konsumen untuk membedakan produk jasa antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Posisioning berkaitan dengan bagaimana pemasar mebedakan jasanya dengan pesaing (memilih pesaing), contoh dalam konteks pendidikan tinggi adalah karena banyaknya perguruan tinggi (PT) menyebabkan siswa lulusan SMA/MA kebingungan dalam menentukan pilihan jika mereka tidak dapat membedakan satu PT dengan PT lain. Oleh karena itu, Universitas Gadjah Mada (UGM)) menyebut dirinya sebagai *research university,* Universitas Indonesia dengan *The Word Class University,* UIN Sunan Kalijaga *Integrative University,* UIN Sunan Gunung Djati Bandung …….., dan lain-lain. Sedangkan segmentasi berkaitan dengan bagaimana pemasar memilih pasar (konsumen).

Setiap lembaga jasa termasuk madrasah sesungguhnya mempunyai pertanyaan tentang *"pelanggan seperti apakah yang harus dicari untuk menjadi target/sasaran dari jasa yang ditawarkan?".* Pertanyaan ini tentu harus dijawab sebelum lembaga pendidikan tersebut memulai kegiatan pemasarannya yang lain. Salah satu kunci keberhasilan lembaga adalah terletak pada proses segmentasi yang merupakan akar dari pertanyaan tersebut. Keberhasilan lembaga pendidikan tentu saja sangat bergantung pada pelanggannya (siswa), mulai dari siapa pelanggannya, bagaimana kerekteristiknya,

sampai pada bagaimana daya beli pelanggan tersebut. Semua ini ditentukan oleh proses segmentasi pasar jasa pendidikan.

Selanjutnya adalah penentuan target pasar. Dalam pasar yang sangat beragam karakternya, perlu ditentukan atribut-atribut apa yang menjadi kepentingan utama bagi pengguna pendidikan. Secara umum segmentasi pasar dapat dipilah berdasarkan segmentasi demografi dan sosioekonomi, segmentasi psikologis, segmentasi geografi, segmentasi manfaat, segmentasi penggunaan, dan segmentasi berdasarkan jasa. Dengan demikian sekolah akan lebih mudah menentukan strategi pemasaran sehubungan dengan karakteristik dan kebutuhan pasar. Setelah kita mengetahui karakter pasar, maka kita akan menentukan mengenai bagian pasar mana yang akan kita layani. Tentunya secara ekonomis, melayani pasar yang besar akan membawa sekolah/madrasah yang baik.

3. Diferensiasi Produk

Melakukan diferensiasi merupakan cara yang efektif dalam mencari perhatian pasar. Dari banyaknya sekolah yang ada, orang tua siswa akan kesulitan untuk memilih sekolah anaknya dikarenakan atribut-atribut kepentingan antarsekolah semakin standar. Sekolah hendaknya dapat memberikan tekanan yang berbeda dari sekolah lainnya dalam bentuk-bentuk kemasan yang menarik seperti logo dan slogan. Fasilitas internet mungkin akan menjadi standar, namun jaminan internet yang aman dan bersih akan menarik perhatian orangtua. Melakukan pembedaan secara mudah dapat pula dilakukan melalui bentuk-bentuk tampilan fisik yang tertangkap panca indra yang memberikan kesan baik, seperti pemakaian seragam yang menarik, gedung sekolah yang bersih atau stiker sekolah.

Differensiasi merupakan salah satu dari tiga strategi pemasaran sebagai strategi bersaing, yaitu:

a. Differensiasi, adalah strategi memberikan penawaran yang berbeda dibandingkan penawaran yang diberikan oleh kompetitor.

Strategi differensiasi mengisyaratkan perusahaan mempunyai jasa atau produk yang mempunyai kualitas ataupun fungsi yang bisa membedakan dirinya dengan pesaing. Strategi differensiasi dilakukan dengan menciptakan persepsi terhadap nilai tertentu pada konsumennya. Misalnya: persepsi mengenai keunggulan kerja, inovasi produk, pelayanan yang lebih baik, *brand image* yang lebih unggul, dan lain-lain.

b. Keunggulan biaya, adalah strategi mengefisienkan seluruh biaya produksi sehingga menghasilkan produk atau jasa yang bisa dijual lebih murah dibandingkan pesaing. Strategi harga murah ini fokusnya pada harga, jadi biasanya produsen tidak terlalu perduli dengan berbagai faktor pendukung dari produk atau pun harga yang penting bisa menjual produk atau jasa dengan harga murah kepada konsumen. Warung Tegal misalnya mengandalkan strategi harga. Mereka tidak perduli dengan kenyamanan orang ketika makan, bahkan juga dengan kebersihan, yang penting bisa menawarkan menu makanan lengkap dengan harga yang sangat bersaing.

c. Fokus adalah strategi menggarap satu target market khusus. Strategi fokus biasanya dilakukan untuk produk ataupun jasa yang memang mempunyai karakteristik khusus. Beberapa produk misalnya hanya fokus ditargetkan untuk kaum muslim sehingga semua produknya memberikan benefit dan fungsi yang disesuaikan dengan aturan Islam. Produk yang fokus pada target market kaum muslim biasanya selalu mensyaratkan label halal, tanpa riba, dan berbagai aturan lain yang disesuaikan dengan ketentuan Islam.

4. Komunikasi Pemasaran

Akhirnya pengelola sekolah hendaknya dapat mengkomuniasikan pesan-pesan pemasaran sekolah yang diharapkan pasar. Sekolah sebagai lembaga ilmiah akan lebih elegan apabila bentuk-

bentuk komunikasi disajikan dalam bentuk/ format ilmiah, seperti menyelenggarakan kompetisi bidang studi, forum ilmiah/seminar dan yang paling efektif adalah publikasi prestasi oleh media independen seperti berita dalam media massa. Komunikasi yang sengaja dilakukan sekolah dalam bentuk promosi atau bahkan iklan sekali pun perlu menjadi pertimbangan. Bentuk dan materi pesan agar dapat dikemas secara elegan namun menarik perhatian agar sekolah tetap dalam *image* sekolah sebagai pembentuk karakter dan nilai yang baik.

Publikasi yang sering terlupakan namun memiliki pengaruh yang kuat adalah promosi *"mouth to mouth"* (mulut ke mulut). Alumni yang sukses dapat membagi pengalaman (*testimony*) atau bukti keberhasilan sekolah. Komunikasi pemasaran pendidikan dapat menggunakan strategi komunikasi proaktif (*proactive strategies)*, khusus yang berkenaan dengan *action strategy* yang terdiri dari:

a. *Organizational performances*, meyakinkan publik bahwa organisasi memiliki kualitas yang terbaik bagi konsumen, yakni dengan membuktikan atau mengkomunikasikan bahwa sekolah kita adalah yang berkualitas.
b. *Audience participation*, menggunakan taktik komunikasi dua arah dan melakukan aktivitas dari publik yang berkepentingan untuk secara langsung melakukan kontak dengan produk atau jasa yang dihasilkan organisasi, diantaranya dengan cara memberikan kesempatan kepada *audience* memberikan *feedback* atas pesan yang sesudah disampaikan dalam rangka melakukan *outside in,* misalnya dengan diadakannya survey untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang sekolah.
c. *Special events*, misalnya dengan mengadakan *open house* di sekolah yang ditujukan kepada masyarakat umum, dan mengikuti *education expo* dan melakukan *education gathering* seperti seminar dan *workshop* dengan pembicara tokoh pendidikan

untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya sebuah pendidikan.

d. *Aliances and coalitions*, misalnya dengan melakukan kerja sama dengan sekolah lain.
e. *Sponsorship,* untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tujuan ataupun sasaran program, dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh target market, yakni dengan memberikan sponsor pada acara pentas seni sekolah.
f. *Strategic philanthropy*, ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan berupa reputasi yang baik atau biasa disebut dengan *corporate social responsibility* (CRS), yakni dengan memberikan beasiswa berupa beasiswa penuh dan beasiswa berupa potongan 50% biaya sekolah untuk anak-anak berprestasi di sekolah dan yang tidak mampu.

5. Pelayanan Pembelajaran

Pelayanan pembelajaran di madrasah terlihat sebagai apa yang diharapkan konsumen. Kesenjangan yang sering terjadi adalah adanya perbedaan persepsi kualitas maupun atribut jasa pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap organisasi jasa, termasuk madrasah, didapati beberapa ciri-ciri organisasi jasa yang baik yaitu memiliki (Kotler, 2000):

1. Konsep strategis yang memiliki fokus kepada konsumen.
2. Komitmen kualitas dari manajemen puncak.
3. Penetapan standar yang tinggi.
4. Sistem untuk memonitor kinerja jasa.
5. Sistem untuk memuaskan keluhan pelanggan.
6. Memuaskan karyawan sama dengan pelanggan.

Terdapat lima langkah dalam rangka mencapai ciri-ciri tersebut di atas, (Parasuraman, 1985) menyebutnya pada persoalan: keandalan, responsif, keyakinan, empati, dan wujud.

Keandalan merupakan kemamampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. Dalam setiap realisasi pelayanan madrasah hendaknya sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Dan selanjutnya bagaimana dengan kondisi pelayanan yang ada dapat membantu keberhasilan proses belajar mengajar.

Responsif merupakan kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. Kecepatan waktu juga harus diikuti oleh ketepatan waktu sehingga kualitas pelayanan tidak dikorbankan. Penanggung jawab kegiatan, guru dan juga guru piket merupakan ujung tombak dalam merespon orangtua siswa. Mereka hendaknya dapat menjawab setiap pertanyaan dan paling tidak dapat menjadi 'pendengar yang baik' ketika keluhan muncul.

Keyakinan merupakan pengetahuan dan kompetensi guru dan kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. Keyakinan pasar yang timbul merupakan suatu reputasi sekolah yang dibangun dalam kurun waktu tertentu dan yang utama merupakan cerminan dari kulitas guru. Untuk itu diperlukan strategi pendekatan pemasaran internal yaitu bagaimana pemilik sekolah dapat memberikan peningkatan kemampuan/kompetensi guru serta memotivasi guru agar dapat semakin yakin akan organisasinya.

Empati merupakan syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi pelanggan. Pada prinsipnya setiap manusia senang apabila diperhatikan orang lain. Hal ini dapat menjadi dasar perlakuan sekolah untuk memperhatikan setiap perkembangan siswanya. Pengelolaan administrasi, termasuk basis data yang baik dapat memudahkan pendekatan ini.

Berwujud merupakan penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil dan media komunikasi. Umumnya jasa pendidikan akan semakin terlihat baik ketika fasilitas fisik tersedia secara lengkap dan baik. Untuk menambahkan kewujudan dari jasa pelayanan dapat dilakukan dengan mewujudkan yang tidak berwujud (Octavian, 2005).

I. Membuat Citra Baik terhadap Madrasah

Konsumen dalam membeli sesuatu sebenarnya bukan hanya sekedar membutuhkan barang tersebut, tetapi ada hal lain yang diharapkan dibalik barang tersebut. Sesuatu tersebut sesuai dengan citra yang tebentuk dalam dirinya. Oleh sebab itu penting sekali sebuah lembaga pendidikan madrasah memberikan informasi kepada publik agar dapat membentuk citra yang baik.

Citra adalah impresi perasaan atau konsepsi yang ada pada publik mengenai perusahaan, mengenai suatu obyek, orang atau mengenai lembaga. Citra tidak apat dicetak seperti mencetak barang, akan tetapi citra adalah kesan yang diperoleh sesuai dengan pengetahuan, pemahaman seseorang tentang sesuatu (Alma, 2003: 92). Kotler (1982: 57) mendefinisikan *image* sebagai *"..is the sum of beliefs, ideas, and impressions that aperson has an object".*

Citra terbentuk dari bagaimana lembaga melaksanakan kegiatan operasionalnya yang mempunyai landasan utama pada segi layanan. Citra (*image*) juga terbentuk bedasarkan impresi, berdasarkan pengalaman yang dialami seseorang terhadap sesuatu, sehingga membangun suatu sikap mental. Sikap mental inilah yang nantinya dipakai sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan. Karena *image* dianggap mewakili totalitas pengetahuan seseorang terhadap sesuatu. Lembaga pendidikan dan lembaga *non-profit* lainnya, mencari dana yang diperlukan untuk membiayai organisasi. Dana ini diperoleh dari orang-orang yang berhubungan dengan organisasi. Oleh sebab itu, agar dana lebih mudah mengalir, maka perlu dibentuk *image* yang baik terhadap organisasi.

Banyak cara dapat dilakukan untuk menarik perhatian publik dalam rangka pembentukan *image* trehadap lembaga pendidikan (sekolah/madrasah), baik melalui daya tarik fisik bangunan maupun melalui daya tarik yang yang bersifat akademik, religious dan sebagainya, di antarannya (Alma, 2003: 93-94):

1. Membenahi gedung sekolah/madrasah yang menghadap ke jalan secara *artistic* dan dengan desain yang baik, sehingga menarik perhatian masyarakat.
2. Memasang lampu kuning kedip-kedip (perhatian hati-hati/pelan-pelan) bagi pengemudi.
3. Kerjasaman dengan media.
4. Kepala madrasah gencar mengadakan pidato-pidato, menghadiri pertemuan-pertemuan, dan menginformasikan lembaganya dengan baik.
5. Memberikan kosultasi dan nasehat-nasehat yang diperlukan sebagai layanan masyarakat.
6. Mengadakan peringatan hari-hari besar keagamaan misalnya PHBI, isra' mi'raj, maulid nabi, tahun baru Islam, dll.

Dengan demikian maka lembaga pendidikan (madrasah) harus berusaha menciptakan *image* positif di hati masyarakat, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan untuk mendaftarkan putra-putri mereka masuk ke lembaga pendidikan tersebut. Pembentukan *image* ini tidak dapat terbentuk secara cepat dan singkat, sebab publik sifatnya sensitif dan kritis. *Image* negatif biasanya cepat terbentuk namun *image* positif memerlukan waktu yang lama. Oleh karenannya lembaga pendidikan secara terus menerus harus membangun, membentuk dan mempertahan *image* yang positif.

Daftar Pustaka

Anatan, L, dan Ellitan, L. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Bisnis Modern*. Bandung: Alfabeta.

Ara Hidayat dan Imam Machali. 2016. *The Hand Book of Education Management*. Jakarta: Prenada Media Group.

Armstrong, M. 2009. Armstrong's *Handbook of Management and Leadersip: A Guide to Managing for Results.* London and Philadelphia: Kagon Page.

Barnett, John, & Gerald Fallon. 2007. *Conflicting Views of School Community the Dichotomy between Administrator and Teachers*. [On Line]. International Journal of Education Policy & Leadership. Vol. 2 Number 1 January 10, 2007. Tersedia: http: //journalist.sfu.ca/ijepl/index.php /ijepl/article/ view/28/ 14. [12 Mei 2007].

Becker, Gary S. 1993. *Human Capital A Theoritical and Empirical Analysis With Special Reference to Education*. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Burhanuddin. 1994. *Analisa Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan.* Bandung: Mizan

Cascio, Wayne F. 1998. *Managing Human Resource Poductivity, Quality of Work Life*. USA Profit: McGraw Hill Companies Inc.

Crawford. Megan and Kydd, Lesley. 2005. *Kepemimpinan dan Kerja Sama Tim di Dalam Manajemen Kependidikan*. Jakarta: Grasindo

Depdiknas. 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Buku Konsep dan Pelaksanaan*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. 2004. *Strategi Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 2003-2010, Mewujudkan Perguruan Tinggi Berkualitas Buku Pendukung HELTS 2003-2010.* [Tersedia] **Error! Hyperlink reference not valid.** [Online] 3 September 2008.

Fadjar, A Malik. 2006. *Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Berwawasan Transpormatif.* Bandung: Gunung Djati Press.

Gibbs, Paul & Michael Knapp. 2002. *Marketing Higher and Further Education.* British Library Cataloguing in Publication Data.

Griffin, Ricky W. 1997. *Management* (Fifth Edition). India.: A. I. T. B.S Publisher & Distribution

Hersey, Paul dan Keneth H Blanchard. 1993. *Management of Organizational Behavior*. Enggelwood Cliffs: Prentice-Hall.

Hersey & Blanchard. 2004. *Manajemen Perilaku Organisasi Pendayagunaan Sumber Daya Manusi*a, Terjemahan. Jakarta: Erlangga

Keith, Sherry, Girling, Robert H. 1991. *Education Management, and Participation New Directionin Educational Management*. Massachussets: Allyn and Bacon.

Komariah, Aan. 2004). *Pengaruh Visionary Leadership dan Budaya Sekolah Terhadap Efektivitas Sekolah di Era Desentralisasi pada SMAN di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Provinsi Jawa Barat*. Disertasi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Kotler, Phillip. 2000. *Marketing Management.Englewood Cliffs*. New Jerseys: Prentice Hall.

_____. 1990. *Force for Change: How Leadership Differs from Management*. New York: The Free Press

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.

Robbin, Stephen P. 1996. *Organization Behavior, Concept, Controversies, Application*. New Jersey: Prentice Hall International Inc.

Sadler. S. 1997. *Leadership and Managemen: Fundamental Concept of Educational*. London: Kagon Page Limited.

Sanusi, Achmad dan Natawijaya, Rochman. 1991. *Studi Pengembangan Model Pendidikan Profesional Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Depdikbud.

Schatz, Kenneth & Schatz, Linda. 1995. *Keberhasilan Daya Pengaruh dalam Manajemen.* Jakarta: Spektrum Mitra Utama - Prentice Hall.

Senge, Peter. *et al.* 2002. *Buku Pegangan Disiplin Kelima: Strategi dan Alat-alat untuk Membangun Organisasi Pembelajaran. Alih bahasa oleh Hari Suminto.* Batam: Interaksara.

Spangehl, Steve. 2007. *How to discuss Organizational Culture*. Tersedia. [Online]: http://www.aqip.org/index.php?option=corn.content &task=views&id=86&itemd=115 [5 Juni2007].

Wheelen, Thomas L, and Hunger, J. David. 1995. *Strategic Management and Business Policy* (Fifth Edition). New York: Addison-Wesley Publishing Company.

Zeithaml, Valarie A., dkk. 1990. *Delivering Quality Service Balancing Customer Perception and Expectation*. New York: The Free Press.

_____. 1998. "*Comunication nd Control Processes in the Delivery of Service Quality*", Journal of Marketing, American Marketing Association.

PENDIDIKAN KARAKTER ISLAM MODERN DI SEKOLAH BERBASIS PESANTREN

M. Taufiq Rahman, Ph.D.

A. Pendahuluan

Kajian ini menunjukkan bahwa pesantren merupakan agen pembangunan sumberdaya manusia modern. Melalui pertimbangan seksama dari kandungan doktrin dalam kurikulum pesantren dan kehidupan praktis sehari-hari di pesantren, kajian ini menyimpulkan bahwa pesantren merupakan jenis institusi yang menanamkan karakter yang handal untuk generasi muda. Kajian ini secara spesifik mengungkap keunggulan-keunggulan sekolah berbasis pesantren dalam mencetak karakter Islam yang modern. Untuk ini, dibuktikan pula bahwa pesantren adalah sekolah berbasis masyarakat (perdesaan). Karena pesantren itu merefleksikan keperluan masyarakat – yaitu pencapaian kemajuan. Pesantren juga dibuat oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Di situlah mengapa masyarakat Muslim di Indonesia masih memerlukan keberadaan pesantren hingga hari ini.

Pesantren dan masyarakat sekitarnya mempunyai pertautan yang erat satu sama lain yang tidak dapat diabaikan. Pertautan ini menimbulkan pengaruh satu sama lain berdasarkan situasi serta hal-hal yang dihadapinya. Dalam konteks ini, maka pesantren dapat berfungsi sebagai institusi dengan memfokuskan pada penyebaran penerapan aliran kemodernan (Hadimulyo, dalam Rahardjo, 1985).

Ditinjau dari kedudukannya sebagai institusi yang mempunyai berbagai jenis dan peranan, pesantren berpotensi besar dan memberi sumbangan yang tidak diragukan lagi untuk mencapai pembangunan bangsa dan juga mewujudkan masyarakat adil makmur, baik secara material maupun spiritual.

Pada tahun 1965, Seminar Pondok Pesantren di Yogyakarta, telah bersepakat menerapkan pendidikan dan pendidikan keahlian di dalam kurikulum pesantren, seperti pertukangan, pertanian, peternakan dan bidang keterampilan lainnya (Kemenag, 1990).

Pada masa Orde Baru, pembimbingan pondok pesantren telah dilakukan oleh pemerintah melalui Proyek Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Sejak Pelita I dana pembimbingan pesantren diperoleh dari berbagai institusi pemerintah yang terkait, dari tingkat Pemerintah Pusat sampai ke Pemerintah Daerah (Noer, 1978).

Pada tahun 1975 muncul gagasan baru dalam usaha pengembangan pesantren, yaitu mendirikan pondok pesantren model baru, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah, dengan nama Pondok Karya Pembangunan (PKP), Pondok Modern, Islamic Centre, atau Pondok Pesantren Pembangunan. Namun, belakangan pondok pesantren telah mengalami kekurangan tenaga pengajar yang berkharisma yang dapat memberikan bimbingan dan didikan kepada santri-santrinya (Kemenag, 1990).

Sosiolog Jerman Manfred Ziemek (1986) dalam bukunya, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, mengungkapkan bahwa pesantren bukan saja mampu mempertahankan eksistensinya di alam modern, tetapi justru secara antusias dan konsisten menyambut esensi pembangunan sekaligus mewujudkan etos dan misinya. Malah muncul teori perubahan sosial dengan model pembangunan yang emansipatif partisipatif dari pesantren untuk masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini, pesantren dan masyarakat sekitar tidak menolak arus dan tantangan perubahan sosial, tetapi membuat penyesuaian dan menerima suatu perubahan yang baik untuk kemajuan hidup (Abdul-

lah, 1986). Ini sesuai dengan cara hidup Islam, yaitu konsep *hijrah*, yang mengutamakan pembangunan untuk keluar dari cengkeraman kemiskinan dan kesusahan, seperti yang tersebut dalam al-Qur'an Surah al-Nisa [4]: 97.

Peneliti Jepang, Hiroko Horikoshi (1987), tertarik untuk meneliti profil kyai dalam kaitannya dengan proses perubahan sosial. Melalui kajiannya itu, Horikoshi menemukan adanya kemampuan individu seorang *kyai* dalam melakukan perubahan sosial pada saat-saat yang dipandangnya paling sukar bagi kehidupan masyarakat.

Begitu banyak penulis, terutama lulusan dari pesantren itu sendiri, yang menghubungkan pesantren dengan pembangunan sejalan dengan tekad pemerintah dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya pada masa Orde Baru (kepemimpinan Presiden Soeharto). Penulisan tersebut berusaha menunjukkan eksistensi pesantren di tengah-tengah pesatnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Kesemua ini menunjukkan bahwa pesantren mempunyai otonomi tetapi mereka juga menyokong usaha pemerintah membangun masyarakat.

Dalam masa Orde Baru itu, "dualisme" pembangunan di Indonesia seperti yang disebut Boeke (1953), yaitu dua jenis pembangunan (modern dan tradisional) yang tidak mempengaruhi antara keduanya, dengan memodernkan desa tanpa perlu merusakkan nilai-nilai yang ada pada desa tersebut. Pesantren memang berada di tengah-tengah percaturan pembangunan tersebut. Dalam hal ini, teori dualisme bisa diaplikasikan kepada falsafah pemikiran dan operasional pesantren, yaitu tradisional dan progresif bisa digabungkan pada saat yang sama.

Akan tetapi pembangunan desa mengalami kebuntuan, sejalan dengan krisis ekonomi, sosial, dan politik Indonesia secara keseluruhan sejak akhir tahun 1990-an hingga saat ini. Dalam masalah pertanian, misalnya, didapati sumbangan sektor pertanian terhadap perekonomian nasional telah menurun, sementara jumlah tenaga

kerja di bidang pertanian, terutama di pedesaan, hampir tidak menurun. Hal itu disebabkan karena lahan pertanian yang semakin sempit, sistem penyewaan (*tenancy rates*) yang belum adil, dan teknologi pertanian yang belum modern. Kemunduran drastis di bidang pertanian ini telah membuat Indonesia sebagai negara ASEAN yang menjadi pengimport makanan terbesar saat ini (Widodo, dalam *Masyarakat Indonesia*, 2005). Selain itu, kenaikan harga beras yang cukup tinggi, hingga pemerintah menganggapnya sampai di titik maksimum, diramalkan akan menimbulkan lagi lonjakan jumlah orang miskin. Misalnya, kajian Bank Dunia menemukan korelasi antara lonjakan harga beras dengan lonjakan jumlah orang miskin (Pambudy dalam *Gatra*, 3 Januari 2007).

Berbagai kebijakan dan rencana pemerintah bukannya tidak ada. Kebijakan revitalisasi pertanian sudah dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 11 Juni 2005, tetapi dipandang bahwa kebijakan ini "terkesan hanya sebagai *rhetoric*, belum terlihat implementasi dan realisasinya". Demikianlah, sehingga akibatnya tujuan pembangunan nasional sekarang dapat dianggap sebagai "semakin jauh dari pertanian dan pedesaan" (Pambudy, dalam *Gatra*, 3 Januari 2007).

Memang secara umum, agenda politik Indonesia, yang sejak era Reformasi (pasca kejatuhan Soeharto) bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial, "rupanya justru makin jauh dan terpisah dengan keadaan objektif yang sungguh-sungguh diperlukan rakyat untuk perubahan". (Abdurrahman dalam *Gatra*, 6 Desember 2006). Demikianlah, Indonesia telah memperlihatkan kepada dunia bahwa demokrasi tidak ada hubungannya dengan perubahan dan perbaikan nasib rakyat. Datanya menurut catatan Bank Dunia, sekitar 109 juta orang (49% dari penduduk Indonesia) hidup dalam kemiskinan (Praginanto, dalam *Gatra* 24 Januari 2007).

Sejalan perkembangan di atas, pesantren yang merupakan institusi pendidikan Islam tertua hingga saat ini masih terus bertahan

dengan segala ciri dan perubahannya. Pesantren bahkan seringkali menjadi sentral perhatian ketika muncul masalah kemasyarakatan yang memerlukan upaya penyelesaian (Sukamto, 1999). Terutama ketika corak institusi sosial masih sangat terbatas dan sederhana – yaitu di pedesaan berbasis Islam di Indonesia— hampir semua persoalan yang dihadapi masyarakat muslim, baik menyangkut aspek ritual keagamaan maupun aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan aspek lainnya, mesti dihadapi oleh pihak pesantren dengan *kyai* sebagai figur utamanya.

Posisi yang sentral seperti itu memungkinkan pesantren untuk dapat memainkan berbagai peranan kemasyarakatan yang dapat mempengaruhi masyarakatnya. Dengan kekuatan karismatik yang dimiliki seorang *kyai*, pesantren dapat menggerakkan hampir semua potensi sumber daya manusia yang dimilikinya untuk melakukan berbagai usaha dan kegiatan. Oleh karena itu, pesantren sering pula diandaikan sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*), ataupun pusat pembaruan masyarakat (Malik, 2005). Melalui kekuatan tersebut, pesantren dapat melakukan perubahan baik untuk komunitasnya sendiri maupun untuk masyarakatnya sekitarnya.

B. Pendidikan Kemodernan

Pendidikan Barat dikenal dengan sekolah, dan ia bersifat modern: mempunyai kurikulum yang terukur; ruang kelas yang mempunyai meja, kursi, dan papan tulis; berorientasi pragmatis, yaitu pembentukan manusia yang diperlukan untuk manajemen modern.

Namun kemodernan tidak hanya dibawa oleh Penjajah Belanda. Kemodernan adalah gejala dunia yang terus maju. Keadaan tersebut adalah suatu gejala universal. Kemunculan dunia modern tersebut ditandai dengan adanya struktur baru yang melaksanakan fungsi baru atau untuk mengambil fungsi yang dahulu dilakukan oleh struktur yang lain. Implikasinya, misalnya, muncul pekerjaan

baru, institusi-institusi pendidikan baru yang lebih kompleks dan jenis masyarakat baru (Weiner [ed.], 1966).

Kemodernan, pada sudut yang lain ditandai dengan pandangan psikologis, yaitu sikap manusia yang berorientasikan prestasi. Hal ini dianggap virus mental *n-Ach* (*need for achievement*) (McClelland dalam Weiner [ed.], 1966). Menurut pandangan psikologis, didapati manusia modern tersebut mempunyai kesediaan untuk menerima ide baru dan mencoba cara-cara baru; kesediaan untuk mengekspresikan pendapat; lebih memikirkan masa sekarang dan masa depan; merasakan perlunya ketepatan waktu; lebih memikirkan perencanaan, organisasi, dan efisiensi; kecenderungan untuk melihat dunia sebagai sesuatu yang boleh dihitung; kepercayaan kepada ilmu dan teknologi; dan kepercayaan kepada keadilan masyarakat (Inkeles, dalam Weiner [ed.], 1966).

Gejala universal tentang kemodernan ini melahirkan ide tentang pembangunan, yaitu cara kemajuan itu menjadikan manusia lebih dihargai dan lebih sejahtera. Pemikiran tentang hal ini dilaksanakan oleh dunia global, baik oleh kaum profesional, organisasi internasional, ataupun, yang terutama, adalah pemerintah suatu negara. Seiring dengan kecenderungan global tentang pembangunan, pihak pemerintah Indonesia telah menetapkan empat teras pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan akses kepada pendidikan. Pemerintah mesti dapat menyediakan layanan pendidikan secara merata untuk semua warga negara.
2. Meningkatkan pemerataan dalam pendidikan. Teras ini menitikberatkan kepada prinsip pemenuhan hak dan keadilan untuk memperoleh pendidikan bagi semua warga negara, khususnya untuk daerah-daerah perbatasan dan terpencil.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan. Teras peningkatan kualitas pendidikan merupakan kelanjutan yang tak terpisahkan dengan pilar pemerataan dan peningkatan akses pendidikan. Setelah

keberhasilan program penuntasan wajib belajar 9 tahun sebagai wujud keberhasilan teras peningkatan akses pendidikan, teras peningkatan mutu pendidikan kini harus dijadikan perhatian utama.

4. Meningkatkan tahap kecakapan serta efisiensi manajemen pendidikan. Jaminan mutu pendidikan harus lebih banyak dilakukan dengan berbagai studi dan evaluasi tentang faktor-faktor apa saja yang besar pengaruhnya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Secara nyatanya, pemerintah Indonesia telah melakukan pembaikan dalam bidang pendidikan. Di antaranya adalah mendirikan sekolah dan madrasah negeri. Di Indonesia, *sekolah* adalah jenis pendidikan yang sudah diperkenalkan oleh Belanda. Sementara *madrasah* pula adalah pendidikan khusus Islam yang sudah diterima oleh organisasi Islam di Indonesia. Namun pada masa kini Pemerintah Indonesia telah mendirikan madrasah negeri, yakni masyarakat diberi subsidi untuk pembinaan madrasah ini.

Namun demikian, pihak pemerintah tidaklah terlalu mengkondisikan pesantren-pesantren tersebut untuk menjadi pesantren-pesantren kombinasi. Pihak pemerintah telah membuat banyak program untuk pesantren Salafi khususnya. Yaitu dengan program-program Wajar Dikdas Salafiyah, Program Muadalah, Program Paket A, B, dan C, bahkan pemberian beasiswa untuk murid berprestasi (Kemenag, 2009).

Secara nasional, memang pesantren telah diapresiasi oleh pihak pemerintah sebagai institusi yang secara massif memberantas buta huruf, bahkan secara umum mengamalkan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun. Dengan Program Wajar Dikdas ini santri peserta program dapat belajar mata pelajaran umum wajib yang biasanya diujikan secara nasional. Mereka yang lulus program ini bias meneruskan program pendidikan di atasnya

baik keagamaan ataupun lainnya, seperti menjadi pelajar pada jurusan-jurusan pertanian, kedokteran, teknik, dan sebagainya, karena mendapat ijazah yang diperlukan. Dari tahun ke tahun jumlah pesantren dan santri yang mengikuti program ini semakin bertambah dari hanya 16 pesantren dan 500 santri pada tahun 2001 menjadi 5,211 pesantren dan 397,366 santri pada tahun 2008 (Kemenag, 2004 dan 2009).

Untuk lebih jelas, berikut dinyatakan peranan pesantren dalam pembangunan masyarakat secara umum dan pembangunan masyarakat pedesaan khususnya:

a) Sebagai institusi pendidikan yang bercorak Islam di pedesaan, pesantren menjadi pusat pembinaan mental spiritual keislaman. Kebanyakan dari pesantren tersebut menjadi pusat orientasi (anutan) orang ramai. Sebelum komunikasi berkembang pesat seperti sekarang, institusi ini menjadi pusat kebudayaan oleh masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, pesantren bukan saja merupakan pusat pendidikan tetapi tempat pembinaan kesadaran sosial, ekonomi, dan lain-lain bagi warganya dan juga masyarakat setempat.
b) Meskipun keadaan pesantren itu berbeda-beda, tetapi mereka mempunyai potensi dan kemampuan untuk mengatasi masalah masing-masing. Walaupun menghadapi beberapa masalah, mereka dapat mengembangkan potensi masing-masing melalui peningkatan sumber daya manusia yang profesional dan keterampilan sekiranya bantuan diberikan. Dalam hal ini peranan kyai sangat strategis dan menentukan pengembangan pesantren itu sendiri.
c) Peranan kyai dan pembantunya bukan saja menjadi perhatian pemimpin formal di kawasan pedesaan bahkan pemimpin formal pada peringkat nasional. Banyak fakta dan data yang menunjukkan pembangunan masyarakat pedesaan lebih dahulu

dipelopori oleh mereka yang didukung oleh para kyai atau terus kyai sendiri yang kemudian didukung oleh pihak pemerintah.

d) Nilai keagamaan yang dilaksanakan oleh pesantren memiliki potensi besar untuk mengubah sumber daya manusia dan masyarakat sekitarnya dari masyarakat yang pasif kepada masyarakat yang proaktif. Sejalan dengan pemupukan nilai-nilai spiritual dan kekuatan etos keagamaan yang dimiliki pesantren, kondisi ini bisa memberikan sumbangan yang positif dalam mengisi dan memperkuat nilai-nilai spiritual dan etika dalam kehidupan modern, sekaligus menjauhkan masyarakat dari agama. Akibatnya, tindakan menghalalkan segala cara dan tidak berlandaskan moral sering mewarnai kehidupan masyarakat modern dewasa ini.

e) Tradisi keilmuan yang dimiliki pesantren mempunyai peranan penting dalam usaha memajukan masyarakat. Mereka yang berilmu menjadi pembimbing masyarakat ke arah cita-cita yang menjadi tujuan bersama, yaitu kesejahteraan hidup. Kemampuan untuk bersaing demi meningkatkan kesejahteraan hidup datang dari sumber daya manusia yang berkualitas, yakni yang berilmu dan mampu mengembangkan serta mengamalkan ilmu. Hal ini dapat dilihat dari tradisi usaha pesantren yang menanamkan etos keilmuan kepada para santrinya.

f) Semangat solidaritas sosial dan hidup bersama yang dimiliki pesantren menjadi landasan moral untuk membangun masyarakat, lebih-lebih lagi pesantren berada dalam lingkungan masyarakat yang relatif rendah taraf hidupnya. Hal ini menjadikan kedudukan pesantren sebagai wahana untuk mengatasi kemunduran masyarakat. Usaha peningkatan taraf hidup masyakarat di sekitar pesantren bukanlah tugas mutlak pesantren. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah dengan pesantren untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar pesantren, mesti diwujudkan. Hal ini berkaitan erat dengan strategisnya kedudukan pesantren dalam kalangan masyarakat. Pengembangan

pola perkawanan yang efektif antara usaha dan pesantren seperti pendirian koperasi di setiap pesantren, amat menguntungkan kedua belah pihak.

g) Sumber daya manusia yang bermutu menjadi penentu kemajuan pesantren di masa depan. Oleh yang demikian, peningkatan mutu pendidikan di pesantren merupakan salah satu cara utama pengembangan sumber daya manusia Indonesia, yang beriman dan bertakwa terhadap Allah Swt. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi mutu pendidikan di pesantren, semakin tinggi mutu manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Allah. Pada hakikatnya, keadaan ini dapat amat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
h) Sikap mandiri pesantren, selain ukuran dari kemampuan, yaitu mampu dalam upaya meningkatkan diri baik secara peribadi, maupun secara komunitas, juga berkaitan dengan sikap mentalitas untuk maju. Sikap ini secara sadar atau tidak, dimulai dari pengajaran pesantren yang menggunakan metode *sorogan* (belajar secara individu semasa mendalami ilmu keagamaan tertentu). Sikap mandiri ini didapati sangat positif dan menjadi faktor dalam membentuk nilai kemajuan hidup.
i) Kemauan dan keterbukaan dari kalangan pemimpin pesantren (kyai) dan pengurus pesantren diperlukan untuk mengoptimalkan segenap potensi yang ada dalam setiap pesantren, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia agar lebih berperanan dalam pembangunan masyarakat yang adil dan makmur.

Pesantren yang dikenal sebagai sebuah institusi pendidikan agama yang mampu berdiri sendiri, pada dasarnya bersifat "tradisional" dan merupakan institusi yang terletak di pedesaan (Prasodjo, *et al.*, 1982). Sementara itu, modernisasi memang merupakan

suatu gelombang dunia yang kemudian diadopsi oleh negara-negara berkembang. Maka, jadilah program-program pembangunan pun bergulir di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan demikian, mengkaji pesantren pada mulanya adalah dengan pendekatan modernisasi (*modernization approach*).

Dengan pendekatan modernisasi tersebut, nyatalah bahwa pesantren diuji apakah ia mengadopsi modernisasi, menolaknya, atau pun mencampurkannya dengan tradisi yang sudah ada. Inilah yang pertama diselidiki dalam kajian ini. Tentu saja tidak bisa sepenuhnya digunakan teori-teori modernisasi yang bersifat penerapan dasar-dasar politik ataupun ekonomi yang makro seperti dari W.W. Rostow (1960) yang mempunyai teori tentang lima tahapan modernisasi ataupun teori-teori keterbelakangan (*dependency theory*) dari Cardozo, Santos, Galtung, Frank ataupun Roxborough. Apa yang mungkin adalah meneliti tentang bagaimana pesantren memodernkan dirinya. Yang dapat dilihat, kemudian, adalah perubahan sosial. Maka, teori-teori perubahan sosial seperti yang diungkapkan oleh Parsons (1963, 1971) pun diperlukan di sini.

Perubahan sosial yang terjadi di pesantren dapat dilihat dengan pendekatan sistemik dari Bertalanffy (1973) dan Albrecht (1978). Di sini yang diperlukan adalah standard-standard organisasi modern untuk melihat sejauhmanakah kemodernan diadopsi oleh pesantren. Teori-teori manajemen modern pun digunakan untuk menjelaskan hal ini, bermula dari teori manajemen modern yang dijelaskan oleh Huse (1979), Weihrich (1985), Koontz (1986) sampai teori tentang manajemen sekolah seperti yang dikenalkan oleh Poston, Stone, dan Muther (1992).

Setelah mengetahui sejauhmana pesantren memodernkan dirinya, tibalah saatnya untuk meneliti permasalahan kedua dalam kajian ini, yaitu peranan pesantren dalam pembangunan masyarakat desa pada masa kini. Demikian karena pesantren dikenali pula sebagai institusi sosial yang berpengaruh (Prasodjo, *et al.,* 1982). Hal

ini dapat dilihat dari beberapa tesis tentang pesantren dan pembangunan masyarakat yang dapat diambil dari kajian-kajian yang lalu, yaitu:

1. Pesantren sangat berperanan dalam pembinaan spiritual. Dari awal pendiriannya, pesantren sering menjadi pusat pemupukan spiritual umat Islam, terutama dalam organisasi-organisasi tarekat (Bruinessen, 1999; Praja dalam Nasution, 1990).
2. Pesantren berperanan dalam pembangunan ekonomi. Ada pesantren pertanian seperti Pesantren Darul Falah di Bogor (Prasodjo *et al.,* 1982) atau pesantren agribisnis seperti Pesantren al-Ittifaq di Bandung (Syahid [ed.], 2003).
3. Pesantren berperanan dalam pembangunan politik. Hal ini terutama terlihat ketika pesantren dijadikan sebagai benteng budaya politik tandingan (*counter culture*) bahkan sebagai pusat gerakan menentang penjajahan (Samson dalam Jackson, 1970). Pada masa Orde Baru (masa Pemerintahan Soeharto) sebagian pesantren telah dijadikan agen politik pemerintah Indonesia (Cahyono, 1992).
4. Pesantren berperanan dalam pembangunan sosial. Misalnya, pesantren berperanan dalam menyembuhkan penyakit masyarakat seperti masalah dadah (Abdul Kadir, 1990), diminta mengobati orang sakit dan diminta untuk melariskan barang dagangan (Geertz, 1960).
5. Pesantren berperanan dalam pengembangan budaya. Pesantren memiliki tradisi yang khusus, yang disebut sebagai "*subculture*" pesantren (Wahid, dalam Rahardjo, 1995), yaitu misalnya budaya pengajian, muzik rebana, musabaqah tilawah al-Qur'an, dan lain-lain yang kesemuanya telah mewarnai budaya masyarakat Indonesia. Namun seiring dengan berjalannya waktu, budaya-budaya modern pun datang dan diserap serta disebarkan oleh pihak pesantren kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam budaya modernisasi tanah wakaf yang

berdasarkan tatacara undang-undang modern, juga modernisasi kepemimpinan yang tadinya bersifat individual menjadi kolektif dan hal-hal modern lainnya yang lebih rasional dan terhitung (Sukamto, 1999).

6. Pesantren berperanan dalam pembangunan teknologi. Sebagai tempat berkumpulnya orang-orang pedesaan, pesantren dapat dijadikan agen untuk penyebaran teknologi. Bermula dengan penyebaran teknologi yang agak sederhana seperti teknologi pertanian, pesantren telah pun bersedia sebagai agen pembangunan teknologi (Syahid [ed.], 2003).
7. Pesantren merupakan salah satu institusi kemasyarakatan yang memainkan peranan yang cukup besar dalam proses pembangunan masyarakat, khususnya di pedesaan. Peranan pesantren seperti itu berlangsung dengan memusatkan perhatian pada kompleksitas institusi pesantren yang memiliki struktur dan aktivitas yang cukup aktif untuk membangun masyarakat sekitarnya (Rahardjo, 1995).

Tentu saja pesantren tidak serta merta membangun desa di sekitarnya tanpa adanya rangsangan program-program pembangunan dari pihak pemerintah. Untuk hal ini pun diperlukan adanya teori-teori pertukaran dan sosiologi pembangunan yang melihat sejauhmana interaksi antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat sekitar tentang pembangunan. Dari sinilah munculnya teori dualisme yang dipikirkan Boeke (1953) dan masyarakat transisi atau prismatik dari Abraham (1991) dan Riggs (1985).

Mengingat bahwa pesantren itu merupakan institusi pendidikan tertua yang masih ada di Indonesia, sudah mestilah banyak hal yang membuatnya bertahan hidup dan bahkan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Tulisan ini memperhitungkan pembangunan sosial yang merupakan suatu program kesejahteraan atau bantuan bagi orang miskin melalui keperluan asasnya, yang bukan saja

mencakup peluang untuk memperoleh pendapatan, malahan juga akses terhadap perkhidmatan awam, seperti pendidikan, kesihatan, perumahan, pengangkutan, air bersih, dan lain-lain (Korten dan Alfonso, 1981). Demikianlah konsep pembangunan di sini adalah konsep "pembangunan integratif".

C. Karakter Kemodernan Islam

Yang dimaksud dengan karakter Islam adalah nilai-nilai karakter yang diakui Islam sebagai karakter yang baik, yang dapat menyelamatkan manusia di dunia maupun di akhirat. Afirmasi ini dapat kita rujuk pada *nash-nash* al-Qur'an maupun Hadits. Dengan demikian, pembahasan nilai-nilai karakter ini dilakukan dengan memakai metode *mawdhu'i* (tematik). Yaitu, pembahasan dengan menyertakan ayat-ayat al-Qur'an atau hadits-hadits Nabi, ditambah dengan pendapat para ulama mengenainya.

Apa yang disebut karakter dalam Islam adalah akhlak. Dan akhlak yang tinggi yang harus dicontoh oleh umat Islam adalah akhlak Rasulullah. Karena padanyalah akhlak yang agung dipraktekkan (68: 4). Karakter dasar kebaikan manusia berjalan sejalan ditiupkannya Ruh Tuhan pada manusia (15: 29).

Yang penting untuk penumbuhan karakter pembangunan adalah penanaman karakter Islam untuk aspek individual. Di sini, individu harus berbuat dan bersikap terhadap dirinya sendiri. Untuk menumbuhkan karakter yang membawa pada semangat *community development*, hal-hal berikut yang berdasarkan dari dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits merupakan hal-hal yang selalu diingat dan diajarkan di pesantren.

1. Kerja Keras

Bekerja merupakan keperluan yang niscaya bagi manusia. Karena, dengan bekerjalah manusia dapat memenuhi keperluan hidup-

nya, atau lebih jauhnya dapat mencapai kebahagiaan yang diingininya. Oleh karena itu, maka tak heranlah jika manusia disebut sebagai makhluk pekerja atau pencipta (*homo creator*).

Namun, bagi umat Islam, bekerja bukanlah sekedar memenuhi hajat hidupnya saja. Bagi mereka bekerja adalah hal yang *complicated* yang menyangkut pula masalah ketuhanan dan aspek-aspek lainnya. Di sini dijelaskan tentang aspek-aspek yang menjadi maksud dan tujuan bekerja menurut visi Islam.

Tujuan bekerja dalam Islam bukanlah sekedar memenuhi naluri alamiah sebagai makhluk hidup, yaitu hidup untuk kepentingan kelangsungan hidup (*survival*) saja. Islam memberikan pengarahan kepada satu tujuan filsafat yang luhur, tujuan yang mulia, tujuan ideal yang sempurna yaitu untuk ber-*ta'abbud*, memperhambakan diri, mencari keridhaan Allah Swt.

Demikian itu dikarenakan Allah tidak menjadikan kita kecuali supaya kita menyembah kepada-Nya. Dalam al-Qur'an dijelaskan: "Dan Aku (Allah) tidak menjadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku" (Q.S. al-Dzariyat [51]: 56).

Sebab lain adalah bahwa dengan ridha Allah-lah manusia dapat mencapai kebahagiaan yang didambakannya. Firman-Nya:

> Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada-Nya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya (Q.S. al-Bayyinah[98]: 8).

Dengan tujuan mencari ridha Allah itulah maka seorang Muslim mempunyai niat yang baik, yaitu keikhlasan sebagai budaya kerja. Dengan keikhlasan itu, maka tidak ada tujuan lain yang menyertai pekerjaan itu kecuali hanya kepada Allah. Itulah keutamaan dalam bekerja. Sedangkan manfaat-manfaat lain peringkatnya berada di bawah itu.

Banyak sekali keuntungan yang boleh kita ambil daripada keikhlasan ini, terutama dalam hal professionalisme. Sebab dengan keikhlasan, maka tidak ada suatu pun yang menghalangi seorang Muslim untuk bekerja sebaik-baiknya dalam rangka menuju ridha Allah.

Ikhtiar memenuhi keperluan hidup sehari-hari adalah perintah agama. Hal ini tertera dalam al-Qur'an: "Carilah kebahagiaan yang disediakan untukmu oleh Allah di hari akhirat kelak, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia" (Q.S. al-Qashash [28]: 77).

Memenuhi keperluan sesuai dengan naluri tentulah harus terarah dengan tujuan mulia dan mengikuti jalan yang lurus yang diridhai oleh-Nya. Maka kita diperintahkan makan barang yang halal sebagaimana yang dikemukakan dalam al-Qur'an: "Hai manusia, makanlah barang halal dan baik daripada apa yang ada di bumi, dan janganlah kamu menuruti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang terang bagi kamu" (Q.S. al-Baqarah [2]: 168).

Demikian pula dalam hal pakaian, Allah menyuruh untuk menghasilkan dan memakai pakaian yang baik, sekaligus pula menyuruh untuk memakai 'pakaian' takwa: "Hai anak-anak Adam, sesungguhnya telah kami adakan untukmu pakaian untuk menutup aurat kamu dan sebagai perhiasan. Serta pakaian takwa itulah yang terbaik" (Q.S. al-A'raf [7]: 26).

Tujuan bekerja yang lain adalah menafkahi keluarga, dan ini merupakan tugas dari kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga bertanggungjawab terhadap kebahagiaan dan keharmonian rumah tangganya. Rasulullah bersabda: "Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban dalam hal kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin terhadap keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya" (H.R. Bukhari Muslim).

Bekerja juga dimaksudkan untuk mensejahterakan isteri. Karena dalam Islam terdapat kewajiban menafkahi isteri, sebagaimana

Firman Allah Swt: "Wajiblah bagi seorang kepala rumah tangga untuk membelanjai dan memberi pakaian terhadap isterinya dengan sepatutnya" (Q.S. al-Baqarah [2]: 233).

Begitu mulianya bekerja dengan maksud untuk menafkahi keluarga, sehingga menurut Islam, menafkahi keluarga berganjaran besar. Sabda Rasullah Saw:

> Satu dinar kamu dermakan dalam perjuangan fi sabilillah, dan satu dinar kamu pergunakan untuk memerdekakan hamba sahaya, dan satu dinar kamu sedekahkan pada orang miskin, dan satu dinar yang kamu belanjakan untuk keluargamu, yang terbesar ganjarannya ialah yang kamu belanjakan untuk keluargamu (H.R. Muslim dari Abu Hurairah).

Atau sabdanya yang lain: "Tiada kamu belanjakan apapun juga yang kamu niatkan karena Allah, melainkan mendapat ganjaran, hingga pada makanan yang engkau masukkan dalam mulut isterimu" (H.R. Bukhari Muslim dari Saad bin Abi Waqqash).

Kemudian dalam hadis lain disebutkan: "Apabila seseorang membelanjai keluarganya dengan mengharapkan ganjaran (dari Allah), maka tercatat baginya sebagai sedekah" (H.R. Bukhari Muslim).

Sebaliknya, mengabaikan keluarga dan tidak bekerja untuk memberi nafkah pada keluarga adalah dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *"Cukuplah bagi seseorang itu dosa kalau ia mengabaikan (nafkah) orang yang menjadi tanggungannya"* (H.R. Nasa'i dari Abdullah bin Umar).

Manusia selaku makhluk bermasyarakat (*homo socius*), saling bergantung antara satu dengan yang lainnya dalam memenuhi hajat hidupnya yang menuntut bantuan tenaga, pikiran, dan dana; atau guna melakukan peribadatan bersama seperti kurban, sedekah, dan sebagainya. Di sinilah dianjurkannya kita saling tolong menolong, sebagaimana firman Allah Swt. "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong

menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan" (Q.S. al-Ma'idah [5]: 2).

Memang seluruh kerja umat Islam –bahkan seluruh hidupnya— adalah ibadah. Sayyidina Ali r.a. menyebutnya sebagai *hayātunā kulluhā 'ibādah* (hidup kita semuanya adalah ibadah). Secara umum demikianlah adanya, seperti sebelumnya telah disebutkan dengan banyak mengutip ayat al-Qur'an dan al-Hadis.

Namun, jika ada di antara kita yang berpikiran bahwa yang disebut ibadah itu hanyalah yang *mahdhah* saja, maka kita dapat menelusuri pemikiran berikut dalam hubungannya bahwa bekerja itu ibadah sama seperti ibadah *mahdhah*. Dalam memenuhi peribadatan yang khusus (*ritual-ceremonial*) atau yang biasa disebut sebagai ibadah *mahdhah* kita mau tak mau dituntut untuk bekerja.

Jelasnya, ketika kita diperintah Allah untuk sembahyang, maka secara tidak langsung kita pun diperintah untuk mempersiapkan sarana dan prasarana untuk sembahyang, seperti penyediaan air wudhu yang suci, tempat sujud yang bersih, dan lain-lainnya. Demikian pula ibadah *mahdhah* yang lain seperti zakat, haji, kurban, dan lain-lainnya semuanya memerlukan kerja yang saling terkait.

Kegiatan kerja ini, betul-betul mulia, dan bahkan menurut ulama *usul fiqh* adalah sama wajibnya dengan peribadatan yang dituju-nya. Sebab, menurut mereka: *"al-amru bi syai'in amrun biwasāilihi"* (Perintah terhadap sesuatu adalah juga perintah terhadap perantaranya).

Atau dalam kaidah ushul fiqh lainnya: *"Mā lā yatimmu al-wājib illa bihi fahuwa wājib"* (Apa saja yang tidak akan sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengan sesuatu yang lain, maka yang kedua itu pun wajib adanya).

Membiarkan diri miskin dan hidup meminta-minta adalah akhlak tercela. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw., "Apabila seseorang itu terus-terusan minta-minta hingga ia kelak berhadapan dengan

Allah, tanpa sepotong daging pun di mukanya" (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis lain disebutkan: "Siapa yang meminta-minta untuk memperbanyak kekayaan, maka tiada lain hanya memperbanyak bara api. Terserah kamu apakah kamu akan memperbanyak atau menguranginya" (H.R. Muslim).

Selain itu, dengan bekerja yang baik, maka pada saat itu pula pekerjaan yang buruk terkurangi. Karena, banyak data nyata dalam kehidupan bermasyarakat yang menyatakan bahwa kejahatan dan kemunkaran itu terjadi karena adanya pengangguran. Maka, dengan demikian, bekerja dengan baik adalah juga mengurangi bahkan menolak segala bentuk kemunkaran.

2. Berjiwa Wirausaha

Walaupun kebanyakan ayat tentang jual beli itu merupakan ayat-ayat teologis, namun di sisi lain ayat-ayat tersebut telah pula membentuk suatu hukum (*fiqh*) *mu'amalah*. Dalam perkembangannya, kitab-kitab fiqh lebih menonjolkan istilah *buyu*' yang menunjukkan kepada berbagai macam jual-beli seperti: barang dengan barang, barang dengan uang, uang dengan barang (*sharf*), barang dengan tanggungan (*salam*/jual beli secara bertempo), *khiyar* (penentuan laba) dan penambahan (*muzayadah*) (Ibnu Rusyd, 1995: 2). Kata *bay'a* sendiri berasal dari akar kata *al-bā'u* yang berarti mengulurkan tangan. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut saling mengulurkan tangan mereka untuk mengambil dan memberi. Adapun secara istilah, *al-bay'* adalah "saling tukar harta, saling menerima, dan dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab kabul" (Ahmad Isa Asyur, t.t.: 5).

Dalam fiqh, *al-tijarah* atau *al-bay'* yang berarti jual beli ini dikenal sebagai salah satu cara yang dilegalisasi oleh Islam dalam mewujudkan kemaslahatan ummat berkaitan dengan harta. Landasan al-Qur'an yang terkenal adalah bahwa "Allah telah menghalalkan jual

beli dan mengharamkan riba" (Q.S. 2: 275), dan "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S. 4: 29). Walhasil, al-Qur'an menyebut *tijarah* (perdagangan) dengan sifat atau indikasi yang menunjukkan bahwa perdagangan itu merupakan suatu usaha yang diridhai Allah, yaitu dengan digunakannya istilah "*ibtigha min fadlillah*" (mencari karunia Allah), seperti tersurat dalam Firman Allah, "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah" (Q.S. 62: 10).

Selain al-Qur'an, hadits-hadits Nabi Saw. pun seringkali dikutip untuk menegaskan legalisasi jual beli ini. Di antara hadits-hadits itu misalnya, "Hendaknya kalian mencari kayu bakar untuk dijual, karena perbuatan itu lebih baik daripada meminta-minta terhadap orang lain, baik diberi maupun tidak" (Bukhari, I, 1994: 316). Dalam hadits lain disebutkan bahwa *"Perolehan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur"* (Ahmad, II, t.t.: 208). Kehalalan jual beli dan penekunannya itu sudah berlaku (dibenarkan) oleh ummat Islam (*ijma'*) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini (Sayyid Sabiq, III, 1983: 127).

Keterangan-keterangan tersebut mengungkapkan bahwa usaha perdagangan bukan saja halal dan produktif, melainkan juga mulia jika berjalan di atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Tetap mengumpulkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, Islam tetap mengharamkan perdagangan barang yang membahayakan masyarakat, baik terhadap tubuh maupun rohani mereka. Hal ini dikenal dengan ungkapan *Lā dharār wa lā dhirār* (Tidaklah boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri ataupun membuat kemudharatan pada orang lain).

2. Antara dua penyelenggara mu'amalah tetap ada keadilan, dan harus tetap ada kebebasan ijab kabul dalam setiap akad.
3. Tetap berpengaruhnya rasa cinta dan lemah lembut antara dua penyelenggara mu'amalah itu bahkan juga dengan yang lain. Dalam hadits dinyatakan, "Allah merahmati seorang hamba yang murah hati apabila berjualan atau membeli atau menagih utang" (Bukhari, I, 1994:256).
4. Jelas dan jauh dari perselisihan. Dengan demikian, tidak boleh melakukan *gharar* (samar-samar), pemalsuan, maupun penipuan.

D. Praktik Pendidikan Karakter

1. Praktik Pendidikan Karakter di Pesantren

Selain dalil-dalil yang menjadi pedoman etis, praktik sehari-hari di pesantren pun memicu jiwa *community development* pada diri santri. Karena dengan teori dan praktik itulah maka jiwa kemajuan akan melekat pada para santri. Inilah yang disebut dengan penanaman karakter.

Penanaman karakter pada anak bukanlah hal yang baru. Setiap orang tua di segala zaman selalu menanamkan karakter pada anaknya. Demikian karena hidup tanpa karakter berarti hidup tanpa tujuan, tanpa ruh, dan tanpa semangat. Karakter sebagai modal psikomental, dengan demikian, harus diturunkan kepada anak sejalan dengan menurunkan kemampuan mereka untuk terus hidup. Itulah yang selalu dilakukan oleh para orang tua.

Secara umum kita bisa katakan bahwa teori-teori penanaman karakter sesuai dengan kehendak masyarakat, atau apa yang disebut sosialisasi sangatlah bertaburan. Misalnya, ada teori yang menumpukan perhatian pada beberapa hal seperti melihat perkembangan kognitif (seperti Piaget), penanaman moral dan identitas personal melalui hubungan kekeluargaan (seperti Freud), penerap-

an kategori moral dan nilai (seperti Durkheim), konsep diri dan identitas sosial (seperti Mead), dan perkembangan keterampilan sosial yang membuat keberhasilan interaksi, terutama dalam komunikasi linguistik (seperti Bernstein).

Memang, secara sosiologis, karena kita berkembang dan bermasyarakat, di masyarakat kita muncul pembagian tugas, yaitu adanya tenaga yang mengajarkan kemampuan dan karakter kepada generasi muda (Rahman, 2011). Mereka dikenal dengan guru, ustadz, dan sebagainya. Dan mereka tidak hanya mengajar dari rumah ke rumah, atau di rumahnya, atau di tempat ibadah. Mereka pun mempunyai lembaga pendidikan.

Maka, kepada guru-guru di lembaga-lembaga pendidikan itulah tiap-tiap keluarga menitipkan anak-anaknya untuk dididik. Di situlah karakter pun tertanam, tumbuh, dan berkembang. Demikian karena di lembaga-lembaga pendidikan itulah generasi muda kita diasuh, dididik, bahkan menghabiskan waktunya setelah di rumah mereka.

Kemudian, selain pendidikan yang berdasarkan kurikulum yang formal, lembaga pendidikan juga melatih anak-anak didiknya dengan pendidikan sampingan (ko-kurikulum). Yang berbeda adalah fokus kokurikulum tersebut. Misalnya, di pesantren-pesantren tradisional, keterampilan hidup yang ditawarkan kepada santri ialah keterampilan hidup di pedesaan seperti masalah pertanian (Mustari & Rahman, 2010). Sementara itu, di pesantren-pesantren modern, keterampilan hidup sudah mengarah kepada gaya profesionalisme hidup di kota seperti latihan jurnalistik, bahasa Inggeris, keterampilan berdebat dan retorika, dan lain-lain. Namun begitu, semua keterampilan hidup tersebut masih bersifat kokurikulum. (Wawancara dengan Kepala SMA Plus Muallimin Persis Rajapolah, Tasikmalaya, 18 Oktober 2008).

Keterampilan hidup yang menjadi kurikulum pesantren sudah dilaksanakan di pesantren-pesantren kombinasi yang sudah membuka sekolah-sekolah kejuruan (SMK). Di sini, santri-santri menjadi

tenaga profesional menengah ketika tamat dari sekolah-sekolah kejuruan tersebut. Sekolah-sekolah tersebut menginduk pada Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdikbud) yang mempunyai kurikulum yang dikhususkan untuk melahirkan tenaga profesional menengah. Di SMK ini keterampilan hidup sudah dijuruskan supaya pembelajaran menjadi lebih terfokus. Misalnya jurusan otomotif untuk keterampilan perbengkelan mobil; jurusan pembangunan untuk keterampilan pembangunan rumah; jurusan bisnis untuk keterampilan administrasi dan perniagaaan, dan sebagainya.

Diakui oleh salah seorang pemimpin pesantren jenis kombinasi ini (yaitu Kyai Asep Rifa'i, dari Pesantren Ar-Riyadh Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya) bahwa dengan berdirinya sekolah kejuruan di pesantrennya, santri-santri semakin banyak yang datang dan bermukim di pesantren. Hal ini sangat berkaitan erat dengan tujuan dunia (yaitu pandai untuk hidup *survival*) dan tujuan akhirat (yaitu memahami ilmu agama) yang dilaksanakan secara bersamaan di pesantren gabungan *salafi* dan *khalafi* tersebut (Wawancara di Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, 19 September 2008).

Tentang hal ini Pesantren Suryalaya mempunyai tujuan, yaitu santri harus mempunyai kualitas sebagai hamba Allah (Abdullah) dan wakil Allah di muka bumi (Khalifah) secara sekaligus, tidak separuh-separuh (*Satu Abad Pondok Pesantren Suryalaya*, 2005).

Demikianlah, dengan kokurikulum lembaga pendidikan agama seperti pesantren pun dapat memberi semangat kepada para santrinya untuk mempunyai karakter tidak pantang menyerah, optimis, dan bekerja keras. Tidak heran jika pesantren tidak hanya mampu melahirkan ulama saja, malah bisa pula memunculkan orang yang mampu menjadi pekerja dalam berbagai bidang. Demikian karena pesantren sekarang lebih banyak mengajarkan berbagai keterampilan.

Yang paling terlihat dari lembaga pendidikan adalah kedisiplinan. Setiap lembaga pendidikan sudah pasti menerapkan disiplin

kepada anak-anak didiknya. Namun, yang paling nampak kedisiplinan itu diterapkan di lembaga pendidikan pesantren. Upaya pesantren untuk membentuk kepribadian yang taat beragama ditunjang dengan strategi luar (lahir) yang berbentuk kegiatan pendidikan dan pembinaan diri selama 24 jam sehari dan strategi dalam (bathin) berbentuk ibadah ritual yang dilakukan secara bersama-sama (berjamaah) seperti latihan hati (*Riyadloh Qalby*), tadarus al-Qur'an, shalat berjamaah awal waktu, shalat tahajud dan duha, dan lain-lain.

Dengan pembinaan kepribadian muslim tersebut yang dibentuk oleh pesantren diharapkan santri menjadi insan yang mempunyai disiplin yang tinggi. Hal itu diperkukuh dengan tatatertib. Walaupun pada mulanya disiplin tersebut diawasi oleh para ustadz dan santri senior, namun pada akhirnya santri sendiri sudah dapat mengikuti pola hidup pesantren secara mekanistik dan otomatis. Setiap kegiatan dibedakan dengan bunyi bel. Hal ini dilakukan, misalnya, di pesantren al-Furqon Muhammadiyah Singaparna. Lain halnya dengan kehidupan santri di Miftahul Huda. Tidak ada lonceng sama sekali. Oleh karena itu, santri perlu sentiasa mengingat jadwal mereka. Jika tidak, santri-santri senior akan mengingatkan mereka dengan cara menyapu (*sweeping*) ke seluruh pelosok bangunan pesantren (Wawancara dengan anggota Resimen Santri [Ressant] di Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya, 19 Oktober 2008).

Disiplin memang nampak keras, tetapi dengan disiplin didapati suatu kepastian. Yaitu kepastian untuk mencapai sesuatu yang baik. Disiplin adalah usaha untuk membuat keras tubuh kita yang suka akan yang lunak-lunak. Dengan kekerasan hati, kita akan mendapat suatu yang kita inginkan. Di pesantren, disiplin adalah hal yang utama yang harus ditanamkan pada diri setiap murid (santri). Banyak keluaran pesantren yang hebat-hebat pada masa dewasanya adalah karena mereka berdisiplin dalam hidup mereka, persis seperti ketika mereka belajar di pesantren.

Memang, kunci sukses pembinaan pengembangan manusia di pesantren tertumpu pada sikap rutin, yaitu terus-menerus melakukan pembinaan diri para santri. Hal ini didasarkan pada niat dan pandangan luhur para kyai bahwa santri yang ada di bawah bimbingannya merupakan *amanah* Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi. Mereka juga diberi bekal, yakni ilmu pengetahuan, untuk menghadapi kehidupan ketika tamat pendidikan di pesantren. (Wawancara dengan Kepala Tata Usaha Pesantren al-Furqon, Singaparna, Tasikmalaya, 17 Oktober 2008).

Namun demikian, dalam hal penanaman disiplin ini, pihak pengelola lembaga pendidikan janganlah hanya tertumpu pada hal-hal yang bersifat fisik saja, tanpa penghayatan. Renungan-renungan dari hati sanubari perlu ditanamkan kepada anak-anak didik agar semua disiplin itu diresapi dan diinternalisasi ke dalam diri santri.

Lembaga pendidikan juga harus mendorong anak didiknya untuk bisa belajar sendiri (otodidak). Demikian karena, dengan otodidak para murid atau santri dapat mengerahkan pikiran dan kemampuannya sendiri. Belajar menjadi lebih masuk terserap ke dalam pikiran dan perasaannya. Begitu pula, dengan cara belajar seperti inilah nantinya mereka akan menghadapi dunia.

Cara belajar otodidak ini misalnya dapat menumbuhkan karakter cinta ilmu, rasa ingin tahu, dan bahkan sifat egalitarianisme. Sikap demokratis atau egalitarianisme ini, misalnya, sungguh menonjol di pesantren. Di pesantren, para santri harus belajar bersama-sama yang lain dengan dibantu kyai, para ustadz dan fasilitas yang sama. Tidak ada pemihakan emosional dalam pembelajaran di sini. Para santri diajarkan untuk berpikir sendiri. Para ustadz dan kyai hanyalah mengantarkan para santri pada sumber-sumber yang asli, yang original, dari sumber-sumber Islam. Para santri dibiasakan untuk melihat langsung potret Islam dari al-Qur'an dan al-Sunnah melalui al-Qur'an itu sendiri dan kitab-kitab Hadits. Dengan demikian, tidak ada otoritas merasa benar sendiri atas Islam yang dianut. De-

mikian karena santri maupun ustadz, memegang kitab-kitab yang sama dan pemikiran mereka berdasarkan kaidah *ittiba'*, yaitu *qabūl al-qawl al-qā'il wa anta ta'lamu min ayna ma'khudzuh* (menerima suatu perkataan dari yang berkata dan Anda tahu dari mana sumber pengambilannya).

Keterampilan keagamaan adalah salah satu di antara yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, bahkan sekolah yang bersifat umum sekali pun. Di sekolah-sekolah umum ada guru agama yang membimbing praktek beragama menurut agama masing-masing anak didik. Namun yang sangat menekankan keterampilan keagamaan adalah pesantren.

Pesantren pada dasarnya adalah institusi pendidikan keagamaan. Oleh karena itu, keterampilan yang terutama dibina di pesantren adalah keterampilan yang bersifat keagamaan. Seluk-beluk kehidupan beragama mestilah dikuasai oleh santri keseluruhannya. Begitu juga setelah keluar dari pesantren, santri sudah mampu memperlihatkan dirinya sebagai seorang alim. Di sinilah dipupuknya rasa percaya diri.

Seorang santri itu sebelum keluar dari pesantren harus sudah dapat menghafal sekurang-kurangnya Juz 'Amma (Juz ketigapuluh) dari al-Qur'an, menghafal dalil-dalil populer dari al-Qur'an dan Hadis, menghafal doa-doa yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, mengetahui tatacara khutbah, mengimami shalat, dan mengajarkan Islam (Dari Dokumen Resmi Pesantren Miftahul Huda dan Wawancara dengan Pemimpin Pesantren al-Furqon Muhammadiyah, Singaparna, Tasikmalaya, 19 September 2008).

Memang, setelah tamat mengaji di pesantren, masyarakat menuntut santri untuk menjadi pemimpin keagamaan dalam lingkungan (tempat) mereka, baik sebagai seorang khatib, imam shalat, penceramah dalam pengajian, ataupun menjadi guru agama untuk anak-anak usia sekolah (Wawancara dengan Pemimpin Pesantren Persis Ciberekah, Rajapolah, Tasikmalaya, 16 Oktober 2008).

Di Pesantren Miftahul Huda, semua keterampilan keagamaan tersebut dipelajari dan dinilai sebelum tamat belajar. Di pesantren-pesantren modern pun begitu juga. Di sana, teori dan praktek untuk membina calon guru atau guru masyarakat sangat ditekankan. Hal ini pada akhirnya akan membina rasa percaya diri santri apabila kelak mereka terjun ke masyarakat.

2. Sambutan Pemerintah terhadap Sekolah Berbasis Pesantren

Sekolah berbasis pesantren memang sudah banyak berkembang tumbuh di masyarakat. Hal itu kebanyakannya merupakan respons pihak pesantren dan masyarakat pada umumnya atas perkembangan zaman yang menuntut diapresiasinya ilmu-ilmu kemodernan. Namun, apresiasi itu tentu berbeda-beda dari segi pelaksanaannya. Demikian karena pihak pesantren pun berbeda-beda dari segi kemampuan dan resepsinya atas pendidikan model sekolah. Dari sini muncullah respon dari pihak pemerintah.

Dalam apresiasinya terhadap pesantren yang mendirikan sekolah, pihak pemerintah telah melakukan pengkajian dan menyiapkan berbagai macam proyek untuk membantu kelancaran sekolah berbasis pesantren. Dalam apresiasinya, menurut pemerintah (Kemdikbud, 2012), Sekolah Berbasis Pesantren (SBP) adalah sekolah yang mengintegrasikan keunggulan sistem pendidikan sekolah dan pesantren. Pada tataran implementasinya, SBP menitikberatkan pada: (a) peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia serta kemandirian dalam hidup (b) pengembangan kemampuan akademik dan keterampilan. Pilihan memadukan sistem sekolah dan pesantren ini diambil setelah melihat dan mengamati secara seksama mutu pendidikan yang dilahirkan oleh masing-masing sistem. Secara umum, pesantren dan sekolah merupakan dua satuan pendidikan yang masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda satu sama lain. Bila mereka berjalan sendiri-sendiri, ada potensi dan kekuatan pendidikan yang pemanfaatannya kurang optimal. Namun bila ke-

dua unggulan itu dapat disatukan, maka akan lahir sebuah kekuatan pendidikan yang komprehensif untuk melahirkan anak Indonesia yang unggul.

Kemdikbud (2012) menilai keunggulan yang dikembangkan dalam SBP adalah nilai-nilai keunggulan yang dimiliki oleh sistem pesantren dan keunggulan yang dimiliki oleh sistem persekolahan. Nilai unggul yang dimiliki sistem pesantren adalah kekuatannya dalam pengembangan akhlak mulia dan pembinaan kepribadian, sedangkan nilai unggul yang dimiliki sistem sekolah adalah kekuatannya dalam pengembangan mutu akademis.

Program SBP yang dikembangkan melalui kerja sama Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama ini telah dimulai pada tahun 2008 dan saat ini diikuti oleh SMP di 111 pondok pesantren, tersebar di 86 kabupaten/kota, 26 provinsi. Pada tahun 2012 ini direncanakan akan dikembangkan lagi program SBP di 39 pondok/SMP. Sehingga seluruhnya berjumlah 150 SMP Berbasis Pesantren (Kemdikbud, 2012).

Untuk mendorong pencapaian tujuan yang diharapkan, berbagai langkah telah diambil dalam bentuk bantuan pemenuhan ketersediaan sumber daya pendidikan, seperti bantuan pembangunan RKB dan ruang belajar lainnya, alat pembelajaran, workshop pengembangan KTSP, bantuan pembinaan SBP, bantuan pengembangan SBP. Upaya-upaya tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan lima misi Direktorat Pembinaan SMP, yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian memperoleh layanan pendidikan yang bermutu (5 K). Untuk lebih memperkuat kemampuan SMP Berbasis Pesantren dalam mencapai tujuan, pada tahun 2012 Direktorat Pembinaan SMP akan melanjutkan program bantuan komprehensif yang dapat digunakan untuk memenuhi lima misi

(lima K) di atas, khususnya upaya pencapaian peningkatan kualitas dan daya saing.

Di sisi lain, kita mengamati bahwa proses pembelajaran di Indonesia, khususnya pembelajaran mata pelajaran Matematika, Ilmu pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) belum sepenuhnya efektif. Para siswa cenderung sekedar membaca dan menghafal. Proses pembelajaran menjadi kurang menyenangkan, bahkan sebagian siswa menganggap sebagai hal yang menjemukan. Selain itu, pada saat proses pembelajaran tidak ada sikap atau pola pikir ilmiah yang sampai pada siswa. Sebagai gilirannya siswa tidak dapat mengembangkan pola berfikir kreatif dan kritis *(creative and critical thinking)*.

Mutu pendidikan dapat dilihat dari penguasaan para siswa terhadap hasil pembelajaran baik dilihat dari ranah kognitif, afektif maupun psikomotoriknya. Sehubungan dengan itu peningkatan mutu bidang Matematika, IPA dan IPS dipandang perlu untuk dilakukan dan ditampilkan oleh siswa-siswi yang berprestasi sebagai suatu hasil pembelajaran di sejumlah SMP.

Peningkatan mutu pendidikan banyak dipengaruhi beberapa faktor, antara lain kurikulum, sarana dan prasarana serta kompetensi guru untuk mengelola proses pembelajaran. Pengembangan kemampuan dan kompetensi siswa yang berprestasi dapat dilakukan dengan melalui pembinaan dan pelatihan yang sistematis oleh sekolah yang bermutu.

Lomba-lomba bidang akademik merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk memotivasi siswa, guru dan sekolah untuk lebih maju dalam pembelajaran khususnya di bidang Matematika, IPA dan IPS. Selain itu, lomba tersebut juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan siswa terhadap mata pelajaran tersebut.

Demikianlah, untuk meningkatkan kemampuan SMP Berbasis Pesantren dalam mengembangkan kompetensi siswa yang berpres-

tasi agar mampu berkompetisi, dalam pemanfaatan bantuan pembinaan SBP juga dipergunakan untuk pembinaan kompetensi siswa; Kemdikbud telah melakukan banyak hal untuk membantu pesantren.

Langkah apresiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terhadap pesantren di atas hanya merupakan salah satu contoh saja dari pemerintah, yaitu pada SMP. Dalam kenyataannya, seperti sudah disebutkan di atas, ada pesantren-pesantren yang mendapatkan bantuan dari pelbagai kementerian, seperti Kementerian Agama, Kementerian Koperasi, Kementerian Pertanian, dan sebagainya.

E. Kesimpulan

Dari paparan di atas, nampak bahwa landasan etis dan praktis yang dijunjung tinggi dan dipraktikkan di pesantren memang ditujukan untuk pengembangan pribadi-pribadi yang maju, membangun, dan berkarakter. Di sini terlihat peran lembaga pendidikan pesantren terhadap penanaman jiwa kemodernan pada generasi muda, sesuai dengan program pembangunan yang dicanangkan pemerintah.

Pesantren mempunyai peran sentral untuk mendidik generasi muda yang datang kepadanya. Demikian karena selama di pesantren itulah, sehari-hari, para pengelola dan pendidik di pesantren telah menjadi wakil orang tua santri, wakil dari masyarakat, dan bahkan wakil dari pemerintah. Di situlah maka semua pihak (*stakeholders*) perlu terus membantu mengembangkan pesantren. Terutamanya pihak pemerintah, disarankan agar melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi program pengembangan pesantren.

Sebab di sekolah berbasis pesantren, nampak bahwa pesantren menawarkan kemodernan sebagai dasar ajaran kepada para santrinya. Dengan begitu, pesantren ikut merayakan kemajuan manusia

sebagai suatu berkah bagi dunia Islam, bukan sebagai suatu kutukan yang harus ditakuti. Selebrasi kemodernan itu tentu saja dapat diwarnai oleh karakter pesantren yang memang sudah sejatinya mempunyai tradisi keislaman yang kuat. Perpaduan dua kurikulum (yang modern dan yang tradisional) yang membuat sekolah berbasis sekolah kukuh dan mantap dalam menyongsong berbagai tantangan dan cabaran dunia yang cepat berubah ini.

Akhirnya, dengan mengkarakterkan santrinya pada kemodernan, pesantren sebetulnya sudah melakukan perluasan loyalitas pendidikan karakter dari transfer ajaran Islam (doktrinal) ke transfer kepribadian (personal) dan karakter (*character building*) kepada generasi muda. Pada akhirnya, pesantren pun berguna untuk individu yang ikut mesantren, yaitu santri; berguna untuk para orang tua yang menitipkan anak-anaknya; berguna untuk masyarakat; bangsa; bahkan negara. Di sini kelihatan bahwa negara pun terbantukan tugasnya dalam ”mencerdaskan kehidupan bangsa”, dan dengan pendidikan kemodernannya, dapat ”mensejahterakan rakyat.”

Daftar Pustaka

Abdul Kadir, Emo Kastama. 1990. *Inabah Suryalaya*. Tasikmalaya: Serbabakti.

Abdullah, Taufik. 1986. “The Pesantren in Historical Perspective,” in Abdullah, Taufik and Siddique, Sharon (eds.), *Islam and Society in Southeast Asia.* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Ahmad Isa Asyur. t.th. *Fiqh Misal fī al-Mu‘āmalah*, Mesir: Dār al-Fikr.

Ahmad. t.th. *Musnad Ahmad*, Jilid II, Mesir: Dār al-Fikr, t.t.

Albrecht, Karl. 1978. *Successful Management by Objectives: An Action Manual*. New Jersey: Prentice-Hall Inc. & Englewood Cliffs.

Bertalanffy, Ludwig von. 1973. *The General Systems Theory*. New York: G. Braziller.

Boeke, J. H. 1953. *Economics and Economic Policy of Dual Societies*. Institute of Pacific Relations.

Bruinessen, Martin van. 1999. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.

Bukhari. 1994. *Shaḥih Bukhari*, Jilid I, Mesir: Dār al-Fikr.

Cahyono, Heru. 1992. *Peranan Ulama dalam Golkar 1971-1980: dari Pemilu sampai Malari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Dawi, Amir Hasan. 1999. *Penteorian Sosiologi dan Pendidikan*. Tanjong Malim, Perak, Malaysia: Quantum Books.

Gatra, 24 Januari 2007.

Gatra, 3 Januari 2007.

Gatra, 6 Desember 2006.

Geertz, Clifford. 1960. "The Javanese Kijaji: the Changing Roles of a Cultural Broker", dalam *Comparative Studies in Society and History*, Vol. II, No. 2, 1960.

Hadimulyo. 1985. "Dua Pesantren Dua Wajah Budaya", dalam Rahardjo, M. Dawam (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun dari Bawah*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.

Horikoshi, Hiroko. 1987. *Kyai dan Perubahan Sosial*, Diterjemahkan oleh Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.

Huse, Edgar F. 1979. *The Modern Manager*. New York: West Publishing Company.

Ibnu Rusyd. 1995. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid*. Mesir: Dār al-Fikr.

Kemdikbud R.I. 2012. *Panduan Pelaksanaan Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Pembinaan SMP Berbasis Pesantren*. Jakarta: Direktorat PSMP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kemenag R.I. 1983. *Nama dan Alamat Pondok Pesantren Se Indonesia, Proyek Pembinaan dan Bantuan Kepada Pondok Pesantren*. Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kemenag RI.

Kemenag R.I. 1990. *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Kemenag R.I. 2000. *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Kemenag R.I. 2006. *Statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan Tahun Pelajaran 2005-2006*. Jakarta: Bagian Data dan Informasi Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama.

Kemenag R.I. 2009. *Buku Statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan Tahun Pelajaran 2008/2009*. Jakarta: Bagian Data dan Informasi Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama.

Koontz, Harold; O'Donnell, Cyril; and Weihrich, Heinz. 1986. *Essentials of Management*. New York: McGraw-Hill.

Korten, David C. and Alfonso, Felipe B. (eds.). 1981. *Bureaucracy and the Poor: Closing the Gap*. Singapore: McGraw-Hill International Book Company, Copyright by Asian Institute of Management, Makatai, Metro Manila, the Philippines.

Malik, Jamaluddin (ed.). 2005. *Pemberdayaan Pesantren: Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Santri dengan Metode Daurah Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren dan Yayasan Kantata Bangsa.

Mustari, Mohamad, and M. Taufik Rahman. (2010). *Peranan pesantren dalam pembangunan pendidikan masyarakat desa*. MultiPress.

Noer, Deliar. 1978. *Administration of Islam in Indonesia*. Monograph Series No. 58, Cornell Modern Indonesia Project, Ithaca. New York: Cornell University.

Parsons, Talcott. 1963. *Structure and Process in Modern Societies*, 2nd Edition. New York: The Free Press of Glencoe.

Praja, Juhaya S. 1990. "TQN Pondok Pesantren Suryalaya dan Perkembangannya pada Masa Abah Anom (1950-1990)" dalam Harun Nasution, *Thoriqot Qodiriyyah Naqsabandiyyah: Sejarah, Asal-Usul, dan Perkembangannya.* Tasikmalaya: Institut Agama Islam Latifah Mubaroqiyyah.

Prasodjo, Sudjoko *et. al.* 1982. *Profil Pesantren: Laporan Hasil Penelitian Pesantren al-Falak dan Delapan Pesantren Lain di Bogor*, Cetakan ketiga Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

Rahardjo, M. Dawam (ed.). 1995. *Pesantren dan Pembaruan*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

Rahman, M. Taufiq. (2011). *Glosari Teori Sosial*. Bandung: Ibnu Sina Press.

Riggs, Fred W. 1985. *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society*. Boston: Houghton Mifflin Company.

Rostow, W. W. 1960. *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.

Samson, Allan. 1970. "A Conception of Politics and Ideology in Contemporary Indonesian Islam" in Karl D. Jackson, *Political Power and Communication in Indonesia*. Berkeley: University of California Press.

Satu Abad Pondok Pesantren Suryalaya: Perjalanan dan Pengabdian 1905-2005. 2005. Tasikmalaya: Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya.?

Sayyid Sabiq. 1983. *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Mesir: Dār al-Fikr.

Sukamto. 1999. *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

Syahid, Achmad (ed.). 2003. *Pesantren dan Pengembangan Ekonomi Umat: Pesantren al-Ittifaq dalam Perbandingan*. Jakarta: Pekapontren Kemenag R.I.

Wahid, Abdurrahman. 1995. "Pesantren Sebagai Sub Kultur" dalam Rahardjo, M. Dawam, (ed.). *Pesantren dan Pembaruan*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

Weihrich, Heinz. 1985. *Management Excellence: Productivity Through MBO*. New York: McGraw-Hill Book Company.

Weiner, Myron (ed.). 1966. *Modernization: The Dynamics of Growth*. New York: Basic Books Inc.

Widodo, Y. B. 2005. "Dinamika Pembangunan Pedesaan: Masalah Petani Gurem dan Buruh Tani di Pedesaan Jawa," dalam *Masyarakat Indonesia*, Jilid XXXI, No. 2, 2005.

Ziemek, Manfred. 1986. *Pesantren dalam Perubahan Sosial,* Diterjemahkan oleh Butche B. Soendjojo. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.

MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI BERBASIS NILAI
Studi di Binus University, Jakarta

Dr. Lilis Sulastri

A. Pendahuluan

Pendidikan pada dasarnya adalah sebuah upaya sistematis untuk mengarahkan dan membentuk perilaku, mental, serta sikap seseorang agar menjadi manusia yang seutuhnya. Upaya ini umumnya mencakup praktik pengajaran, pelatihan, pembentukan kesadaran, yang dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah lembaga yang berjenjang sesuai dengan pembagian tahapan pendidikan itu sendiri.

Pendidikan yang dipraktekkan dalam konteks lembaga ini tentu tidak bisa tidak bisa dijalankan tanpa adanya manajemen pendidikan dan kelembagaan yang baik. Ia membutuhkan perencanaan, penentuan target dan tujuan, pengelolaan, hingga evaluasi yang tertata sehingga bisa diukur tingkat keberhasilannya. Pendidikan perlu dikelola dengan manajemen yang profesional agar bisa memenuhi kebutuhan dan tuntutan perubahan serta minat masyarakat, bahkan perkembangan disiplin ilmu pengetahuan itu sendiri. Pendidikan tanpa kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan beragam tuntutan perubahan tersebut, yang mencakup juga tuntutan kualifikasi dunia kerja, perkembangan minat dan bakat peserta didik, hingga beragam kecenderungan generasi kontemporer, pada akhirnya hanya akan menjadi pendidikan yang buruk. Pendidikan yang tidak

mampu mengakomodir kebutuhan zaman, hanya akan menghasilkan lulusan yang asal-asalan.

Mengingat hal itu, maka wajar adanya bila lembaga-lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan tinggi dituntut untuk lebih bisa menyiapkan dirinya agar dapat menghasilkan tingkat lulusan sarjana yang mampu untuk hidup dalam era dengan karakteristik yang menantang seperti sekarang. Hal ini dikarenakan semua tuntutan itu pada dasarnya dapat dirangkum pada satu hal, yakni tuntutan akan pendidikan yang lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih. Melalui pendidikan yang berkualitas dan bernilai lebih inilah, sebuah lembaga pendidikan tinggi bisa menjadi perguruan tinggi unggulan dan diminati oleh masyarakat.

Banyaknya jumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia, yang berkorelasi dengan pertambahan jumlah penduduk, pada dasarnya sudah menjadi peluang bagi masyarakat untuk memilih perguruan tinggi mana yang lebih sesuai untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini tentu menjadi catatan bagi pelaksana dan pengelola pendidikan tinggi, bahwa untuk menampung minat dan kebutuhan tersebut, maka mereka harus bisa meningkatkan daya saing dan nilai-nilai keunggulan yang dimiliki agar tetap menjadi pilihan masyarakat. Kesadaran dari pelaksana akan tingkat persaingan dalam konteks pendidikan tinggi ini akan lebih diperlukan ketika Indonesia dihadapkan pada rencana masyarakat ASEAN mulai diberlakukan pada tahun 2015. Pada titik itu, lembaga pendidikan tinggi bukan hanya dihadapkan pada persaingan yang bertingkat lokal, namun juga merambah pada persaingan yang melibatkan perguruan tinggi asing yang nantinya akan menjamur di Indonesia.

Data statistik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Departemen Pendidikan Nasional, dalam hal ini mencatat bahwa secara kuantitas perkembangan perguruan tinggi di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ada banyak satuan pendidikan tinggi (akademi, institut, sekolah tinggi, dan universitas)

yang berdiri setiap tahun. Pada tahun 2012 misalnya, jumlah perguruan tinggi swasta saja (PTS) mencapai 3.214 unit. Sedangkan perguruan tinggi negeri (PTN) mencapai 101 unit. Konteks kuantitatif satuan pendidikan tinggi yang sangat tinggi ini jelas melahirkan tingkat persaingan yang semakin tajam. Ironisnya, banyak perguruan tinggi yang tidak siap dalam menghadapi era persaingan yang semakin kompetitif. Thomas Suyatno (2013), Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTS), menyatakan bahwa 90% perguruan tinggi swasta di Indonesia dinilai tidak siap bersaing dengan perguruan tinggi asing. Hal ini juga bisa dilihat dari statistik pertumbuhan perguruan tinggi yang meski terus mengalami pertambahan, namun jarang sekali di antara perguruan tinggi tersebut yang mampu menjadi perguruan tinggi unggulan.

Persoalan utama dari pendidikan tinggi yang ada adalah persoalan ketidakmerataan dan kesenjangan infrastruktur pendidikan tinggi itu sendiri. Hal ini berakibat pada perbedaan kualitas yang tajam antar perguruan tinggi yang ada. Pemeringkatan perguruan tinggi terbaik yang ada, misalnya pemeringkatan oleh webometrics, 4ICU, atau TeSCA, selalu ditempati oleh perguruan tinggi yang hampir sama. Berikut adalah beberapa hasil pemeringkatan perguruan tinggi unggulan berdasarkan kategori penilaian yang sudah ditentukan oleh masing-masing lembaga survey (Lihat: Tabel 1).

Setiap perguruan tinggi dituntut untuk bisa bertahan di tengah persaingan yang semakin pesat seiring pertumbuhan jumlah perguruan tinggi itu sendiri. Sebuah perguruan tinggi dituntut untuk memiliki infrastruktur pendidikan yang mumpuni, sekaligus nilai jual di mata masyarakat penggunanya. Salah satu faktor penentu yang mendorong adanya perbedaan dan kesenjangan nilai dan kualitas antar perguruan tinggi sendiri adalah manajemen pengelolaan lembaga yang baik serta tingkat keberhasilan masing-masing perguruan tinggi dalam mengusung nilai-nilai keunggulan berkelanjutan (*sustainable competitive advantages*) yang dimilikinya.

Tabel 4: Pemeringkatan Perguruan Tinggi Unggulan
di Indonesia versi Webometrics, 4ICU, dan TeSCA.

No.	Webometrics	4ICU	TeSCA
1	Universitas Gadjah Mada	Universitas Gadjah Mada	Universitas Indonesia
2	Institut Teknologi Bandung	Institut Teknologi Bandung	Universitas Gunadarma
3	Universitas Indonesia	Universitas Indonesia	Institut Teknologi Bandung
4	Universitas Gunadarma	Universitas Brawijaya	Universitas Padjadjaran
5	Universitas Brawijaya	Universitas Gunadarma	Universitas Airlangga
6	Universitas Diponegoro	Institut Pertanian Bogor	STMIK AMIKOM Yogyakarta
7	Institut Pertanian Bogor	Universitas Diponegoro	Universitas Bina Nusantara
8	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Universitas Sebelas Maret	Universitas Komputer Indonesia
9	Universitas Padjadjaran	Universitas Pendidikan Indonesia	Universitas Gadjah Mada
10	Universitas Airlangga	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Universitas Kristen Duta Wacana
11	Universitas Kristen Petra	Universitas Mercu Buana	Institut Pertanian Bogor
12	Universitas Negeri Malang	Universitas Airlangga	Universitas Kristen Satya Wacana
13	Universitas Sriwijaya	Universitas Padjadjaran	Universitas Brawijaya
14	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Universitas Islam Indonesia	Universitas Sriwijaya
15	Universitas Pendidikan Indonesia	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Universitas Muhammadiyah Malang
16	Universitas Islam Indonesia	Universitas Bina Nusantara	Universitas Kristen Petra
17	Universitas Sebelas Maret	Universitas Sumatera Utara	Institut Teknologi Telkom (IT TELKOM)
18	Universitas Mercu Buana	Universitas Negeri Malang	Universitas Negeri Surabaya
19	Universitas Muhammadiyah Malang	Universitas Muhammadiyah Malang	Institut Teknologi Sepuluh Nopember
20	Universitas Hasanuddin	Universitas Sriwijaya	Universitas Ahmad Dahlan
21	Universitas Komputer Indonesia	Universitas Negeri Yogyakarta	Universitas Pendidikan Indonesia
22	Universitas Negeri Semarang	Universitas Hasanuddin	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
23.	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Universitas Komputer Indonesia	Universitas Budi Luhur
24	Universitas Esa Unggul	Universitas Kristen Petra	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
25	Universitas Bina Nusantara	Universitas Udayana	Universitas Indonesia

Sumber: *Situs webometrics, 4ICU, dan TeSCA (2013)*.

Salah satu persoalan utama dari pendidikan tinggi di Indonesia adalah persoalan ketidakmerataan dan kesenjangan infrastruktur pendidikan tinggi itu sendiri. Hal ini berakibat pada perbedaan kualitas yang tajam antar perguruan tinggi yang ada. Pemeringkatan perguruan tinggi terbaik yang ada, misalnya pemeringkatan oleh webometrics, 4ICU, atau TeSCA, selalu ditempati oleh perguruan tinggi yang hampir sama. Berikut adalah beberapa hasil pemeringkatan perguruan tinggi unggulan berdasarkan kategori penilaian yang sudah ditentukan oleh masing-masing lembaga survey (Lihat: Tabel 1).

Setiap perguruan tinggi dituntut untuk bisa bertahan di tengah persaingan yang semakin pesat seiring pertumbuhan jumlah perguruan tinggi itu sendiri. Sebuah perguruan tinggi dituntut untuk memiliki infrastruktur pendidikan yang mumpuni, sekaligus nilai jual di mata masyarakat penggunanya. Salah satu faktor penentu yang mendorong adanya perbedaan dan kesenjangan nilai dan kualitas antar perguruan tinggi sendiri adalah manajemen pengelolaan lembaga yang baik serta tingkat keberhasilan masing-masing perguruan tinggi dalam mengusung nilai-nilai keunggulan berkelanjutan (*sustainable competitive advantages*) yang dimilikinya.

Perguruan tinggi dengan manajemen yang baik dan profesional adalah perguruan tinggi yang mampu fokus pada pencapaian apa yang sudah ditentukan dalam visi, misi, dan tujuannya. Fokus pada visi berarti fokus pada nilai-nilai yang menjadi pedoman gerak manajemen lembaga pendidikan tinggi itu sendiri. Dengan kata lain, seperti disebutkan oleh Iyer (2009) manajemen yang tidak dijalankan secara profesional atau baik, adalah manajemen yang "miskin nilai" (*lack of values*) atau tidak memiliki pedoman dan standar dalam menjalankan praktik kelembagaannya.

Lembaga pendidikan yang tidak mengindahkan pentingnya peranan nilai dalam praktik manajemen yang dijalankannya, akan kehilangan pedoman dan fokus pada apa yang menjadi tujuannya.

Karena itu, tidak heran banyak sekali lembaga pendidikan yang belum juga sanggup mencapai visi yang sudah dicanangkan sejak lama. Alih-alih mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, lembaga pendidikan tinggi justru tidak mampu mempertahankan eksistensinya di tengah tuntutan perubahan dan persaingain perguruan tinggi yang semakin sengit.

Pentingnya peranan nilai sebagai landasan bagi praktik manajemen sebuah organisasi, tidak terkecuali perguruan tinggi inilah yang harus disadari betul oleh setiap pemangku organisasi. Dalam konteks perguruan tinggi, maka salah satu perguruan tinggi yang sedari awal mengusung basis nilai dalam praktik manajemennya adalah Universitas Bina Nusantara atau biasa dikenal dengan Binus University. Nilai, bagi Binus University merupakan sumber utama yang menjadi pedoman gerak manajemen agar senantiasa terfokus pada apa yang menjadi tujuannya.

Dalam praktiknya, Binus University mencantumkan empat nilai utama sebagai landasan dan pedoman kerja seluruh elemen yang terdapat di dalamnya, yaitu: (1) *tenacious focus* (focus pencapaian)*;* (2) *freedom to innovate* (bebas berinovasi)*;* (3) *farsighted* (berpandangan jauh)*;* dan (4) *embrace diversity* (merangkul perbedaan). Tidak heran, jika pada akhirnya, Binus University selalu berhasil masuk dalam jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia sebagaimana bisa dilihat sebelumnya dalam tabel pemeringkatan tingkat keunggulan perguruan tinggi berdasarkan survey Webometrics, 4ICU, dan TeSCA.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana manajemen berbasis nilai ini diterapkan dalam lingkungan Binus University yang mencakup praktik penciptaan nilai (*value creation*) dan pengelolaan nilai (*value management*).

Penelitian ini membahas studi kasus tunggal (*single case study*) mengenai penerapan Manajemen Berbasis Nilai (*value based mana-*

gement) dalam konteks lembaga pendidikan tinggi, yakni Binus University sebagai lembaga publik non-profit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifsebagai pendekatan yang dianggap tepat untuk melakukan penelitian kasus tunggal (*single case study*), dengan metode *snowball sampling*, dan teknik pengumpulan datanya melalui *indepth interview*, sehingga pada analisis dan pembahasan mengacu secara khusus padalembaga yang menjadi locus penelitian, yakni Binus University secara mendalam. Pemilihan Binus University sendiri dilakukan setelah studi awal yang dilakukan peneliti tentang penggunaan basis nilai dalam konteks manajemen di tempat bersangkutan. Penelitian ini merupakan eksplorasi lanjutan, terutama untuk menjawab dan memberikan interpretasi secara komprehensif tentang penerapan basis nilai dalam praktik manajemen dalam kontek lembaga pendidikan tinggi, khususnya Binus University.

Penelitian ini menggunakan strategi analisis *pattern matching* untuk membandingkan logika berpikir secara empiris yang didasarkan pada suatu ataupun beberapa prediksi tertentu. Jika ada kesamaan antara yang diprediksi dengan yang terjadi, maka hal ini akan memperkuat *internal validity* dari penelitian ini. Dalam penelitian *case study* yang merupakan penelitian *explanatory, pattern matching* yang digunakan berhubungan dengan 4 (empat) proposisi, yaitu:

Proposisi 1: Nilai memegang peranan penting dalam praktik manajemen yang dijalankan oleh Binus University.

Proposisi 2: Penciptaan nilai (*value creation*) merupakan proses awal dalam praktik manajemen berbasis nilai yang terdapat di Binus University.

Proposisi 3: Pengelolaan nilai (*value management*) adalah upaya untuk memelihara, menjaga, dan melembagakan nilai sebagai cita ideal dan pedoman bagi praktik manajemen di Binus University.

Proposisi 4: Manajemen berbasis nilai memiliki dampak yang besar terhadap tingkat keunggulan bersaing berkelanjutan (*sustainable competitive advantage*) Binus University.

B. Manajemen Berbasis Nilai

1. Nilai dan Praktik Manajemen

Nilai pada dasarnya merujuk pada sesuatu yang berharga, indah, bagus, dan bermanfaat. Masyarakat Yunani kuno misalnya, meyakini bahwa nilai merupakan properti dari suatu barang ataupun jasa. Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno menyatakan bahwa terdapat tujuh kelas dari nilai, yakni: (1) ekonomis; (2) moral; (3) aestetik; (4) sosial; (5) politis; (6) religius; dan (7) yudisial. Namun, gagasan tentang nilai yang terdapat pada barang ataupun jasa inilah yang kemudian berkembang dan melekat dalam pikiran kita saat ini. Nilai ini bahkan dianggap sebagai sesuatu yang dapat mengatur tingkah laku manusia. Perubahan yang terjadi pada kebutuhan akan berpengaruh pada nilai dari suatu barang ataupun jasa itu sendiri.

Term "nilai" ketika digunakan untuk mengindikasikan kualitas subjektif, seperti gaya, penampilan, bentuk, dan lainnya, atau digunakan untuk hal-hal yang ditentukan oleh emosi, maka term "nilai" ini akan sulit untuk didefinisikan. Namun, ketika ia digunakan untuk mengindikasikan kualitas objektif, seperti kehidupan, kinerja, reliabilitas, berat, dan lainnya yang ditentukan dengan properti dan karakteristik tertentu, maka term "nilai" akan bisa diukur dan dikuantifikasi. Terdapat banyak faktor yang memengaruhi perspektif kita tentang nilai ini, terutama dikarenakan perspektif tentang nilai tersebut bersifat dinamis, dan berubah dari masa ke masa (S.S. Iyer, 2009).

Christopher Barlow (1998) dalam hal ini menyatakan lebih jauh bahwa *"value is about discovering relationships among the various*

goals of those who affect and are affected." Berdasarkan pengertian ini, S. S Iyer (2009) kemudian menyatakan bahwa nilai merupakan suatu hubungan (*a relationship*) yang dibangun melalui komparasi (*comparison*). Nilai adalah mengenai kinerja yang dibandingkan dengan kebutuhan (*aboutperformance compared to needs*), tujuan dengan kinerja (*intent compared to performance*), kebutuhan dengan persyaratan (*needs compared to requirements*), persyaratan yang dibandingkan dengan fitur ataupun atribut (*requirements compared to features or attributes*), fitur atau atribut dengan harga (*features or attributes compared to price*), dan harga dengan kepuasan (*price compared to satisfaction*). (S.S. Iyer, *Managing for Value*, 2009)

Persoalan nilai ini dalam perkembangannya menjadi salah satu term penting dalam dunia manajemen secara umum. Signifikansi dari term ini misalnya tampak pada munculnya berbagai istilah dan konsep yang melibatkan peranan nilai, seperti *value management, value-based management, value analysis, value net, shared value,* dan lain sebagainya dalam bidang manajemen.

Term "nilai" dalam praktik manajemen yang saat ini paling sering digunakan adalah manajemen berbasis nilai. Manajemen berbasis nilai atau disebut juga dengan istilah *value-based management* pada dasarnya tidak memiliki pengertian yang seragam antara satu tokoh dengan yang lain. Lebih dari itu, hampir tidak ada definisi yang baku tentang istilah "manajemen berbasis nilai" ini. Akan tetapi dalam dunia manajemen secara umum, istilah manajemen berbasis nilai ini digunakan dalam pengertian tentang praktik manajemen yang berusaha memastikan bahwa sebuah organisasi berjalan secara konsisten dengan berlandaskan pada nilai-nilai tertentu yang diusungnya.Definisi yang lebih terperinci pernah dikeluarkan oleh R. Scarlett (2001) yang mengatakan:

> *"VBM is an approach to management whereby the company's overall aspirations, analytical techniques, and management processes are align-*

ed to help the company maximise its value by focusing management decision-makin one the key drivers of shareholder value."

Pengertian lainnya adalah manajemen berbasis nilai merupakan sebuah pendekatan manajemen yang berusaha menjaga gerak manajemen agar bisa memaksimalkan nilai-nilai baik *shareholder* maupun *stakeholder* (S. David Young, *et al.* 2001). Berdasarkan pengertian ini, Jaap de Jonge (2010) menyatakan bahwa terdapat dua konsep penting yang mesti dipahami, yakni: 1) penciptaan nilai (*creating value*); dan 2) pengelolaan nilai (*managing value*).

2. Manfaat Basis Nilai dalam Praktik Manajemen

Sebuah organisasi dalam bentuk apapun, baik profit maupun non-profit, pada dasarnya ada untuk menyampaikan beberapa nilai tertentu. Sebuah organisasi atau perusahaan yang bergerak dalam lingkungan bisnis harus memberikan sejumlah upaya, waktu, sumber daya, investasi, dan asset untuk menjalankan bisnisnya dengan baik dari masa ke masa. Oleh karena itu, keberadaan nilai-nilai tertentu sangat diperlukan agar semua hal itu bisa berjalan dengan baik, terutama bagaimana sebuah organisasi bisa mengelola, mengukur, mengawasi, dan menyokong segenap usahanya dengan berlandaskan nilai-nilai tersebut. Manajemen berbasis nilai adalah sebuah model tentang bagaimana semua hal itu dalam sebuah organisasi.

Basis nilai dalam praktik manajemen dapat membantu sebuah organisasi atau perusahaan untuk memenangkan segenap persaingan dalam empat pasar (*market*) tersebut. Kegagalan sebuah organisasi atau perusahaan dalam persaingan pada salah satu dari empat pasar ini akan membawa kegagalan sistemik yang bisa meruntuhkan keberadaannya di masa mendatang. Oleh karena itu, manfaat utama dari penerapan manajemen berbasis nilai adalah membantu dan menyokong sebuah organisasi untuk mengatasi kegagalan yang

mungkin timbul dari berbagai persaingan dalam empat jenis pasar tersebut.

3. Implementasi Basis Nilai dalam Praktik Manajemen

Sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan segenap upayanya untuk bisa bersaing dalam era yang semakin kompetitif ini pada akhirnya sangat bergantung pada ada tidaknya nilai-nilai keunggulan yang dimiliki untuk memenangkan persaingan tersebut. Dalam banyak kesempatan, seringkali terdapat penilaian atas kondisi persaingan yang melibatkan seluruh perusahaan ini dengan berdasarkan berbagai kriteria tertentu yang semuanya menunjukkan pada nilai-nilai yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan.

Seperti disebutkan sebelumnya, manajemen berbasis nilai dalam sebuah organisasi atau perusahaan, dapat terwujud dengan tiga cara utama sebagai dua praktik penting di dalamnya, yaitu: 1) penciptaan nilai (*value creation*); dan 2) pengelolaan nilai (*value management*). Berikut adalah bahasan atas masing-masing hal tersebut.

4. Penciptaan Nilai dalam Organisasi

Penciptaan nilai dalam sebuah organisasi atau perusahaan pada dasarnya adalah sebuah proses panjang yang memerlukan pemahaman akan visi, misi, strategi, arah, tujuan, modalitas dan segenap sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri. Penciptaan nilai bahkan tidak menjadi domain disiplin tertentu, karena ia dapat melibatkan dan memberi dampak bagi seluruh aspek dari sebuah organisasi ataupun perusahaan (Edward L. Melnick, et al, 2007: ix).

Ada banyak alternatif yang bisa dilakukan sebuah organisasi dalam proses penciptaan nilai, baik melalui inovasi, perubahan strategi, maupun implementasi segenap misi yang dimilikinya secara

gradual. Namun, satu hal terpenting yang mesti dilakukan sebelum itu semua adalah pemahaman akan kondisi dan posisi kekinian dari organisasi atau perusahaan. Untuk bisa melakukan hal tersebut, salah satu cara adalah menerapkan model *Five Forces* dari Michael E. Porter (2008). Model ini merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk menganalisa tingkat *attractiveness* atau nilai dalam struktur industri. Analisis ini dibuat dengan mengidentifikasi 5 kekuataan (*forces*) kompetitif utama, yaitu: (1) *entry of competitors;* (2) *threat of subtitutes;* (3) *bargaining power of buyers;* (4) *bargaining power of suppliers;* dan (5) *Rivalry among the existing players.*

5. Pengelolaan Nilai dalam Organisasi

Seperti diketahui, penciptaan nilai semata tidaklah cukup untuk menjadikan nilai sebagai basis bagi praktik manajemen dalam sebuah organisasi. Diperlukan adanya proses pengelolaan nilai (*managing value*) yang bisa menjamin bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam praktik manajemen sebuah lembaga atau perusahaan tetap berjalan dengan baik.

Mengapa diperlukan pengelolaan nilai (*managing value*) dalam sebuah organisasi? S.S. Iyer dalam "Managing for Value" (2009) menyatakan bahwa hal ini dikarenakan kondisi nilai yang terus berubah secara dinamis bahkan drastis. Nilai berubah seiring perubahan kecenderungan manusia terhadap barang atau jasa. Ia bahkan berubah tanpa disadari oleh para penggunanya.

Oleh karena itu, dalam mengantisipasi perubahan nilai yang tidak bisa ditahan ini, maka sebuah lembaga atau perusahaan harus bisa mengolah suatu strategi yang bisa mengantisipasi berbagai macam perubahan tersebut. Untuk mengantisipasi perubahan nilai inilah maka pengelolaan nilai (*managing value*) sangat diperlukan. Lembaga atau perusahaan yang tidak bisa membuat dan menerapkan suatu strategi pengelolaan nilai yang baik, pada akhirnya akan menjadi organisasi "miskin nilai". S.S. Iyer sendiri menyatakan

bahwa kemiskinan akan nilai yang terdapat pada sebuah organisasi ini biasanya disebabkan oleh hal-hal berikut: (1) *lack of information;* (2) *lack of knowledge;* (3) *lack of time;* (4) *lack of intention;* (5) *lack of listening;* (6) *lack of problem ownership;* (7) *poor quality;* (8) *honest wrong beliefs;* (9) *habitual thinking;* (10) *risk of personal loss;* (11) *reluctant to seek advice;* (12) *habits and attitudes;* (13) *unrealistic requirements;* (14) *temporary or changed circumstances;* (15) *changing technology;* (16) *poor communication;* (17) *prejudice;* (18) *misconceptions;* (19) *lack of experience;* (20) *desire to conform;* (21) *poor Interactions between Department and between Specialists;* (22) *high cost-activities;* (23) *creep;* (24)*non value-adding work;* (25) *waste*.

Dalam proses pengelolaan nilai (*managing value*), Iyer menekankan bahwa setiap orang mesti terlibat dan berkomitmen untuk menciptakan, membangun, dan menambah nilai yang ada bagi organisasi. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan nilai menjadi bagian dari fungsi semua elemen yang terlibat dalam gerak manajemen sebuah organisasi. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam upaya *managing value* tersebut.

Pertama, pihak manajemen harus bisa menunjukkan komitmen mereka untuk mengelola nilai (*managing value*) yang terdapat dalam perusahaan. Komitmen ini harus terlihat dalam setiap uraian operasional yang dinyatakan oleh pihak manajemen dalam menjalankan organisasi atau perusahaan.

Kedua, pihak manajemen mesti mengintegrasikan upaya pengelolaan nilai (*managing value*) dengan berbagai teknik manajemen. Upaya-upaya pengelolaan nilai ini meliputi: 1) keterlibatan dalam persiapan (*involvement to set up*); 2) keterlibatan dalam operasionalisasi (*involvement to operate*); 3) siapa yang mengimplementasikan gagasan/nilai tersebut (*who implements ideas*); 4) pembangkit (*generator*); 5) kebutuhan (*require*); 6) bidang yang dikelola, meliputi desain, kualitas, pelayanan, metode, motivasi, dan

biaya; 7) efek perubahan (changes affect); dan 8) fitur-fitur penting lainnya (*other important features*).

Ketiga, pihak manajemen mesti membuat tahapn-tahapan di mana nilai tersebut bekerja. Pengelolaan nilai sendiri merupakan proses yang terus berjalan tanpa henti dan tanpa batas waktu. Ia memerlukan pendekatan terstruktur yang menyatukan berbagai perspektif, seperti terlihat di atas, dan menghasilkan solusi yang lebih baik dari waktu ke waktu atas segenap persoalan yang dihadapi oleh organisasi.

Keempat, dalam proses pengelolaan nilai dalam sebuah organisasi atau perusahaan ini, maka terdapat beberapa hal yang harus diperhitungkan sebagai penyebab dari perubahan nilai, dan membawa ekses yang signifikan pada proses pemeliharaan nilai itu sendiri, yakni: 1) *leadership; 2) corporate culture;* 3) *adaptability;* 4) *government policies;* dan 5) *environment*.

Penelitian tentang basis nilai dalam proses penciptaan dan pengelolaan serta praktek manajemen berbasis nilai ini menggunakan landasan teori umum (*grand theory*), yakni ilmu manajemen (*management*) dan teori organisasi (*organizational theory*) yang memiliki keterkaitan dengan teori antara (*midle range theory)* yang terdiri dari manajemen sumber daya manusia (*human resources management*), perilaku organisasi (*organizational behavior*) dan manajemen stratejik *(strategic management). Middle range theory* tersebut merupakan induk keilmuan dari teori aplikasi (*applied theory)* yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu manajemen berbasis nilai *(value based management)* dan manajemen berbasis nilai pada lembaga publik non profit yang membahas tentang proses penciptaan nilai (*value creation*), dan proses pengelolaan nilai (*value management)* sebagai dua tahapan utama dalam praktik manajemen berbasis nilai. Keterkaitan masing masing teori dalam penelitian ini digambarkan dalam bagan berikut:

Gambar 6: Landasan Teori Penelitian

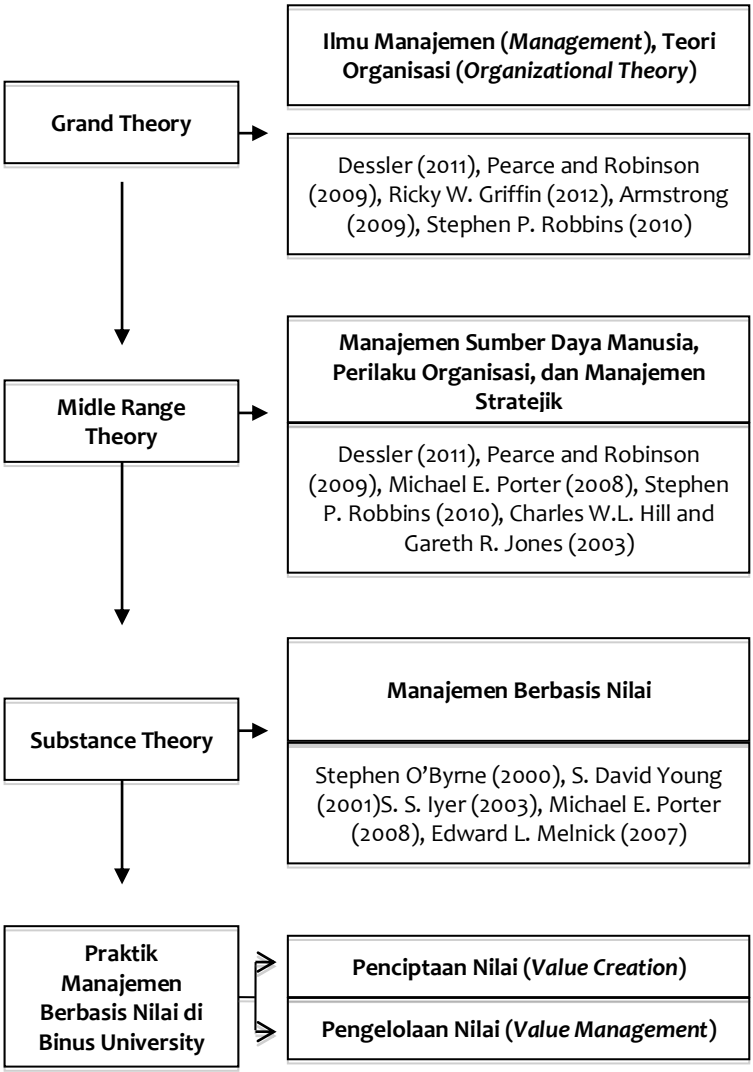

C. Profil Binus University

Universitas Bina Nusantara pada awalnya berasal dari sebuah institusi pelatihan komputer Modern Computer Course yang didirikan pada 21 Oktober 1974. Pada tanggal 1 Juli 1981, karena banyaknya peminat dan pesatnya pertumbuhan, lembaga pendidikan komputer ini berkembang menjadi Akademi Teknik Komputer (ATK) dengan jurusan Manajemen Informatika dan Teknologi Informasi. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 13 Juli 1984, ATK mendapat status Terdaftar dan berubah menjadi Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Jakarta. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1985, dibuka jurusan Komputerisasi Akuntansi, dan pada tanggal 21 September 1985, AMIK Jakarta berganti nama menjadi AMIK BINA NUSANTARA.

Pada 9 November 1987 AMIK Bina Nusantara bergabung dengan STMIK Bina Nusantara membentuk satu institusi pendidikan yang menawarkan program studi diploma (D3) dan strata 1 (S1). STMIK Bina Nusantara memperoleh status disamakan untuk semua program studi pada 18 Maret 1992. STMIK Bina Nusantara kemudian membuka program studi pascasarjana manajemen sistem informasi, pertama di Indonesia pada 10 Mei 1993.

Universitas Bina Nusantara kemudian didirikan pada 8 Agustus 1996. STMIK Bina Nusantara kemudian bergabung dengan Universitas Bina Nusantara pada 20 Desember 1998. Saat ini, Universitas Bina Nusantara memiliki program pendidikan: Sekolah Sistem Informasi, Sekolah Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Komunikasi, Sekolah Desain, Fakultas Humaniora, Magister Teknik Informatika, Magister Manajemen Sistem Informasi, Magister Manajemen (Sekolah Bisnis), dan Doktor Riset Manajemen.

Universitas Bina Nusantara memiliki 5 buah kampus yang berbeda, yaitu:

a. *Kampus Syahdan*: kampus ini terletak di Jl. K H. Syahdan No. 9, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11480.
b. *Kampus Anggrek:* kampus ini terletak di Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530.
c. *Kampus Kijang;*kampus ini terletak di Jl. Kemanggisan Ilir III No. 45, Kelurahan Kemanggisan, Jakarta Barat 11480.
d. *Kampus Alam Sutera:* kampus ini terletak di Jl. Alam Sutera Boulevard No. 1, Serpong, Tangerang 15325.
e. *Kampus JWC:* kampus ini terletak di Jl. Hang Lekir I No. 6, Senayan, Jakarta Selatan 10270. Kampus ini hanya digunakan untuk program kuliah internasional.

1. Visi dan Misi Binus University

Binus University merupakan sebuah universitas yang cukup tinggi prestigenya di kalangan masyarakat saat ini dan juga merupakan salah satu universitas termuka di bidang komputer khususnya Teknologi Informasi. Dengan tagline *People, Innovation, Excelent,* Binus University berusaha mencapai tingkat *World Class University* pada tahun 2020 dan tertuang dalam visi dan misinya yang baru.

Visi Binus University

"A World-class university In continuous pursuit of innovation and enterprise"

Misi Binus University

Sedangkan misi dari Binus University adalah, *to contribute to the global community through the provision of world-class education by:*

1. *Recognizing and rewarding the most creative and value-adding talents.*

2. *Providing a world-class teaching, learning and research experience that fosters excellence in scholarship, innovation and entrepreneurship.*
3. *Creating outstanding leaders for global community.*
4. *Conducting professional services with an emphasis on application of knowledge to the society.*
5. *Improving the quality of life of Indonesians and the international community*.

Misi ini merupakan penyempurnaan dari misi sebelumnya yang sudah ditetapkan, yaitu:

1. Menyelenggarakan program-program studi yang menunjang pengembangan dan penerapan teknologi informasi, kemampuan berbahasa asing, komunikasi, kepemimpinan, kemampuan berinovasi dan kewirausahaan serta berkarakter baik.
2. Menyediakan sarana dan lingkungan yang kondusif bagi pelaksana kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan lulusan yang trampil, kreatif, dan inovatif.
3. Menjaga keterkaitan dan relevansi seluruh kegiatan pendidikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomis dan industry secara global.
4. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, agar pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan selalu muktahir dan tepat guna penerapannya.
5. Membangun komunitas Binusian yang menganut budaya nilai-nilai dan etos kerja Binus University.

3. *Value*

Selain visi dan misi di atas, Binus University pada dasarnya mencantumkan empat nilai utama yang melandasi dan menjadi pedoman gerak manajemen dan pendidikan yang dilangsungkannya, yaitu:

1. *Tenacious Focus*

Acting with a passionate, committed, and determined focus towards shared purposes.

2. *Freedom to Innovate*
   Combining integrity with a creative and result-oriented spirit.
3. *Farsighted*
   Sharing the foresight to recognize and take action on future opportunities.
4. *Embrace Diversit yCelebrating diversity in the pursuit of excellence.*

Nilai ini merupakan perihal unik yang dimiliki oleh Binus University, karena jarang sekali lembaga yang mencantumkan nilai-nilai tertentu sebagai pedoman gerak lembaga dalam melaksanakan fungsi manajemen dan pendidikan yang diusungnya. Nilai-nilai ini pula yang menjadi standar pengelolaan bagi manajemen Binus University dalam menyusun berbagai kerangka kebijakan, baik yang bersifat akademis, maupun fungsional kelembagaan.

4. Profil Manajemen Binus University

Seperti lazimnya sebuah organisasi, sebuah lembaga pendidikan juga memiliki manajemen dan struktur kepengurusan yang mengatur gerak perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan seluruh fungsi manajemen pada umumnya.

Jika menilik pada sejarah berdirinya, Binus University sedari awal sudah dikondisikan untuk menjadi sebuah organisasi dengan struktur kelembagaan yang kuat. Sentralitas kepemimpinan dan kebijakan, namun sambil tetap mengusung prinsip keterbukaan dan kritik membuat Binus University bisa mengembangkan struktur kelembagaannya serta manajemennya menjadi lebih sesuai dengan perkembangan dan kemajuan yang dicapainya.

Semenjak didirikan dan sampai pada akhirnya menjadi sebuah universitas, Binus University terus mengembangkan organisasinya untuk mencapai keefektifan dan keefisiensian dalam mencapai

visinya, dengan mendirikan center-center yang dibawahi oleh Wakil Rektor (*Vice Rector*). Sistem pembagian fungsi menjadi centers ini lebih dikenal dengan SODA (Sentralisasi Akademik, Desentralisasi Operasi), yang berarti untuk proses akademik dipusatkan pada bagian tertentu sedangkan bagian operasinya dibagi-bagi menjadi banyak center-center sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Seperti terlihat pada bagan di bawah, struktur kelembagaan Binus University dimulai dari Bina Nusantara Foundation yang membawahi seluruh Binus Group. Posisi di bawahnya adalah Rector Bina Nusantara University sebagai pimpinan tertinggi. Posisi di bawah Rektor adalah bagian *Research & Intellectual Capital, Strategic Management Directorate, Vice Rektor I* sampai *Vice Rector IV*, dan seluruh Dekan Fakultas yang ada. Untuk fungsi *center-center*, berada di bawah posisi masing-masing *Vice Rector* sesuai dengan fungsinya.

Gambar 7: Struktur Organisasi Binus university

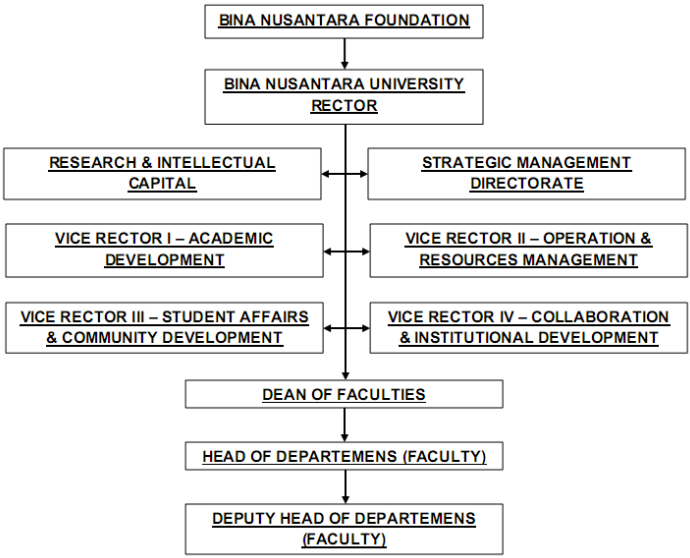

5. Analisis SWOT Binus University

Berdasarkan analisis sementara yang dilakukan oleh penulis terhadap Binus University, maka didapatkan data-data tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki dan dihadapi oleh Binus University, yaitu:

a. Kekuatan (Faktor Internal Positif)
   1) Memiliki nama yang cukup terkenal sebagai sebuah universitas terkemuka di Indonesia (*Brand Awareness*).
   2) Salah satu universitas terbaik di Indonesia terutama pada bidang ilmu komputer.
   3) Konsep SODA (Sentralisasi Operasi dan Desentralisasi Akademik), membuat Binus University dapat berkembang secara optimal.
   4) Universitas pertama di Indonesia yang memiliki Sertifikasi Manajemen Mutu International atau yang lebih dikenal dengan nama ISO: 9001:2008.
   5) Memiliki BINUS Career sebagai sarana para lulusan Binus University untuk mencari kerja dan menjembatani dengan perusahaan-perusahaan global.
b. Kelemahan (Faktor Internal Negatif)
   1) mahasiswa/i luar daerah untuk mencari tempat tinggal karena didirikan di daerah padat penduduk.
c. Peluang (Faktor Eksternal Positif)
d. Ancaman (Faktor Eksternal Negatif)
   1) Persaingan antar lembaga pendidikan tinggi yang semakin sengit.
   2) Adanya rencana masyarakat ASEAN dan globalisasi pendidikan.

Kualitas pengajar sebagai bagian dari sumber daya intelektual masih terbatas dan harus terus dibina dan dikembangkan selaras dengan visi dan misi organisasi.

D. Manajemen Berbasis Nilai di Binus University

Proposisi 1: Nilai memegang peranan penting dalam praktik manajemen

Seperti sudah dijelaskan, Binus University mencantumkan empat nilai utama sebagai landasan gerak dan pedoman praktik bagi manajemen dan pendidikan yang dijalankannya, yaitu (1) *tenacious focus* (focus pencapaian)*;* (2) *freedom to innovate* (bebas berinovasi)*;* (3) *farsighted* (berpandangan jauh)*;* dan (4) *embrace diversity* (merayakan perbedaan). Nilai-nilai tersebut dianggap bisa mewakili visi dari Binus University sendiri, yakni untuk menjadi *a world-class university*.

Binus University menyadari bahwa untuk menjadi perguruan tinggi berkelas internasional tidak mudah. Ia memerlukan persistensi dan upaya yang terfokus untuk mencapainya (*tenacious focus*). Ia juga membutuhkan budaya akademik yang memberikan kebebasan dalam berinovasi (*freedom to innovate*), sehingga bisa menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Binus University juga menyadari bahwa persaingan bukan lagi dengan perguruan tinggi lokal, namun dengan perguruan tinggi level global. Oleh karena itu, dengan visi seperti ini, harus dianggap sebagai cara Binus University meluaskan pandangannya (*farsighted*), cita-citanya, hingga tindakan dan segenap kebijakan yang diambilnya dengan sikap terbuka untuk merayakan perbedaan dalam kesatuan visi (*embrace diversity*).

Pencantuman nilai-nilai yang diderivasikan dari visi dan misi Binus University tersebut sebenarnya merupakan pengembangan dari nilai-nilai sebelumnya, seperti *sense of belonging, trust in God,* dan lainnya. Dengan kata lain, pencantuman nilai dalam konteks pengembangan kelembagaan sudah lama dilakukan oleh Binus University. Praktik manajemen dan praktik pendidikan yang dijalankan oleh Binus University yang memuat kebijakan sentralistik sekaligus

desentralistik, mencantumkan empat nilai derivasi utama dari visinya untuk menjadi *a world-class university*, membentuk karakter "Binusian" dengan lima kompetensi utama, semuanya menegaskan bahwa nilai berperanan penting bagi eksistensi Binus University.

Gambar 8: Ringkasan Proposisi Satu

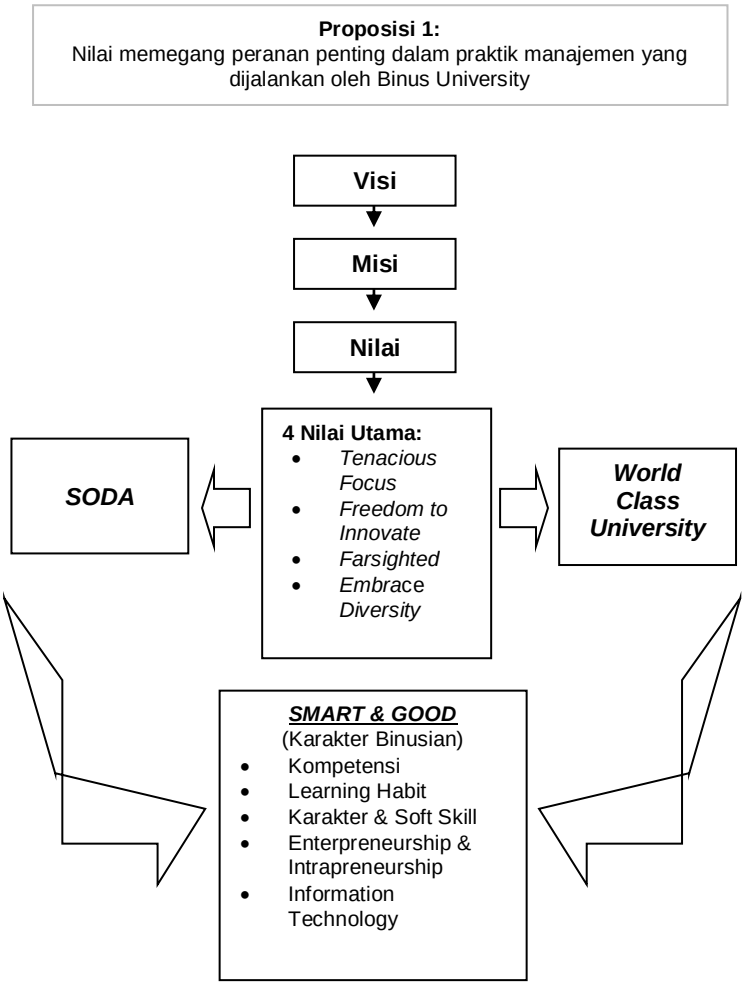

Proposisi 2: Penciptaan nilai (*value creation*) merupakan proses awal dalam praktik Manajemen Berbasis Nilai

Praktik penciptaan nilai oleh manajemen di suatu lembaga merupakan sebuah praktik panjang yang melibatkan seluruh anasir organisasi, baik *stakeholder* maupun *shareholder*-nya. Penciptaan nilai ini juga merupakan proses yang sangat berkaitan dengan budaya organisasi, perkembangan struktur manajemen, kebijakan dan regulasi yang ada dalam organisasi, maupun bagaimana seluruh pihak dalam organisasi menafsirkan visi, misi, tujuan, falsafah, hak, dan kewajiban yang sudah ditetapkan.

Terkait proses penciptaan nilai, secara konseptual ada banyak alternatif yang bisa dilakukan oleh manajemen sebuah organisasi, terutama melalui inovasi, perubahan strategi, maupun implementasi segenap visi, misi, dan sasaran yang dimilikinya secara gradual. Namun, satu hal terpenting yang mesti dilakukan sebelum itu semua adalah pemahaman akan kondisi dan posisi kekinian dari organisasi atau perusahaan. Untuk bisa melakukan hal tersebut, salah satu cara adalah menerapkan model *Five Forces* dari Michael E. Porter (2008). Model ini merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk menganalisa tingkat *attractiveness* atau nilai dalam struktur industri dengan memperhatikan lima aspek berikut, yaitu: (1) *entry of competitors;* (2) *threat of subtitutes;* (3) *bargaining power of buyers;* (4) *bargaining power of suppliers;* dan (5) *rivalry among the existing players;*.

Model *Five Forces* dari Porter ini dalam konteks upaya menjadikan nilai sebagai basis dari praktik manajemen pada dasarnya dapat digunakan untuk proses penciptaan nilai-nilai dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses penciptaan nilai-nilai harus dimulai dari penentuan nilai-nilai apa yang diinginkan untuk menjadi landasan gerak sebuah organisasi atau perusahaan. Pemahaman akan posisi dan kekuatan yang

ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan dapat membantu dalam menetapkan nilai-nilai tersebut.

Temuan penelitian yang ada berdasarkan wawancara dengan responden yang dilakukan oleh peneliti, menyatakan bahwa proses penciptaan nilai (*value creation*) sudah lama dilakukan oleh Binus University. Penciptaan nilai ini sudah terkandung mulai dari proses perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, prosedur, serta setumpuk regulasi akademik, kegiatan belajar-mengajar, dan praktik manajemen secara keseluruhan.

Terkait dengan model *five forces* dari Porter (2008), Binus University pada dasarnya sudah memiliki tingkat keunggulan tersendiri.

Pertama, *entry of competitors*. Binus University memang berada di tengah daerah yang memiliki banyak perguruan tinggi ternama. Namun, Binus University memiliki nilai, tingkat keunggulan, dan basis tawaran program pendidikan yang berbeda dengan perguruan tinggi lainnya. Sehingga, tanpa mengecilkan peran dan posisi perguruan tinggi lain, Binus University untuk konteks pesaing dan prestasi yang diperlukan di dalam persaingan itu, sudah berada pada garis terdepan yang membuatnya tetap menjadi pilihan bagi masyarakat yang menginginkan pendidikan berkualitas di negeri ini.

Kedua, *threat of subtitutes,* atau ancaman dari produk sejenis yang timbul sebagai dampak dari perkembangan minat masyarakat dan kemajuan bidang pendidikan itu sendiri. Binus University sendiri, sangat menyadari bahwa program studi yang mereka tawarkan merupakan jenis program studi yang banyak dicari oleh masyarakat, serta dibutuhkan oleh dunia kerja hari ini. Oleh karena itu, sejak awal kesadaran untuk memilih bidang dan program studi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja tersebut sudah dimiliki oleh Binus University. Kekuatan Binus University bahkan salah satunya terletak pada tingkat keunggulan pendidikan yang ditawarkannya dibandingkan perguruan tinggi lain yang juga menawarkan produk yang sama.

Ketiga, *bargaining power of buyers,* atau daya tawar pembeli. Dalam konteks persaingan pendidikan tinggi di mana Binus University terlibat di dalamnya, maka sebenarnya posisi Binus University cukup dominan dibandingkan perguruan tinggi lainnya. Hal ini misalnya tampak dari pencitraan yang dibangun oleh Binus University sendiri sebagai perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang siap dan pasti diterima oleh dunia kerja. Keberadaan Binus University yang terdapat di daerah kota dengan kapasitas dunia kerja yang lebih besar, juga mendukung Binus University untuk terus mendapatkan titik fokus masyarakat yang berminat terhadap pendidikan tinggi.

Keempat, *bargaining power of suppliers.* Hal ini berkaitan erat dengan daya tawar Binus University sebagai pemberi layanan pendidikan. Dalam konteks persaingan antar lembaga pendidikan tinggi yang semakin sengit seperti sekarang ini, maka masyarakat pendidikan umumnya mengacu pada pemeringkatan perguruan tinggi yang dilakukan oleh badan-badan atau lembaga survey tertentu. Posisi Binus University sendiri dalam konteks pemeringkatan tersebut selalu stabil sebagai salah satu dari 20 perguruan tinggi terbaik yang ada di Indonesia.

Kelima, *rivalry among the existing players.* Kebijakan pendidikan yang selaras dengan tuntutan globalisasi dan pasar bebas, pada dasarnya membuat banyak pihak bisa dengan mudah mendirikan lembaga pendidikan di negeri ini. Meski saat ini masih terdapat moratorium yang mengatur perihal pendirian lembaga pendidikan tinggi, namun para pelaku pendidikan tinggi di Indonesia pada dasarnya sudah dihadapkan pada tantangan akan globalisasi pendidikan tersebut. Tanpa ada upaya untuk memperbaiki kinerja lembaga pendidikan tinggi dari segenap manajemen perguruan tinggi, maka dapat dipastikan perguruan tinggi yang ada hanya akan tergusur dari arena persaingan sejak dini.

Lima aspek kekuatan dari Porter yang dikemukakan di atas, secara lebih teknis juga merupakan sudut pandang yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan observasi tentang *existing condition* Binus University. Berdasarkan pengamatan dan analisa awal tentang posisi Binus University ditimbang dari lima aspek kompetitif tersebut, penulis kemudian menemukan bahwa Binus University melakukan proses penciptaan nilainya dari kesadaran dan pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya sekaligus peluang dan ancaman yang akan dihadapinya. Berangkat dari hal tersebut, Binus University kemudian merumuskan langkah-langkah manajemen yang diperlukan agar ia bisa mencapai apa yang telah ditetapkan dari visi, misi, dan tujuan pendirian Binus University sendiri.

Pertimbangan akan aspek kebutuhan tentang kualitas agar bisa menawarkan layanan pendidikan yang baik misalnya, membuat Binus University kemudian mewajibkan dirinya untuk mencapai standar mutu manajemen dan layanan pendidikan yang kemudian dibuktikan dengan pencapaian ISO 9001:2008. Setelah mencapai standar mutu yang diharapkan, Binus University kemudian menentukan visi baru yakni bahwa Binus University harus menjadi perguruan tinggi internasional, yang berarti ia juga harus merumuskan nilai-nilai ideal baru yang selaras dengan visi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tentang segenap aspek untuk menjaga keunggulan di tengah tuntutan persaingan tersebut pula, segenap jajaran manajemen dan pimpinan Binus University mulai membuat kebijakan baru bahwa agar setiap elemen manajemen dan lembaga bisa bergerak dan bekerja guna mencapai cita-cita bersama, maka dibutuhkan pemahaman akan visi, misi, tujuan, strategi, yang semuanya kemudian dituangkan dalam bentuk yang lebih konkret yakni, empat nilai utama dan karakteristik Binusian.

Gambar 9: Praktik Penciptaan Nilai di Binus University

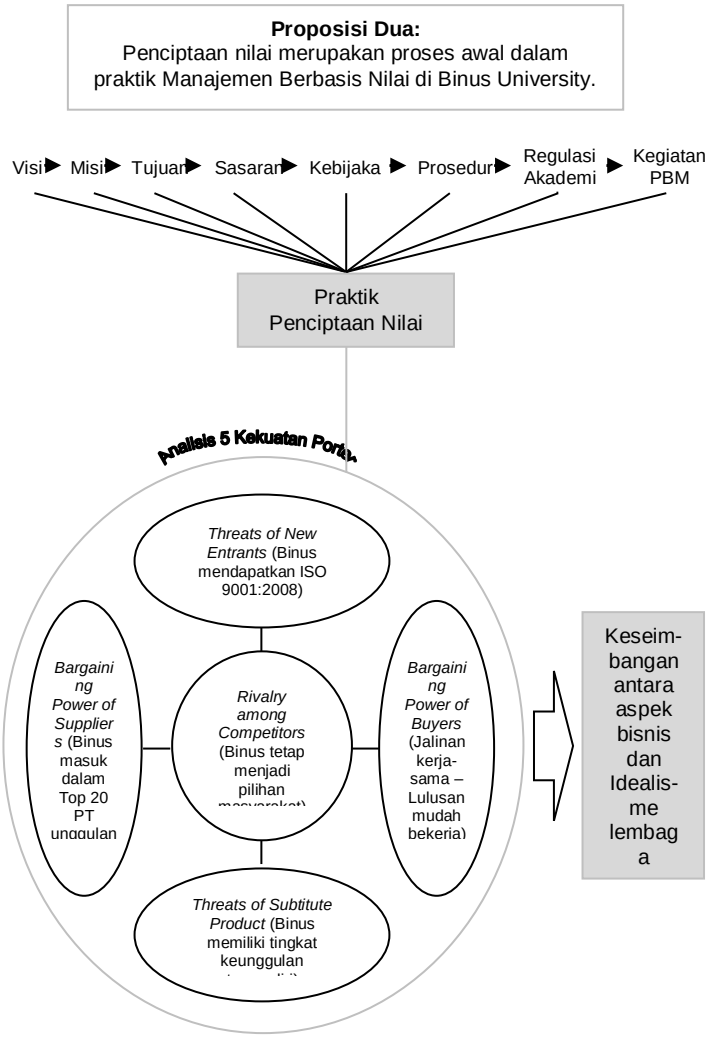

Proposisi 3: Pengelolaan nilai (*value management*) adalah upaya untuk memelihara, menjaga, dan melembagakan nilai sebagai cita ideal dan pedoman bagi praktik manajemen

Seperti diketahui, penciptaan nilai semata tidaklah cukup untuk menjadikan nilai sebagai basis bagi praktik manajemen dalam sebuah organisasi. Diperlukan adanya proses pengelolaan nilai (*managing value*) yang bisa menjamin bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam praktik manajemen sebuah lembaga atau perusahaan tetap berjalan dengan baik.

Secara umum, praktik pengelolaan nilai sebenarnya merupakan tanggungjawab seluruh bagian atau lini manajemen yang terdapat dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Bagaimanapun, sukses atau tidaknya rencana organisasi atau perusahaan dalam upayanya untuk mencapai visinya, sangat bergantung pada sejauhmana tingkat profesionalitas dan keberhasilan setiap lini dalam mencapai target yang sudah ditetapkan. Dalam konteks perguruan tinggi, hal ini berarti bergantung tidak hanya pada tingkat manajemen puncak (kepemimpinan rektor) yang ada, tapi juga menjadi bagian tanggung jawab dari unit lembaga terkecil, yakni program studi (jurusan) yang ada di perguruan tinggi bersangkutan.

Keterlibatan semua lini dalam praktik pengelolaan nilai ini, sebagaimana ditekankan oleh Iyer (2009) dimaksudkan agar pengelolaan nilai menjadi bagian dari fungsi semua elemen yang terlibat dalam gerak manajemen sebuah organisasi. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam upaya *managing value* tersebut.

Pertama, pihak manajemen harus bisa menunjukkan komitmen mereka untuk mengelola nilai (*managing value*) yang terdapat dalam perusahaan. Komitmen ini harus terlihat dalam setiap uraian operasional yang dinyatakan oleh pihak manajemen dalam menjalankan organisasi atau perusahaan. Komitmen pihak manajemen

terhadap upaya pengelolaan nilai ini bisa mengambil berbagai bentuk, di antaranya:

Kedua, pihak manajemen mesti mengintegrasikan upaya pengelolaan nilai (*managing value*) dengan berbagai teknik manajemen. Upaya-upaya pengelolaan nilai ini meliputi: 1) keterlibatan dalam persiapan (*involvement to set up*); 2) keterlibatan dalam operasionalisasi (*involvement to operate*); 3) siapa yang mengimplementasikan gagasan/nilai tersebut (*who implements ideas*); 4) pembangkit (*generator*); 5) kebutuhan (*require*); 6) bidang yang dikelola, meliputi desain, kualitas, pelayanan, metode, motivasi, dan biaya; 7) efek perubahan (*changes affect*); dan 8) fitur-fitur penting lainnya (*other important features*).

Ketiga*,* pihak manajemen mesti membuat tahapan-tahapan di mana nilai tersebut bekerja. Pengelolaan nilai sendiri merupakan proses yang terus berjalan tanpa henti dan tanpa batas waktu. Ia memerlukan pendekatan terstruktur yang menyatukan berbagai perspektif, seperti terlihat di atas, dan menghasilkan solusi yang lebih baik dari waktu ke waktu atas segenap persoalan yang dihadapi oleh organisasi.

Keempat, dalam proses pengelolaan nilai dalam sebuah organisasi atau perusahaan ini, maka terdapat beberapa hal yang harus diperhitungkan sebagai penyebab dari perubahan nilai, dan membawa ekses yang signifikan pada proses pemeliharaan nilai itu sendiri, yakni: 1) *leadership;* 2) *corporate culture;* 3) *adaptability;* 4) *government policies;* dan 5) *environment*.

Langkah-langkah inilah yang sekiranya bisa dilakukan oleh organisasi atau perusahaan dalam upaya mereka untuk mengelola nilai-nilai yang mereka miliki sebagai basis bagi gerak dan praktik manajemen yang ada. Dalam konteks Binus University, praktik pengelolaan nilai ini umumnya dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:

1. Memberikan pemahaman akan empat nilai utama, sebagai nilai-nilai pedoman bagi gerak manajemen dalam menjalankan praktik kelembagaannya. Pemahaman ini diberikan tidak saja pada segenap elemen fungsional kelembagaan, tapi juga pada stakeholder lembaga, baik itu mahasiswa, alumni, maupun masyarakat yang memiliki kepentingan di dalamnya.
2. Integrasi nilai-nilai filosofis kelembagaan ke dalam segenap praktik manajemen dan praktik pendidikan, baik itu melalui penentuan prosedur, kebijakan, kepemimpinan, kurikulum, metode pembelajaran, dan lainnya.
3. Membangun budaya kerja dan budaya organisasi yang disesuaikan dengan tingkat adaptabilitas budaya serta potensi perubahan yang mungkin dihadapi di masa mendatang. Dalam hal ini, manajemen Binus University misalnya memandang bahwa diperlukan format baru dalam cara belajar, di mana salah satunya adalah penerapan *multi channel learning,* yakni penggunaan berbagai jenis *resources* untuk membantu mahasiswa dalam belajar.

Selain hal-hal di atas, Binus University juga telah membangun beberapa *center* di lingkungan Binus University yang memiliki fungsi pengembangan masing-masing sesuai dengan kebutuhan yang dirasa perlu untuk dibentuk lembaga khusus guna menanganinya. Beberapa *center* yang sudah dibentuk di Binus University, antara lain adalah:

1. *Quality Assurance Center* (QAC) yang bertanggungjawab melakukan penelitian dan mengembangkan model institusi pendidikan bermutu. Pembentukan QAC ini ditujukan agar Binus University dapat membentuk dirinya sebagai lembaga pendidikan bermutu, dan model yang dapat menjadi panutan bagi lembaga pendidikan tinggi lain di Indonesia.

2. *Center for Enterpreneurship* (CforE), yang bertanggungjawab untuk mengembangkan dan menanamkan konsep kewirausahaan kepada seluruh Binusian. Center ini bertugas untuk mengembangkan kelompok mata kuliah entrepreneurship untuk menanamkan konsep kewirausahaan dan mendampingi para mahasiswa atau para lulusan di dalam mengembangkan usaha yang dibangunnya, melalui konsultasi maupun pengembangan jaringan dengan lembaga lain yang diperlukan. Termasuk juga untuk memacu berkembangnya inovasi-inovasi baru yang siap disajikan kepada masyarakat Indonesia.
3. *Student Advisory Center* (SAC), yang bertanggungajawab melakukan pengembangan mahasiswa dalam hal akademik, *soft skills* dan konseling. Pembentukan *center* ini ditujukan agar Binus University dapat meningkatkan prestasi akademiknya.
4. *Self Access Language Learning Center* (SALLC), yang bertanggungjawab untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan binusian dalam penguasaan bahasa asing sebagai salah satu cara menghadapi persaingan global (Sambutan Rektor Ubinus dalam Acara Wisuda 25 Juni 2006).

Meski pembuatan *center-center* tersebut pada awalnya hanya diniatkan untuk membantu Binus University dalam mengembangkan atau meningkatkan performa tertentu dalam bidang-bidang yang khusus, baik itu berkaitan dengan persoalan mutu pendidikan, kewirausahaan, budaya belajar, dan lainnya, namun pembentukan center ini dapat dianggap sebagai bagian dari upaya Binus University dalam mengelola nilai-nilai ideal dan tingkat keunggulan tertentu yang ingin dicapai. Dengan adanya center-center ini, maka proses dan praktik pengelolaan atas nilai-nilai yang diharapkan bisa lebih terjaga dan terawasi sehingga pada nantinya lebih mudah untuk dilakukan evaluasi.

Temuan penelitian berdasarkan wawancara terfokus di lapangan dengan responden yang dianggap memiliki kualifikasi untuk memberikan penjelasan, menyatakan bahwa proses pengelolaan nilai ini terkait erat dengan model dan gaya kepemimpinan yang dimiliki Binus University, pola pembuatan aturan dan perumusan kebijakan yang ada, komunikasi yang berlangsung antar elemen lembaga di Binus University, serta cara Binus University dalam melakukan internalisasi nilai-nilai yang ada pada setiap elemen dan masyarakat di dalamnya.

Terkait model dan gaya kepemimpinan yang dijalankan di Binus University, ditemukan bahwa model kepemimpinan yang dijalankan pada dasarnya adalah model kepemimpinan partisipatif. Hal ini selaras dengan penerapan SODA (*Sentralisasi Operasi Desentralisasi Akademik*) di manajemen Binus University itu sendiri. Dengan model kepemimpinan dana manajemen seperti itu, maka perumusan kebijakan selalu berdasarkan arus informasi dan masukan dari bawah, atau tidak melulu didasarkan pada otoritas pusat. Meski demikian, model ini tidak mutlak seperti itu, melainkan lentur sesuai dengan konteks persoalan yang dihadapi.

Sistem SODA yang diterapkan dalam praktik manajemen Binus University sebenarnya sudah menjelaskan bahwa perumusan kebijakan, atau pembuatan peraturan ada kalanya bersifat desentralistik, dan bisa pula sentralistik. Pola ini disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan serta tingkat efisiensi dan pertimbangan akan konsekuensinya di masa depan. Dalam beberapa hal, pelaksanaan selalu dirumuskan dari pusat. Namun, kemasan kebijakan diserahkan pada level unit organisasi Binus University itu sendiri. Pola kebijakan seperti ini merupakan bagian dari pengelolaan nilai-nilai yang sudah dicantumkan sebelumnya.

Gambar 10: Praktik Pengelolaan Nilai di Binus University

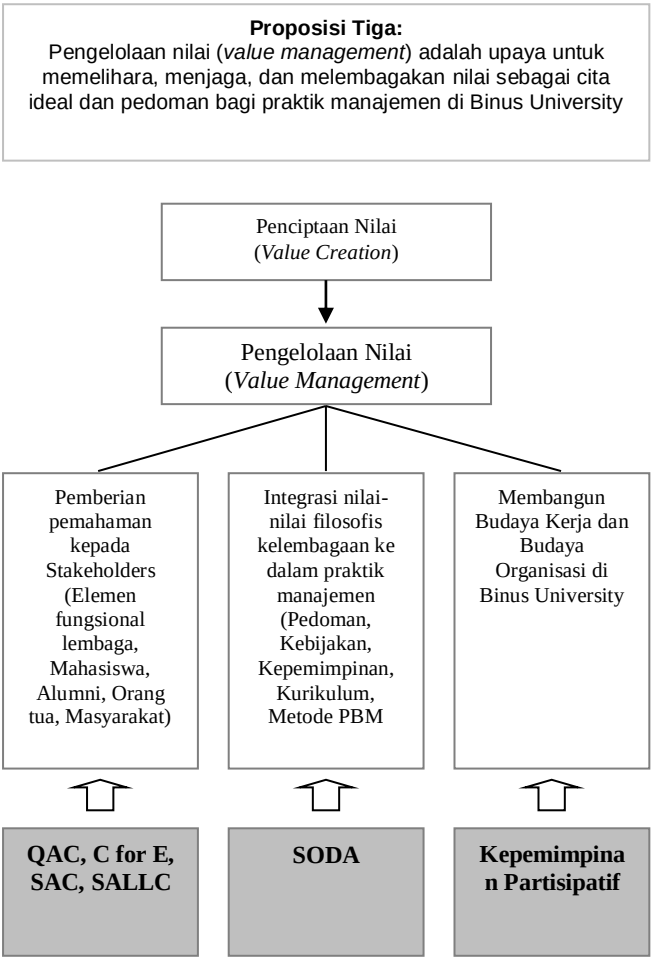

Terkait perihal pola komunikasi di antar elemen di Binus University dalam hubungannya dengan proses pengelolaan nilai, maka ia pada dasarnya adalah faktor penting dalam melancarkan proses dan internalisasi nilai-nilai yang ada. Binus University, sebagai sebuah sistem yang terbuka, pola komunikasi di dalamnya tentu saja

akan menjadi lebih interaktif dan partisipatif. Hal ini kemudian menjadi lebih mudah lagi tatkala, seperti disampaikan oleh responden bahwa, teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi bagian dari kehidupan kampus sehari-hari. Penggunaan email, web, blog, sistem informasi akademik, sistem informasi manajemen,dan lainnya membuat komunikasi antar elemen di lembaga ataupun dalam konteks pendidikan menjadi sangat mudah. Meski demikian, dalam konteks kebijakan, komunikasi ini harus dibaca sebagai bagian utama dari perumusan kebijakan.

Pentingnya pengelolaan nilai ini dikarenakan ia merupakan tahapan yang dari bagaimana upaya Binus University melaksanakan manajemen berbasis nilai dalam praktik manajemennya. Dalam rumusan sederhana, praktik penciptaan nilai ini bisa dilihat pada bagan mana dapat dilihat dalam Gambar 10.

> Proposisi 4: Manajemen berbasis nilai memiliki dampak yang besar terhadap tingkat keunggulan bersaing berkelanjutan (*sustainable competitive advantage*)

Persaingan adalah hal yang tidak terelakkan dalam konteks kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang ini. Ada banyak perguruan tinggi yang menawarkan produk dan warna baik yang sama ataupun yang berbeda sebagai cara agar terus kompetitif di tengah persaingan tersebut. Bagi Binus University sendiri, persaingan tersebut tidak lagi dalam konteks dan skala lokal, melainkan global. Hal ini mengingat visi Binus University yang ingin menjadi *world-class university*, maka dengan sendirinya, persiapan yang dilakukan adalah untuk persaingan dengan pendidikan tinggi dalam konteks global tersebut.

Untuk menjadi kompetitif, setiap lembaga pendidikan tinggi tentu membutuhkan modalitas baik secara teknis kelembagaan, fasilitas, maupun kesiapan infrastruktur akademik itu sendiri. De-

ngan kata lain, untuk menghadapi persaingan, Binus University memerlukan kesiapan baik secara struktur fisik, maupun kesiapan karakter psikis yang terwujud dalam sikap, tindakan, dan cara setiap anggota Binusian dalam memandang persaingan itu sendiri. Pada titik inilah, nilai menjadi persoalan penting, karena ia yang melandasi gerak, arah, kebijakan, dan seluruh tindakan yang diperlukan. Nilai menjadi pedoman. Nilai menjadi titik tolak karakter yang dibangun oleh Binus University.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan penjelasan bahwa persoalan utama yang seringkali dihadapi oleh lembaga pendidikan tinggi adalah keterceraian antara visi, misi, strategi, tujuan, tindakan, falsafah, dan nilai yang sudah ditetapkan sedari awal. Setiap lembaga pendidikan tinggi pasti memiliki visi, misi, tujuan, strategi, falsafah, bahkan nilai-nilai yang diusung. Namun, jika dalam praktiknya ternyata hanya sedikit yang bisa bertahan dalam kinerja ideal untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, maka dapat dipastikan ada yang salah dengan praktik manajemennya. Kesalahan ini biasanya dikarenakan masing-masing ideal cita organisasi tersebut berdiri sendiri, dan terlepas dari kesadaran dan tindakan elemen lembaga yang menjadi pengurus dan anggotanya. Dalam konteks yang lebih sederhana, jika sebuah perguruan tinggi yang sudah memiliki visi yang bagus, daya tunjang infrastruktur yang mapan, sumber daya yang mumpuni, namun masih saja tidak bisa bersaing dengan perguruan tinggi lain, maka dapat dipastikan bahwa itu dikarenakan tidak ada konkritisasi nilai yang menjadi perekat atas semua unsur dan faktor yang sudah disebutkan sebelumnya.

Nilai, dengan demikian memiliki fungsi sebagai perekat atau bisa juga sebagai wadah yang menyatukan antara visi yang ditetapkan dengan strategi yang dijalankan. Antara misi yang ditentukan dengan tindakan yang dijalankan. Antara kebijakan yang diambil dengan ketaatan untuk melaksanakan. Nilai tidak semata perihal ab-

strak yang hanya terwujud dalam wacana ideal dari pikiran, melainkan ia harus diejawantahkan secara konkrit dalam bentuk kesadaran, tindakan, rumusan, aturan, kebijakan, karakter, hingga lulusan dari Binus University sendiri.

Nilai ini pula yang nantinya menjadi modal utama sebuah lembaga pendidikan tinggi untuk memiliki daya tawar dan daya saing dengan lenbaga pendidikan tinggi lainnya. Dengan kata lain, nilailah yang mendasari keunggulan kompetitif berkelanjutan (*sustainable competitive advantages*) sebuah lembaga pendidikan tinggi di masa mendatang. Jika sebuah perguruan tinggi atau lembaga pendidikan pada umumnya bisa memiliki keunggulan kompetitif ini, maka dapat dipastikan eksistensinya akan bertahan dan mampu menghadapi tekanan persaingan yang ada.

Meski persoalan daya tawar dan daya saing sebuah perguruan tinggi juga bergantung pada banyak hal selain keunggulan kompetitif, seperti promosi, dan lainnya, namun apa yang menjadi dasar atas kepercayaan stakeholderlah yang utama. Kepercayaan ini hanya bisa terwujud jika perguruan tinggi mampu memberikan pertanggungjawaban melalui prestasi dan keunggulan. Hal inilah yang seharusnya disadari betul oleh setiap pengelola lembaga pendidikan tinggi.

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh penulis, apa yang dilakukan oleh Binus University untuk memasarkan keberadaannya, tentu saja tidak melulu bergantung pada bagaimana mewujudkan daya saing tersebut. Ia juga secara lebih teknis dilakukan melalui komunikasi yang berkesinambungan dengan seluruh stakeholder lembaga atau masyarakat secara umum. Semua media dan sarana yang membantu Binus University dalam mempromosikan keberadaan lembaganya selalu diberdayakan dengan maksimal. Manajemen Binus Universityterkait promosi lembaganya, tidak ragu untuk mengunjungi berbagai daerah dalam skala nasional untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat dan menyampaikan

apa yang menjadi visi, misi, dan tujuan dari Binus University. Manajemen Binus Universityjuga mengikuti berbagai pameran pendidikan, hingga tentu saja yang paling utama menjali kerjasama mutualistik dengan berbagai instansi, baik sejenis ataupun perusahaan yang nantinya mendukung promosi Binus University itu sendiri.

Disampaikan juga, bahwa keunggulan sebuah lembaga berkaitan erat dengan keberhasilannya mencapai derajat dan level tertentu, baik dalam konteks kualitas pendidikan ataupun standar manajemen. Keunggulan inilah yang menjadi modal utama bagi lembaga pendidikan tinggi untuk menjadi kompetitif di tengah persaingan tersebut. Tanpa nilai-nilai keunggulan, kita tidak akan bisa *survive* dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Padahal, kepercayaan masyarakat inilah yang menjadi tolak ukur keberhasilan lembaga pendidikan dalam menghadapi persaingan. Bagaimana dampak manajemen berbasis nilai pada keunggulan daya saing di Binus University sendiri bisa dilihat pada bagan berikut (Gambar 11):

Gambar 11: Dampak Manajemen Berbasis Nilai
pada Keunggulan Bersaing Binus University

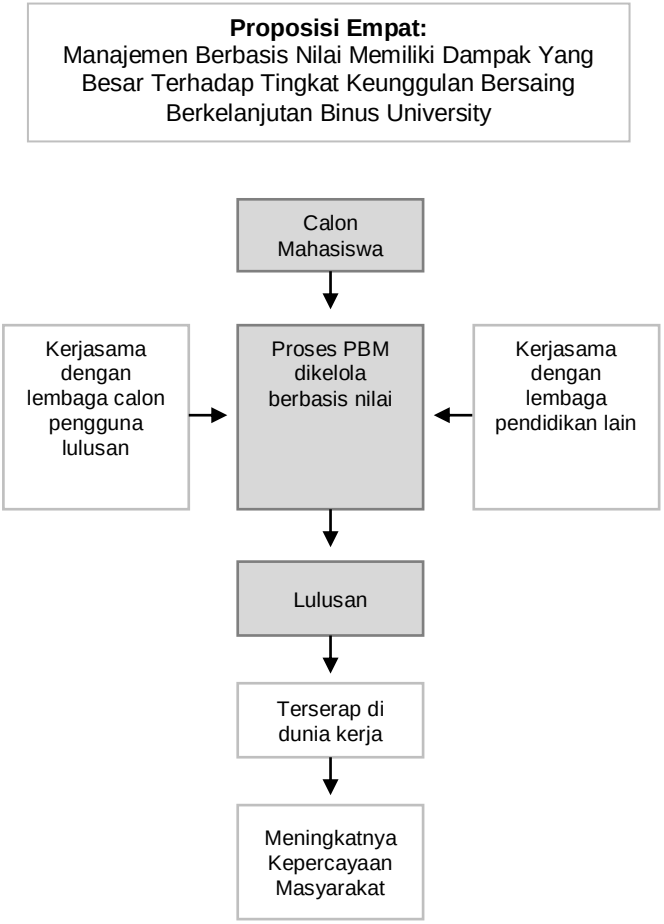

E. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik Manajemen berbasis Nilai di Binus University, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan basis nilai memegang peranan penting dalam praktik manajemen, khususnya pada lembaga pendidikan tinggi sebagai lembaga yang berorientasi non-profit. Manajemen berbasis nilai ini membuat lembaga yang menerapkannya mampu menyeimbangkan antara aspek idealisme pendidikan dengan tuntutan persaingan bisnis dan kompetisi antar lembaga pendidikan tinggi.
2. Praktik penciptaan nilai di Binus University (*value creation*) merupakan praktik awal dalam kerangka penerapan manajemen berbasis nilai pada sebuah lembaga. Dalam konteks Binus University, praktik ini diawali dengan perumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan perumusan nilai-nilai filosofis kelembagaan yang akan menjadi pedoman dan tuntunan bagi setiap unsur manajemen dan lembaga secara umum dalam menjalankan setiap bentuk upaya mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
3. Praktik pengelolaan nilai (*value management*) adalah tahapan kedua dari penerapan manajemen berbasis nilai yang mencakup internalisasi nilai-nilai ideal yang sudah dirumuskan ke dalam setiap unsur manajemen dan lembaga. Hal ini bertujuan agar semua elemen mampu bergerak sesuai dengan keinginan dan cita-cita bersama secara harmonis. Dalam konteks Binus University, praktik pengelolaan nilai ini terkandung dari mulai perumusan kebijakan, penetapan prosedur dan aturan, penetapan kurikulum dan hal-hal yang berkaitan dengan aspek akademis lembaga, praktik kepemimpinan, hingga penataan elemen manajemen baik secara fungsional maupun struktural.
4. Adanya basis nilai dalam praktik manajemen yang dijalankan oleh Binus University, baik sebagai lembaga pendidikan maupun sebagai lembaga yang dituntut untuk terus bersaing dengan mengutamakan peningkatan kualitas, membuat Binus University mampu meraih prestasi baik dalam standar manajemen (ISO 9001:2008) maupun prestasi yang berkaitan dengan

kualitas akademik (termasuk dalam perguruan tinggi unggulan berdasarkan pemeringkatan perguruan tinggi Webometrics, 4iCU, dan TeSCA).

Daftar Pustaka

Armstrong, Michael. 2009. *Strategic Human Resource Management: A Guide to Action.* New York: Kogan Page Ltd.

Byrne, Stephen O. 2000. *Does Value Based Management Discourage Investment in Intangibles? In Value-Based Metrics: Foundations and Practice.* Frank J. Associates.

Dessler, Gary. 2011. *Human Resource Management (13th Edition)*. New York: Prentice Hall.

Griffin, Ricky W. 2004. *Management.* Boston: Cengage Learning.

Iyer, S.S. 2009. *Managing for Value.* New York: New Age Publisher.

Melnick, Edward L. 2007. *Creating Value in Financial Services: Strategies, Operations and Technologies.* Berlin: Springer.

Pearce, John A and Richard B. Robinson, 2012, *Strategic Management, Planning for Domestic & Global Competition*. New York: McGraw-Hill.

Porter, Michael E. 2008. *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Free Press.

Robbins P. Stephen & Couiter Mary. 2010. *Management*. 6th Edition. Prentice Hall International Inc.

Young, S. David. 2001. *EVA and VBM:A Practical Guide to Implementation.* New York: McGraw-Hill.

EVALUASI MATERI UJIAN TULIS MASUK UIN BANDUNG

Dr. Asti Meiza

A. Pendahuluan

Tujuan Pendidikan Nasional dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 3 berbunyi: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional nomor 2 Tahun 1989, "Pendidikan Nasional bertujuan meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggungjawab dan produktif serta sehat jasmani dan rohani".

Landasan hukum di atas dan Rencana Strategis Pengembangan IAIN menjadi UIN (Renstra UIN, 2005) menjadi dasar untuk merancang sistem pendidikan di UIN.

Universitas Islam Negeri (UIN) mempunyai paradigma keilmuan yang berbeda dengan perguruan tinggi lain. Visi dan misi UIN ingin mengaktualisasikan universalitas ajaran Islam yang tidak mengenal dikotomi antara ilmu-ilmu dan ilmu agama. Kalaupun ada dikotomi sebatas pengklasifikasian ilmu saja, bukan berarti pemisahan. Konsep ini diterapkan mulai dari proses awal pemilihan mahasiswa yang dianggap bisa menjadi bagian dari civitas ademika UIN, yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Setiap tahun UIN selalu berusaha

mengevaluasi performansi akademik mahasiswanya. Hasil evaluasi performansi ini menjadi acuan untuk perbaikan pada seluruh rancangan sistem perkuliahan termasuk proses seleksi penerimaan mahasiswa baru UIN juga mengalami perbaikan setiap tahunnya.

Seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Ujian Tulis (UTL) meliputi ujian secara tertulis untuk Pengetahuan Umum, Pengetahuan Agama, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris dan ujian lisan untuk baca tulis Al-Qur'an dan wawancara. Seleksi jalur ini merupakan proses penjaringan calon mahasiswa dengan memberikan pemerataan dari berbagai lulusan SMU dan sederajat. Melihat dari komposisi materi yang diujikan, terlihat warna yang sesuai dengan paradigma keilmuan yang tidak dikotomi, seperti yang telah dijelaskan di atas. UIN menginginkan mahasiswa yang kapabel dan kompeten baik di ilmu-ilmu umum sekaligus ilmu agama.

Dalam proses perkuliahan yang berlangsung di UIN, ada saja ditemukan mahasiswa yang kurang bisa mengikuti sistem perkuliahan dengan baik. Dari rekam jejak akademik, dari semester-semester awal sudah terlihat mahasiswa yang kurang bisa mengikuti proses perkuliahan. Sepertinya mereka bisa lolos dalam seleksi masuk tidak lain karena faktor keberuntungan saja. Seharusnya jika materi ujian masuk benar-benar valid, maka dengan sendirinya akan terjaring calon mahasiswa yang sesuai dengan kebutuhan perkuliahan yang sudah dirancang UIN.

Dari keenam seleksi penerimaan mahasiswa baru yang sudah dijelaskan di awal, otoritas penuh UIN sebagai lembaga mandiri yang mengadakan proses seleksi ada pada jalur UTL. Proses seleksi di sini dimulai dari sosialisasi, menyiapkan materi UTL, menyelenggarakan UTL, dan melakukan seleksi hasil UTL dengan kriteria yang ditentukan. Sedangkan lima bentuk seleksi lainnya, UIN melakukan kerjasama dengan pihak SMU dan Panitia Pusat SNMPTN. Karena itu perbaikan dalam materi Ujian Tulis UIN bisa dan perlu dilakukan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh materi tes masuk UIN yang reliabel, valid, dan mempunyai item-item yang layak secara psikometrik; Merevisi silabus pengajaran mata kuliah Psikometri yang selama ini menggunakan TTK dengan TRI; dan Mensosialisasikan penggunaan TRI untuk berbagai pembuatan alat ukur psikologi.

B. Kajian Teori

Tes merupakan salah satu jenis teknik penilaian yang menggunakan prosedur yang sistematis untuk mendapatkan informasi dan mengubah informasi tersebut ke dalam bentuk angka atau skor (Friedenberg, 1995). Dari definisi tes diketahui perbedaan tes dengan teknik penilaian yang lain terletak pada derajat kontrol perolehan informasi yang lebih tinggi.

Ini ditandai dengan terdapatnya prosedur yang sistematis yang meliputi:

1. Pemilihan item atau butir soal atau pertanyaan tes.
2. Spesifikasi kondisi pelaksanaan tes.
3. Aturan sistem skoring.

Selanjutnya istilah 'item' akan digunakan untuk menyatakan butir soal atau pertanyaan tes. Ini dimaksudkan agar sesuai dengan nama teori yang digunakan yaitu Teori Respon Item.

Tes dikenal juga dengan istilah 'skala' dalam ruang lingkup psikologi. Sejauh ini masih ada pro dan kontra mengenai tes. Karena itu tes tidak bisa dijadikan ukuran yang presisi untuk menggambarkan karakteristik individu karena hanya menggunakan sampel perilaku. Hasilnya sebaiknya dipandang sebagai estimasi/perkiraan saja karena skala yang digunakan terbatas dan mudah dipengaruhi oleh variabel dari luar. Tes tidak bisa digunakan untuk membuat keputusan tentang individu melainkan sebagai langkah untuk pengembangan dan evaluasi.

Sebuah tes yang baik dirancang dengan hati-hati dan dievaluasi secara empirik untuk meyakini informasi yang diperoleh dari tes itu akurat dan bermanfaat. Karakteristik tes yang baik dilihat dari sifat-sifat rancangan dan sifat-sifat psikometrinya. Rancangan tes harus mempunyai tujuan yang jelas, mempunyai isi yang spesifik dan baku, mempunyai prosedur pelaksanaan yang baku, dan mempunyai prosedur skoring yang baku. Sedangkan dipandang dari sifat-sifat Psikometrinya, penentuan baik atau tidaknya sebuah tes dengan perangkat analisis statistik yaitu analisis reliabilitas, analisis validitas, dan analisis item

Reliabilitas berarti konsisten atau handal atau ajeg. Seseorang diukur dengan tes yang reliabel dalam dua waktu yang berbeda akan memberikan hasil yang sama. Dengan kata lain, seseorang dari sekelompok peserta tes akan berada pada *posisi yang relatif sama* dalam kelompoknya untuk berbagai tes. Kegunaan reliabilitas yaitu jika skor individu berubah dari satu tes ke tes yang lain atau dari rangkaian tes yang berbeda versi, diharapkan perbedaan ini memang mencerminkan adanya perubahan pada pengetahuan atau karakteristik mereka.

Reliabilitas tes dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mengakibatkan munculnya kesalahan pengukuran. Misalnya panjang suatu tes (jumlah item) dan keragaman skor tes (variansi).

Salah satu sifat psikometri yang harus dipenuhi oleh sebuah tes yaitu mempunyai item yang baik melalui serangkaian analisis statistik. Item yang baik, harus bisa membedakan peserta yang mampu dengan yang tidak (daya beda, tingkat kesulitan) dan tidak tidak memuat pilihan yang mubazir. Analisis item khususnya digunakan jika tes tidak reliabel atau gagal memperlihatkan hubungan prediktif dengan ukuran-ukuran kriteria. Reliabilitas dan validitas tes dapat diperbaharui dengan membuang item-item yang tidak bagus atau menulis ulang item-item baru. Analisis item merupakan serangkaian analisis statistik yang dikenakan pada item-item tes satu per satu.

Terdapat berbagai uji statistik yang dapat dikerjakan dan berbagai teknik menghitung. Secara umum terdapat tiga macam statistik yang terlibat yaitu tingkat kesulitan item, *p*, daya pembeda item, D, dan kekuatan pengecoh. Ketiga statistik ini dalam konteks tes kemampuan dengan item berbentuk pilihan ganda (PG). Sedangkan untuk item berbentuk jawaban singkat dan esai serta untuk tes kepribadian, tes minat dan bakat, tingkat kesulitan item dan daya pembeda item dapat diadaptasi.

Maximal-performance Test adalah tes yang dirancang untuk mengetahui atau menentukan batas atas kemampuan seseorang, bisa berupa pengetahuan ataupun keterampilan. Peserta diharapkan menjawab pertanyaan dengan benar sebanyak-banyaknya sehingga menghasilkan skor tertinggi. Disebut juga dengan istilah *Ability test*. Salah satu contoh adalah tes prestasi dan tes seleksi.

Ujian Tulis UIN yang diteliti dalam penelitian ini meru-pakan bagian dari *Maximal-performance test,* khususnya *Ability test.* Format itemnya adalah *Alternate-choice*, khususnya pilihan ganda. Secara rinci, format item UTL akan dibicarakan saat memutuskan model matematika yang akan dipilih dari Teori Respon Item.

Penelitian dari para ahli, menemukan bahwa teori ini memiliki keterbatasan, di antaranya karakteristik item bergantung pada kelompok diberlakukannya tes. Tingkat kesulitan item akan menjadi mudah jika tes dilakukan pada kelompok yang mempunyai kemampuan tinggi, dan sebaliknya. Jadi karakteristik item sangat dipengaruhi oleh kelompok tempat tes dilakukan. Ini mengakibatkan konsistensi karakteristik item tidak bisa diperoleh. Untuk itu dikembangkan sebuah teori baru yang tidak mendasarkan analisanya pada sampel. Teori ini dikenal dengan Teori Respon Item (TRI).

Konsep Fungsi Respon Item sudah dikaji sebelum tahun 1950-an, kemudian dikembangkan sebagai sebuah teori antara tahun 1950 dan 1960. Dua orang pionir yang terkenal dalam pengembang-

an teori ini adalah seorang psikometrian *Frederic M.Lord* dan seorang matematikawan Denmark, *Georg Rasch*.

Teori ini adalah sebuah pendekatan baru dalam pembuatan alat ukur. Secara psikometrik, TRI adalah sebuah teori yang menjelaskan aplikasi model matematika terhadap data yang diperoleh dari kuesioner dan tes yang menjadi dasar untuk pengukuran kemampuan, sikap, atau atribut psikologis lainnya. Teori ini digunakan untuk melakukan analisis statistik dan pengembangan alat ukur, seringkali untuk tes bergengsi seperti *Graduate Record Examination (GRE).* TRI didasarkan pada ide bahwa peluang sebuah item dijawab benar merupakan sebuah fungsi dari kemampuan (*ability*). 'Kemampuan' ini dikenal juga dengan *latent trait variable*. Sebagai contoh, seseorang dengan kecerdasan yang tinggi diperkirakan akan memberikan jawaban yang benar untuk item-item pada tes kecerdasan dengan porsi lebih besar. Istilah 'latent' digunakan di sini untuk menekankan bahwa respon item diskrit diambil sebagai manifestasi yang bisa diobservasi dari karakteristik, gagasan, atau atribut yang dihipotesiskan, tidak diobservasi secara langsung, melainkan disimpulkan dari respon-respon yang muncul.

Semua model TRI menjelaskan peluang respon terhadap item secara khusus di berbagai tingkat dari variabel laten yang dilambangkan dengan θ.

Pada Teori Respon Item, peluang peserta untuk menjawab benar item tertentu, parameter item, dan statistik dari sampel, dinyatakan dalam suatu model matematika yaitu model logistik. Model matematika ini bisa saja sesuai (fit) dengan data yang dianalisis, bisa tidak. Model yang sesuai dengan data memberikan informasi bahwa tingkat kemampuan peserta sesuai dengan karakteristik item dan sebaliknya.

Tampilan sebuah item dalam suatu tes dijelaskan dengan Kurva Karakteristik Item (KKI). Pada TTK, kurva karakteristik item memperlihatkan hubungan antara total skor tes dengan tingkat kesulitan

item (Friedenberg, 1995). Pada TRI, KKI menggambarkan peluang seseorang dengan kemampuan di tingkat tertentu untuk bisa menjawab item tertentu dengan benar. Individu dengan kemampuan yang rendah mempunyai peluang lebih kecil untuk menjawab item secara benar dibanding individu dengan kemampuan yang lebih tinggi. Perhatikan KKI berikut:

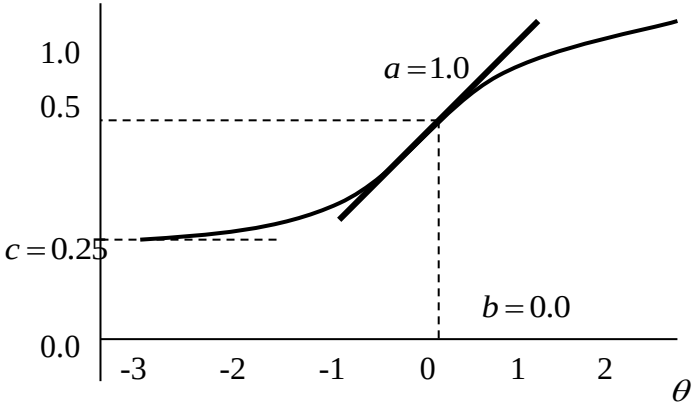

Gambar 12: Kurva Karakteristik Item

Kurva Karakteristik Item di atas merupakan contoh model logistik tiga parameter dengan θ adalah parameter kemampuan individu dan $a, b,$ dan c adalah parameter-parameter item.

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif terhadap populasi penelitian meliputi respon calon mahasiswa baru UIN yang tertuang dalam hasil UTL UIN SGD Bandung. Metodologi ini dipilih karena dapat memberikan data yang cukup akurat untuk ditinjau dengan analisis statistik melihat kredibilitas item-item ujian tulis masuk UIN. Seperti halnya pada Teori Tes Klasik, analisis statistik dengan Teori Respon Item didasarkan pada skor tes. Dilihat

dari cara per-olehan data, penelitian ini bisa digolongkan pada penelitian dengan data sekunder karena peneliti tidak melakukan sendiri pengukuran melainkan data diperoleh dari pihak penyelenggara UTL UIN yaitu bagian Akademik UIN SGD Bandung.

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta UTL UIN SGD TA 2012/2013. Data bersumber dari Bagian Akademik UIN SGD (lihat lampiran). Dengan pertimbangan keterbatasan waktu dan SDM untuk olah data, sampel diambil untuk satu bagian UTL saja yaitu Pengetahuan Agama. Untuk memenuhi sampel yang representatif serta untuk menghemat biaya, tenaga, dan waktu, peneliti mengambil 386 sampel. Penentuan sampel menggunakan teknik *simple random sampling* yaitu mengambil secara acak peserta pada UTL bagian Pengetahuan Agama.

Jenis data adalah jawaban peserta UTL setiap butirnya untuk ketiga bagian tes. Rekapitulasi data berupa jawaban berdasarkan kunci jawaban dengan penggunaan tanda (*) untuk jawaban yang benar atau sesuai kunci dan penggunaan huruf (a, b, c, d) untuk jawaban yang salah, sesuai jawaban peserta.

Data dikumpulkan melalui Ujian Tulis yang terdiri dari tiga bagian yaitu Pengetahuan Bahasa, Pengetahuan Umum, dan Pengetahuan Agama. Setiap bagian terdiri dari seratus (100) butir soal Pilihan Ganda (PG) dengan empat pilihan yaitu a, b, c, dan d. Jawaban yang benar yaitu yang sesuai dengan kunci jawaban akan diberi skor 1. Sedangkan jawaban yang salah akan diberi skor 0. Karena itu skor total untuk seluruh materi ujian setiap bagiannya akan berkisar dari 0 sampai dengan 100. Rekapitulasi data dilakukan per butir dengan menggunakan perangkat lunak komputer *Microsoft Excel.* Respon sampel berupa hasil UTL (skor tes), dianalisis secara kuantitatif (empiris) dengan program komputer *Microsoft Excel.*

D. Pengolahan dan Analisis Data

Rekapitulasi data dilakukan per item dengan menggunakan perangkat lunak komputer *Microsoft Excel.* Respon sampel berupa hasil UTL (skor tes), dianalisis secara kuantitatif (empiris) dengan program komputer *Microsoft Excel.*

Penelitian dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Perencanaan
   1. Penyusunan kerangka umum penelitian
   2. Pencarian referensi berupa studi literatur dan penelitian-penelitian terdahulu.
   3. Pencarian data awal pendukung kerangka penelitian.

b. Tahap Penentuan Subjek Penelitian

   Semula peneliti ingin mengambil subjek penelitian peserta ke-tiga bagian UTL UIN TA 2012/2013 yaitu Pengetahuan Agama, Pengetahuan Umum, dan Pengetahuan Bahasa sebanyak 1200 sampel, yaitu sekitar 30% dari jumlah seluruh peserta UTL (data terlampir). Namun karena keterbatasan waktu dan SDM dalam pengolahan data, diputuskan untuk hanya mengambil sampel peserta UTL bagian Pengetahuan Agama saja yaitu sebanyak 386 peserta. Pertimbangan lain memilih bagian UTL ini adalah karena UIN adalah insitusi berbasiskan agama, di mana selama ini jumlah peserta UTL terbanyak adalah lulusan dari Sekolah menengah Atas dan sederajat berbasiskan agama pula.

c. Tahap Pengumpulan Data

   Dalam penelitian ini, data diperoleh dari Bagian Aka-demik UIN SGD Bandung berupa hasil UTL. Data digolongkan pada data sekunder karena peneliti tidak melakukan sendiri pengukuran untuk memperoleh data. Jadi tidak perlu lagi dilakukan penyu-sunan alat ukur dan serangkaian analisa alat ukur.

d. Tahap Pengolahan Data

Data dalam penelitian ini diolah dengan pendekatan kuantitatif. Data yang terkumpul berupa hasil UTL dalam bentuk Lembar Jawaban Komputer (LJK). Karena yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah hasil UTL per item maka dilakukan rekapitulasi ulang hasil UTL untuk setiap itemnya. Pengumpulan data dilakukan secara manual dan komputerisasi dengan menggunakan program *Microsoft Excel*. Data disimpan dalam tabel dimana kolom menyatakan item sebanyak 100 item dan baris menyatakan banyaknya sampel yaitu 386 orang. Selanjutnya data diolah dengan *Microsoft Excel* juga untuk memperoleh hasil Analisis item berdasarkan TTK dan TRI.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu hasil analisis item berdasarkan Teori Tes Klasik (TTK) dan hasil analisis item berdasarkan Teori Respon Item (TRI). Berikut hasilnya.

a. Teori Tes Klasik

Pada TTK, analisis item dilakukan dengan melihat tingkat kesulitan item (*p*) dan daya pembeda item (*D*).

1. Tingkat Kesulitan Item

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu sukar tetapi juga tidak terlalu mudah. Soal yang terlalu mudah akan membuat peserta tes tidak menemukan tantangan untuk bisa mengerahkan kemampuan maksimalnya dalam menjawab. Sebaliknya soal yang terlalu sukar, justeru akan membuat peserta tes putus asa dan cenderung mencari bantuan jawaban. Tentunya kondisi ini tidak mendukung kepada prinsip pendidikan.

Tingkat kesulitam item dilambangkan dengan *p*. Nilai *p* berkisar antara 0 dan 1. Nilai 0 menyatakan item terlalu sulit sehingga tidak

satupun peserta bisa menjawab. Sedangkan nilai 1 menyatakan item yang terlalu mudah sehingga semua peserta tes bisa menjawab dengan benar item tersebut. Nilai *p* dicari dengan formulasi berikut:

$$p = \frac{B}{J} \qquad (4.1)$$

Di mana *p* adalah tingkat kesulitan item, *B* adalah banyaknya peserta yang menjawab benar untuk item tersebut, dan *J* adalah jumlah seluruh peserta tes.

Tingkat kesulitan item diklasifikasikan lagi sebagai berikut :

1. $0.00 < p < 0.30$ → item yang sulit
2. $0.31 < p < 0.70$ → item yang sedang
3. $0.71 < p < 1.00$ → item yang mudah

Berikut hasil rekapitulasi tingkat kesulitan item dan persentase serta distribusi itemnya.

Tabel 5: Indeks Tingkat Kesulitan dan Distribusi Itemnya

Klasi-fikasi	***p***	**Jml item**	**%**	**Nomor item**
Mudah	0.71 - 1.00	9	9%	3 7 12 14 16 24 26 82 87
Sedang	0.31 - 0.70	48	48%	4 5 8 10 11 13 15 17 18 19 21 27 28 29 30 32 33 36 37 39 40 41 42 43 46 47 48 50 51 54 56 57 60 61 62 66 70 73 74 76 80 83 84 86 88 89 91 100
Sulit	0.00 - 0.30	43	43%	1 2 6 9 20 22 23 25 31 34 35 38 44 45 49 52 53 55 58 59 63 64 65 67 68 69 71 72 75 77 78 79 81 85 90 92 93 94 95 96 97 98 99

Gambar 13: Persentase Tingkat Kesulitan Item

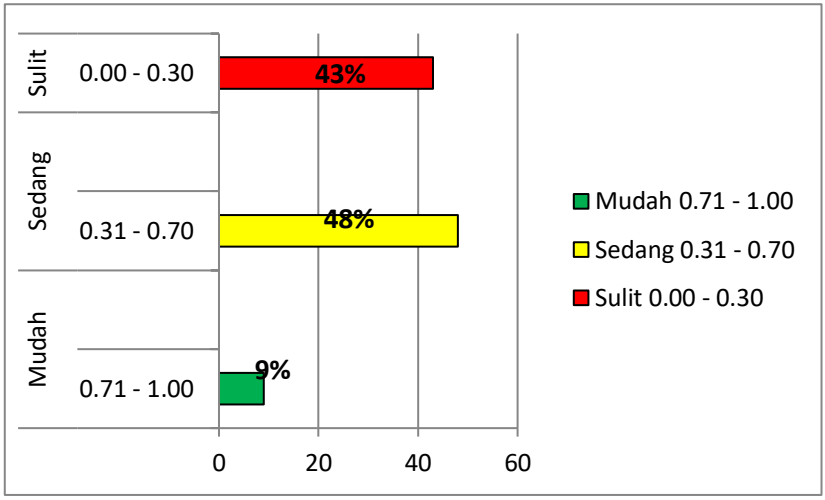

Terlihat pada hasil di atas bahwa hampir seluruh item (48% dan 43%) diklasifikasikan sebagai item yang sedang dan sulit. Sedangkan item yang mudah hanya 9%. Dengan asumsi awal bahwa mayoritas peserta tes UTL UIN SGD adalah lulusan SMU/sederajat berbasiskan agama, tidak tercermin dalam hasil analisis ini. Sebagian besar item dianggap tidak mudah bagi peserta.

2. Daya Pembeda Item

Daya pembeda item adalah kemampuan item untuk membedakan peserta tes yang berkemampuan tinggi dengan yang berkemampuan rendah. Daya pembeda item dilambangkan dengan sebuah indeks yaitu *D*. Nilai untuk D berkisar antara -1 sampai 1, dimana tanda ne-gatif menunjukkan ada situasi yang 'terbalik' yaitu peserta dengan total skor tinggi (dianggap berkemampuan tinggi) tidak bisa menjawab dengan benar pada item yang bersangkutan. Sedangkan peserta dengan total skor rendah (dianggap berkemampuan rendah) justru malah menjawab benar item tersebut.

Nilai Daya pembeda ditentukan dengan kelompok peserta menjadi Kelompok Atas (KA) dan Kelompok Bawah (KB). Jika anggota kelompok kurang dari 100 maka peserta dibagi menjadi dua kelompok yang sama (masing-masing 50% peserta). Tetapi jika anggota kelompok lebih dari 100 maka

KA = 0.27 x anggota kelompok teratas (4.2)

KB= 0.27 x anggota kelompok bawah (4.3)

Bisa juga dinyatakan bahwa KA adalah 27% skor ter-tinggi, sedangkan KB adalah 27% skor terendah.

Kemudian dihitung proporsi peserta yang men-jawab benar untuk item tertentu di masing-masing kelompok. Caranya seperti menentukan tingkat kesulitan item. Terakhir untuk menghitung *D* digunakan formulasi berikut.

$$D = p_A - p_B \quad (4.4)$$

Dengan $p_A = \frac{B_A}{J_A}$ dan $p_B = \frac{B_B}{J_B}$, dimana :

p_A : proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar item tertentu

p_B : proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar item tertentu

B_A : banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar item tertentu

B_B : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar item tertentu

J_A : banyaknya peserta kelompok atas

J_B : banyaknya peserta kelompok bawah

Klasifikasi daya pembeda item adalah sebagai berikut.

1. $0.00 < D < 0.20$ → item yang jelek
2. $0.21 < D < 0.40$ → item yang cukup
3. $0.41 < D < 0.70$ → item yang baik
4. $0.71 < D < 1.00$ → item yang baik sekali

Pada penelitian ini ditemukan indeks daya pembeda setiap item seperti pada Tabel 4.

Berdasarkan indeks daya pembeda, Pada penelitian ini ditemukan hampir semua item tidak layak untuk digunakan sebagai materi seleksi. Terlihat dari hanya satu buah item yang diklasifikasikan sebagai 'cukup' sedangkan selebihnya masuk pada klasifikasi 'jelek' bahkan harus di 'buang'. Ini mencerminkan bahwa hampir semua item tidak bisa dijadikan ukuran untuk membedakan antara peserta tes berkemampuan tinggi dengan yang berkemampuan rendah. Berikut rekapitulasi untuk persentasenya adalah sebagai berikut:

Tabel 6: Indeks Daya Pembeda dan Distribusi Itemnya

Klasifikasi	***D***	**Jml item**	**%**	**Nomor item**
Buang	*D < 0*	18	18%	2 3 17 18 20 25 26 31 35 44 56
Jelek	0.0 - 0.20	81	81%	1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 21 22 23 24 27 28 29 30 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 57 58 59 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 95 96 97 98 99 100
Cukup	0.21 - 0.40	1	1%	50
Baik	0.41 - 0.70	0	0	-
Baik Sekali	0.70 – 1.00	0	0	-

Grafik histogram untuk tabel di atas seperti pada Gambar 14.

Gambar 14: Persentase Daya Pembeda Item

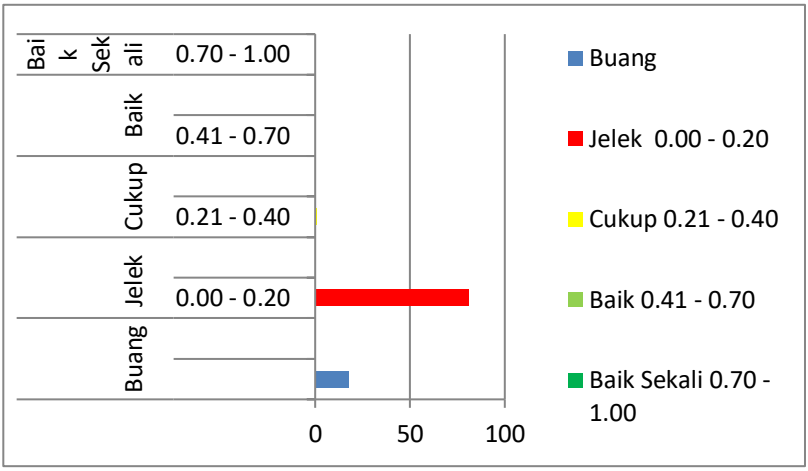

Rinciannya dapat dilihat di lampiran.

Selanjutnya mari kita lihat bagaimana analisis item berdasarkan Teori Respon Item.

3. Teori Respon Item

Pada penelitian ini model yang akan dipilih untuk TRI adalah model dengan dua parameter yaitu melibatkan parameter tingkat kesulitan (*p*) dan parameter daya pembeda (*D*). Hasil analisis item untuk TTK bisa dipakai di sini. Berikut grafik untuk kedua parameter tersebut.

Gambar 15: Kurva Karakteristik Item *p* vs *D*

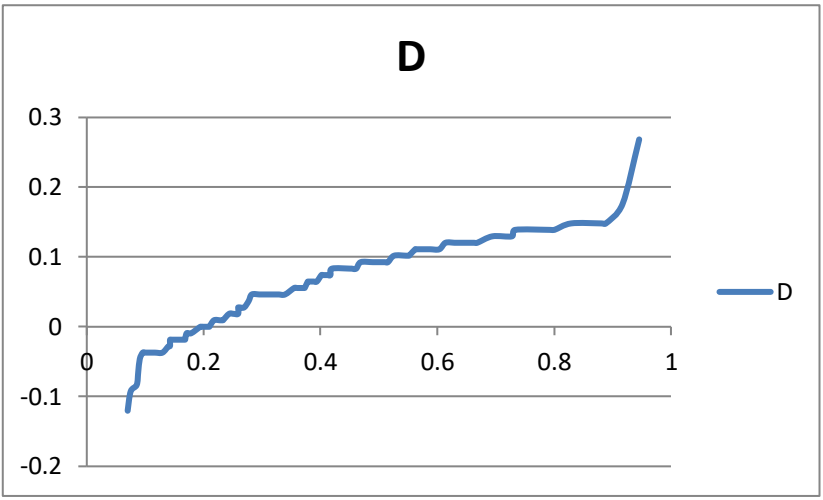

Grafik ini memperlihatkan tidak ditemukan bentuk TRI ideal yang menunjukkan karakteristik item yang baik, seperti ditunjukkan Gambar 1 di atas.

Penelitian ini menemukan bahwa materi UTL UIN Sunan Gunung Djati yang digunakan sebagai salah satu proses seleksi penerimaan calon mahasiswa baru UIN TA 2012/2013 harus dievaluasi dan ditulis ulang. Setelah proses revisi dilakukan, perlu dilaksanakan serangkaian ujicoba sehingga diperoleh alat ukur yang reliable dan valid yang layak digunakan sebagai sarana untuk melakukan proses seleksi penerimaan mahasiswa baru UIN melalui jalur UTL.

F. Kesimpulan dan Saran

Merujuk kepada pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan pada bagian perumusan masalah di awal maka berdasarkan analisis data dapat ditarik kesimpulan bahwa materi Ujian Tulis

Masuk (UTL) UIN Sunan Gunung Djati Bandung khususnya bagian Pengetahuan Agama, perlu dievaluasi dan ditulis ulang. Ini dapat dilihat dari hampir semua item baik ditinjau dari tingkat kesulitan maupun daya pembeda item. Evaluasi dan penulisan ulang materi UTL perlu ditindak-lanjuti dengan serangkaian ujicoba sehingga mendapatkan item-item yang benar-benar layak untuk menjadi instrumen seleksi mahasiswa baru. Hal ini ditujukan agar diperoleh calon mahasiswa yang mempunyai kompetensi tinggi dan kapabilitas yang sesuai, khususnya di bidang Agama.

Perbandingan analisis item dengan TTK dan TRI pada penelitian ini tidak bisa memberikan kesimpulan tentang metode mana yang lebih baik. Ini disebabkan karena keduanya memberikan hasil yang sama. Tetapi untuk pengenalan terhadap TRI sebagai materi ajar pada mata kuliah Psikometri di fakultas Psikologi, tidak ada salahnya untuk dilakukan.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka untuk mendapatkan calon mahasiswa baru UIN yang memiliki kompetensi tinggi dan kapabilitas sesuai, peneliti mengajukan beberapa saran berikut :

a. Dengan diperolehnya hasil analisis item pada materi UTL UIN baik dengan TTK maupun TRI maka disarankan untuk melakukan evaluasi dan penulisan ulang terhadap item-item UTL UIN khususnya bagian Pengetahuan Agama.
b. Ke depan perlu dilakukan juga penelitian lanjut berupa analisis item terhadap kedua bagian UTL UIN lainnya yaitu bagian Pengetahuan Bahasa dan Pengetahuan Umum.
c. Untuk evaluasi dan penulisan ulang materi UTL UIN diperlukan sebuah tim yang terdiri dari gabungan ahli yang berkompeten di bidangnya, termasuk ahli Psikometri.

Daftar Pustaka

Chadha, N.K. (2009). *Applied Psychometry*. SAGE Publications

Cohen, Jay Ronald, etc. 1988. *Psychological Testing: An Introduction to Tests and Measurement*. California: Mayfield Pub.Co.

Daryanto. 2012. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Friedenberg, Lisa. 1995. *Psychological Testing: Design, Analysis, and Use.* Allyn & Bacon, Inc.

Gregory, Robert. 2000. *Psychological Testing: History, Principles, and Applications. Third Ed*. Allyn & Bacon, Inc.

Kaplan, Robert & Saccuzzo, Dennis. 2001. *Psychological Testing Principles, Applications, and Issues*.

Lee, Sung-Hyuck & Terry, Robert. IRT-FIT : SAS. Macros for Fitting Item Response Theory (IRT) Models. SUGI 30. Statistics and Data Analysis paper. Pp 204-230

Lembaga Penelitian UIN SGD Bandung. 2013. *Pedoman Penulisan Laporan Hasil Penelitian dan Laporan Penggunaan Biay*a.

Ningsih, Ening, dkk. 2008. *Relevansi Kurikulum Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Dunia Kerja*. Laporan Penelitian DIPA UIN SGD Bandung TA 2008.

Suryabrata, Sumadi. 2000. *Pengembangan Alat Ukur Psikologis.* Yogyakarta: Andi Offset.

Susetyo, Budi. 2008. "Penilaian Hasil Pembelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP)". Disampaikan pada Seminar Nasional "Penilaian Pembelajaran dalam konteks KTSP" pada acara Pengukuhan Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia HEPI UKC Metro Lampung 12 Juni 2008.

LAMPIRAN

1. TINGKAT KESULITAN ITEM

Item no.	*p*	Klasi-fikasi	Item no.	*p*	Klasi-fikasi
1	0.259067	sulit	16	0.917098	mudah
2	0.168394	sulit	17	0.546632	sedang
3	0.829016	mudah	18	0.663212	sedang
4	0.468912	sedang	19	0.588083	sedang
5	0.373057	sedang	20	0.129534	sulit
6	0.209845	sulit	21	0.401554	sedang
7	0.733161	mudah	22	0.142487	sulit
8	0.360104	sedang	23	0.251295	sulit
9	0.243523	sulit	24	0.880829	mudah
10	0.57772	sedang	25	0.139896	sulit
11	0.632124	sedang	26	0.800518	mudah
12	0.727979	mudah	27	0.411917	sedang
13	0.404145	sedang	28	0.419689	sedang
14	0.888601	mudah	29	0.489637	sedang
15	0.316062	sedang	30	0.404145	sedang

Item no.	*p*	Klasi-fikasi	Item no.	*p*	Klasi-fikasi
31	0.282383	sulit	51	0.373057	sedang
32	0.453368	sedang	52	0.233161	sulit
33	0.525907	sedang	53	0.23057	sulit
34	0.090674	sulit	54	0.515544	sedang
35	0.142487	sulit	55	0.295337	sulit
36	0.310881	sedang	56	0.367876	sedang
37	0.417098	sedang	57	0.505181	sedang
38	0.259067	sulit	58	0.26943	sulit
39	0.668394	sedang	59	0.629534	sulit
40	0.378238	sedang	60	0.38342	sedang
41	0.388601	sedang	61	0.354922	sedang
42	0.65285	sedang	62	0.61399	sedang
43	0.510363	sedang	63	0.194301	sulit
44	0.168394	sulit	64	0.069948	sulit
45	0.297927	sulit	65	0.145078	sulit
46	0.326425	sedang	66	0.339378	sedang
47	0.660622	sedang	67	0.207254	sulit
48	0.450777	sedang	68	0.178756	sulit
49	0.196891	sulit	69	0.233161	sulit
50	0.378238	sedang	70	0.551813	sedang

Item no.	*p*	Klasi-fikasi	Item no.	*p*	Klasi-fikasi
71	0.095855	sulit	81	0.168394	sulit
72	0.196891	sulit	82	0.945596	mudah
73	0.660622	sedang	83	0.453368	sedang
74	0.393782	sedang	84	0.551813	sedang
75	0.07513	sulit	85	0.261658	sulit
66	0.339378	sedang	86	0.562176	sedang
67	0.207254	sulit	87	0.792746	mudah
68	0.178756	sulit	88	0.694301	sedang
69	0.233161	sulit	89	0.603627	sedang
70	0.551813	sedang	90	0.217617	sulit
71	0.095855	sulit	91	0.564767	sedang
72	0.196891	sulit	92	0.085492	sulit
73	0.660622	sedang	93	0.202073	sulit
74	0.393782	sedang	94	0.088083	sulit
75	0.07513	sulit	95	0.209845	sulit
76	0.46114	sedang	96	0.101036	sulit
77	0.11658	sulit	97	0.261658	sulit
78	0.259067	sulit	98	0.227979	sulit
79	0.277202	Sulit	99	0.170984	sulit
80	0.329016	sedang	100	0.38601	sedang

2. INDEKS DAYA PEMBEDA ITEM

Item no.	*D*	Klasi-fikasi	Item no.	*D*	Klasi-fikasi
1	0.018519	jelek	21	0.074074	jelek
2	-0.02778	buang	22	0	jelek
3	-0.01852	buang	23	0.148148	jelek
4	0.064815	jelek	24	0.101852	jelek
5	0.046296	jelek	25	-0.03704	buang
6	0.083333	jelek	26	-0.12037	buang
7	0.018519	jelek	27	0.092593	jelek
8	0.175926	jelek	28	0.12037	jelek
9	0.083333	jelek	29	0.046296	jelek
10	0.138889	jelek	30	0.083333	jelek
11	0.046296	jelek	31	-0.03704	buang
12	0.111111	jelek	32	0.111111	jelek
13	0.138889	jelek	33	0.055556	jelek
14	0.055556	jelek	34	0.046296	jelek
15	0.111111	jelek	35	-0.03704	buang
16	0.027778	jelek	36	0.055556	jelek
17	-0.09259	buang	37	0.074074	jelek
18	-0.00926	buang	38	0.138889	jelek
19	0.092593	jelek	39	0.064815	jelek

20	-0.02778	buang	40	0.101852	jelek

Item no.	*D*	Klasi-fikasi	Item no.	*D*	Klasi-fikasi
41	0.12037	jelek	61	0.055556	jelek
42	0.148148	jelek	62	0.046296	jelek
43	0.018519	jelek	63	0	jelek
44	-0.08333	buang	64	-0.01852	buang
45	0.083333	jelek	65	0.046296	jelek
46	0.12037	jelek	66	0.12037	jelek
47	0.12037	jelek	67	0.111111	jelek
48	0.055556	jelek	68	0.064815	jelek
49	0.101852	jelek	69	0.064815	jelek
50	0.268519	cukup	70	0.009259	jelek
51	0.009259	jelek	71	0	jelek
52	0	jelek	72	0.046296	jelek
53	0.074074	jelek	73	0.092593	jelek
54	0.092593	jelek	74	0.074074	jelek
55	0	jelek	75	0.009259	jelek
56	-0.03704	buang	76	0.064815	jelek
57	0.12037	jelek	77	0	jelek
58	0.12963	jelek	78	-0.06481	buang
59	0.101852	jelek	79	0.027778	jelek

60	-0.01852	buang	80	0.009259	jelek

Item no.	***D***	**Klasi-fikasi**	**Item no.**	***D***	**Klasi-fikasi**
81	0.064815	jelek	91	-0.01852	buang
82	0.027778	jelek	92	-0.0463	buang
83	0.148148	jelek	93	-0.01852	buang
84	0.092593	jelek	94	-0.00926	buang
85	0.12037	jelek	95	0.037037	jelek
86	0.12037	jelek	96	0.027778	jelek
87	0.083333	jelek	97	0.027778	jelek
88	0.12963	jelek	98	0.074074	jelek
89	0.111111	jelek	99	0	jelek
90	0.046296	jelek	100	0.009259	jelek

3. DATA PESERTA SELEKSI MASUK UIN SGD DARI 6 JALUR SELEKSI TA 2012/2013

FAKULTAS / JURUSAN / PRODI		PPA			
		PENDAFTAR		LULUS	REG
		PIL. 1	PIL. 2		
FAK. USHULUDDIN					
101	Aqidah dan Filsafat	1	3	3	2
102	Perbandingan Agama		2	2	3
103	Tafsir dan Hadits	12	11	16	21
104	Tasawuf Psikoterafi	1	3	3	7
	Jumlah Fak. Ushuluddin	**14**	**19**	**24**	**33**
FAK. TARBIYAH DAN KEGURUAN					
201	Kependidikan Islam	23	42	25	20
202	Pendidikan Agama Islam	194	138	60	58
203	Pendidikan Bahasa Arab	69	67	22	20
204	Pendidikan Bahasa Inggris	272	113	22	22
205	Pendidikan Matematika	130	70	22	21
206	Pendidikan Biologi	173	121	25	23
207	Pendidikan Fisika	84	50	22	22
208	Pendidikan Kimia	88	68	22	20
209	Pendidikan Guru MI	96	109	22	19
	Jumlah Fak. Tarbiyah	**1129**	**778**	**242**	**225**
FAK.SYARI'AH DAN HUKUM					
301	Al-Ahwal Al-Syakhsiyah	22	19	30	27
302	Mu'amalah	84	103	45	37
303	Siyasah	4	8	7	15
304	Perb.Madzhab dan Hukum		5	5	6
305	Ilmu Hukum	27	23	25	21
306	Hukum Pidana Islam		5	3	10
307	Manajemen Keuangan Syari'ah	136	176	45	38
	Jumlah Fak. Syari'ah	**273**	**339**	**160**	**154**
FAK. DAKWAH DAN KOMUNIKASI					
401	Bimbingan dan Penyuluhan Islam	3	43	26	22

402	Komunikasi dan Penyiaran Islam	10	14	15	23
403	Manajemen Dakwah	13	14	17	14
404	Pengembangan Masyarakat Islam		6	3	4
405	Ilmu Komunikasi Jurnalistik	33	59	40	29
406	Ilmu Komunikasi Humas	9	26	17	13
	Jumlah Fak. Dakwah	**68**	**162**	**118**	**105**
FAK. ADAB DAN HUMANIORA					
501	Sejarah dan Peradaban Islam	1	14	8	6
502	Bahasa dan Sastra Arab	4	26	19	24
503	Bahasa dan Sastra Inggris	16	50	40	31
505	D-3 Terjemah Bahasa Inggris	1		1	5
	Jumlah Fak. Adab	**22**	**90**	**68**	**66**
600. FAKULTAS PSIKOLOGI		**116**	**91**	**50**	**45**
FAK. SAINS DAN TEKNOLOGI					
701	Matematika	6	16	14	15
702	Biologi	17	41	20	18
703	Fisika	4	10	12	12
704	Kimia	13	15	9	17
705	Teknik Informatika	137	113	60	56
706	Agroteknologi	24	33	20	15
707	Teknik Elektro	19	26	20	16
	Jml Fak.Sains dan Teknologi	**220**	**254**	**155**	**149**
FAK. ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK					
801	Administrasi Negara	73	81	21	19
802	Manajemen	70	112	21	19
803	Sosiologi	19	45	40	33
	Jumlah FISIP	**162**	**238**	**82**	**71**
	JUMLAH	**2004**	**1971**	**899**	**848**
	Tidak Memilih		33		
	Tidak Mengembalikan Formulir				
	JUMLAH	**2004**	**2004**	**899**	**848**

FAKULTAS / JURUSAN / PRODI		UJIAN TULIS			
		PENDAFTAR		LULUS	REG.
		PIL.1	PIL.2		
FAK. USHULUDDIN					
101	Aqidah dan Filsafat	10	13	17	10
102	Perbandingan Agama	7	37	34	23
103	Tafsir dan Hadits	39	78	96	99
104	Tasawuf Psikoterafi	38	105	32	56
	Jumlah Fak. Ushuluddin	**94**	**233**	**179**	**188**
FAK. TARBIYAH DAN KEGURUAN					
201	Kependidikan Islam	81	83	60	51
202	Pendidikan Agama Islam	471	109	113	110
203	Pendidikan Bahasa Arab	132	68	58	48
204	Pendidikan Bahasa Inggris	412	107	44	42
205	Pendidikan Matematika	249	75	48	46
206	Pendidikan Biologi	304	97	63	63
207	Pendidikan Fisika	97	41	55	49
208	Pendidikan Kimia	158	63	69	65
209	Pendidikan Guru MI	258	131	63	61
	Jumlah Fak. Tarbiyah	**2162**	**774**	**573**	**535**
FAK.SYARI'AH DAN HUKUM					
301	Al-Ahwal Al-Syakhsiyah	42	71	82	85
302	Mu'amalah	146	177	92	77
303	Siyasah	28	41	51	56
304	Perb.Madzhab dan Hukum	6	26	18	34
305	Ilmu Hukum	116	106	43	41
306	Hukum Pidana Islam	10	92	65	70
307	Manajemen Keuangan Syari'ah	415	271	93	87
	Jumlah Fak. Syari'ah	**763**	**784**	**444**	**450**
FAK. DAKWAH DAN KOMUNIKASI					
401	Bimbingan dan Penyuluhan Islam	47	214	153	121
402	Komunikasi dan Penyiaran Islam	37	129	88	92
403	Manajemen Dakwah	25	130	71	54
404	Pengembangan Masyarakat Islam	10	73	11	19
405	Ilmu Komunikasi Jurnalistik	123	239	110	95

406	Ilmu Komunikasi Humas	42	132	42	39
	Jumlah Fak. Dakwah	**284**	**917**	**475**	**420**
FAK. ADAB DAN HUMANIORA					
501	Sejarah dan Peradaban Islam	28	173	112	89
502	Bahasa dan Sastra Arab	24	116	70	87
503	Bahasa dan Sastra Inggris	78	262	225	219
505	D-3 Terjemah Bahasa Inggris	2	28	15	26
	Jumlah Fak. Adab	**132**	**579**	**422**	**421**
600. FAKULTAS PSIKOLOGI		**264**	**157**	**99**	**90**
FAK. SAINS DAN TEKNOLOGI					
701	Matematika	19	65	53	44
702	Biologi	34	121	52	42
703	Fisika	11	63	23	41
704	Kimia	34	115	32	43
705	Teknik Informatika	432	169	98	96
706	Agroteknologi	60	107	59	51
707	Teknik Elektro	52	89	54	47
	Jml Fak.Sains dan Teknologi	**642**	**729**	**371**	**364**
FAK. ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK					
801	Administrasi Negara	207	217	38	37
802	Manajemen	241	244	46	42
803	Sosiologi	65	167	112	92
	Jumlah FISIP	**513**	**628**	**196**	**171**
	JUMLAH	**4854**	**4801**	**2759**	**###**
	Tidak Memilih		53		
	Tidak Mengembalikan Formulir	26	26		
	JUMLAH	**4880**	**4880**	**2759**	**###**

SPMB-PTAIN									
REGULER					BIDIKMISI				
PENDAFTAR			LULUS	REG.	PENDAFTAR			LULUS	REG.
PIL.1	PIL.2	PIL.3			PIL.1	PIL.2	PIL.3		
	1	3	8	1	3	11	18	4	6
2	1	2	13		18	8	16	16	11
3	8	6	10	4					
	5	4	11	1	16	24	23	10	8
5	**15**	**15**	**42**	**6**	**37**	**43**	**57**	**30**	**25**
3	3	8	11	3	63	42	51	7	5
33	35	37	10	8					
12	14	22	15	7	60	40	34	5	4
36	44	36	6	3					
31	26	20	4	2					
37	19	13	8	3					
12	15	12	11	11	37	12	14	3	2
18	23	15	7						
8	21	17	7	7					
190	**200**	**180**	**79**	**44**	**160**	**94**	**99**	**15**	**11**
4	8	7	15	8	8	10	10	5	4
5	16	13	10	7					
1	1	1	7	2	1	7	9	5	4
2	1	3	8	1	6	5	6	5	5
14	14	20	2	2					
3	6	2	8	1	11	10	8	5	3
39	44	49	11	7					
68	**90**	**95**	**61**	**28**	**26**	**32**	**33**	**20**	**16**
3	8	7	6	2					
	4	8	3	2					
6	11	5	14	2	10	25	28	5	4
1	1	5	13	2	20	14	19	10	8
19	18	25	10	6					

8	14	15	10	2	28	41	30	5	3
37	**56**	**65**	**56**	**16**	**58**	**80**	**77**	**20**	**15**
6	2	4	15	4	21	31	30	10	9
2	8	13	22	4	23	36	21	10	9
9	25	11	23	12					
		2	1	1					
17	**35**	**30**	**61**	**21**	**44**	**67**	**51**	**20**	**18**
35	**47**	**41**	**17**	**5**	**109**	**80**	**65**	**11**	**4**
5	9	8	5	5					
5	14	8	5	5					
2	6	4	12	1	14	11	9	7	5
4	12	7	12	1	36	26	20	7	5
47	53	34	4		1				
12	17	11	4	3					
4	22	9	4	2					
79	**133**	**81**	**46**	**17**	**51**	**37**	**29**	**14**	**10**
17	23	22	5	2					
22	24	45	5	4					
2	15	15	15	9					
41	**62**	**82**	**25**	**15**					
472	**638**	**589**	**387**	**152**	**485**	**433**	**411**	**130**	**99**
472	**638**	**589**	**387**	**152**	**485**	**433**	**411**	**130**	**99**

SNMPTN						
PENDAFTAR			**UNDANGAN**		**TERTULIS**	
PIL.1	PIL.2	PIL.3	Lulus	Reg	Lulus	REG.
32	134	46	7	3	19	17
30	110	42	7	6	18	12
62	**244**	**88**	**14**	**9**	**37**	**29**
22	71	33	12	5	23	15
22	**71**	**33**	**12**	**5**	**23**	**15**
14	116	35	13	7	33	23

13	48	20	13	7	33	21
27	**164**	**55**	**26**	**14**	**66**	**44**
16	56	16	13	10	33	24
16	**56**	**16**	**13**	**10**	**33**	**24**
48	**117**	**62**	**13**	**8**	**23**	**12**
4	25	9	5	2	20	14
23	93	62	5	5	19	13
7	24	6	5	3	19	12
10	17	19	5	3	19	13
70	200	75	5	4	30	19
7	36	22	5	1	19	12
5	55	5	5	2	19	13
126	**450**	**198**	**35**	**20**	**145**	**96**
28	132	4	13	10	23	19
70	210	49	13	7	23	15
8	76	8	10	6	33	22
106	**418**	**61**	**36**	**23**	**79**	**56**
407	**###**	**513**	**149**	**89**	**406**	**276**
407	**###**	**513**	**149**	**89**	**406**	**276**

JUMLAH TOTAL				
PENDAFTAR			LULUS	REG
PIL.1	PIL.2	PIL.3		
14	28	21	32	19
27	48	18	65	37
54	97	6	122	124
55	137	27	56	72
150	**310**	**72**	**275**	**252**
170	170	59	103	79
698	282	37	183	176
273	189	56	100	79
752	398	82	98	87
440	281	62	99	87
514	237	13	96	89
230	118	26	91	84
264	154	15	98	85
362	261	17	92	87
3703	**2090**	**367**	**960**	**853**
76	108	17	132	124
235	296	13	147	121
34	57	10	70	77
14	37	9	36	46
179	214	53	105	84
24	113	10	81	84
590	491	49	149	132
1152	**1316**	**161**	**720**	**668**
53	265	7	185	145
47	147	8	106	117
54	180	33	107	74
31	94	24	37	33
189	432	60	206	160

100	261	65	120	85
474	**1379**	**197**	**761**	**614**
56	220	34	145	108
53	186	34	121	124
119	393	27	334	296
3	28	2	17	32
231	827	97	617	560
572	**492**	**168**	**213**	**164**
34	115	17	97	80
79	269	70	101	83
38	114	19	78	74
97	185	46	84	82
687	535	109	197	175
103	193	33	107	82
80	192	14	102	80
1118	**1603**	**308**	**766**	**656**
325	453	26	100	87
403	590	94	108	87
94	303	23	210	162
822	**1346**	**143**	**418**	**336**
8222	**9363**	**1513**	**4730**	**4103**
	86			
26	26			
8248	**9475**	**1513**	**4730**	**4103**

4. Rekapitulasi Item UTL Pengetahuan Agama

Hanya ditampilkan 50 subjek dari 386 sampel.

Subjek	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	B	C	C	C	A	A	C	B	B	D	B	A
1	0	0	*	*	*	0	*	0	0	*	0	*
2	*	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	*	0	*	*	0	0	*	0	0	*	*	0
4	0	*	0	*	*	*	*	0	*	0	*	*
5	0	0	*	0	*	*	*	0	0	*	*	*
6	0	*	*	*	0	0	0	0	0	0	*	*
7	0	0	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0
8	*	0	*	0	*	0	*	*	0	*	*	*
9	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	*
10	0	*	*	*	0	0	0	*	0	*	*	*
11	0	0	*	0	*	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	*	0	0	0	*	*	*	*	*	0
13	0	*	*	0	0	0	*	0	0	*	*	*
14	0	0	*	0	0	*	*	0	0	0	0	*
15	0	0	*	*	*	0	*	0	*	*	*	*
16	*	*	0	0	*	0	*	0	0	*	*	0
17	0	0	*	0	*	*	*	0	*	*	*	0
18	*	0	*	0	*	0	*	0	0	*	*	0
19	0	0	*	0	0	*	*	0	*	0	0	*
20	0	0	*	0	*	0	0	0	*	*	*	*
21	0	0	*	0	0	0	*	0	0	*	0	*
22	0	0	*	0	*	*	0	*	0	*	*	*
23	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	0	*

Subjek	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	B	C	C	C	A	A	C	B	B	D	B	A
24	0	0	0	0	0	0	*	0	*	0	*	*
25	0	0	*	*	0	*	*	*	0	*	0	*
26	0	0	0	*	*	*	*	*	0	*	0	*
27	0	0	0	*	*	0	*	0	0	*	*	*
28	0	0	*	0	*	0	*	*	0	0	*	*
29	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	*
30	0	0	0	*	0	*	0	0	*	0	*	*
31	0	*	*	0	0	0	*	0	0	*	*	*
32	0	0	0	*	*	0	0	*	0	0	*	*
33	0	0	*	0	0	*	*	0	0	*	0	0
34	*	0	*	*	0	0	*	*	0	*	*	*
35	0	0	*	0	*	0	*	0	0	*	0	*
36	0	0	*	0	*	*	*	*	0	*	*	*
37	*	0	*	*	0	0	*	*	0	*	*	*
38	0	0	*	0	0	0	*	0	0	*	*	*
39	0	0	*	*	0	0	*	0	*	*	*	*
40	*	0	*	0	0	0	0	*	*	*	0	*
41	0	0	*	*	0	0	*	*	0	*	*	*
42	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	*
43	*	0	0	*	0	0	*	0	0	0	*	*
44	0	0	*	*	0	0	0	0	0	*	0	*
45	0	0	*	*	0	*	*	*	*	*	0	*
46	0	0	*	0	0	0	*	0	0	*	0	*
47	*	0	*	0	0	*	*	0	0	*	0	0
48	0	*	*	0	0	0	0	*	0	*	*	*
49	*	0	*	0	0	0	*	0	0	*	*	0
50	0	*	*	0	0	0	*	*	*	0	0	*
	11	**8**	**40**	**19**	**18**	**15**	**39**	**17**	**13**	**35**	**33**	**40**

Item											
13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
A	**A**	**B**	**D**	**D**	**C**	**A**	**C**	**A**	**D**	**A**	**A**
*	*	*	*	*	*	*	0	*	0	*	*
0	*	*	*	*	*	*	0	*	0	*	*
0	*	0	*	*	*	0	0	0	*	0	*
0	*	0	*	*	0	0	0	*	0	0	0
*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	*
0	0	*	*	*	*	*	0	*	0	*	*
*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	*
0	*	0	*	*	*	0	0	*	0	0	*
0	*	0	*	0	0	*	0	*	*	*	*
*	*	*	*	0	*	*	*	0	*	0	*
*	*	*	*	0	*	*	0	*	0	0	*
*	*	*	*	*	*	0	0	*	0	0	*
0	*	0	*	*	*	0	0	0	0	0	*
0	*	0	*	*	0	0	0	*	0	0	0
0	*	0	*	*	*	0	0	0	0	0	*
0	*	0	*	0	0	0	0	*	0	0	0
0	*	*	*	0	*	0	0	0	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	0	0	*	0	*
*	*	0	*	0	0	*	0	*	*	0	*
0	*	0	*	0	*	0	*	*	*	*	*
0	*	0	*	0	*	0	0	0	0	0	*
0	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*
0	*	0	*	*	0	*	0	0	0	0	*
0	*	*	*	0	*	0	0	0	0	0	*
*	*	0	*	0	*	0	0	0	0	0	*
*	*	0	*	0	*	0	0	*	*	0	*
*	*	0	*	*	*	*	0	0	0	*	*
*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	*
0	0	0	*	0	*	0	0	*	0	0	*

Item											
13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
A	**A**	**B**	**D**	**D**	**C**	**A**	**C**	**A**	**D**	**A**	**A**
0	*	0	*	*	0	*	0	0	0	*	*
0	*	0	*	*	*	*	0	*	0	*	*
0	0	0	*	0	*	*	0	0	0	0	*
0	*	0	0	0	*	*	0	0	*	0	0
0	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	*
0	*	0	*	*	*	0	0	*	*	0	0
0	*	0	*	*	*	0	0	0	0	0	*
*	*	0	*	*	*	0	0	0	0	*	*
0	*	0	*	*	*	*	0	*	0	0	*
0	*	0	*	*	0	*	0	*	0	*	*
*	*	0	*	0	*	*	0	0	0	0	*
*	*	*	*	*	*	*	0	*	0	0	*
0	*	0	*	0	*	0	0	0	*	0	*
*	*	*	*	0	0	*	0	0	*	0	*
0	*	0	*	*	*	0	*	0	0	0	*
0	*	*	*	*	*	0	*	0	0	0	*
0	*	0	*	*	0	*	0	0	0	*	0
*	*	0	*	0	*	0	0	0	0	0	*
*	*	0	*	*	*	0	0	0	0	0	*
0	*	*	*	0	*	0	0	*	0	*	*
*	*	*	*	0	0	*	0	*	0	0	*
19	**47**	**19**	**49**	**29**	**38**	**24**	**4**	**22**	**13**	**14**	**44**

item												
25	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**
A	**C**	**B**	**D**	**C**	**B**	**A**	**B**	**B**	**A**	**A**	**B**	**D**
0	*	*	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*
0	0	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	*
0	*	0	*	*	*	*	*	*	0	0	0	*
0	*	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	*
0	*	0	*	*	*	0	*	*	*	0	*	0
0	*	0	*	*	*	0	*	*	0	0	0	*
0	*	*	0	0	*	0	*	*	0	0	*	0
0	*	0	*	0	0	*	0	0	0	0	*	0
0	*	*	0	0	*	*	0	0	0	0	0	0
*	*	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0	*
0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0
0	*	0	*	0	0	0	*	*	0	0	*	*
*	*	*	*	0	*	0	*	*	0	0	0	*
0	*	0	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0
*	*	0	*	0	*	0	*	0	0	0	*	*
0	*	0	*	*	0	0	0	0	0	0	0	*
0	*	0	*	0	*	0	*	0	*	0	0	0
0	*	0	*	0	*	0	0	*	0	0	0	0
0	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*	*	0	*	*	*	0	*	*	0	0	0	0
0	*	0	0	0	0	*	0	*	0	0	0	*
0	*	0	0	0	*	0	0	*	0	0	*	0
0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	*	0	*	0	0	*	0	0	0	0	0	*
0	*	0	*	*	*	0	0	*	0	0	0	0
*	*	0	0	*	0	0	*	*	0	0	*	*
0	*	0	0	*	0	0	*	0	0	*	0	*
0	*	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*

item												
25	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**
A	**C**	**B**	**D**	**C**	**B**	**A**	**B**	**B**	**A**	**A**	**B**	**D**
*	*	0	*	0	0	0	0	*	0	0	0	*
*	*	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	0
0	*	*	*	*	*	0	0	0	0	*	0	0
0	*	0	0	0	0	*	0	*	0	0	0	0
0	*	0	*	*	0	0	*	*	0	0	0	*
0	*	0	*	0	0	0	0	*	0	0	0	*
0	*	0	*	0	0	0	*	*	*	0	0	*
0	*	*	*	0	*	0	*	0	0	0	0	0
0	*	*	0	*	0	0	0	*	0	*	0	0
0	*	0	*	*	*	*	0	0	0	*	*	*
0	*	0	0	*	*	*	0	0	0	0	0	0
0	*	*	0	*	0	0	0	0	*	0	*	0
0	*	0	*	*	0	0	0	*	0	0	0	*
0	*	*	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0
0	*	0	0	*	0	0	*	*	0	0	0	*
0	*	*	0	*	0	0	0	*	0	0	*	*
0	0	0	0	0	*	0	*	*	0	0	0	0
0	*	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	*
0	*	0	*	0	*	0	*	0	0	0	*	*
0	*	0	0	*	0	0	*	0	0	0	*	*
0	*	0	*	0	0	*	*	*	0	0	0	0
7	**47**	**38**	**25**	**0**	**20**	**11**	**24**	**28**	**5**	**4**	**14**	**26**

Item												
38	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
B	**C**	**A**	**B**	**D**	**C**	**C**	**B**	**B**	**C**	**C**	**D**	**C**
*	0	*	0	*	*	0	*	0	*	*	0	0
*	*	*	*	*	0	0	*	0	*	*	*	*
0	*	*	*	*	*	0	0	*	*	*	0	*
0	*	*	*	0	0	0	0	0	*	*	0	0
0	*	0	*	*	*	0	0	0	*	0	*	*
0	0	*	0	*	0	0	*	*	*	0	0	*
0	0	0	0	0	0	*	0	0	*	0	0	0
0	*	*	*	*	*	0	*	0	*	*	*	*
0	0	0	0	*	0	0	0	0	*	*	0	*
*	*	0	*	*	0	0	0	0	*	*	0	0
0	0	*	*	0	0	0	0	0	0	0	*	0
*	*	*	0	*	0	0	*	0	*	0	0	*
0	*	*	*	*	0	0	*	*	*	*	0	0
0	*	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0
0	*	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0
0	*	0	0	0	*	0	0	*	*	*	*	0
0	*	0	*	*	*	0	*	*	*	0	0	0
0	0	*	*	*	*	0	0	0	*	*	*	*
0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0
*	*	0	0	*	0	0	0	0	*	0	0	*
0	*	0	0	0	0	0	*	0	*	0	0	0
*	*	0	*	*	0	0	0	0	*	0	*	*
0	*	0	0	*	0	0	0	0	*	0	0	0
0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0
*	*	*	0	*	0	0	0	0	*	0	0	*
0	*	*	*	0	*	0	0	*	*	0	0	*
*	0	*	*	*	0	0	*	*	*	*	0	*
0	*	*	*	0	*	0	*	0	*	*	0	0
0	0	0	*	0	0	0	*	*	0	0	0	0

Item												
38	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
B	**C**	**A**	**B**	**D**	**C**	**C**	**B**	**B**	**C**	**C**	**D**	**C**
0	*	0	0	*	0	0	0	0	0	*	0	0
0	*	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0
0	*	0	*	*	*	0	*	0	*	0	0	*
0	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0
*	0	0	0	*	*	0	0	*	*	*	0	*
0	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	*	*	0	0	0	0	0	*	*	*	0	0
0	*	0	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0
0	*	0	0	*	0	0	0	*	0	*	0	0
*	*	*	0	*	0	*	0	0	*	0	0	0
0	*	0	0	0	*	0	*	0	*	*	0	0
0	*	0	*	*	*	0	*	0	0	0	0	*
0	*	0	0	*	*	0	0	0	0	*	0	0
0	*	*	0	*	*	0	0	*	*	0	0	0
0	*	0	*	0	*	0	0	0	0	0	0	0
*	0	0	*	*	0	0	*	0	*	0	0	0
0	*	*	0	*	*	0	0	0	0	0	*	*
0	*	*	0	*	0	0	0	0	*	0	*	0
0	*	0	0	*	*	0	0	0	*	0	0	*
0	*	*	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0
*	0	*	*	*	*	*	0	0	*	*	0	*
12	**36**	**22**	**22**	**31**	**23**	**6**	**16**	**12**	**35**	**20**	**9**	**19**

Item												
51	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**63**
B	**D**	**D**	**A**	**B**	**B**	**B**	**B**	**D**	**A**	**C**	**D**	**C**
*	0	*	*	0	0	*	0	*	0	*	*	0
0	*	*	*	*	0	*	*	*	0	*	0	*
0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	0	*	*
0	0	*	*	0	0	*	0	*	0	0	0	0
0	0	0	*	0	0	*	0	*	*	*	0	*
*	0	*	0	0	0	*	0	*	0	*	0	*
0	0	0	0	0	*	*	*	*	0	0	*	0
0	0	*	0	0	*	0	0	*	*	*	0	0
0	*	0	0	*	0	0	0	*	0	*	*	0
*	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	*
0	0	*	*	0	*	*	0	0	0	0	*	0
*	0	*	0	0	0	*	0	0	0	0	*	0
0	0	*	*	0	*	*	0	*	0	0	*	0
0	0	0	*	0	0	0	*	0	*	0	0	*
0	0	*	0	*	0	0	0	0	0	0	*	0
*	0	0	0	*	*	*	0	0	0	0	0	*
*	0	*	*	0	*	0	0	0	0	0	0	0
*	*	0	*	*	*	0	*	*	0	*	0	*
0	0	0	*	*	0	*	0	0	*	0	*	0
0	0	0	*	0	*	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	*	*	0	0	0	*	*	0
*	0	0	*	0	0	0	0	*	*	*	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	0	0	0
0	0	0	0	*	0	0	0	0	*	*	0	0
0	0	0	*	*	*	*	0	*	*	0	0	*
*	0	*	*	0	*	*	0	0	*	0	*	0
*	0	*	0	*	0	*	*	*	*	0	*	0
0	*	0	*	0	0	*	0	0	*	*	*	0
0	*	0	*	*	0	*	0	*	*	*	*	*

Item												
51	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**63**
B	**D**	**D**	**A**	**B**	**B**	**B**	**B**	**D**	**A**	**C**	**D**	**C**
*	0	*	*	0	*	*	0	0	0	*	0	0
*	0	0	*	0	0	*	*	*	0	*	0	0
0	0	0	0	0	*	*	*	*	0	*	*	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	0	0	*
0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	0
*	*	0	0	0	*	*	0	*	0	*	*	0
0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	*	0
*	0	0	0	0	*	*	*	0	*	0	0	0
0	*	0	*	0	0	*	0	0	0	*	*	0
*	0	0	*	*	*	0	*	0	0	0	0	*
*	0	0	*	0	0	0	0	*	*	0	*	0
0	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0
*	0	*	0	*	*	*	0	*	0	0	*	0
*	0	0	0	0	0	*	0	0	E	0	*	*
0	0	0	*	*	0	0	0	*	0	0	*	0
*	0	0	0	*	*	*	0	0	0	*	0	0
0	0	0	*	*	0	0	0	*	*	0	*	0
*	0	*	*	0	*	0	0	0	0	0	*	0
*	0	0	*	0	0	0	0	0	0	*	*	0
0	0	*	*	0	0	*	*	0	*	0	0	0
21	**8**	**16**	**26**	**11**	**19**	**27**	**10**	**25**	**20**	**20**	**26**	**13**

Item												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
B	A	C	C	A	C	D	B	C	C	A	B	B
0	*	*	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0
0	0	*	*	*	0	*	0	*	*	*	0	*
0	0	*	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0
0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0	*
0	0	0	0	0	*	*	0	*	0	*	0	*
0	0	0	0	0	0	*	0	0	*	0	0	0
0	0	0	0	*	0	0	0	0	*	0	0	0
0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0	*
0	0	*	0	0	*	*	0	0	*	0	*	*
0	0	*	0	*	*	*	0	0	*	*	*	0
0	0	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0	*
0	0	*	*	*	*	0	0	0	*	*	0	*
0	0	0	0	0	0	*	0	0	*	0	0	0
0	0	*	0	0	0	0	0	0	*	*	0	0
*	0	0	0	0	0	*	0	0	*	0	0	0
0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	0	0
0	0	0	0	*	*	*	0	0	*	0	0	*
0	0	0	*	*	0	0	0	0	*	*	0	*
0	0	0	0	0	*	*	0	0	*	0	0	0
0	*	0	0	*	*	0	0	0	0	*	0	0
0	0	*	0	0	0	*	0	0	*	0	0	0
0	0	*	0	0	0	*	0	0	0	0	0	*
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	*	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0
0	0	*	0	*	0	*	0	0	*	*	0	*
0	0	*	0	0	0	0	0	0	*	*	0	0
0	0	*	0	0	0	*	0	0	*	*	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	0

Item												
64	**65**	**66**	**67**	**68**	**69**	**70**	**71**	**72**	**73**	**74**	**75**	**76**
B	**A**	**C**	**C**	**A**	**C**	**D**	**B**	**C**	**C**	**A**	**B**	**B**
0	0	*	0	0	0	*	0	*	*	*	0	*
0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	*
0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
0	0	*	*	0	*	0	*	*	0	0	0	*
0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	*
0	0	0	*	0	0	*	0	0	*	*	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	0	*
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	*	0	0	*	0	0	*	*	0	0
0	0	0	*	0	0	*	0	0	0	0	0	*
0	0	0	0	*	0	*	0	*	0	*	0	*
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	*	0	0	*	*	*	0
0	0	0	0	0	*	*	0	0	*	0	0	0
0	*	0	*	0	0	*	0	0	*	0	0	0
0	0	*	0	*	*	*	0	0	*	*	0	0
0	0	0	0	0	0	*	0	0	*	0	0	0
0	0	0	0	0	0	*	0	0	*	*	0	*
0	0	0	0	0	*	*	0	0	*	0	0	*
0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0
1	**5**	**17**	**9**	**10**	**14**	**28**	**2**	**6**	**35**	**19**	**4**	**21**

Item												
77	**78**	**79**	**80**	**81**	**82**	**83**	**84**	**85**	**86**	**87**	**88**	**89**
B	**D**	**A**	**C**	**D**	**D**	**C**	**A**	**B**	**B**	**C**	**A**	**B**
0	*	0	0	0	*	*	*	0	*	*	*	*
*	*	*	0	0	*	0	*	*	*	*	*	*
0	0	0	0	0	*	0	0	0	0	*	*	0
0	*	0	0	*	*	0	*	0	*	*	0	0
0	*	0	0	0	*	*	0	*	*	*	*	*
0	*	*	0	*	*	*	*	0	0	*	*	0
0	0	*	0	*	*	*	*	0	*	0	0	*
*	0	0	0	0	*	0	*	*	0	*	0	0
0	*	0	0	0	*	*	0	*	*	*	*	0
0	0	0	0	0	*	0	*	0	*	*	*	*
0	0	0	*	*	*	0	0	*	*	*	*	*
0	0	*	*	0	*	*	*	*	0	0	0	*
0	0	0	0	0	*	*	*	*	0	*	*	*
0	*	0	*	*	*	*	0	0	*	0	0	0
*	0	0	0	*	0	*	*	*	*	0	0	*
0	0	*	0	0	*	*	*	0	*	*	*	*
0	*	0	*	0	*	0	0	0	0	*	*	*
0	0	0	*	0	*	0	0	*	0	*	*	*
0	*	0	0	0	*	*	*	0	*	0	0	*
0	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0
0	*	0	0	0	*	0	*	*	*	*	0	*
0	*	*	*	0	*	0	0	0	*	*	0	*
0	*	0	0	0	*	*	0	0	0	*	*	0
*	0	*	0	0	*	0	*	0	0	*	0	0
0	0	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*
0	*	0	*	0	*	0	*	0	0	*	*	*
0	0	0	0	0	*	0	*	0	*	*	*	*
*	0	0	0	0	*	0	0	0	*	*	*	0
0	0	0	0	*	*	0	*	*	*	0	*	*

Item												
77	**78**	**79**	**80**	**81**	**82**	**83**	**84**	**85**	**86**	**87**	**88**	**89**
B	**D**	**A**	**C**	**D**	**D**	**C**	**A**	**B**	**B**	**C**	**A**	**B**
0	0	0	0	0	*	*	0	0	*	0	*	*
0	0	0	0	0	*	0	*	0	*	*	*	*
0	0	*	0	0	*	0	*	0	*	*	*	*
0	0	0	*	0	*	*	0	0	0	*	*	*
0	0	0	0	0	*	*	0	0	0	0	0	*
0	0	*	*	0	*	*	0	*	0	*	0	0
0	0	*	0	*	*	0	*	*	*	*	*	*
0	0	*	0	*	*	0	*	0	*	*	*	*
0	0	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*
0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*
0	0	0	*	0	*	0	0	0	*	*	0	*
0	0	*	0	*	*	*	*	0	*	*	*	*
0	0	0	0	*	*	*	*	0	*	*	0	*
0	0	0	*	0	*	*	*	0	0	0	*	0
0	0	*	0	0	*	0	0	0	*	0	*	0
0	0	*	0	0	*	*	*	0	0	*	*	0
0	0	*	*	0	*	0	*	0	*	*	*	0
0	0	0	0	0	*	0	0	*	0	0	*	0
0	0	*	*	0	*	0	0	0	*	*	*	*
0	0	0	*	*	*	0	*	0	*	*	*	*
0	0	0	*	0	*	0	0	0	0	*	*	*
5	**13**	**19**	**17**	**8**	**48**	**24**	**31**	**16**	**32**	**39**	**36**	**34**

Item											
90	**91**	**92**	**93**	**94**	**95**	**96**	**97**	**98**	**99**	**100**	**Total**
C	**D**	**A**	**D**	**A**	**D**	**C**	**D**	**B**	**C**	**B**	**skor**
0	*	0	0	0	0	0	0	0	*	0	52
0	0	*	0	0	*	0	0	*	0	0	68
0	*	0	0	0	*	0	*	0	0	*	42
0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	36
*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	*	51
0	0	0	0	0	0	0	*	0	*	*	45
0	*	0	0	*	0	0	0	0	0	0	37
0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	*	42
0	*	*	0	*	0	*	*	*	0	*	42
*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	45
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
0	0	0	0	0	0	*	*	0	0	*	48
0	*	0	0	*	0	0	0	0	0	0	44
0	0	0	*	0	0	*	0	0	*	*	29
0	*	0	0	*	*	0	0	0	0	*	39
*	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	36
*	*	0	0	0	*	0	0	0	0	0	44
*	*	0	*	0	0	0	*	0	0	*	52
0	0	0	*	*	0	*	0	0	*	0	34
*	0	0	0	0	0	0	*	0	*	0	41
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	30
0	*	0	0	0	*	0	0	0	*	0	46
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	20
0	*	0	0	0	0	0	0	0	*	0	23
0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	46
0	*	*	0	0	0	0	0	*	*	0	47
*	*	0	0	0	0	0	*	*	0	*	52
0	0	*	*	0	*	0	0	*	0	*	41
0	*	*	*	0	0	0	0	0	*	0	36

Item											
90	**91**	**92**	**93**	**94**	**95**	**96**	**97**	**98**	**99**	**100**	**Total**
C	**D**	**A**	**D**	**A**	**D**	**C**	**D**	**B**	**C**	**B**	**skor**
0	*	0	0	0	0	0	*	0	0	0	38
0	*	0	0	0	*	0	0	0	0	*	37
0	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0	37
0	*	0	0	*	0	0	0	0	0	0	22
0	*	0	0	0	0	0	*	0	0	0	39
*	*	0	0	0	0	0	0	*	0	0	32
0	0	0	0	0	0	*	0	0	*	0	46
0	*	0	0	*	0	0	0	*	0	*	44
0	*	0	*	0	*	0	*	0	0	0	39
0	*	0	*	0	0	0	0	0	0	0	47
*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	*	38
*	0	0	*	0	0	0	*	0	0	*	50
0	0	0	0	0	*	*	0	*	*	0	29
*	*	0	*	0	0	0	*	0	0	*	42
*	0	0	*	0	0	*	0	0	*	*	34
0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
0	*	0	0	0	*	0	0	*	0	0	39
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
0	0	*	0	0	0	0	*	0	*	0	42
0	*	0	*	0	0	0	0	0	0	*	39
0	*	0	*	0	0	0	0	0	0	*	42
12	**30**	**7**	**12**	**7**	**11**	**7**	**15**	**10**	**14**	**22**	**0**

TANTANGAN MASA DEPAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN PTKI

Prof. Dr. Agus Salim Mansyur

A. Pendahuluan

Berbagai isu global yang dihadapi manusia seperti banyak dilansir media massa akhir akhir ini seperti pemanasan global, perubahan cuaca, terorisme, perlombaan produksi senjata, kemiskinan, dan peperangan; semuanya haruslah mendapatkan perhatian dari pendidikan kita. Secara khusus di Indonesia, persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya masih menjadi kendala utama dalam upaya memajukan pendidikan. Dengan demikian, faktor-faktor eksternal ikut memberikan andil dalam sistem pendidikan kita, selain yang paling krusial adalah adanya kelemahan internal yang terdapat dalam sistem pendidikan kita.

Negara-negara yang sudah maju seperti Amerika, Jepang, Jerman, Prancis, dan Inggris, menjadikan pendidikan sebagai prioritas dan primadona utama dalam rangka meningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang nantinya berimbas kepada peningkatan ilmu dan teknologi, ekonomi, dan kemajuan pembangunan bangsanya sehingga disegani oleh bangsa-bangsa lainnya. Komitmen terhadap peningkatan kualitas pada sektor pendidikan menjadi *trademark* mereka. Hal ini terbukti dari setiap kampanye para calon pimpinan negara-negara tersebut yang selalu memprioritaskan pendidikan sebagai pilar pembangunan atau inovasi pembangunan mereka. Hal tersebut membuktikan negara-negara tersebut yang nota-

bene dianggap sudah maju, justru terus semakin maju pesat dalam berbagai sektor, seperti: ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, militer, dan semacamnya.

Banyak negara di Asia seperti Jepang, Korea, China, Taiwan, Hongkong, bahkan Malaysia dan Singapura yang pendidikannya berkiblat ke sana. Kebijakan pemerintahnya meniru negara-negara tersebut, yakni menitikberatkan pembangunannya pada pembangunan pendidikan karena mereka menganggap bahwa melalui sektor inilah bangsa dan negara bisa berkembang, maju, kompetitif, dan sejahtera. Selain itu, harkat dan derajat bangsanya akan terangkat di mata dunia, diperhitungkan, dihormati, disegani, bahkan ditiru bangsa-bangsa lainnya. Ini artinya bahwa negara-negara yang kurang respek dan perhatian terhadap pendidikan tidak akan mampu bersaing, bahkan akan semakin tertinggal dengan negara-negara lain. Negara-negara tersebut pada akhirnya akan selalau tinggi ketergantungannya kepada negara-negara lain dan secara politis akan menjadi permainan bangsa lain yang sudah maju.

Kalau kita mengambil ilustrasi negara-negara yang tergabung dalam perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara (ASEAN), kita merasa cemburu dengan perkembangan dan kemajuan yang mereka raih, baik itu pada tingkat kualitas sumberdaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, eksistensinya di mata dunia, ataupun lobi politik globalnya yang mulai sudah diperhitungkan dunia. Hal ini terjadi sebagai dampak dari perhatian penuh pemerintahnya kepada sektor pendidikan yang menyebabkan SDM mereka berkualitas. Atensi pemerintahnya terhadap sektor pendidikan menjadi skala prioritas di atas pembangunan sektor lainnya. Mereka tidak menjadikan sekala prioritasnnya pada pembangunan ekonomi dan pembangunan fisik, tapi mereka lebih menitikberatkan kepada sektor pendidikan yang mampu mencetak SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas mampu membawa bangsanya ke era persaingan global yang begitu kompetitif.

Sebagai ilustrasi dari negara-negara ASEAN yang dianggap sudah lebih maju adalah Malaysia dan Singapura. Kedua negara tersebut menjadikan sektor pendidikan sebagai kiblatnya pembangunan bangsanya, sektor pendidikan dijadikan sebagai pilar pembangunan, dan sektor pendidikan dijadikan agama bagi pembangunan bangsanya. Hal tersebut terbukti dari perhatian pemerintah yang sangat serius dalam menangani pendidikan, di antaranya dengan mengalokasikan dana dari APBN-nya yang sangat besar. Pada awal merdeka, Malaysia mengalokasikan dana dari APBN-nya sebesar 35% (1967) dan Singapura mengalokasikan dana dari APBN-nya sebesar 75%. Sungguh sangat luar biasa, sangat prestisius, dan sangat menakjubkan perhatian para pimpinan negara mereka terhadap sektor ini. Sebagai efek langsung adalah mereka maju, sejahtera, kompetitif, dan dihormati oleh bangsa-bangsa lainnya karena mampu menciptakan SDM yang berkualitas yang tak akan kalah dari bangsa-bangsa lainnya, sekalipun dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu maju seperti Eropa dan Amerika Serikat.

Pendidikan di era arus informasi yang begitu cepat, alih teknologi dan bahkan penciptaan teknologi, serta gejolak global seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih istimewa. Hal ini dikarenakan mau tidak mau bangsa ini akan ada di dalamnya dan terpengaruh besar olehnya. Sebagai bagian dari bangsa ini, UIN/IAIN/STAIN sebagai institusi pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Agama mempunyai kewajiban untuk merespon dan menyesuaikan kurikulumnya sesuai dengan berbagai perubahan dan tuntutan kebutuhan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Signifikansi kurikulum dinamis ini akan lebih terasa saat diberlakukannya pasar bebas Asia Tenggara (AFTA) pada tahun 2004, pasar bebas Asia Pasifik (APEC) mulai tahun 2010, dan pasar bebas global (GAT) yang akan dimulai pada tahun 2020. Orang yang tidak mampu berbahasa Inggris akan ketinggalan informasi, ketinggalan ilmu pengetahuan, ketinggalan teknologi dan bahkan ketinggalan ekonomi.

Di Indonesia, strategi untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan telah diatur dalam UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Semua itu seharusnya direalisasikan pada tataran praktis di lapangan sebab pengetahuan tanpa aksi tidak akan berarti apa-apa, dan itu identik dengan adagium Herbert Spencer yakni *the great aim of education is not knowledge, but action*, yakni tujuan besar dari pendidikan bukan hanya pada tataran pengtahuan semata, tapi pada tataran aksi yang nyata. Bukan pada tataran programnya semata, tapi bagaimana aksinya di lapangan yang efeknya berpengaruh besar terhadap kualitas hasil. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang berpihak pada upaya pembentukan SDM yang unggul perlu mendapat respons positif dan dukungan dari berbagai pihak melalui jalinan kerja dan proses yang sinergis dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan. Pemerintah seyogyanya merancang, mengimplementasi, dan mengevaluasi program pendidikannya agar dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu *(qualified education)*. Selama ini dikesani bahwa pemerintah ingin mendapatkan standar lulusan yang berkualitas tanpa memberikan standar pelayanan yang terencana dengan baik yakni meningkatkan kualitas pendidik dan perlengkapan/fasilitas pendidikannya.

Kewenangan pemerintah dalam menciptakan program dan standar nasional pendidikan merupakan langkah strategis guna memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Oleh karena itu, melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), pemerintah telah menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP yang telah dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerinatah Nomor 19 Tahun 2005 itu memuat: 1) Standar Isi; 2) Standar Proses; 3) Standar Kompetensi Lulusan; 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 5) Standar Sarana dan Prasarana; 6) Standar Pengelolaan; 7) Standar Pembiayaan; dan 8) Standar Penilaian. Walaupun semua itu fokus-

nya pada pendidikan dasar dan menengah, namun bisa dijadikan acuan bagi sistem pendidikan tinggi.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, SNP di atas perlu dirancang, disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh lembaga pendidikan secara sistemik dan kontinyu agar menghasilkan suatu program yang mutakhir dengan implementsi yang berkualitas, serta evaluasi yang akurat, sehingga menghasilkan *output* yang handal. Untuk tingkat perguruan tinggi berbeda dengan tingkat pendidikan dasar dan menengah, yakni dirancang, disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh pengelola, para dosen, dan melibatkan *stakeholders*. Secara khusus, setiap dosen, sebagai ujung tombak dari pembelajaran, harus memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam menyusun program, melaksanakan, dan mengevalusai kegiatan pembelajaran dan hasilnya. Fungsi pengajar kaitannya dengan kurikulum bukan hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai pengadaptasi, pengembang, dan bahkan peneliti. Ini artinya bahwa dosen yang punya komitmen akan kewajibannya, dosen yang bertanggungjawab, dan dosen yang sadar akan profesinya merupakan karakteristik dosen yang berkualitas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peran, tugas, dan tanggung jawab yang dipikul dosen sangat vital dan berat. Tugas dan tanggung jawab tersebut memerlukan konsentrasi, kompetensi, dan profesionalisme dosen. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dosen sebagai petugas penanggungjawab memperoleh penghargaan dan perhatian khusus dari pemerintah, baik peningkatan kompetensi dan profesionalisme, maupun peningkatan lainnya yang berpihak kepada dosen dan kepentingan pencapaian tujuan pendidikan nasional, misalnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan, dan sebagainya. Tuntutan akan kualitas kompetensi dan profesionalisme dosen sangat mendesak, demikian juga penghargaan terhadapnya. Hal tersebut beriringan dengan tuntutan terhadap kualitas *input* dan *output* pendidikan.

B. Kondisi Objektif Kurikulum Program Studi

Menurut ketentuan Pasal 1, butir 19 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, kurikulum dapat diartikan sebagai program pengajaran suatu jenjang pendidikan.

Menurut Ibrahim (2005: 4), setiap program studi mengandung dua komponen pokok. Pertama, komponen kurikulum inti yang diberlakukan secara nasional; dan kedua, komponen yang dikembangkan oleh masing-masing institusi (komponen isntitusional). Kedua komponen tersebut secara bersama-sama membentuk kurikulum utuh program studi yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal itu, pengembangan kurikulum setiap program studi mencakup dua tahapan pokok, yaitu 1) pengembangan kurikulum inti, dan 2) pengembangan kurikulum program studi (kurikulum utuh). Kurikulum (utuh) program studi dapat dihasilkan setelah dilakukan pengembangan komponen institusional untuk setiap program studi.

Menurut Kepmendiknas Nomor 045/U/2002, kurikulum inti suatu program merupakan suatu rancangan program pendidikan yang berisi delapan butir pokok sebagai berikut: 1) Deskripsi Program Studi; berisi *nama, visi, misi, tujuan,* dan *karakteristik program studi;* 2) ciri khas Kompetensi utama; Perangkat kompetensi yang harus dicapai oleh semua lulusan program studi tersebut yang diberlakukan secara nasional. Perangkat kompetensi utama dikelompokkan dalam beberapa rumpun dan dilengkapi matriks untuk memperlihatkan hubungan rumpun-rumpun kompetensi dengan elemen-elemen kompetensi dalam Kepmendiknas Nomor 045/U/2002*;* 3) Substansi kajian; perangkat bahan kajian (konsep/topik) yang esensial dan strategis untuk mendukung pencapaian kompe-

tensi utama yang telah ditetapkan pada butir b. (disusun dalam bentuk matriks yang menghubungkan setiap bahan kajian dengan kompetensi-kompetensi utama yang didukungnya. 4) Proses Pembelajaran; 5) Sistem evaluasi; 6) Persyaratan Akademik Dosen; 7) Fasilitas Utama; 8) Kelompok Pemrakarsa.

Menurut Pasal 3 ayat (1) Kepmendiknas Nomor 45/U/2002, kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama yang harus dicapai oleh setiap masing-masing program studi, yang membedakannya dari program studi yang lain. Dalam Pasal 3 ayat (2) Kepmendiknas tersebut dinyatakan bahwa kurikulum inti suatu program studi bersifat; a) dasar untuk mencapai kompetensi lulusan, b) acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi, c) berlaku secara nasional dan internasional, d) lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang, dan e) kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan.

Kompetensi utama merupakan perangkat kompetensi yang mutlak diperlukan untuk melaksanakan dengan tepat tugas-tugas profesionalnya sebagai tenaga kependididikan yang bersangkutan. Kompetensi utama inilah yang mencerminkan tujuan pokok program studi yang harus dicapai oleh semua luluasan program studi tersebut. Kurikulum inti yang dirancang untuk mencapai kompetensi utama dalam setiap program studi dikembangkan melalui kerja sama antar program studi sejenis, untuk memungkinkan diberlakukannya kurikulum inti tersebut secara nasional. Proporsi kompetensi utama yang harus dicapai melalui kurikulum inti setiap program studi, termasuk Bahasa dan Sastra Inggris (BSI), ditetapkan 40-75% dari keseluruhan kompetensi yang harus dicapai melalui kurikulum utuh program studi yang bersangkutan. Proporsi kompetensi utama dapat bervariasi di antara berbagai program studi yang ada, tergantung tujuan dan karakteristik masing-masing program studi.

Kurikulum utuh setiap program studi merupakan perpaduan antara kurikulum inti dan komponen institusional yang dikembangkan oleh masing-masing lembaga (institusi). Komponen institusional dikembangkan untuk mencapai: 1) kompetensi pendukung, dan 2) kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama. Kompetensi pendukung merupakan kompetensi yang berfungsi meningkatkaan pelaksanaan profesinya. Kompetensi tersebut untuk lebih mengukuhkan kompetensi utama. Kompetensi lain merupakan kompetensi tambahan yang dapat melengkapi kompetensi utamanya. Proporsi kompetensi pendukung setiap program studi berkisar 20-40% dari keseluruhan kompetensi, sedangkan kompetensi lain antara 0-30%. Dengan perkataan lain, kurikulum utuh suatu program studi mungkin saja mencakup kompetensi utama dan kompetensi pendukung saja, tanpa kompetensi lainnya.

Kurikulum utuh sebuah prodi meliputi struktur kurikulum dan silabus mata kuliah. Dalam struktur kurikulum terkandung rumusan visi, misi, dan tujuan program studi, kompetensi yang ingin dicapai, daftar mata kuliah/sks beserta deskripsinya, sebaran matakuliah dari semester oertama sampai semester terakhir, serta sumber daya (dosen dan fasilitas) yang diperlukan. Silabus mata kuliah berisi paparan tentang tujuan dan kompetensi, prasyarat, deskripsi mata kuliah (diambil dari struktur kurikulum), cakupan materi yang dibahas, kegiatan pembelajaran, alat/media dan evaluasi, rujukan/referensi, serta hal-hal lain yang dianggap penting.

Secara umum, kurikulum Program Studi di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) berusaha untuk mengikuti aturan-aturan di atas. Namun dalam pelaksanaan terdapat beberapa kelemahan dalam tingkat implementasinya sebagaimana dapat disimpulkan sebagai berikut in. Pertama, sejak tahun 2004, rata-rata disain kurikulum prodi di lingkungan PTKI didasarkan kepada model kurikulum teknologis atau dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sesuai kebijakan Kepmen Agama Nomor 353 Tahun

2004 dan sesuai anjuran Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama melalui surat Nomor Dj.II/Dt.II.III/P.009/AZ/ 328/02, dan Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj.II/114/2005 tentang kebijakan akademik dan kelembagaan tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi. Disain kurikulumnya rata-rata berisikan:

1) Tujuan. Tujuan prodi adalah menciptakan sarjana yang profesional, kompetitif, dan memiliki wawasan ke-Islaman yang tinggi, serta berakhlaqul karimah;
2) Jumlah Beban Studi. Beban studi yang harus diselesaikan umumnya mengambil batas maksimum, yaitu sebanyak 160 sks; yang terdiri atas rumpun mata kuliah: Kompetensi Dasar (rata-rata 10%-15%), Kompetensi Utama (60%-70%), Kompetensi Pendukung (05%-12%), dan Kompetensi lainnya (0-10%);
3) Deskripsi Mata Kuliah dan Tujuan Mata Kuliah. Deskripsi setiap mata kuliah memang tercantum, tetapi umumnya hanya sebagian saja, termasuk tujuan mata kuliah.

Hal Ini menggambarkan bahwa isi kurikulum tidak dirancang secara baik, yang akan menyebabkan sasaran pembelajaran menjadi tidak tentu arahnya. Komponen kurikulum yang ada hanya tujuan dan isi semata, itu pun masih belum jelas rumusannya. Rumusan tujuan prodi seharusnya terdiri atas standar kompetensi lulusan, rumusan kompetensi (kompetensi dasar, utama, pendukung, dan lainnya), serta standar kompetensi dan kompetensi dasar. Isi/materi seharusnya berdasarkan standar kompetensi lulusan (SKL) yang diinterpretasikan ke dalam substansi kajian, penamaan mata kuliah, menentukan waktu dan bobot SKS, struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah serta pembuatan silabus dengan SAP.

Pemilahan mata kuliah dalam rumpun kompetensi sebagaimana tercantum dalam dokumen kurikulum prodi umumnya masih membingungkan, yakni banyaknya kesalahan penyimpanan mata

kuliah. Ini merefleksikan bahwa pengelola prodi tidak memahami benar hakikat dari kompetensi dan rumpun setiap mata kuliah tersebut, sebagai akibatnya terjadi kesalahan yang sangat kentara. Dilihat dari jumlah SKS nampaknya terlalu gemuk yakni 160 SKS. Hal ini jelas sangat membebani mahasiswa dalam menyelesaikan studi S1-nya, apalagi substansi kajiannya tidak jelas. Hal ini semakin menggambarkan tidak memahaminya hakikat kurikulum, apalagi dalam hal langkah-langkah pengembangan kurikulum. Nampaknya yang dimaksud dengan kurikulum hanya kumpulan nama mata kuliah semata. Selain itu, tidak tercantumkannya silabus yang utuh, materi pokok dengan metode yang akan digunakan dalam setiap pembelajaran, padahal ini sangat penting dan vital karena tanpa menggunakan metode pembelajaran yang jelas, maka tujuannya pun tidak akan jelas arahnya. Selain itu, sistem evaluasinya pun tidak tercantum secara eksplisit. Ini menunjukkan bahwa sistem evaluasi bisa dipersepsi kurang penting, padahal hal ini sangat penting untuk mengukur atau menakar keberhasilan prestasi akademik mahasiswa yang juga sekaligus untuk menakar keberhasilan dosen yang mengajarnya.

Kedua, kurikulum tidak diimplementasikan sesuai dengan kebijakan yang diharapkan dalam Kepmen Agama dan Keputusan Dirjen Binbaga Islam, yakni kebijakan kurikulum yang seharusnya digunakan KBK tapi kenyataannya menggunakan model konsep Kurikulum Berbasis Ilmu (KBI) atau Kurikulum Subyek Akademis (KSA). Hal ini terlihat dari proses pembelajaran yang didominasi oleh dosen dengan banyaknya ceramah yang digunakan. Kemampuan nalar atau kognitif menjadi target pembelajaran, sedangkan aspek psikomotor dan afektif sama sekali tidak diperhatikan. Peranan dosen dalam pengembangan kurikulum masih terbatas, walaupun dalam hal pengembangan dan penetapan materi, dosen diberi kewenangan yang leluasa. Keterbatasan peran serta dosen dalam pengembangan kurikulum berdampak pada tidak terpahaminya tujuan uta-

ma pengembangan kurikulum dan muncul berbagai kesulitan dosen dalam perancangan dan implementasi kurikulum.

Ketiga, dilihat dari keseluruhan kegiatan evaluasi kurikulum yang seharusnya dilakukan oleh tim pengembang kurikulum, ternyata hanya melakukan evaluasi hasil belajar yang diselenggarakan oleh para dosen saja yang hanya berbentuk UTS dan UAS saja. Kegiatan evaluasi lainnya tidak pernah dilakukan secara resmi. Nampaknya, program studi belum terbiasa melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang sedang berjalan. Perhatian dosen terhadap kurikulum biasanya hanya pada saat perubahan struktur mata kuliah yang dilakukan secara berkala. Kebiasaan untuk melakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses belajar mengajar seperti dalam pengembangan tujuan pengajaran, bahan pelajaran yang menyangkut sekuens bahan ajar, strategi mengajar dan media mengajar, dan termasuk sistem evaluasi yang diterapkan jarang dilakukan. Kesimpulan ini diperkuat oleh data penelitian bahwa hanya 20% dosen saja yang membuat silabus dan sisanya 80% dosen tak pernah membuat silabus sama sekali, dan 100% dosen tak pernah membuat SAP. Pelaksanaan evaluasi hasil belajar, sebagai bagian dari evaluasi kurikulum juga jarang dilakukan peninjauan. Bahkan terkadang, mengukur kompetensi tata bahasa *(grammar)* diuji dengan tes lisan. Dari sudut ini saja menunjukkan bahwa dosen tidak konsisten dalam menakar kemampuan mahasiswa. Bukti lainnya dari ketidakadaan evaluasi kurikulum juga nampak dari penggunaan soal-soal yang tidak melalui proses validasi dan reliabilitas soal.

Kegiatan evaluasi terhadap proses pembelajaran tidak dilakukan secara resmi. Evaluasi kepada tujuan pengajaran, komponen bahan pelajaran yang menyangkut sekuens bahan ajaran, strategi mengajar dan media mengajar, dan sistem evaluasi yang diterapkan tidak pernah dilakukan secara sistematis. Dari keseluruhan jenis evaluasi hasil belajar, program studi dilingkungan PTAI umumnya hanya dilakukan dengan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Se-

mester. Bentuk tes tulis dan tes lisan sudah biasa dilakukan, kecuali *tes tindakan* belum banyak dikenal. Untuk menilai hasil belajar mahasiswa tidak direncanakan secara baku dalam bentuk yang komprehensif dan dikendalikan oleh pengelola program studi tetapi justru hanya dilakukan oleh dosen masing-masing. Banyak lagi proses evaluasi yang tidak dilakukan, misalnya studi penelusuran lulusan program studi. Studi penelusuran penyerapan lulusan program studi sebenarnya sangat penting sebagai bagian dari evaluasi relevansi kurikulum.

Keempat, sarana dan prasarana pendukung pembelajaran pada prodi sangat tidak memadai. Kurang memadainya laboratorium (bahasa/budaya/dan lainnya) dan peralatan pendukung lainnya, perpustakaan yang memiliki koleksi yang sesuai dan proporsional dengan jumlah mahasiswa, dan ketidakadaan *native speaker* yang handal akan menyebabkan proses pembelajaran kurang optimal, sehingga mutu pembelajaran pun tidak memuaskan atau tidak mencapai sasaran yang diharapkan.

Kelima, alumni prodi di lingkungan PTKI sudah banyak tersebar, dan sebagian besar dari mereka bekerja sebagai pengajar baik pada level SD, SLTP, SMU/SMK, bahkan banyak pula yang mengajar di perguruan tinggi. Hanya sedikit sekali yang bekerja sebagai editor, penulis, penterjemah, pekerja bank, karyawan dinas pendidikan, Disbudpar, Garuda, dan sebagainya, bahkan mungkin tak sedikit pula yang masih belum bekerja terutama mereka yang baru lulus. Kalau menilik kepada kualitas lulusan nampaknya bisa dikategorikan cukup baik, sebagai buktinya sebagian besar sudah terserap pasar kerja. Hal ini membuktikan bahwa kompetensi lulusan prodi bisa dikatagorikan cukup *marketable* walaupun sebagian besar dari mereka bekerja tidak sesuai dengan keilmuan yang mereka peroleh, sebagai contohnya menjadi pengajar, editor, dan bekerja di bank. Tuntutan para pengguna atau dunia kerja perlu mendapat perhatian yang sangat serius karena pengembangan kurikulum harus *focus on*

customers, artinya bahwa kurikulum prodi bukan saja berbasis ilmu, tetapi juga berbasis pasar. Untuk itu tuntutan para pengguna harus direspon positif sebagai masukan untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Sebagai contoh yang riil adalah banyaknya alumni prodi yang bekerja sebagai pengajar, padahal tujuan prodi ini bukan membentuk *output* untuk mengajar. Melihat realita yang ada, maka *EFL Teaching Methodology* menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk diberikan kepada mahasiswa. Begitu pula mereka yang bekerja dalam profesi lainnya (profesi pendukung) harus dibekali secara formal dalam bentuk mata kuliah yang substansinya didiskusikan oleh tim perumus kurikulumnya agar tepat sasaran.

Selain itu, di dunia Perguruan Tinggi (PT), termasuk di lingkungan PTKI misalnya, pencapaian kompetensi mahasiswa dalam berbagai bidang masih dirasakan kurang maksimal. Hal ini menimpa semua *agregat* tersebut dan pada dasarnya disebabkan oleh:

1) Masih rendahnya motivasi dan minat belajar mahasiswa. Ini disebabkan mereka kurang memahami maksud dan tujuan mata kuliah yang disajikan atau malah tidak menyenanginya karena beberapa faktor. Ketidaksenangannya disebabkan oleh berbagai hal, salah satu di antaranya adalah karena pengalaman awal belajar MK tersebut atau yang serupa dengannya pada jenjang pendidikan sebelumnya tidak didorong dengan motivasi dan minat yang tinggi sehingga mereka kurang memiliki kemampuan apalagi menguasainya, bahkan beberapa mata kuliah termasuk mata kuliah yang dibenci (Mansyur, 2002: 3). Rendahnya minat mereka dalam belajar MK tertentu akan berakibat negatif terhadap kemampuan mereka sendiri, hal ini identik dengan apa yang Wittig (1983: 43) katakan bahwa *no learning no interest*, artinya bahwa tidak akan ada aktivitas belajar tanpa minat.
2) Kelemahan kurikulum, artinya bahwa kurikulum yang disusun tidak berdasarkan kepada *need assessment*. Kurikulum yang

ada kurang memadai karena terkesan "dipaksa" untuk seragam tanpa memperhitungkan *need assessment* tadi. Kalau kurikulum didisain berdasarkan *need assessment*, maka akan tergambarkan kompetensi yang dibutuhkan dan harus dimiliki mahasiswa, jenis materinya, model, strategi, teknik, dan pendekatan pembelajarannya, dan jenis-jenis evaluasi yang mampu merekam kompetensi berwacana bahasa Inggris mahasiswa secara *integrated*. Kelemahan kurikulum merupakan kesalahan awal yang berakibat sangat fatal, karena ia merupakan akar dari proses pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembelajaran yang berakhir pada *output*, bahkan *outcome*. Oleh karena itu, kurikulum yang terkesan dipaksakan tidak akan membuahkan hasil yang memuaskan, bahkan cenderung akan membingungkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanannya, baik dosen lebih-lebih mahasiswa karena tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dan proses perumusan kurikulumnya pun tidak melibatkan elemen terkait yang kompeten; sedangkan kurikulum dituntut harus mampu mengantarkan mahasiswa ke arah pencapaian kompetensi yang ideal (*ideal competence*). Tak cukup hanya itu, aspek implementasi di lapangan terutama pada proses pembelajaran sangat menentukan terhadap kualitas *output*. Sehebat atau setangguh apa pun kurikulum didisain, tidak akan berpengaruh banyak pada kualitas *output* apabila kualitas prosesnya kurang memuaskan. Oleh karena itu, kualitas proses pembelajaran menentukan kualitas hasil;

3) Profesionalisme dan tingkat pendidikan dosen yang masih rendah. Misalnya, tidak sedikit dosen yang memberikan mata kuliah bahasa Inggris bukan berasal dari latar belakang pendidikan bahasa Inggris (*mismatch*). Hal ini merupakan salah satu masalah yang sangat ironis dan perlu segera ditangani, sebab mengajarkan bahasa tidak cukup hanya bermodalkan kebisaan berbahasa saja (*knowing language*), tetapi juga diperlukan pengeta-

huan berbahasanya (*knowing about language*). Dengan demikian, maka kegiatan pembelajaran atau perkuliahan harus diselenggarakan dan dikelola secara profesional, atau menempatkan orang pada tempatnya (*the right man on the right place*). Kalau hal tersebut masih dibiarkan berlangsung, maka akan berakibat fatal bagi sistem pendidikan karena tujuan pembelajaran bahasa Inggris yang tadinya agar mahasiswa mampu berbahasa Inggris, justru akan menjadi kabur. Islam sudah mewanti-wanti hal itu dimana jika sesuatu urusan dipegang bukan oleh ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya. Penempatan orang untuk mengajar bahasa Inggris sebaiknya dilakukan secara proporsional dan profesional, agar menghasilkan *output* yang kompeten.

4) Kebiasaan yang kurang kondusif dalam menentukan pengajar atau dosen hendaknya jangan terus dipelihara dan dilestarikan, sebab untuk mencapai tujuan kurikuler atau institusional tidak akan bisa ditempuh hanya dengan cara asal-asalan karena akibatnya akan memproduk *output* yang asal-asalan pula. Prinsip proporsionalisme dan profesionalisme hendaknya menjadi komitmen bersama guna meningkatkan kualitas pendidikan menuju pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan pada kurikulum. Kemampuan berbahasa Inggris saja tidak menjamin seseorang memiliki kemampuan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran bahasa Inggris dengan baik dan benar. Untuk menjadi pengajar bahasa Inggris yang baik, diperlukan mengetahui, memahami, dan memiliki pengalaman dalam mengimplementasikan kurikulum (merencanakan pembelajaran: menyusun silabi dan SAP yang baik, menggunakan metode pembelajaran yang tepat, menggunakan dan memanfaatkan media dan sumber belajar, dan menilai aspek-aspek berbahasa secara tepat); penguasaan materi bahasa Inggris; dan mampu memotivasi mahasiswa. Selain itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (2005:

25) Pasal 31 ayat 1 poin b menyebutkan bahwa pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum lulusan program Magister (S2) untuk program Sarjana (S1). Melihat hal di atas jelas bahwa pendidikan dosen atau pengajar di perguruan tinggi seharusnya berpendidikan minimal Strata-2 pada bidangnya karena mereka yang diajar adalah mahasiswa program S-1. Idealnya memang seperti itu karena sangat ironis sekali dosen berkualifikasi S1 mengajar pada mahasiswa program S1. Kondisi tersebut masih banyak terjadi hampir di setiap lembaga pendidikan tinggi.

5) Rendahnya *input* mahasiswa menjadi hal yang sangat krusial dan urgensi untuk dipikirkan karena ini akan berakibat kurang efektif dalam implementasi kurikulum di lapangan. Animo mahasiswa yang rendah perlu dipikirkan ulang faktor penyebabnya. Hal ini disebabkan akan mengganggu terhadap kualitas *output* yang dihasilkan.
6) Proses pembelajaran bahasa Inggris yang tidak standar atau tidak maksimal, artinya kompetensi apa yang akan dicapai setelah mata kuliah itu disajikan, kurang jelas arahnya. Hal ini terlihat dari persiapan dosen yang kurang terencana dengan baik ketika dia akan mengajar. Hal ini terlihat dari jarangnya membuat Silabus dan SAP yang merupakan kerangjka pembelajaran dimana semuanya sangat lengkap tentang apa dan bagaimana materi itu akan disajikan, media apa yang akan digunakan dan termasuk sistem evaluasi dan tugas-tugas yang akan diemban oleh mahasiswanya. Hal tersebut terlihat sangat jelas, runtut dan sistematis.
7) Kurangnya sumber daya pendukung, hal ini akan menyebabkan terganjalnya kelancaran program yang dicanangkan sebab hal tersebut tidak kalah pentingnya dalam pencapaian kompetensi yang dicanangkan. Laboratorium bahasa, perpustakaan, lingkungan belajar, dan sarana penunjang lainnya yang sangat

vital dan berpengaruh langsung atau tidak langsung dalam proses pembelajaran.

C. Pengembangan Kurikulum Program Studi

Untuk meminimalisir sejumlah kelemahan di atas diperlukan revitalisasi pengembangan kurikulum program studi, khususnya pada domain kurikulum inti prodi yang mengarah kepada kompetensi utama. Secara makro, upaya untuk mencapai kompetensi utama ini diwujudkan lewat kebijakan Menteri Agama Republik Indonesia melalui pemberlakukan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di Perguruan Tinggi Agama Islam melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 pada tanggal 6 Juli 2004. Dasar pemikirannya adalah: 1) beragamnya potensi peserta didik yang harus dikelola secara beragam, tepat, dan komprehensif; 2) kondisi pendidikan di Indonesia menghasilkan mutu pendidikan yang rendah dan mengabaikan aspek moral, akhlak, budi pekerti, seni dan olah raga, serta *lifeskill*; 3) *output* PTAI harus kompeten dalam bidang keilmuan agama Islam serta bidang keahlian, terutama dalam menghadapi pasar bebas dunia; 4) kompetensi SDM, dan 5) persaingan lembaga pendidikan (Depdiknas, 2003: 1). KBK yang dimaksud oleh SK Menag RI sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45/U/2002, yakni seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu (Kepmendiknas Nomor 45/U/2002). Dalam konteks pendidikan, Depdiknas (2003: 2) menyebutkan bahwa Pendidikan Berbasis Kompetensi dimaksudkan sebagai bentuk pendidikan yang diselenggarakan untuk menyiapkan lulusannya menguasai seperangkat kompetensi yang bermanfaat bagi kehidupan kelak.

KBK lahir dari model kurikulum teknologi yang merupakan suatu model kurikulum yang memfokuskan tujuannya pada penguasaan

kemampuan atau kompetensi-kompetensi khusus. Kompetensi umum yang dituntut dikuasai dalam suatu sub, diuraikan menjadi kompetensi khusus atau sub-kompetensi dan bahkan menjadi sub-sub kompetensi atau performansi. Yang dimaksud kompetensi, menurut McAshan dalam Sihono (1997: 69), adalah seperangkat pegetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperoleh seseorang, yang telah menjadi bagian dari dirinya di mana ia dapat melakukan dengan baik perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor *(the knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and psychomotor behavior)*. Sedangkan Crunkilton (1988: 6) mendefinisikan kompetensi sebagai tugas-tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang dianggap kritis untuk keberhasilan ketenagakerjaan. Jadi, kompetensi yang dimaksud dalam penelitian adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki oleh semua pelaku pendidikan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, semuanya harus dikuasai dan dijadikan acuan dalam menyusun kurikulum.

Namun demikian, pemberlakuan KBK di PTKI selama ini belum disertai oleh langkah-langkah administratif dan akademik lebih lanjut. Kebijakan itu seakan dipaksakan disebabkan tidak adanya atau kurikulum tidak jelas dilihat dari komponen tujuan, isi, media/strategi pembelajaran, dan evaluasi, yang ada hanya tujuan PTAI serta kompetensi yang diinginkan PTAI. Hal ini yang membuat para pengelola lembaga (UIN, IAIN, STAIN, dan PTAIS) menjadi limbung. Seharusnya dibuat rumusannya berdasarkan komponen kurikulum sebagaimana telah disebutkan di atas secara rinci dalam contoh kurikulum suatu prodi yang ada di lingkungan PTAI sehingga bisa dijadikan contoh untuk merumuskan rancangan kurikulum prodi.

Bahkan penerapan KBK tersebut belum sepenuhnya mengikuti langkah-langkah pengembangan kurikulum. Istilah pengembangan

kurikulum ini berasal dari kata pengembangan dan kurikulum. Istilah "pengembangan" dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai "usaha sistematis, terencana, metodologis, dan komprehensif dengan tujuan untuk mengkiritisi, memperbaharui, dan menyempurnakan sesuatu yang telah ada sebelumnya" seperti dikatakan oleh Gopper dan Ross dalam Hamalik (2000). Sedangkan definisi kurikulum disebutkan oleh Oliva (1997: 12) sebagai "*Curriculum itself is a construct or concept, a verbalization of an extremely complex idea or set of ideas".* Dari pengertian mengenai pengembangan dan kurikulum, maka yang dimaksud dengan "pengembangan kurikulum," dalam tulisan ini adalah "usaha terencana, sistematis, metodologis, dan komprehensif yang ditujukan untuk mengkritisi, memperbaharui, dan menyempurnakan kurikulum yang telah ada sebelumnya, yang dalam konteks khusus difokuskan pada pengembangan kurikulum prodi di PTKI.

Gambar 16: Langkah-langkah Pengembangan Kurikulum

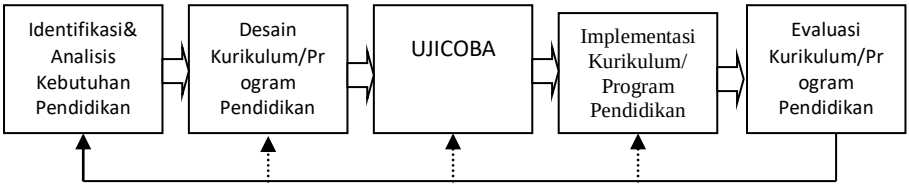

Adapun langkah-langkah pengembangan kurikulum terdiri dari beberapa tahapan simultan, yakni: 1) mengidentifikasi kebutuhan pendidikan, 2) menganalisis kebutuhan pendidikan, 3) menyusun desain kurikulum, 4) memvalidasi kurikulum, 5) mengimplementasi kurikulum, 6) mengevaluasi kurikulum (Sukmadinata, 2004: 93). Berdasarkan tahapan pengembangan kurikulum itu, dan melihat berbagai persoalan dalam pencapaian kompetensi, nampaknya diperlukan jalan keluarnya untuk mengantisipasi segala masalah dan kesu-

litan yang ada. Salah satu jalan keluarnya adalah pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan.

Gambar 17: Proses Pendidikan dan Komponen Pendukungnya

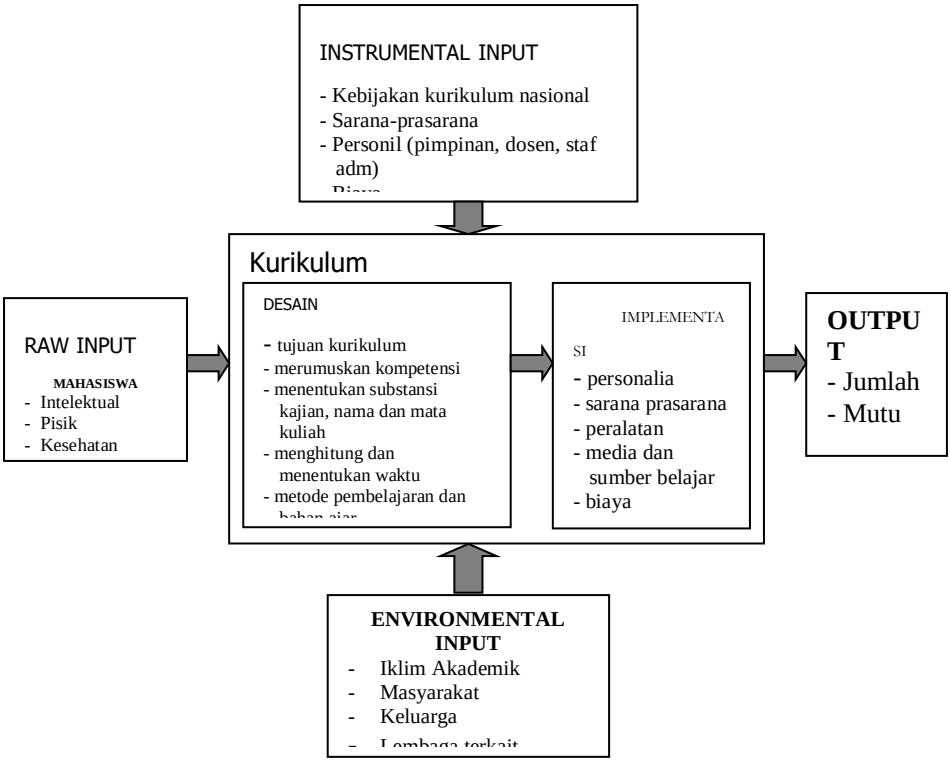

Perumusan disain kurikulum seharusnya melibatkan berbagai khalayak yang kompeten dan berkepentingan: mahasiswa, dosen, alumni, pengguna (*user*), tim ahli, yang mempunyai kebijakan, dan yang berkepentingan lainnya (*stakeholders*). Tidak bisa suatu kurikulum prodi dirancang hanya berdasarkan ilmu semata atau di belakang meja semata karena kegiatan *esensial* dalam perencanaan ku-

rikulum adalah melakukan penilaian kebutuhan (*need assessment*). Penilaian kebutuhan ini sendiri merupakan prosedur untuk mengidentifikasi kesenjangan yang muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan antara realitas dan keinginan. Hal ini sesuai dengan pendapat Oliva dalam Hamalik (2002: 25) bahwa macam-macam kebutuhan yang perlu diukur meliputi: kebutuhan mahasiswa, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan *subject matter*.

Dalam pendidikan, kurikulum merupakan fondasi yang memungkinkan sistem bekerja karena kurikulum merupakan kerangka sekaligus ruh pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus dilakukan secara matang dan terencana. Beberapa kegiatan yang ada dalam pengembangan kurikulum bisa dikaji dan dilakukan secara luas, yaitu meliputi identifikasi/analisis kebutuhan, penyusunan desain kurikulum, ujicoba, validasi, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Oleh karena itu, untuk meninjau ulang suatu kurikulum diperlukan apa yang disebut dengan pengembangan kurikulum. Setiap pengembangan kurikulum tersebut mempunyai karakteristik tertentu. Pengembangan yang nantinya akan diimplementasikan harus mempertimbangkan ***raw input*** (mahasiswa), ***instrumental input,*** dan ***environmental input*** yang akan tergambarkan pada tujuan umum dan khusus yang akan dirancang untuk mendesain kurikulum, mengimplementasikan kurikulum, menentukan model-model pembelajaran, dan proses evaluasi dalam rangka meningkatkan kompetensi *output* baik mutu ataupun jumlah. Tujuan umum dan khusus yang akan dirancang untuk mendesain kurikulum, model-model pembelajaran, dan proses evaluasi, didasarkan kepada dukungan penelitian, pendapat kalangan profesional, masyarakat pengguna, dan pelajar/mahasiswa. Untuk lebih jelasnya hal tersebut bisa dilihat pada gambar di bawah ini:

Kurikulum prodi di lingkungan PTAI seharusnya dikembangkan melalui hasil analisis kebutuhan yang digali dari berbagai unsur/khalayak, antara lain: dosen, mahasiswa, alumni, pengguna (*user*), dan

stakeholders. Hasil penelitian dan pengembangan ini menghasilkan produk, yakni kurikulum prodi yang cukup komprehensif. Adapun sosok kurikulum prodi yang dikembangkan secara garis besarnya berisikan:

a. visi, misi, dan konstribusi prodi:
   1) visi prodi.
   2) misi prodi.
   3) konstribusi prodi.

b.Tujuan yang berisi:
   1) standar kompetensi lulusan prodi.
   2) rumusan kompetensi:
      a) kompetensi dasar beserta subkompetensinya.
      b) kompetensi utama beserta subkompetensinya.
      c) kompetensi pendukung beserta subkompetensinya.
      d) kompetensi lainnya juga beserta subkompetensinya.

c. Isi/materi yang berisikan:
   1) substansi kajian.
   2) penetapan nama mata kuliah.
   3) penetapan waktu dan bobot sks.
   4) struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah.
   5) merumuskan silabus dan SAP/RPS.

d. Media/metode pembelajaran yang berisikan:
   1) media/sumber pembelajaran.
   2) metode pembelajaran.

e. Evaluasi, yang mencakup:
   1) evaluasi program.
   2) evaluasi proses dan hasil belajar.

Hasil analisis kurikulum yang sedang berlaku menggambarkan bahwa hanya komponen tujuan dan isi semata. Komponen tersebut pun tidak utuh ada karena tidak merumuskan kompetensi, baik itu standar kompetensi lulusan, standar kompetensi, maupun kompe-

tensi dasar. Selain itu, komponen isi pun tidak utuh karena yang ada hanya sebagian deskripsi mata kuliah, sebagian lagi tujuan, dan sebagian lagi hanya pokok bahasan saja. Komponen lain seperti media/metode pembelajaran dan evaluasi sama sekali tidak terumuskan, padahal kedua komponen ini sangat penting dan tak bisa terpisahkan dengan ke dua komponen tujuan dan isi karena untuk menciptakan *output* yang handal dipengaruhi sekali oleh proses pembelajaran dan alat ukur pencapaiannya yakni evaluasi yang digunakannya. Dalam kurikulum yang dikembangkan tidak demikian, semuanya dicoba dirumuskan sesuai dengan prinsip-prinsip dan langkah-langkah pengembangan kurikulum. Untuk lebih mengetahui perbandingan kurikulum prodi yang sedang berlaku dengan kurikulum yang dikembangkan bisa dilhat pada tabel berikut ini.

Tabel 7: Perbandingan antara Kurikulum Prodi yang Berlaku dengan Kurikulum yang Dikembangkan

Karakteristik	Kurikulum yang berlaku	Kurikulum yang Dikembangkan
Pengembang Kurikulum	- Pengelola Prodi	- Pengelola Prodi/Fakultas - Para Dosen - Pakar Kurikulum dan Pembelajaran
Visi	- Tidak dirumuskan	- Diselaraskan dengan visi PTAI, UIN, dan Fakultas
Misi	- Tidak dirumuskan	- Diselaraskan dengan visi prodi/lebih operasional
Tujuan	- SK Depag	-SK Depag -SKL -Perumusan Kompetensi -Standar Kompetensi -Kompetensi dasar

Karakteristik	Kurikulum yang berlaku	Kurikulum yang Dikembangkan
Perumusan substansi kajian	- Tidak dirumuskan	- Berdasarkan kepada tujuan KL - Analisis kebutuhan -Tim pengembang kurikulum
Penetapan nama mata kuliah	- Langsung muncul nama mata kuliah	- Berdasarkan kepada substansi kajian yang dirumuskan
Penetapan waktu dan bobot sks	- Langsung ditetapkan setiap mata kuliah bobotnya 2 sks - Jumlah total 160 sks	- Waktu dihitung secara seksama berdasarkan substansi kajian - Bobot SKS dihitung berdasarkan jumlah jam tiap-tiap substansi kajian -Jumlah total 148 sks
Struktur mata kuliah dan sebarannya	- Dirumuskan tanpa melihat prasyarat pengambilan mata kuliah	- Dirumuskan berdasarkan tingkat kesulitan materi - Dirumuskan berdasarkan mata kuliah prasyarat
Prerequisite	- tidak dirumuskan	- Dirumuskan berdasarkan gradasi materi
Tujuan mata kuliah	- Ada yang dirumuskan ada yang tidak	- Dirumuskan berdasarkan SKL, rumusan kompetensi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar
Deskripsi mata kuliah	- Dirumuskan berdasarkan nama mata kuliah	- Dirumuskan berdasarkan substansi kajian, SKL, rumusan kompetensi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar
Media	- Tidak direncanakan	- Dirumuskan berdasarkan

Karakteristik	Kurikulum yang berlaku	Kurikulum yang Dikembangkan
pembelajaran	- Tidak memakai	karakteristik bahan ajar - Dirumuskan berdasarkan apa yang ada di lingkungan pembelajaran
Metode pembelajaran	- Tidak dirumuskan - Metode ceramah	- Dirumuskan berdasarkan karakteristik bahan ajar - Disesuaikan berdasarkan apa yang ada di lingkungan pembelajaran
Evaluasi	-Evaluasi hasil (kognitif) -Tugas, UTS, dan UAS hasilnya tidak dikembalikan	-Evaluasi program -Evaluasi Pembelajaran: proses dan hasil belajar (kognitif, afektif, dan psikomotor) - Tugas, UTS, dan UAS hasilnya dikembalikan kepada mahasiswa

Hasil ujicoba dan uji validasi kurikulum yang telah dikembangkan penulis sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, walaupun perbedaannya baru terlihat signifikansinya antara 64%-85%. Namun demikian, hal ini bisa dijadikan *entry point* yang baik bagi upaya pengembangan kurikulum di masa yang akan datang. Artinya bahwa kurikulum prodi yang dikembangkan membawa dampak positif terhadap pencapaian kompetensi mahasiswanya. Hal ini tergambarkan dari hasil perhitungan statistik yang menggunakan uji t dengan bantuan SPSS versi 11 yang menggambarkan adanya peningkatan yang sangat signifikan prestasi akademik mahasiswa dari *pretest* ke *posttest* setelah diberi perlakuan (*treatment*).

a. Karakteristik Kurikulum Prodi yang Dikembangkan

Salah satu unsur untuk melihat keefektifan suatu kurikulum adalah dengan mengimplementasikan kurikulum, yakni bagaimana kurikulum itu diimplementasikan dalam tataran implementasi pembelajaran. Dalam pengembangan kurikulum program studi di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung, implementasi pembelajaran dilakukan dengan melakukan uji-coba baik terbatas, lebih luas maupun juga uji validasi pada pembelajaran menulis (*writing*). Dari hasil penelitian dan pengembangan menggambarkan bahwa karakteristik kurikulum program studi di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah sebagai berikut:

1) Menekankan kepada pencapaiaan kompetensi mahasiswa.
2) Pencapaian kompetensi mahasiswa bersifat individu.
3) Berorientasi kepada *learning outcomes* atau hasil belajar.
4) Berorientasi kepada keberagaman.
5) Pendekan pembelajaran yang digunakan sangat variatif.
6) Metode pembelajaran yang digunakan sangat variatif.
7) Dosen bukan satu-satunya sumber belajar.
8) Unsur lain yang bersifat edukatif merupakan sumber belajar.
9) Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar.

Hal tersebut menggambarkan bahwa karakteristik kurikulum program studi di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung sesuai dengan karakteristik KBK, yaitu: 1) Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal; 2) Berorientasi pada hasil belajar (*learning outcomes*) dan keberagaman; 3) Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi; 4) Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber lainnya yang memenuhi unsur edukatif; dan 5) Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi (Puskurnas 2002: 1).

b. Memperbaiki Proses Pembelajaran

Peran dosen menjadi sangat sentral dan penting dalam pengembangan kurikulum, terutama dalam menentukan visi, misi, dan standar kompetensi lulusan (SKL) prodi, termasuk langkah selanjutnya penyusunan substansi kajian. Kegiatan tersebut tidak serta merta merupakan tugas pengelola prodi semata karena hal tersebut akan diberlakukan kepada semua komponen pendidikan yang nantinya akan berdampak besar terhadap kompetensi *output.* Tidak bisa kalau hal tersebut dilakukan hanya oleh pengelola prodi, atau beberapa gelintir dosen saja, karena keterbatasan pengetahuan terutama dalam menentukan substansi kajian. Perlu adanya koordinasi yang efektif bukan hanya pengelola prodi dengan dosen saja, tetapi juga antar dosen dalam rangka merumuskan substansi kajian sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan saling memberikan masukan satu sama lainnya.

Selain itu, perencanaan pembelajaranpun menjadi tugas pokok dosen dalam rangka bagaimana merancang pembelajaran agar mahasiswa lebih bergairah dan aktif belajar, dan tentu saja prestasi akademik mahasiswa meningkat. Pembuatan silabus dan SAP yang terarah serta penggunaan metodologi pembelajaran yang tepat, menjadi tugas rutin dosen. Dampak lebih lanjut dari tuntutan tersebut dalam pengembangan kurikulum prodi dapat terlihat pada penyusunan silabus dan SAP serta *treatment* (perlakuan) terhadap mahasiswa prodi dalam pembelajaran. Secara teoretis pembelajaran pada prodi akan lebih efektif seandainya dosen membuat perencanaan pembelajaran secara reguler. Selain itu membuat kontrak belajar yang jelas dengan mahasiswa tentang sistem pembelajaran mulai dari materi, proses pembelajaran, dan sistem evaluasinya. Materi yang disajikan gradasinya jelas dan mudah dicerna mahasiswa karena penggunaan metode pembelajaran yang tepat serta sistem evaluasinya yang tidak hanya mengandalkan kepada hasil se-

mata (UTS dan UAS), yakni ditambah dengan evaluasi proses di mana mahasiswa merasa diperhatikan dan diamati aktivitasnya.

c. Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan menganalisis kebutuhan yang digali dari berbagai unsur, termasuk mahasiswa salah satunya. Mereka ikut memberikan pandangannya bagaimana kondisi kurikulum yang ada, terutama kelebihan dan kekurangannya. Hal ini merupakan kebijakan yang sangat apresiatif bagi mahasiswa karena baru kesempatan ini mereka dilibatkan ikut andil dalam memberikan pandangannya. Kebijakan tersebut justru memberikan motivasi yang sangat besar bagi mahasiswa untuk belajar, yakni: bertanya, berdiskusi, dan memberikan informasi tentang problema mahasiswa dalam belajar, termasuk kondisi objektif proses pembelajaran kepada pengelola atau kepada dosen. Hal ini menjadi sangat penting karena mereka yang menjadi sasaran utama kurikulum, dan masukan mereka menjadi sangat penting untuk dijadikan bahan kajian dan renungan bagi peningkatan kualitas pembelajaran.

Penyusunan silabus dan SAP yang dilakukan dosen pada ujicoba (baik terbatas maupun lebih luas) dan uji validasi membuat mahasiswa bergairah dan termotivasi untuk belajar karena hal tersebut dianggap sebagai barang langka bagi mereka dan dengan langkah seperti itu membuat pembelajaran jadi jelas arah dan tujuannya. Dosen membuat kontrak belajar melalui presentasi silabus pada awal perkuliahan dengan menjelaskan: 1) identitas mata kuliah; 2) standar kompetensi; 3) deskripsi mata kuliah; 4) tujuan pembelajaran; 5) materi pokok setiap pertemuan yang terdiri atas: kompetensi dasar, materi pokok, pengalaman belajar, indikator, alokasi waktu; 6) media/sumber pembelajaran; 7) sistem evaluasi; dan 8) buku rujukan.

Proses pembelajaran menekankan kepada pencapaiaan kompetensi mahasiswa. Pencapaian kompetensi mahasiswa bersifat in-

dividu, berorientasi kepada proses dan *learning outcomes* atau hasil belajar, dan berorientasi kepada keberagaman. Pendekan dan pembelajaran yang digunakan sangat variatif. Dosen bukan satu-satunya sumber belajar, unsur lain yang bersifat edukatifpun merupakan sumber sumber belajar. Sistem penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar. Ini dianggap sangat jelas dan objektif sehingga mahasiswa antusias untuk lebih giat, lebih aktif, lebih semangat, disiplin, dan taat terhadap aturan sesuai pada kontrak belajar kontrak belajar yang sebelumnya sudah disepakati dengan dosen. Hasil tugas mahasiswa, latihan, UTS, dan UAS selalu dikembalikan kepada mahasiswa agar mereka mengetahui catatan-catatan yang diberikan dosen, bukan hanya kekurangan, kesalahan yang akan dijadikan bahan renungan dan pertimbangan bagi mahasiswa, tetapi juga kelebihan-kelebihannya. Ini membuat mahasiswa lebih termotivasi untuk lebih giat belajar, lebih aktif dan kritis dalam pembelajaran (bertanya dan menjawab), lebih banyak menggali informasi dari berbagai sumber belajar, dan lebih serius dalam membuat tugas-tugas yang dibebankan dosen. Hal tersebut walaupun awalnya menjadi beban yang sangat berat disebabkan merupakan hal yang baru atau tak terbiasa, tetapi lambat laun justru meningkatkan motivasi mahasiswa karena semuanya dianggap jelas dan objektif.

d. Mengoptimalkan Hasil Belajar Mahasiswa

Standar kompetensi lulusan yang dirumuskan sangat jelas dan tepat, penyusunan substansi kajian, perumusan kompetensi dan subkompetensi, penggunaan media/metode pembelajaran, dan sistem evaluasi yang tepat, serta dosen membuat perencanaan pembelajaran dan kontrak belajar dengan mahasiswa, jelas akan mengoptimalkan hasil belajar mahasiswa. Sebagai bukti untuk mengetahui kompetensi mahasiswa prodi dalam pengembangan kurikulum, dilakukan implementsi pembelajaran. Sebelum implementsi dilakukan terlebih dahulu memberikan *pretest,* kemudian mengada-

kan perlakuan selama tiga kali untuk masing-masing kelas, dan diakhiri dengan memberikan *posttest.* Dari hasil penghitungan statistik dengan menggunakan uji-t diketahui bahwa perolehan skor rata-rata prestasi akademik mahasiswa pada *posttest* lebih tinggi dari rata-rata skor *pretest*. Ini menggambarkan adanya peningkatan prestasi akademik yang signifikan antara *pretest* dan *posttest* setelah melalui treatment (perlakuan). Artinya bahwa kurikulum tersebut dirasakan efektif untuk mengoptimalkan hasil belajar mahasiswa.

e. Meningkatkan Kinerja Dosen

Sebagaimana hasil penelitian menggambarkan bahwa kinerja dosen prodi sangat rendah terutama dalam hal merencanakan pembelajaran. 80% dosen tidak biasa membuat silabus dan 100% tidak pernah membuat SAP. Ini menggambarkan bahwa sebagian besar dosen tidak merencanakan pembelajaran. Dalam uji coba yang telah dilakukan ini, justru dosen dicoba untuk diminta aktivitasnya sesuai dengan fungsinya, yakni merumuskan silabus dan SAP. Kegiatan semacam ini sebenarnya hanya sebagian kecil saja dari tugas dosen karena baru pada tataran darma satu dari tridarma perguruan tinggi, yakni pada tataran pembelajaran. Artinya bahwa dosen jangan menganggap hal ini sebagai beban berat yang harus dipikul karena itu baru merupakan salah satu tugas dosen. Oleh karena itu, posisi ini menjadi yang prioritas satu pada tridarma perguruan tinggi karena dianggap merupakan urat nadinya perguruan tinggi (lembaga pendidikan).

Sebelum pembelajaran dimulai, dosen diharuskan membuat perencanaan pembelajaran secara matang dan jelas (silabus dan SAP). Hal ini dilakukan agar pembelajaran itu jelas arahnya, baik tujuan, materi, metode, evaluasi dan hasilnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan ujicoba dan uji validasi dengan membuat perencanaan pembelajaran, yakni silabus dan SAP, kemudian diujikan. Sebelum dilakukan *treatment*, diberikan dulu *pretest* untuk

mengetahui kemampuan awal mahasiswa. Setelah itu dilakukan *treatment* selama tiga kali, dan kemudian diberikan *posttest* untuk mengetahui perkembangan kemampuan akademik mahasiswa pasca diberikan *treatment*. Yang terjadi adalah perubahan skor rata-rata pada *pretest* ke *posttest* menunjukkan hasil yang signifikan atau prestasi akademik mahasiswa meningkat. Melihat hasil yang demikian, maka kinerja dosen kalau ingin meningkatkan prestasi akademik mahasiswa harus lebih meningkat, baik itu pada tataran perencanaan pembelajaran (banyak membaca, membuat silabus dan SAP), implementasi (merencanakan media dan metode pembelajaran), bahkan evaluasinya (evaluasi proses dan hasil belajar).

Terdapat beberapa keunggulan dari kurikulum prodi yang telah dikembangkan, antara lain:

1) Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan.
2) Kurikulum yang dikembangkan digali dari berbagai khalayak: mahasiswa, dosen, pengelola, ahli, alumni, pengguna, dan yang berkepentingan (*stakeholders*).
3) Kurikulum yang dikembangkan diawali dengan merumuskan terlebih dahulu a) visi, misi, dan konstribusi; b) tujuan: standar kompetensi lulusan, rumusan kompetensi, standar kompetensi dan kompetensi dasar; c) merumuskan isi: substansi kajian, penetapan nama mata kuliah, waktu, jumlah sks, dan merumuskan silabus dan SAP; d) merumuskan media/metode pembelajaran; dan e) sistem evaluasi.
4) Memungkinkan dikembangkannya mata kuliah baru yang sebelumnya tidak ada dalam kurikulum. Oleh karena perumusan bidang kajian membawa dampak pada ruang lingkup dan kedalaman materi dari suatu mata kuliah yang dikembangkan.
5) Silabus yang berisi informasi yang lengkap tentang suatu mata kuliah membawa dampak pada pembelajaran yang sistematik. Artinya, baik dosen maupun mahasiswa memiliki target-target dan dapat mengembangkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan

kompetensi yang diharapkanf, pengalaman belajar yang dikembangkan melalui berbagai pendekatan/strategi/metode, sumber-sumber yang dapat dioptimalkan, serta sistem evaluasi yang digunakan.

6) Kejelasan yang diperoleh mahasiswa khususnya, menuntut kesiapan belajar dan memberikan gambaran tentang apa dan bagaimana suatu perkuliahan itu akan dijalani. Kejelasan ini juga akan menjadi ”kontrak belajar” antara dosen dan mahasiswa sehingga dapat saling mengingatkan.

Sedangkan keterbatasan yang menjadi permasalahan dalam pengembangan kurikulum yang telah dilakukan, antara lain:

1) Memerlukan cukup banyak waktu untuk mengali informasi dan merumuskan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan para lulusan dan masyarakat pengguna (*user*).
2) Penyusunan kurikulum memerlukan waktu yang luang, tenaga yang banyak, dan biaya yang besar.
3) Kurikulum harus disusun dan dikembangkan oleh suatu tim yang solid.

Penyusunan silabus yang berisi gambaran lebih menyeluruh tentang mata kuliah yang akan dikembangkan memerlukan waktu penyusunan dan pemikiran yang lebih menguras tenaga. Apalagi tanpa didukung oleh kemampuan profesional dosen yang memadai dan biaya yang tidak mencukupi.

D. Nilai-nilai Religius dalam Kurikulum Program Studi

Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), baik UIN, IAIN, STAIN, STAIS atau pun lainnya yang berada di lingkungan Departemen Agama mempunyai visi, misi, dan tujuan eksplisit untuk mengkaji, memahami, dan mengimplementasi tata nilai keislaman dalam struktur kurikulumnya. Dengan kata lain, keislaman menjadi salah satu

"identitas" atau ciri pembeda dalam kurikulumnya dari Perguruan Tinggi lainnya. Umumnya, dilihat dari visi, misi, dan tujuan, prodi di lingkungan PTAI mencantumkan keislaman sebagai salah satu dasar dan atau tujuan dari kurikulumnya. Namun demikian upaya memformulasikan nilai keagamaan dalam kurikulum merupakan salah satu kendala dalam kurikulum prodi di lingkungan PTAI, terlebih pada prodi-prodi "umum" di beberapa UIN dan IAIN. "Keislaman", baik tersirat maupun tersurat dalam visi, misi, dan tujuan, belum diturunkan pada standar yang terukur. Karenanya, kelemahan ini menyebabkannya menjadi tidak jelas ketika diturunkan ke dalam Mata Kuliah, Proses Pembelajaran, dan sistem evaluasi. Perlu ditekankan kembali bahwa dalam usaha menurunkan visi, misi, dan tujuan prodi ke dalam mata kuliah dan seterusnya, umumnya kesalahan yang terjadi adalah terlewatnya proses perumusan substansi yang menjadi dasar untuk perumusan nama mata kuliah, sks, metode, sistem evaluasi, dll.

Jika kita membagi anasir pendidikan pada tiga ranah yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, maka seharusnyalah upaya memasukkan nilai-nilai keislaman pun harus meliputi tiga ranah tersebut. Kenyataaannya kurikulum prodi di lingkungan PTAI lebih meneknakan aspek kognitif (pengetahuan) keislaman, dibanding dengan ranah lainnya. Hal ini tercermin dari mahasiswa dan alumni PTAI yang sangat fasih berbicara dan berwacana mengenai "Islam" tetapi cukup "kering" pada tingkat penghayatan-sikap hidup dan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan tersebut dalam perilaku keseharian. Indikator hal ini tercermin dari sistem eveluasi yang lebih menekankan pada evaluasi kognitif dari output kompetensi mata kuliah atau substansi keagaamn dari kurikulum prodi tersebut. Selain itu, implementasi kurikulum yang menyangkut pembelajaran) ke-Islaman yang selama ini diterapkan seringkali berkutat pada persoalan norma dan kesalehan (ritual individual), dan jarang menyentuh pada persoalan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan. Hal ini menye-

babkan para mahasiswa dan alumni prodi-prodi di lingkungan PTAI gagap dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan atau gagap membaca peluang dengan perspektif keilmuan yang dipelajarinya.

Oleh karena itu, beberapa kelemahan dalam sistem kurikulum prodi yang menyangkut substansi keislaman dalam kurikulum prodi di lingkungan PTAI harus kembali menjadi pemikiran kita bersama dan harus dirumuskan secara komprehensif supaya subtannsi keagamaan dalam kurikulum keagamaan dapat dimplementasikan secara terukur, efektif, efisien, integral, dan komprehensif. Sebagai sebuah substansi, nilai-nilai keislaman seharusnya muncul dalam kurikulum inti dan kurikulum pendukung.

Pengemasan Substansi Kajian ke dalam Mata Kuliah. Penempatan sejumlah substansi kajian ke dalam suatu mata kuliah dilakukan dengan mempertimbangkan faktor: 1) homogenitas yang memungkinkan berbagai substansi tersebut dinilai sejenis dan saling berkaitan; dan 2) faktor kelaikan/keterlaksanaan, yang mencakup isi suatu matakuliah tidak terlalu banyak sehingga melampaui bobot maksimum sks yang berlaku. Ibrahim (2005: 11) menyebutkan bahwa terdapat beberapa alternatif yang dapat ditempuh dalam proses pengemasan substansi kajian dari kurikulum inti dan komponen institusional ke dalam mata kuliah.

Mata Kuliah A	**Mata Kuliah B**	
Substansi keislamaman menjadi dasar dari substansi Kajian dari: • Kurikulum inti • Komponen institusional	Substansi keislamaman menjadi dasar dari substansi Kajian dari: • Kurikulum inti • Komponen institusional	dst

Pertama, setiap mata kuliah mengandung substansi keislaman yang menjadi ruh kajian dari kurikulum inti maupun komponen institusional yang dikemas dalam mata kuliah yang terintegrasi.

Kedua, substansi keislaman menjadi bagian dari kajian dari kurkulum inti dan komponen institusional yang dikemas dalam mata-mata kuliah yang terpisah:

Mata Kuliah A	**Mata Kuliah B**	
Substansi keislamaman menjadi dasar dari substansi Kajian dari: • Kurikulum inti	Substansi keislamaman menjadi dasar dari substansi Kajian dari: • Komponen institusional	dst

Ketiga, kombinasi anlternatif pertama dan kedua, di mana sebagian mata kuliah berisi substansi kajian dari kurikulum inti dan komponen institusional sedangkan sebagian mata kuliah lagi berisi substansi kajian dari kurikulum inti atau komponen institusional:

Mata Kuliah A	**Mata Kuliah A**	**Mata Kuliah B**	dst
Substansi keislamaman menjadi dasar dari substansi Kajian dari: • Kurikulum inti • Komponen institusional	Substansi keislamaman menjadi dasar dari substansi Kajian dari: • Kurikulum inti	Substansi keislamaman menjadi dasar dari substansi Kajian dari: • Komponen institusional	

Dalam tingkat implementasinya, secara sederhana formulasi substansi keislaman dapat muncul secara integratif dalam tiga bentuk:

1. Muncul dalam mata kuliah tersendiri, seperti Pengantar Studi Islam, al-Qur'an/Tafsir, Hadits/Ulum al-hadits, Fiqh/Ushl al-Fiqh, Tauhid/ilm al-Kalam, Akhlaq/Tasawuf, Sejarah Peradaban Islam, dan sejenisnya.
2. Menjadi tema-tema keislaman sebagai bagian dari silabus yang diajarkan dalam mata kuliah yang secara eksplisit tidak berlabel ke-Islaman. Misalnya memasukkan tema keislaman dalam MK bahasa Inggris, Matematika, Biologi, sosiologi, antropologi, fisika, dan sejenisnya. Tentunya pemilihan tema ini disesuaikan dengan gradasi kesulitan dari mata kuliah yang bersangkutan.
3. Memperkaya setiap tema kajian dalam silabus dengan perspektif keislaman. Misalnya, ketika dosen menerangkan tema "*Our Body*" dalam mata kuliah bahasa Inggris, biologi, dan fisika, dosen tersebut menambahkannya dengan memasukkan tata nilai keislaman dengan menyatakan "Tuhan telah menciptakan susunan tubuhn manusia dengan sangat sempurna, oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Tuhan dengan cara memelihara tubuh ini dan memanfaatkan untuk diri sendiri dan orang banyak sesuai dengan tuntunan dari Tuhan sendiri"

Namun perlu ditegaskan kembali bahwa evaluasi yang perlu dibuat adalah evaluasi pembelajaran yang *integrated* pula yang meliputi aspek kognitif, apektif, dan psikomotor. Selain instrumen evaluasi lisan dan tulisan, setiap dosen dan pengelola prodi harus pula menekankan pada aspek evaluasi sikap.

E. KKNI sebagai Upaya Penegasan KBK

Kita masih ingat dengan upaya pengarusutamaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang dilakukan oleh Pemerintah melalui

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Aturan tersebut menyatakan bahwa kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi (KBK). Pernyataan ini telah menegaskan kembali Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, serta Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Implementasi KBK seharusnya telah terlaksana di seluruh perguruan tinggi mulai akhir tahun 2002. Namun pada kenyataannya belum seluruh perguruan tinggi telah menerapkan KBK sesuai dengan dua Kepmendiknas di atas karena berbagai kendala antara lain masih beragamnya pemahaman tentang makna KBK serta implementasinya dalam pembelajaran.

Dalam upaya melakukan kualifikasi terhadap lulusan perguruan tinggi di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Lampirannya yang menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional. Terbitnya Perpres Nomor 08 tahun 2012 dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah berdampak pada kurikulum dan pengelolaannya di setiap program. Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Secara ringkas KKNI terdiri dari sembilan level kualifikasi akademik SDM Indonesia.

1. Isi KKNI

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikann dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkmmait dengan sistem pen-

didikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang bermutu dan produktif.

Gambar 18: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

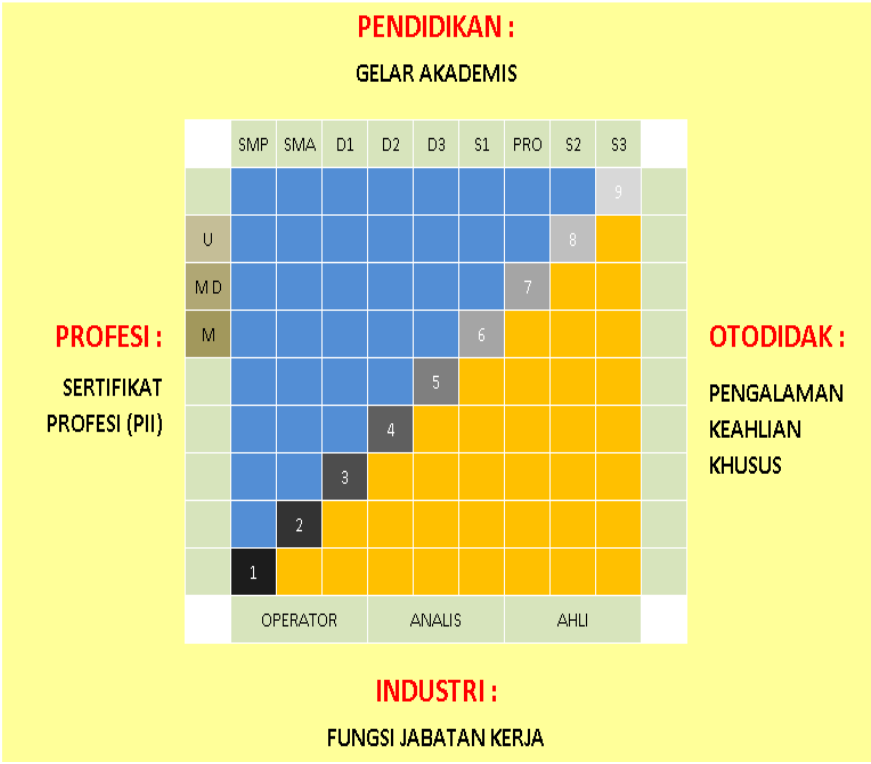

KKNI merupakan sistem yang berdiri sendiri dan merupakan jembatan antara sektor pendidikan dan pelatihan untuk membentuk SDM nasional berkualitas dan bersertifikat melalui skema pendidikan formal, non formal, in formal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran

yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. KKNI terdiri dari sembilan jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifiaksi satu sebagai kualifiaksi terendah hingga kualifikasi sembilan sebagai kualifikasi tertinggi.

Dengan adanya KKNI ini diharapkan akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata Ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, non formal, atau in formal) yang akuntanbel dan transparan.

2. Langkah-langkah Pengembangan Kurikulum

Menurut Sukmadinata (2004: 5) secara umum, langkah-langkah umum pengembangan kurikulum berbasis KKNI sebenarnya tidak berbeda dengan KSA, KBI, dan KBK. Langkah-langkah pengembangan kurikulum tersebut meliputi: a) identifikasi kebutuhan, b) analisis dan pengukuran kebutuhan, c) penyusunan desain kurikulum, d) validasi kurikulum (ujicoba dan penyempurnaan), e) implementasi kurikulum, dan f) Evaluasi kurikulum. Sedangkan Ibrahim (2005: 8) mengemukakan langkah-langkah pengembangan kurikulum sebagai berikut; a) analisis kebutuhan, b) penyusunan draft naskah kurikulum inti, c) reviu dan validasi, d) finalisasi, dan e) sosialisasi.

Pelaksanaan KKNI melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Penetapan Profil Kelulusan.
2. Merumuskan *Learning Outcomes* (LO).
3. Merumuskan Kompetensi Bahan Kajian.
4. Pemetaan LO Bahan Kajian.
5. Pengemasan Matakuliah.
6. Penyusunan Kerangka kurikulum.
7. Penyusuan Rencana Perkuliahan.

Kompetensi adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya. Capaian Pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.

Gambar 19: Empa Unsur Deskripsi KKNI

Untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruaan tinggi. Rambu-rambu yang harus dipenuhi di tiap jenjang perlu dapat membedakan:

1) *Learning Outcomes.*
2) Jumlah sks.
3) Waktu studi minimum.

4) Mata Kuliah Wajib: untuk mencapai hasil pembelajaran dengan kompetensi umum.
5) Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.
6) Akuntabilitas asesmen.
7) Perlunya Diploma Supplement (surat keterangan pelengkap ijazah dan transkrip).

Setiap sektor dan jenjang pada KKNI memiliki deskriptor masing-masing. Deskriptor pada KKNI terdiri atas dua bagian yaitu deskripsi umum dan deskripsi spesifik. Deskripsi umum mendeskripsikan karakter, kepribadiaan, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia dan berlaku pada setiap jenjang.

Sedangkan deskripsi spesifik mendeskripsikan cakupan keilmuan (*science*), pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*know-how*) dan keterampilan (*skill*) yang dikuasai seseorang bergantung pada jenjangnya.

3. KKNI Untuk Program Sarjana

Deskripsi Umum

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya bangsa Indonesia, implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi mencakup proses yang menumbuhkembangkan afeksi sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta Tanah Air serta mendukung perdamaian dunia.
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/ temuan orisinal orang lain.

Kualifikasi Jenjang Sarjana (Level 6)

1. Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
2. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara secara mandiri dan kelompok.
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

F. Penutup

Kurikulum setiap prodi haruslah dinamis sebagai upaya merespon perubahan dan tuntutan keilmuan, profesionalisme, dan pasar (*stakeholders*). Dengan demikian, dinamis merupakan salah satu nilai intrinsik dari kurikulum selain beroreintasi ke masa depan, efisien, efektif, *integrated*, dan komprehensif. *Output* dari implementasi kurikulum pada akhirnya terukur dari alumni prodi tersebut, dan sangat terukur oleh kuantitas lulusan yang berprofesi (bekerja), baik disekot formal maupun non formal, sesuai dengan kompetensi (utama, pendukung, dan lainnya) sebagaimana dirumuskan oleh kurikulum prodi tersebut.

Selebihnya, formulasi nilai-nilai keislaman dalam strukktur dan implementasi kurikulum haruslah dievaluasi secara kontinu, supaya kompetensi pada bidang ini menjadi identitas atau ciri pembeda yang benar-benar terwujud.

Daftar Pustaka

Finch, Cyrtis R. & Crunkilton, John R. 1988. *Curriculum Development in Vocational and Technical Education: Planning, Content, and Implementation.* Boston: Allyn and Bacon.

Hamalik, Oemar Hamalik. 2000. *Evaluasi Kurikulum,* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ibrahim, R. 2005. *Kurikulum dan Pembelajaran,* Jakarta: Rajawali.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam.

Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj.II/114/2005 tentang kebijakan akademik dan kelembagaan tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi.

Mansyur, Agus Salim. 2007. "Pengembangan Kurikulum Berbasis Karakter: Konsepsi dan Implementasinya," *Jurnal Pendidikan Universitas Garut,* Vol. 1, No. 1, 1-9.

Olivia, P.F. 1997. *Developing the Curriculum,* New York: Longman.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Pusat Kurikulum Nasional Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi,* Jakarta: Depdiknas.

Sihono, Tarsisus. 1997. "Implementasi Konsep Pendidikan Berdasarkan Kompetensi pada Pengembangan Kurikulum Pelatihan Pesawat Udara dan Dampaknya terhadap Hasil yang Dicapai," *Tesis* PPs IKIP Bandung.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2004. *Pengembangan Kurikulum,* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Wittig, Arno F. 1983. *Psychology of Learning*, London: McGraw-Hill Education Europe.

STRATEGI PENERAPAN SPIRIT KEILMUAN WAHYU MEMANDU ILMU DALAM ILMU KIMIA

Dede Suhendar

A. Pendahuluan

Integrasi keilmuan dan penerapannya saat ini bukan lagi merupakan hal yang asing, bahkan diperlukan untuk menjawab kompleksitas permasalahan yang timbul dan tidak dapat lagi ditangani secara eksklusif menurut disiplin ilmu dan penerapannya. Lembaga-lembaga studi dengan konsentrasi studi yang interdisiplin mulai bermunculan dengan pesatnya di negara-negara maju dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, termasuk di Indonesia. Satu contoh yang paling nyata adalah munculnya kajian ilmu sosial dan budaya dalam studi masalah lingkungan.

Berbicara tentang hubungan dan integrasi antar ilmu bukan merupakan hal yang perlu atau tidak, dapat dilakukan atau tidak, namun sangat bergantung pada pengakuan formal. Pada dasarnya antar ilmu dan penerapannya memiliki irisan dan integrasi sejak awal ilmu itu muncul karena seiring dengan kebutuhan manusia, perubahan dan perkembangan budayanya. Dengan demikian, situasi dan kepentingan politik maupun ekonomi juga ikut mewarnai kemunculan dan perkembangan ilmu. Karakeristik alam dan sumber dayanya juga sangat berpengaruh pada karakteristik dominasi cabang ilmu yang dikaji dan diterapkannya. Demikian juga fondasi keilmuan sangat dipengaruhi paham ideologi dan politik.

Sains dianggap memiliki nilai eksak dan netral (bebas nilai). Renaissance yang pada awalnya juga dapat dianggap sebagai gerakan

pencerahan dan pembebasan, salah satunya dari belenggu dogma agama Katolik, pada akhirnya melahirkan paham materialisme yang melahirkan ideologi-ideologi dunia dan sains modern saat ini. Secara substansi, sains modern memang netral, namun karena kemunculannya memiliki latar belakang penolakan terhadap agama Katolik yang menjadi basis agama masyarakat Eropa, terutama kaum bangsawan karena kekuasaannya didukung oleh gereja, pada akhirnya terdapat pakem sains dan keilmiahan harus terbebas dari semua nilai-nilai ketuhanan tanpa kecuali, termasuk dari nilai-nilai keislaman. Kontradiktif dengan yang terjadi pada masa keemasan umat Islam, sains lahir dari buah-buah pikiran dan eksperimen-eksperimen para saintis yang tak diragukan keislamannya. Melalui karya-karya merekalah muncul sains modern di Eropa.

Pakem sains harus bebas dari nilai-nilai ketuhanan sangat jelas terjadi. Integrasi keilmuan (khususnya sains) ke dalam ajaran Islam tidak mudah dilakukan, buktinya antara sains dan ilmu-ilmu keislaman tidak memiliki saling keterkaitan hubungan dalam kajiannya karena keduanya merupakan entitas yang terpisah, baik dalam tataran akademis maupun riset, jika terjadi hanya bersifat lokal dan terbatas. Khususnya dalam ilmu kimia, usaha-usaha riil yang bersifat lokal dan terbatas dapat dilihat dari usaha Internasional Islamic University (IIU), Malaysia, yang memasukkan kurikulum mata kuliah kehalalan pangan di program studi strata satu kimianya.

Saat ini, sulit dilakukan harus dari mana upaya integrasi itu dalam bentuk aksi nyata sesuai dengan karakteristik sains yang menekankan empirisme. Jika dipandang dari aspek kebutuhan, manfaat, dan keuntungan komersial, nampak terlihat upaya IIU sejalan dengan kepentingan ekspansi Malaysia menjadi pemeran utama dalam industri pangan halal dunia. Jika dipandang lebih lanjut, inisiasi IIU nampak realistis dan terukur, mengingat masalah kehalalan pangan sangat jelas dalil-dalilnya dan sains kimia sangat realistis dijadikan alat untuk menginterpretasikannya, demikian juga aspek

keuntungan komersialnya karena tingkat kesadaran dan tuntutan masyarakat muslim di berbagai belahan dunia akan keperluan produk-produk pangan halal. Selain itu, masalah "kehalalan pangan" dalam banyak hal memiliki kesetaraan makna dalam hal cara memperoleh, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan produk pangan dengan masalah "keamanan pangan" yang sudah lebih dulu populer dalam ilmu pangan. Dengan demikian, sebenarnya aksi nyata upaya integrasi dapat dimulai dengan mengambil langsung beberapa topik khusus, seperti masalah taharah dan obat-obatan.

Dalam masalah taharah, kriteria nilai ambang batas polutan bagi lingkungan, khususnya tanah dan air. Najis dalam ilmu fikih memiliki makna riil dalam ilmu lingkungan sebagai polutan, demikian juga syarat air dan tanah untuk taharah memiliki makna yang sangat dekat dengan kriteria terjadinya pencemaran dalam ilmu lingkungan. Demikian juga dalam banyak hadits dapat ditemukan makna riil benda-benda yang disebut sebagai obat, seperti kurma, madu, dan zaitun. Dalam bidang ilmu kimia organik dan biokimia, metabolit primer dan sekunder dari sumber alam banyak ditemukan sebagai obat, kimiawan dapat mengisolasi zat-zat aktif obat yang terdapat dalam sumber-sumber alami tersebut, mempelajari struktur, mensintesis, dan memodifikasinya.

Bagaimanapun juga, perlu mempertimbangkan keberlangsungan riset dengan mempertautkan pada tema-tema khusus yang menjadi isu nasional yang perlu dipecahkan, sehingga memiliki peluang lebih besar dalam pengembangannya karena dapat memanfaatkan kompetisi proposal-proposal riset yang didanai oleh pemerintah ataupun swasta. Hal penting yang tidak boleh dilewatkan adalah publikasi di jurnal internasional yang terindeks lembaga yang diakui. Dana-dana penelitian perlu dipikirkan dialokasikan secara serius ke publikasi internasional.

B. Pembahasan

Integrasi sains ke dalam ajaran Islam tidak pernah lepas dari sikap kontra dari kaum muslimin sendiri. Berbagai alasan dari kalangan akademisi, praktisi, maupun umum dapat mengarahkan penyebab utamanya tidak lain adalah begitu mendalamnya pengajaran sains yang eksklusif dan superior. Saat ini yang tidak pernah sedikit pun membahas agama, sementara buku-buku agama dipaksa untuk memasukkan sains dalam kaitan dengan ayat-ayat kauniyah. Sains saat ini diterima kaum muslimin adalah ilmu yang eksklusif dan superior, ilmu yang khusus berdiri sendiri dan tidak pernah membahas ilmu-ilmu lainnya, termasuk ilmu-ilmu agama, sementara ilmu-ilmu lainnya tidak akan pernah melewatkan pembahasan sains, secara langsung maupun tidak.

Faktor utama yang menentukan dapat atau tidak berjalannya kajian dan pengembangan sains berbasis wahyu memandu ilmu (WMI) adalah pelaku utamanya sendiri, yakni para saintis muslim, untuk mulai mengikis pandangan materialisme dengan tauhid, memandang sains sebagai sunnatullah, yang tidak akan pernah bertentangan dengan Quran dan Hadits sahih. Konsep sains berbasis WMI setidaknya menjadikan Quran dan Hadits sahih sebagai koridor kajian dan pengembangan sains yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil dari keduanya. Ayat-ayat kauniyah banyak bertebaran dalam Quran, baik yang sudah dipahami secara umum maupun yang masih banyak interpretasinya. Dalam hadits, lebih banyak lagi keterangan-keterangan sifat zat yang memiliki potensi untuk diselidiki maksud-maksudnya secara empirik, dan memiliki potensi aplikasinya.

Dalam tataran metode, antara pandangan materialisme dengan tauhid tidak perlu berbeda jauh, hal-hal yang secara syariat dilarang mesti diganti atau dicarikan alternatifnya yang tetap dapat diterima oleh cara pandang materialisme. Dengan demikian penerapan konsep WMI berpotensi mengembangkan metode dalam suatu tema

khusus. Contoh sederhana misalnya dalam riset-riset yang melibatkan sampel yang memiliki status najis dan haram, diperlukan prosedur tambahan, analog dengan penanganan bahan-bahan berbahaya yang sudah dikenal dalam ilmu kimia yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium.

Gambar 20: Ruang Lingkup Riset Kimia Berbasis Wahyu Memandu Ilmu Dikaitkan dengan Status Hukum Benda menurut Ilmu Fikih

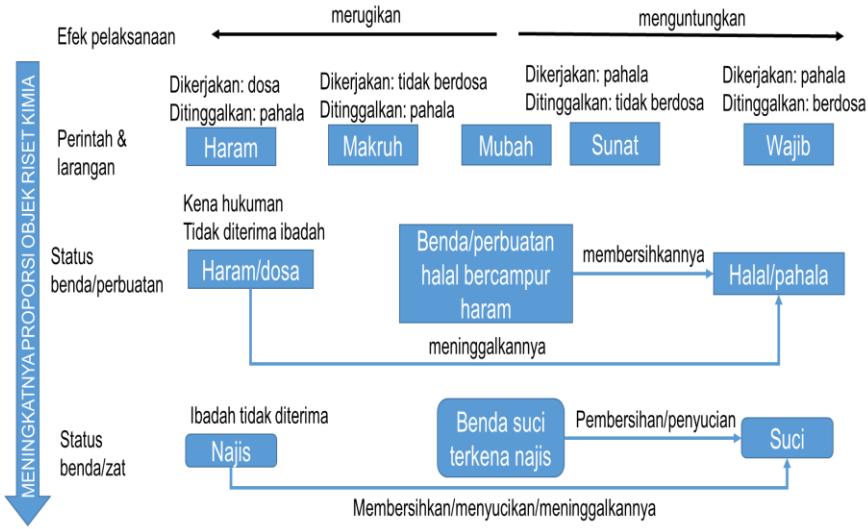

Dalam ruang lingkup penelitian, topik-topik riset yang dapat diangkat adalah yang berkenaan dengan sifat-sifat benda dalam kimia dan status hukum benda itu menurut ilmu fikih. Perlu diketahui bahwa sifat dan status hukum merupakan hal yang bersifat gradasi, dari mulai yang bersifat empirik, semi empirik, sampai non empirik, analog dengan konsep batas keamanan bahan kimia yang efeknya bersifat skala. Pemahaman gradasi dan skala ini dapat dipahami melalui diagram yang ditunjukkan pada Gambar 1. Perlu juga

dipahami bahwa tingkat bahaya bersifat relatif dan membutuhkan spesifikasi khusus, misalnya arsen (As) dinyatakan sebagai polutan dan tidak ada lembaga ilmiah yang menyatakan secara tegas ambang batasnya, namun kenyataannya dalam tubuh manusia dan sebagian besar tumbuhan mengandung arsen. Dengan dosis dan keadaan kimiawi tertentu, arsen justru menjadi obat.

Sebenarnya, dalam Quran maupun Hadits masih banyak keterangan tentang benda, bukan hanya yang terlibat analoginya dengan masalah pangan, sanitasi dan kimia lingkungan, namun juga sains lainnya, seperti misalnya fisika, biologi, dan geologi. Konsep ruang lingkup di atas lebih realistis sebagai dasar inisiasi pengembangan ke sains lainnya, ilmu-ilmu interdisiplin sains, dan ilmu rekayasa (teknik). Mengapa demikian? Karena semua aktivitas manusia berkaitan dengan benda, ada yang dilarang (berbahaya), dibolehkan, dan diwajibkan (keharusan). Status halal dan haram akan langsung berkaitan dengan ilmu pangan, ilmu kesehatan, dan ilmu lingkungan, tiga bidang ilmu yang langsung menjadi kebutuhan primer manusia. Ruang lingkup riset yang diperlihatkan secara diagram pada Gambar 1 menitikberatkan pada target penjelasan efek baik dan buruk penggunaan benda-benda dan upaya-upaya pengembangan metode deteksi benda-benda dalam tingkatan molekuler.

Jika ruang lingkup seperti yang diperlihatkan pada Gambar 10 akan diperluas, maka dapat dilihat terdapat empat kemungkinan riset empirik berbasis WMI, seperti yang diperlihatkan pada gambar di atas. Pertimbangan ini menggunakan cara pandang superioritas Quran dan Hadits dibandingkan sains, dan sains merupakan bagian dari sunnatullah yang mustahil bertentangan dengan keduanya, dengan syarat adanya kehati-hatian dalam penyimpulan, tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat, dan adanya pengakuan akan kelemahan manusia sebagai makhluk sehingga memungkinkan terjadinya perbaikan teori-teori sains sebelumnya. Para ahli sudah lebih dulu memunculkan ayat-ayat kauniyah dan bukti kebenarannya

dalam Quran, namun masih terbatas pada ilmu bumi, fisika, biologi, dan astronomi, namun kimia seakan terlewat. Maurice Bucaille cukup banyak memberikan bukti-bukti tafsiran yang konkret akan superioritas Quran ini. Cukup banyak pengarang yang memiliki reputasi baik dan memiliki gelar akademik yang tidak diragukan dalam membahasnya, dari dalam maupun luar negeri, namun sejauh itu pula tidak ada keberanian memunculkan dan meramunya dalam ruang akademik kurikulum dan riset.

Gambar 21: Empat Jenis Benda atau Fenomenanya
dari Keterangan dalam al-Qur'an dan Hadits Sahih

Program Studi (Prodi) Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, saat ini memiliki staf dosen tetap yang masih sedikit, namun secara klasik sudah mewakili bidang-bidang konsentrasi ilmu kimia, yakni Ki-

mia Anorganik (dua orang), Kimia Organik (dua orang), Biokimia (satu orang), Kimia Analitik (satu orang), dan Kimia Fisik (dua orang). *Roadmap* risetnya memusatkan perhatian pada bidang pangan, energi, dan lingkungan. Walaupun sudah memiliki rancangan *roadmap* riset, Prodi Kimia belum membentuk kelompok riset berdasarkan fokus keluaran riset-risetnya itu. Berdasarkan pemetaan riset-riset yang telah dilakukan dari sejak berdirnya prodi ini, terdapat hasil-hasil riset yang menonjol yang mengarah pada aplikasi bidang pangan, lingkungan, dan yang memiliki kedekatan langsung dengan riset yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Penelitian yang mengarah pada penerapan bidang energi yang sudah disepakati dari awal berdirinya prodi ini justru masih banyak terkendala dengan SDM dan fasilitasnya, sementara yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman justru bertahan dan makin berkembang. Dari perkembangan ini akhirnya Prodi Kimia memasukkannya menjadi fokus riset baru, dinamai Kimia Religi.

Fokus riset baru Kimia Religi yang ada di Prodi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi (FST) cenderung masih berupa upaya mewadahi jenis riset dan belum dirumuskan dan ditetapkan konsepnya. Jika dilihat dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan di Prodi ini pada 2010-2015, baik individu dosen maupun mahasiswa (skripsi), terdapat kecenderungan riset kimia religi ini mengarah pada empat jenis/fenomena/karakteristik benda seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Upaya penelitian-penelitian yang bernuansa religi di atas cenderung termotivasi dengan label Islam dari universitas sendiri. Walaupun penelitian-penelitian yang telah dilakukan masih menyandarkan kemampuan pendanaan yang sangat terbatas, dari hasil penelitian-penelitian tersebut sudah mulai tergambarkan secara umum adanya irisan nilai-nilai empirik yang ada dalam empat kelompok benda tersebut. Munculnya gagasan fokus kajian fenomena benda-benda yang belum banyak dipahami secara ilmiah muncul dalam hasil penelitian parameter fisika dan kimia air Zamzam. Ber-

dasarkan standar kualitas air minum sulit untuk dipahami bahwa air Zamzam merupakan air yang bersih dan sehat, namun uji terhadap penumbuhan benih kacang menunjukkan air Zamzam memiliki keunggulan dalam kecepatan tumbuhnya. Jika penelitian ini terus dilanjutkan maka sangat memungkinkan dapat ditemukan teori baru.

Penelitian-penelitian yang bersifat integrasi dengan nilai-nilai keislaman ini belum banyak dipahami dan dilakukan oleh mayoritas dosen Prodi Kimia, namun demikian jumlah penelitiannya cukup signifikan (Tabel 1). Satu orang dosen sangat fokus dalam penelitian terintegrasi ini namun belum dapat menularkan konsep-konsepnya ke dosen-dosen lainnya. Permasalahan yang paling utama muncul adalah menganggap sulitnya mendapatkan referensi dan adanya kekhawatiran cenderung hanya untuk mencocok-cocokkan dalil-dalil dengan hasil-hasil eksperimen. Penempuhan kerja sama pembimbingan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dan skripsi dengan lembaga-lembaga penelitian lain, seperti Pusat Survei Geologi dan Pusat Geologi Lingkungan, secara perlahan mampu menghapus pandangan yang kurang baik terhadap upaya riset terintegrasi ini. Pada akhirnya, langkah lebih lanjut perlu diupayakan untuk lebih mendekatkan lagi dosen-dosen Prodi Kimia ke dalam pemahaman dan konsep penelitian terintegrasi dalam basis WMI ini.

Beberapa upaya, baik secara individu, atas prakarsa institusi fakultas dan jurusan telah dilakukan sepanjang 2013-2015 terkait program pengembangan bidang ilmu dalam basis WMI di Prodi Kimia, meliputi sebagai berikut:

1. Penguatan Teori, terkait hasil penelitian air Zamzam dan tanah dalam model penyucian wadah yang terkena air liur anjing, dilakukan dua individu mahasiswa yang melakukan penelitian tersebut untuk skripsi. Selain itu, kajian dalam ilmu kimia yang kurang selaras dengan Quran dan Hadits memerlukan upaya khusus untuk merekonstrusinya, salah satunya yang telah berhasil adalah tentang konsep kestabilan inti atom.

Tabel 8: Contoh Ragam dan Klasifikasi Riset
Berbasis Wahyu Memandu Ilmu di Prodi Kimia

Tridharma	Klasifikasi	Tema	Riset/Subtema	Tujuan
Penelitian	Kimia Benda	Air Zamzam	1. Parameter fisika dan kimia 2. Pengaruh thdp pertumbuhan 3. Sifat koloigatif 4. Kapasitas buffer 5. Peniruan utk pupuk cair buatan 6. Pengatuh thdp reminiralisasi	Pokok pemahaman kekhasan air Zamzam dan aplikasinya
		Air wudhu	Pengaruh volume dan aerasi	Pokok pemahaman fiqh
		Air hujan	Parameter fisika dan kimia air hujan	Pemahaman air hujan
		Debu tanah thaharah	1. Interaksi dengan saliva anjing 2. Tafsir tanah yang bersih 3. Penyempurnaan konsepsi kimiawi tanah	Pokok pemahaman fiqh tanah dan aplikasinya
		Tulang, batu, besi	1. Pemanfaatan limbah tulang halal 2. Hubungan mineralisasi silikon dan besi	Aplikasi kimia untuk: (1) material dan bahan kimia, (2) arkeologi
		Darah hijamah	1. Kadar kimiawi besi 2. Kandungan kadar dan logam berat	Aplikasi kimia untuk memahami manfaat hijamah
	Rekonstruksi kajian kimia	Konsep kestabilan inti atom	1. Kajian energi ikat inti vs massa inti 2. Kajian tabel periodik dan kelimpahan unsur	Pengayaan bahan ajar
		Karakteristik tanah	1. Kajian Si/Al vs Si-Al dalam tanah 2. Kajian material tanah	Rumus yang lebih akurat dan presisi
		Hukum kekekalan massa	Peninjauan ulang penggunaan istilah kekekalan	Mendapat istilah yang lebih tepat
	Teknologi tepat guna	Keramik berpori	Pengolahan air wudhu	Alat untuk mengolah bekas air wudhu
Kurikulum	Matakuliah WMI	Kimia fiqh	Penelaahan kimia perihal praktek ilmu fiqh	Buku daras hasil kajian terakhir
		Kimia ketahanan dan kehalalan pangan	Penelaahan kimia dalam pangan halal	Buku daras hasil kajian terakhir
Pengabdian Masyarakat	Penerapan hasil penelitian	Teknologi tepat guna	Pengolahan air wudhu	Mengolah air wudhu untuk MCK
		Pengobatan	Pelatihan hijamah dan penjelasan ilmiahnya	Pengobatan alternatif

2. Dalam hal penguatan kelembagaan, revisi kurikulum pada 2016 telah memasukkan dua mata kuliah "Keamanan dan Kehalalan Pangan" dan "Kimia Fikih" yang akan diberlakukan untuk TA 2019/2020 (Kurikulum 2016), dengan tim *teaching*; kelompok riset Kimia Religi sudah disepakati menjadi kelompok riset tersendiri di luar pengelompokan tren riset ilmu kimia. Prodi Kimia juga telah mengupayakan penerbitan jurnal dengan nama "al-Kimiya" yang memberikan ruang untuk publikasi riset kimia, termasuk hasil-hasil riset maupun pemikiran ilmu kimia yang terintegrasi nilai-nilai keislaman.
3. Pengembangan jaringan, dengan inisiasi dari kerja sama pembimbingan yang memiliki potensi kerja sama instansi dalam waktu dekat, terutama dengan Pusat Survei Geologi. Penelitian-penelitian yang telah berjalan adalah terkait dengan makna batu dan besi yang dalam Q.S. 17: 50, yang memiliki kaitan dengan kepentingan keilmuan geologi dan fosil.
4. Pengembangan penelitian, meliputi diseminasi tidak lepas dari peranan Lemlit/LP2M dalam memfasilitasi pendanaan dan lembaga fakultas yang memfasilitasi dilakukannya diseminasi terbatas hasil-hasil penelitian di FST. Presentasi yang disampaikan dalam kesempatan diseminasi ini masih terkait dengan masalah taharah dengan tanah.

Dari keempat usaha pengembangan di atas masih terasa belum optimal, kolaborasi riset yang riil dan target luaran publikasi yang dapat diakui reputasinya masih perlu terus diupayakan. Tanpa dapat meloloskan menjadi publikasi internasional khusus keilmuan sains kimia maupun interdisiplin sains, konsepsi kimia atau sains berbasis WMI masih merupakan impian mendapatkan pengakuan. Publikasi harus dipilah menurut segmentasi kajian, sains murni dan multi/interdisiplin dengan ilmu-ilmu keagamaan. Hasil-hasil riset ilmu kimia yang terintegrasi dan berbasis WMI yang didanai dengan cukup

perlu didorong memiliki luaran minimal dua publikasi, secara parsial keilmuan sains murni di jurnal yang terindeks lembaga pengindeks bereputasi internasional dan ringkasan hasil penelitian yang sangat memunculkan gagasan keislamannya perlu dipublikasikan di jurnal interdisiplin ilmu yang memungkinkan tema penelitian seperti ini dimuat. Anggaran riset perlu secara khusus dialokasikan ke dalam upaya-upaya publikasi internasional, demikian juga LP2M perlu membantu dalam tahap penulisannya, termasuk memfasilitasi proses *proofreading*-nya.

C. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kajian ilmu kimia berbasis WMI memiliki potensi untuk dikembangkan, bahkan dapat menginisiasi untuk keilmuan lainnya di FST dan memotivasi memunculkan gagasan riset yang paling mungkin dikerjakan. Strategi yang perlu diterapkan adalah mewacanakan sains itu memiliki fondasi materialisme yang perlu dikikis, kemudian memikirkan hal yang dapat diteliti dari ajaran Islam dengan yang memiliki kaitan paling dekat dengan konsentrasi bidang ilmunya.

Bagaimana pun perlu dipikirkan hal-hal yang dapat menggairahkan dan mendukung riset-riset berbasis WMI. Riset menjadi *core* dari Tri Darma PT merupakan ciri sebuah PT yang menjalankan visi *research university*. Dari risetlah pengaruhnya dapat menjalar ke dalam kurikulum maupun program pengabdian kepada masyarakat. Kepemimpinan dan kebijakan politis dapat berubah setiap saat, maka perlu mengantisipasi berhentinya semangat WMI ini dengan membentuk keorganisasian yang kuat tingkat universitas yang memiliki payung hukum. Jika masalah-masalah kajian lain mampu dimunculkan keorganisasiannya menjadi pusat-pusat penelitian, maka sebenarnya pusat penelitian semacam konsep WMI ini terlihat cukup terlambat dipikirkan. Kekhasan dan jati diri UIN SGD sebagai

lembaga pendididikan tinggi dan riset akan lebih dihormati lagi jika terdapat representasi riset-riset yang melekat dengan nilai-nilai keislaman.

Berdasarkan kesimpulan dan saran di atas, direkomendasikan untuk membentuk lembaga yang setingkat dengan pusat studi atau pusat penelitian tingkat universitas yang mewadahi, memfasilitasi, dan membuat program-program yang mendukung riset-riset berbasis WMI, disertai hak dan kewajibannya. Jika lembaga ini terbentuk dan riset-risetnya bermanfaat terdapat banyak peluang dilirik oleh lembaga-lembaga keislaman modern, baik kerja sama penelitian maupun pemakaian produk-produk risetnya, di dalam maupun luar negeri.

Daftar Pustaka

Bucaille, M., & Pannell, A. D. (n.d.). *The Bible, The Qur'an and Science: The Holy Scriptures Examined in the Light.* (A. D. Pannell, Trans.) Retrieved from http://www.islamicbulletin.org/free_downloads/quran/bible_quran_science.pdf

Iqbal, M. 2007. *Science and Islam.* London: Greenwood Press.

Khalid, N., Ahmad, A., Khalid, S., Ahmed, A., & Irfan, M. 2014. Mineral Composition and Health Functionality of Zamzam Water: A Review. *International Journal of Food Properties, 17* (3), 661-677.

Multazam, Z. S. 2015. Studi Beberapa Parameter Fisika dan Kandungan Kimia Air Zamzam serta Perbandingannya dengan Air Minum dalam Kemasan. *The 4th Indonesian Student Conference on Science and Mathematics*, (p. 22). Bandung.

Ryanitha, A. R. 2015. Studi Pendahuluan Daya Serap Tanah terhadap Saliva Anjing dan Zar Warna Rhodamin B dengan Metode Spektroskopi Sinar Tampak dan Inframerah. *The 4th Indone-*

sian Student Conference on Science and Mathematics, (hal. 20). Bandung.

Suhendar, D. 2016. "Menentukan Kestabilan Nuklida-nuklida Berdasarkan Massa Inti per Nukleon". *Seminar Nasional MIPA 2016* (hal. 167). Jatinganor: FMIPA Unpad.

GLOSARIUM

Afektif adalah berkaitan dengan sikap, perasaan dan nilai.

Analisis SWOT (*Strengths= kekuatan, Weakness= kelemahan, Opportunity= peluang, Threats= tantangan*), merupakan suatu metode analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal organisasi. Faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. Penggunaan analisis SWOT dimaksudkan untuk menentukan posisi satuan pendidikan (perguruan tinggi).

Bauran Pemasaran Jasa Pendidikan (*marketing mix*) adalah unsur-unsur yang sangat penting dan dapat dipadukan sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk memenangkan persaingan. Bauran pemasaran pendidikan terdiri dari 7 P, yaitu *product* (produk); jasa seperti apa yang ditawarkan, *price* (harga); strategi penentuan harganya, *place* (lokasi/tempat); di mana tempat jasa diberikan, *promotion* (promosi); bagaimana promosi dilakukan. Sedangkan unsur 3P adalah *people* (SDM); kualitas, kualifikasi, dan kompetensi yang dimiliki oleh orang yang terlibat dalam pemberian jasa, *physical evidence* (bukti fisik); sarana-prasarana seperti apa yang dimiliki, dan *process;* manajemen layanan pembelajaran yang diberikan.

Beban Kerja Guru adalah kerja guru 1) sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam satu minggu, mencakup kegiatan pokok merencana kan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan (UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 35 ayat (1) dan (2). Beban maksimal dalam

mengorganisasikan proses belajar dan pembelajaran yang bermutu: SD/MI/SDLB 27 jam @ 35 menit, SMP/MTs/SM-PLB 18 jam @ 40 men it, SAM/MIIISMK/MAK/SMALB 18 jam @ 45 menit (Standar Proses)

Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam kapasitas pribadi seseorang sebagai akibat pengolahan atas pengalaman yang diperolehnya dan praktik yang dilakukannya.

Belajar Aktif adalah kegiatan mengolah pengalaman dan atau praktik dengan cara mendengar, membaca, menulis, mendiskusikan, merefleksi rangsangan, dan memecahkan masalah.

Belajar Mandiri adalah kegiatan atas prakarsa sendiri dalam menginternalisasi pengetahuan, sikap dan keterampilan, tanpa tergantung atau mendapat bimbingan langsung dari orang lain.

Budaya Membaca Menulis adalah semua kegiatan yang berkenaan dengan kemampuan berbahasa (mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis). Proses penulisan dilakukan dengan keterlibatan peserta didik dengan tahapan kegiatan: pra penulisan, buram 1, revisi, buram 2, pengecekan tanda baca, dan terakhir publikasi di mana peserta didik menentukan karyanya dimuat di buku kelas, mading, majalah sekolah, atau majalah yang ada di daerah setempat.

Budaya Organisasi merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai organisasi yang dipahami, dijiwai dan dipraktikkan oleh sebuah organisasi sehingga dapat memberikan arti tersendiri dan menjadi dasar aturan berperilaku dalam organisasi.

Continuous Quality Improvement *adalah* proses dimana peningkatan mutu dilakukan secara terus menerus.

Dekonsentrasi adalah pembagian sebagain kewenangan atau tanggungjawab administratif ke tingkat yang lebih rendah di bawah kementerian dan perwakilan pemerintah pusat, penga-

lihan beban kerja dari pejabat pusat ke staf atau kantor di luar ibukota atau pemerintah pusat.

Delegasi adalah pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung berada di bawah pengawasan pemerintah pusat.

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Secara teoritis desentralisasi mempunyai empat bentuk yaitu dekonsentrasi, delegasi, devolusi (pengalihan), dan privatisasi.

Desentralisasi Manajemen Pendidikan adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah untuk membuat keputusan manajemen dan menyusun perencanaan sendiri dalam mengatasi masalah pendidikan dengan mengacu kepada Sistem Pendidikan Nasional.

Devolusi merupakan transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan dan manajemen kepada unit otonomi daerah.

Efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efek atau hasil yang dikehendaki. Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika pekerjaan tersebut mencapai hasil atau tujuan yang telah ditentukan.(*do the right things*-melakukan pekerjaan yang benar).

Efisien adalah suatu pengertian yang menggambarkan perbandingan terbaik antara usaha dengan hasilnya (*do things right*-melakukan pekerjaan dengan benar).

Equalitas (*Equality*) adalah pemerataan dalam memberikan sumber-sumber atau peluang kepada setiap peserta didik atau

lembaga (organisasi, daerah) tanpa membeda-bedakan tingkatan.

Equitas (*Equity*) adalah keadilan dalam mendistribusikan sumber-sumber atau memberikan peluang kepada setiap peserta didik atau lembaga secara proporsional.

ISO (*International Standardization Organization*) adalah organisasi standardisasi internasional non-pemerintah yang beranggotakan badan-badan standardisasi nasional dari beberapa negara. ISO secara teknis dibentuk pada tahun 1987.

Kepemimpinan (*Leadership)* adalah kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasehati, membina, membimbing, melatih, menyuruh, memerintah, melarang, dan bahkan menghukum seluruh sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien.

Kepemimpinan Pendidikan adalah segenap kegiatan dalam usaha mempegaruhi personal di lingkungan pendidikan pada situasi tertentu agar mereka melalui usaha kerjasama, mau bekerja dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Kepemimpinan Transformatif adalah kemampuan seorang pemimpin dalam bekerja dengan dan atau melalui orang lain untuk mentransformasikan secara optimal sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan.

Kepemimpinan Visioner (*Visionary Leadership*) adalah sebuah model atau pola kepemimpinan yang dimaksudkan memberi arti pada kerja dan usaha yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen organisasi dengan cara memberi arahan berdasarkan visi yang dibuat secara jelas.

Klasikal adalah cara mengelola kegiatan belajar dengan sejumlah peserta didik dalam suatu kelas, yang memungkinkan belajar

bersama, berkelompok dan individual

Kognitif adalah berkaitan dengan atau meliputi proses rasional untuk menguasai pengetahuan dan pemahaman konseptual. Periksa taksonomi tujuan belajar kognitif.

Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Kompetensi adalah 1) seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas tugas di bidang pekerjaan tertentu. 2) Keseluruhan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dinyatakan dengan ciri yang dapat diukur.

Kompetensi Dasar (KD) adalah kemampuan minimal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan efektif.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.

Malcolm Baldrige adalah sebuah sistem manajemen kualitas yang diterapkan untuk menjadikan lembaga unggul atau *excellence.* Sistem ini pertama sekali diciptakan oleh *US Congress* pada tahun 1987 dibawah *Public Law 100-107*, sebagai penghormatan kepada *Malcolm Baldridge*, *Commerce Department Secretary*, yang meninggal pada kecelakaan rodeo pada bulan Juli 1987.

Manajemen adalah usaha me-*manage* (mengatur) organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif, efisien, dan

produktif. Efektif berarti mampu mancapai tujuan dengan baik (*doing the right thing*), sedangkan efisien berarti melakukan sesuatu dengan benar (*doing thing right*).

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), terjemahan dari *School Based Management,* adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk meredesain pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang meliputi guru, siswa, kepala sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat.

Manajemen Mutu Terpadu adalah sistem pengelolaan yang berorientasi terhadap mutu layanan kepada pemakai/pelanggan agar dapat member kepuasan (pemakai jasa pendidikan secara internal; peserta didik, dan eksternal adalah masyarakat).

MPMBS/M (Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah/ Madrasah) adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah/madrasah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mutu adalah totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan. Mutu seringkali diartikan sebagai kepuasan pelanggan (*customer satisfaction).*

Pemasaran Pendidikan adalah sebuah proses sosial dan manajerial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan (*creation*) penawaran, pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain dalam bidang pendidikan.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pendidikan Berbasis Masyarakat (*Community-Based Education*) dikenal juga dengan istilah *"community education for development"* merupakan sistem yang memberikan peluang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup.

***Positioning* (Pemosisian)** adalah karakteristik dan pembedaan (differensiasi) produk yang nyata yang memudahkan konsumen untuk membedakan produk jasa antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Posisioning berkaitan dengan bagaimana pemasar mebedakan jasanya dengan pesaing (memilih pesaing). Contoh *positioning* dalam konteks pendidikan tinggi adalah karena banyaknya perguruan tinggi menyebabkan siswa lulusan SMA/MA kebingungan dalam menentukan pilihan jika mereka tidak dapat membedakan satu PT dengan PT lainnya. Oleh karena itulah UGM menyebut dirinya sebagai *research university,* UI dengan *The Word Class University,* UIN Sunan Kalijaga *Integrative University* dan lain-lain.

Privatisasi adalah tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat.

Produktivitas adalah perbandingan antara input dengan output yang mengandung unsur efektivitas dan efisiensi.

Quality Assurance **(Jaminan Mutu)** adalah ketetapan standar, metode dan persyaratan mutu yang dibuat oleh para ahli disertai pula dengan proses pemeriksaan atau penilaian untuk dikaji tingkat kegunaan yang memenuhi standar

RKT adalah Rencana Kerja Tahunan Sekolah/Madrasah yang berdasar pada rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) sebagai istilah lain dari Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPB-SM).

Segmentasi Pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku, yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Segmentasi berkaitan dengan bagaimana pemasar memilih pasar (konsumen).

Sentralisasi adalah kebalikan dari desentralisasi yaitu memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah.

Sistem adalah seperangkat komponen yang terdiri dari dua atau lebih, yang saling berhubungan dan saling ketergantungan satu sama lain, untuk mencapai tujuan bersama

Six Sigma adalah sebuah sistem manajemen yang terstruktur untuk memperbaiki proses yang difokuskan pada usaha mengurangi variasi proses (*process variances)* sekaligus mengurangi cacat (produk/jasa yang diluar spesifikasi) dengan menggunakan statistik dan *problem solving tools* secara intensif. Secara lebih teknis Six Sigma dapat diartikan sebagai cara mengukur proses yang tujuannya mendekati sempurna, disajikan de-

ngan 3,4 DPMO atau sama dengan 6 SIGMA *(Defect per Million Opportunities).*

Solidaritas Mekanik merupakan solidaritas yang didasarkan pada hubungan mekanis antara angota organisasi, tidak adanya pembagian tugas, dan pekerjaan dilakukan secara bersama-sama. Seperti gotong royong.

Solidaritas Organik merupakan solidaritas yang didasarkan pada pembagian kerja dan tanggungjawab yang jelas antar anggota organisasi. Seperti perusahaan, dan organisasi pemerintah

Stakeholders adalah pihak-pihak (perorangan atau lembaga) yang mempunyai ikatan kepentingan dengan satuan pendidikan seperti orang tua siswa/mahasiswa, pemerintah, perusahaan, masyarakat dan lainnya.

Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan h Menteri Pendidikan Nasional.

Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didukung oleh standar-standar: pengelolaan, kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan penilaian.

Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

Standar Pengelolaan Pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah adalah standar pengelolaan pendidikan untuk sekolah/madrasah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Standar Penilaian Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP.

Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP.

Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Supervisi Pendidikan adalah usaha meningkatkan kompetensi dan kemampuan profesional guru dalam upaya mewujudkan proses pembelajaran yang lebih baik melalui cara-cara mengajar yang lebih baik yang akhirnya berdampak kepada peningkatan hasil belajar peserta didik.

Teaching Performance adalah kinerja pendidik dalam pembelajaran yang diperlihatkan dalam bentuk efektivitas, efisiensi dan produktivitas pembelajaran.

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

INDEKS

A

Aan Hasanah, iv; v; vi; 21; 25
Abad pertengahan, 2
Abu Bakar Ash-Shiddiq, 56
Acep Arifuddin, v
Agus Salim Mansyur, xii
akademik, ix, x; 8; 32; 35; 40; 145-147; 149-155; 157-163
Akhlak, vii; 1; 47; 50; 55;
Amerika Serikat, iv; ix; 145; 255
anggaran, 11; 12
Ara Hidayat, viii
Asep Saeful Muhtadi, iv
Asti Meiza, x

B

Balitbang, 39
Bandung, xi; 22; 211-213; 220
Barat, 3; 4
Belgia, iv
Binghamton, x
Binus University, x; 165; 168-170; 176; 179-185; 188-191; 193-197; 199-204
Budaya, kebudayaan, iii; 2; 3; 4; 5; 16; 17; 26; 255; 301
bushido, 4

C

Cik Hasan Bisri, v; vi, 21, 44
Cina, 3
Clifford Geertz, 7

D

Darul Arqam, vii
das sein, 33
das söllen, 33
Dawam Rahardjo, 4
Dede Suhendar, xiii
dekonsentrasi, v; 31
demokratis, 3; 7; 15
desentralisasi, v; 31
Dewi Sadiah, vii; 47
Dirjen Binbaga Islam, xii
diskusi, iv
Ditjenpendis, 39; 40
dosen, x; 145; 149-156; 159-162
DPR-RI, 26

E

eksklusif, 5
Eropa, iv; 5; 9
etnik, iii
evaluasi, 205-207; 220

F

Fajriuddin,
fakultas, xiii; 8; 22
fikih, xiii
fokus penelitian,
formal, xiii
fundamentalisme, 18

G

Garut, vii; 47; 51-55; 57; 60-66
GBHN, 29
guru, 11; 22; 50; 53; 56-57; 59-61
— agama, vii; viii; 50; 52-58; 61-63
— pembina, 53; 55; 60; 62-64
— umum, vii; 56; 59; 61; 63

H

hak asasi manusia, iv
hakim,
halal, xiii
Hindu, 3
humanisme, 2; 3; 4; 17

I

IAIN, xii; 8; 22; 36; 40; 205
Ibadah, vii; 2
ideologis, v
ijtihad,
ilmu pengetahuan dan teknologi, 3; 4; 31
Ilmu Kimia, 301-303; 305; 307; 309; 311-312
India, 3; 4; 6
Indonesia, 5; 6; 7; 11; 13; 15; 16; 24; 255; 301
Inklusif, 5; 17
Inggris, 255
interdisipliner, x; 34; 35; 301; 306; 311-312
internasional, xii; 17; 25
Islam, viii

J

jabatan fungsional,
jabatan struktural,
Jakarta, 21
jasa, viii; 69-74; 76-84; 87; 89-104
Jawa Barat, 51
Jepang, 3; 4; 7; 255
Jerman, 255

K

kaidah, 26
Kanwil Kementerian, 41
karakter, ix
kebijakan, v; vi; x; 13; 14; 23; 29; 31; 35
kekerasan, iv
keluarga, iii; 2; 25; 26; 43
Kemendikbud, 8; 9; 11; 16; 33
Kementerian Agama, xii; 8; 9; 10; 12; 21; 22; 33; 39; 40
kemiskinan, iii
kependudukan, iv
kepribadian, vii; 1; 47; 55; 58
Kepres, 9
kerangka berpikir,
kesehatan, iii
keteladanan, vii
kimia, xiii
koherensi, vi
kokurikulum, ix
kompetensi, xiii; 43
konflik internasional, iv
konsumen, 69-74; 79-81; 83-84; 89; 91-95; 97; 99-101; 103
Korea, 3; 7
kriminalitas, iv
KTSP, vii
kurikulum, vii; ix; x; xii; xiii; 2; 8; 10; 30; 52; 257; 259
— Berbasis Ilmu (KBI), xii

— Berbasis Kompetensi (KBK), xii
— Program Studi, 255; 260; 262; 271; 280; 287
— Subyek Akademis (KSA), xii
— Tingkat Satuan Pendidikan, 60

L

legitimasi,
lembaga, 69; 73; 82-85
— pendidikan, 69; 83; 86; 87; 89; 91; 93-97; 103-104
LGBT, iv
Liberalisme, 4
Lilis Sulastri, x
lingkungan hidup, iv
lokal, xii; 5; 30; 33

M

madrasah, viii; 26; 43
— aliyah, vii; 8; 9;
— Aliyah Darul Arqam, 47; 52; 54; 57; 60-66
— diniyah,
— ibtidaiyah, 12
— Malem Reboan (MMR), iv; ix
— negeri,
— tsanawiyah, 8; 9; 12; 22
— swasta,
mahasiswa, x; xi; xii; 205-206; 220
majelis ta'lim, 2
majemuk, kemajemukan, 5; 6; 14; 15; 28
Malaysia, 7
manajemen, x; xi; 14; 23; 37; 165; 167-204
manajerial, viii
MD, 8
mediasi,
media sosial, iv
Menteri Agama,
metode, vii; 52; 56; 57;
MI, 8
minoritas, iii
model, 47; 49; 50; 52; 55; 61; 63; 65; 66
modern, modernisasi, 2; 3; 4; 13; 16; 28; 109-113; 117-120; 130; 135; 138-139
MPR-RI, 29
Muhammadiyah, 51; 60; 62; 64; 65
Multikultural, 15

N

najis, xiii
nasional, xii
negara, 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 36; 47; 48; 301
nilai, vii; xiii; 3; 5; 24; 26; 28; 30; 165-201
— agama, 1; 3; 49
— filosofis, x
— Islam, 17
— masyarakat, 2
— pencapaian, x
— penciptaan, x
— pengelolaan, x
non-formal, xiii; 2
norma, 24; 25

O

obat terlarang, iv
Orde Baru, 9; 110-111; 120
Orde Lama, 9
otonomi daerah, v; 31

P

Pancasila, 1; 29
participation action research (PAR), 34
participatory research approach (PRA), 34
pasar, viii; xiii; 69; 71; 73; 76; 84; 90-92; 95-99; 102
pelajaran, vii
pelanggan, viii
pemasaran, viii; 69-72; 78; 84; 87; 89; 90; 94; 95; 97-100; 102
pembeli, viii
pemerintah, --an, iii; 26; 28; 30; 31; 34; 41;
Pemerintah Daerah, 41
penawaran, viii
pendidikan, iii; v; viii; xii; 1; 4; 6-14; 17; 21; 22; 24-28; 30; 31; 33; 36; 39; 47; 51; 52; 54; 55; 60; 61; 69-70; 76-78; 82-104; 145-146; 151; 156-160; 163; 255-260; 267-295
— agama dan keagamaan (PAK), v; vi; 21-44
— agama, v; 1; 8; 9; 15; 21; 22; 2; 27; 30; 40; 42; 43; 48; 51
— agama Islam (PAI), 8
— dasar, v; 13
— demokrasi, 16
— Guru Agama (PGA), 8
— Islam, iv; v; 1; 2; 8-17; 21; 49; 69
— karakter, viii; 109; 129; 139
— keagamaan, v
— keberagamaan, vii
— kelas dua, 10
— madrasah, viii; 69; 84; 87; 89; 90-97; 103;
— masalah, iii
— menengah, 13
— model, vii; 14
— modern, 3; 6; 13
— multikultural, 15
— nasional, 1; 2; 10; 11; 14; 21; 25; 26; 27; 30; 43; 47; 48; 49; 61; 62; 258-259; 271; 292; 296
— nilai, 49; 50-52; 55; 56; 62; 63; 65; 66
— plural, 15
— prasekolah, 25
— Rasulullah, 49
— Satu Atap, 10
— satuan, v; 26; 27
— tinggi, v, ix; xii; 4; 25
— umum, 1; 16; 48; 51
penelitian, iv; v; vi; 21; 22; 23; 28; 32-42
— kebijakan, 21; 23; 28; 32; 33; 34; 36-39; 41; 42; 44
pengetahuan,
— agama, xi; 206; 239;
— bahasa, xi; 206;
— umum, xi; 9; 50; 206
peradaban, 2; 3; 15; 17; 21; 48
— Islam, 2; 4
— modern, iv; v; 1; 3; 4; 5
Perancis, iv; 255
Perdesaan, 13
perguruan tinggi, x; 8; 33; 36; 41; 145-146; 148; 150-153; 155-157; 165-167; 184-185; 188-190; 192; 199-201;
pertukaran, viii
pesantren, vii; viii; ix; 2; 27

peserta didik, 1; 47
pluralisme, 4; 15; 16; 26; 27
politik, v
polutan, xiii
produk, viii
program studi, prodi, xii; xiii
promosi, viii
psikologi, xi, 207, 210, 221
psikometrik, xi; 207-210; 221
PTKI, xii; 255; 262; 266-267; 272-273
publik, vi
Puslitang PAK, 22; 34; 39

Q

Q.S., 48

R

RA, 8
Radikalisme, 18
Rasulullah, 56
regional, xii
rihlah ilmiah, iv

S

sains dan teknologi, xiii; 307-308
santri, ix; 110;115-116; 129-135; 138
SD, 8
sekolah, vii; viii; ix; 3; 8; 11; 14; 25; 26; 27; 43; 53; 109; 113; 115; 119; 130-131; 134-139
seks, iv
sekularisme, 4
Shalahuddin Kafrawi, ix; 145
silabus, xi
Sistem Kredit Semester, ix
Sistem Pendidikan Nasional, 1; 14; 24; 26; 43; 47
siswa, vii; viii; 50; 51; 53
SKB, 9; 10
SLTP, SMP, 8; 22
SMU, 8
SNMPTN, 206
Soekarno,
Sosial, iii
STAIN, xii; 8
State University of New York, x
sumber daya manusia, viii; ix; 10; 255;
swasta, 11; 12; 27

T

teologis, v
teori, 207; 209-210; 212; 214; 219
terorisme, iv
thaharah, xiii
Timur, 3; 13
TK, 8
transaksi, viii
tri dharma, x; 146; 150-151
Tuhan Yang Maha Esa, 1; 48;

U

UAS, xii
UIN, xii; 8; 22; 36; 40; 205-207; 209; 211-216; 220-221
— Sunan Gunung Djati, xi; 22
Ujian tulis (UTL), xi; 205-206; 209; 211-212; 220
ulama, ix
urbanisasi, iv
UU,

— Nomor 20/2003, 1; 14; 24; 47; 48; 258
— Nomor 12/2012,
— Dasar 1945, 1; 29; 205; 258
— Pendidikan Nasional, 205
— SPN, 10
UTS, xii

W

wahyu, 301, 304, 305, 310
— Memandu Ilmu (WMI), xiii, 304; 306; 309-313
warga negara, 2
Webometrics, xi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Apabila masalah dijadikan sasaran pengkajian, maka kehidupan manusia dapat dipandang sebagai rentetan masalah yang berkesinambungan sehingga dapat dikaji sepanjang masa. Hasil kajian itu, secara praktis, diarahkan untuk memecahkan masalah tersebut. Upaya untuk memecahkan, atau, menyelesaikan masalah menjadi ciri abadi yang melekat dalam kehidupan umat manusia. Hal itu terjadi karena suatu masalah kehidupan berhubungan dengan masalah-masalah lain, sehingga penyelesaian suatu masalah berakibat pada kemunculan masalah baru. Terjadi serangkaian masalah yang selalu tidak terselesaikan. Semakin rumit kehidupan manusia, maka masalah pun semakin menumpuk dan menggurita.

Dewasa ini masalah-masalah sosial itu mencakup masalah keluarga, pendidikan, kemiskinan, minoritas, masalah etnik, pemerintahan, kesehatan, dan masalah-masalah lainnya. Dewasa ini muncul masalah baru yang telah menjadi keprihatinan masyarakat dunia ialah masalah hak asasi manusia, masalah penyalahgunaan obat terlarang, masalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), dan masalah terorisme internasional.

Tulisan yang disajikan dalam buku ini membahas berbagai hal tentang masalah pendidikan Islam, khususnya di Indonesia. Ia mencerminkan tentang "apa yang semestinya diraih menurut ukuran ideal dengan apa yang senyatanya dapat diraih". Intinya, tentang harapan dan kenyataan pendidikan Islam di Indonesia. Hampir seluruh tulisan tersebut pernah dipresentasikan dalam diskusi Madrasah Malem Reboan (MMR). Ada yang berupa makalah yang sengaja disiapkan untuk diskusi. Ada pula yang berasal dari hasil penelitian di antaranya ditulis dalam disertasi. Pemaparanya dalam buku ini dimulai tentang pendidikan menengah dan diakhiri tentang pendidikan tinggi.

MMR
Madrasah Malem Reboan

PUSLITPEN
UIN "SGD" BANDUNG

ISBN 978-602-51281-9-4